RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2025

Pemerintah Daerah
Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVUNSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalusi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 165);
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

:

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evalusi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6.A Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Halmahera Barat Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
b. Pemerintahan Daerah adalah Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
d. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat;
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Halmahera Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
f. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat selaku pengguna anggaran/barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
g. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BP3D adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Halmahera Barat;
h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 - 2026 yang memuat Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah;
i. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 2021 - 2026 yang memuat Visi, Misi, dan Program Kerja SKPD;
j. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yakni tahun 2022 atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
k. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yakni tahun 2023;
l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
m. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
n. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
o. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
p. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
q. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yakni tahun 2025 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD LALU
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2025
BAB VI : PENUTUP

Pasal 3

(1) RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 yang berisi kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
(2) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
(3) Uraian lengkap RKPD tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 digunakan sebagai pedoman untuk menyusun dokumen kebijakan umum APBD, penetapan plafon anggaran sementara APBD dan rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.
(2) Seluruh pemangku kepentingan/stakeholder, terutama unsur penyelenggara pemerintahan daerah berkewajiban melaksanakan RKPD.
(3) Seluruh Kepala SKPD berkewajiban melaksanakan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD.
(2) Pengendalian dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk keseluruhan RKPD, sedangkan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3) Pengendalian oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi pemantauan/monitoring, supervisi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
(4) Pemantauan/monitoring pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
(5) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

(6) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan setiap triwulan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 6

(1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan evaluasi terhadap RKPD.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dala ayat (1) meliputi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan RKPD.
(3) Evaluasi oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk keseluruhan pelaksanaan RKPD dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD.
(4) Evaluasi oleh Evaluasi oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi penilaian terhadap seluruh proses perumusan prioritas dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan; dan menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang teknis pelaksanaanya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratuan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 27 Juni 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 27 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

MUHAMMAD SYAHRIL ABDUL RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR : 11

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat

Jason Kalopas Lalomo, SH. LLM
Pembina IV/a
Nip. 19730128 200604 1 009

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencanan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022 dapat tersusun.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Halmahera Barat 2021 -2026 dengan melihat pada Visi dan Misi, Adapun Visinya yaitu : “Mewujudkan Halmahera Barat Yang Aman, Adil dan Sejahtera”. Semoga dengan tersusunnya Dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan akuntantabilitas pemerintah daerah yang pada akhirya akan tercapai visi dan misii pemerintah daerah demi terwujudnya “DIAHI” Halmahera Barat.

Jailolo, Juni 2025

Bupati Halmahera Barat

James Uang, S.Pd., MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 4
1.3 Hubungan Antar Dokumen 7
1.4 Maksud dan Tujuan 10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Kondisi Umum Daerah 1
2.1.1 Sejarah Kabupaten Halmahera Barat 1
2.1.2 Aspek Geografi dan Demografi 1
2.2.2.1 Luas dan Batas Wilayah 2
2.1.2.2 Topografi 5
2.1.2.3 Geologi 9
2.1.2.4 Hidrologi 12
2.1.2.5 Klimatologi 15
2.1.2.6 Penggunaan Lahan 18
2.1.2.7 Potensi Pengembangan Wilayah 19
2.1.2.8 Wilayah Rawan Bencana 26
2.1.2.9 Demografi 28
2.1.3 Aspek kesejahteraan Masyarakat 31
2.1.3.1 Pertumbuhan PDRB 31
2.1.3.2 Laju Inflasi 41
2.1.3.3 Indeks Gini 41
2.1.3.4 Tingkat Kemiskinan 42
2.1.3.5 Indeks Pembangunan Manusia 48
2.1.3.6 Angka Melek Huruf 50
2.1.3.7 Usia Harapan Hidup 51
2.1.3.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 54
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum 56
2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah 121
2.1.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 121
2.1.5.2 Fokus Wilayah/Infrastruktur 124
2.1.5.3 Fokus Sumber Daya Manusia 132
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 135
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 558

2.3.1 Permasalahan Pembangunan yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah…….558

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 1
3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional 1
3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Provinsi Maluku Utara..... 4
3.1.3 Kondisi dan proyeksi Perekonomian Kabupaten Halmahera Barat 7
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 20
3.2.1 Kondisi Serta Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 21
3.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah 22
3.2.3 Kebijakan Belanja Daerah 28
3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah 39

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... 1
4.2 Prioritas dan Sasaran Program Kerja Pembangunan Daerah .. 8
4.2.1 Priosritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 8
4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 9
4.2.3 Priortitas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 19

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Kab. Halmahera Barat 1
5.2 Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 413

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 2
6.2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 4
6.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing 4

BAB VII PENUTUP

DAFTAR TABEL

Bab II

Tabel 2.1.	Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat	3 – II
Tabel 2.2	Nama-nama Gunung Berapi yang masih Aktif di Kabupaten Halmahera Barat	5 – II
Tabel 2.3	Luas Wilayah (Ha) Menurut Ketinggian di Kabupaten Halmahera Barat	6 – II
Tabel 2.4	Kemiringan Lereng dan Luasnya di Kabupaten Halmahera Barat	8 – II
Tabel 2.5	Nama-nama Sungai yang Melalui Beberapa Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat	12 – II
Tabel 2.6	Nama-nama Danau di Halmahera Barat	13 – II
Tabel 2.7	Nama Mata Air, Lokasi dan Debitnya di Kabupaten Halmahera Barat	14 – II
Tabel 2.8	Potensi Cekungan Air Tanah di Kabupaten Halmahera Barat	14 – II
Tabel 2.9	Kondisi Klimatologi Kabupaten Halmahera Barat	16 – II
Tabel 2.10	Kondisi Cuaca di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	16 – II
Tabel 2.11	Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Halmahera barat	26 – II
Tabel 2.12	Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	29 – II
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Halmahera Barat Tahun 2023	30 – II
Tabel 2.14	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	32 – II
Tabel 2.15	Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	34 – II

Tabel 2.16	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	35 – II
Tabel 2.17	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	36 – II
Tabel 2.18	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	36 – II
Tabel 2.19	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	37 – II
Tabel 2.20	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	39 – II
Tabel 2.21	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	39 – II
Tabel 2.22	Garis Kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2023	44 – II
Tabel 2.23	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2023	49 – II
Tabel 2.24	Angka Melek Huruf Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	50 – II
Tabel 2.25	Usia Harapan Hidup (Tahun) 10 Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	51 – II
Tabel 2.26	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 10 Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2023	53 – II
Tabel 2.27	Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	55 – II
Tabel 2.28	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	60 – II
Tabel 2.29	Rasio Jumlah Guru/Jumlah Sekolah dan Siswa Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	60 – II

Tabel 2.30	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	62 – II
Tabel 2.31	Jumlah PAUD dan RA Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	62 – II
Tabel 2.32	Sebaran PKBM Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	64 – II
Tabel 2.33	Angka Kematian Ibu Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020-2022	65 – II
Tabel 2.34	Angka Kematian Neonatal Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 - 2023	66 – II
Tabel 2.35	Angka Kematian Bayil Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	67 – II
Tabel 2.36	Prevalensi Balita Underweight, Wasting dan Stunting Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	68 – II
Tabel 2.37	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	70 – II
Tabel 2.38	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	70 – II
Tabel 2.39	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	71 – II
Tabel 2.40	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	72 – II
Tabel 2.41	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	72 – II
Tabel 2.42	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai StandarMenurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	73 – II

Tabel 2.43	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	73 – II
Tabel 2.44	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	74 – II
Tabel 2.45	Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	74 – II
Tabel 2.46	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberclosis Sesuai Standar Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	75 – II
Tabel 2.47	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	76 – II
Tabel 2.48	Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	77 – II
Tabel 2.49	Sebaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	77 – II
Tabel 2.50	Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	79 – II
Tabel 2.51	Sebaran Tenaga Kesehatan Dokter Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	80 – II
Tabel 2.52	Sebaran Tenaga Kesehatan Bukan Dokter Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	80 – II
Tabel 2.53	Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	81 – II
Tabel 2.54	Persentase Desa Menerapkan STBM Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	82 – II
Tabel 2.55	Persentase Posyandu Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	84 – II
Tabel 2.56	Kinerja Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	85 – II

Tabel 2.57	Persentase Rumah Tangga Mengakses Sumber Air Minum Bersih Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	86 – II
Tabel 2.58	Persentase Rumah Tangga Mengakses Sanitasi Layak Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020	86 – II
Tabel 2.59	Kinerja Pengembangan Sumber Daya Air di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	87 – II
Tabel 2.60	Kondisi Perumahan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	88 – II
Tabel 2.61	Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 - 2023	89 – II
Tabel 2.62	Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021- 2023	90 – II
Tabel 2.63	Pertumbuhan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah Kabupaten Halmahera Barat	91 – II
Tabel 2.64	Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	92 – II
Tabel 2.65	Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2023	93 – II
Tabel 2.66	Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	94 – II
Tabel 2.67	Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	94 – II
Tabel 2.68	Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	96 – II
Tabel 2.69	Lokasi Tempat Pembunagan Sampah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	97 – II
Tabel 2.70	Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 - 2023	98 – II
Tabel 2.71	Kinerja Urusan Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Halbar 2021-2023	99 – II
Tabel 2.72	Status Indeks Desa Membangun menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	100 – II
Tabel 2.73	Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	101 – II
Tabel 2.74	Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	103 – II

Tabel 2.75	Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	106 – II
Tabel 2.76	Kinerja Urusan Kominfo, Statistik dan Persandian Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	108 – II
Tabel 2.77	Perkembangan Koperasi dan UKM Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	109 – II
Tabel 2.78	Perkembangan Realisasi Investasi di Kabupaten Halmahera Tahun 2021-2023	110 – II
Tabel 2.79	Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	111 – II
Tabel 2.80	Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	112 – II
Tabel 2.81	Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	113 – II
Tabel 2.82	Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	114 – II
Tabel 2.83	Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	115 – II
Tabel 2.84	Perkembangan Sarana Perdagangan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	116 – II
Tabel 2.85	Perkembangan Perusahaan Industri Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	117 – II
Tabel 2.86	Kinerja Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	118 – II
Tabel 2.87	Kinerja Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	118 – II
Tabel 2.88	Kinerja Layanan Unsur Pengawasan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	120 – II
Tabel 2.89	Kinerja Layanan Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	121 – II
Tabel 2.90	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	122 – II
Tabel 2.91	Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 – 2023	124 – II

Tabel 2.92	Jumlah Wisatawan, Kunjungan dan Fasilitas Akomodasi di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 – 2023	126 – II
Tabel 2.93	Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020-2022	129 – II
Tabel 2.94	Unit Pembangkit Listrik, Daya Terpasang, dan Daya Mampu Menurut Unit Ranting PLN di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023	130 – II
Tabel 2.95	Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019 - 2022	131 – II
Tabel 2.96	Kinerja Urusan Kominfo, Statistik dan Persandian di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	132 – II
Tabel 2.97	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018-2020	133 – II
Tabel 2.98	Rasio Ketergantungan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020-2022	134 – II
Tabel 2.99	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Tahun Berjalan	136 – II
Bab III		
Tabel 3.1	Capaian dan sasaran pembangunan Nasional tahun 2023, Target 2024 dan 2025	4 – III
Tabel 3.2	Proyeksi Asumsi Makro Ekonomi Maluku Utara Tahun 2023 – 2024	7 – III
Tabel 3.3	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	8 –III
Tabel 3.4	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019-2023	10 - III
Tabel 3.5	Realisasi Pendapatan Tahun 2021-2023, Target Pendapatan Tahun 2024 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025 Kabupaten Halmahera Barat	26 - III
Tabel 3.6	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2023, Target Belanja Tahun 2024, dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025 Kabupaten Halmahera Barat	37 - III
Tabel 3.7	Pembiayaan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025	40 - III

Bab IV

Tabel 4.1	Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja pada RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025	3 - IV
Tabel 4.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah. Provinsi dan Nasional tahun 2025	7 - IV

Bab V

Tabel 5.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kab. Halmahera Barat Tahun 2025	1 - V
Tabel 5.2	Usulan Pokir di Tahapan Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten Halmahera Barat Ke Dalam SIPD Tahun 2025	414 - V

Bab VI

Tabel 6.1	Indikator Kinerja Makro Kabupaten Halmahera Barat	2 - VI
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Halmahera Barat	2 - VI
Tabel 6.3	Indikator Kinerja Daerah Utama Kabupaten Halmahera Barat, Aspek kesejahteraan Masyarakat	4 - VI

Bab VII

DAFTAR GAMBAR

Bab I

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah	8 – I
Gambar 1.2	Hubungan antar dokumen perencanaan a-Spasial dan Spasial	9 – I
Gambar 1.3	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten	9 – I

Bab II

Gambar 2.1	Peta Kabupaten Halmahera Barat	4 – II
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Halmahera Barat	7 – II
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Halmahera Barat	8 – II
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Halmahera Barat	11– II
Gambar 2.5	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Halmahera Barat	18– II
Gambar 2.6	Peta Kawasan Strategis dalam RTRW Kabupaten Halmahera Barat.	25– II
Gambar 2.7	Peta Resiko Multi Bahaya Bencana Kabupaten Halmahera Barat	27– II
Gambar 2.8	Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	38– II
Gambar 2.9	Perkembangan Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah) Kab. Halmahera Barat 2020-2022	40– II
Gambar 2.10	Indeks Gini Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2023	42– II
Gambar 2.11	Tren Garis Kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 – 2023	44– II
Gambar 2.12	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 - 2023	45– II

Gambar 2.13	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 - 2023	47– II
Gambar 2.14	Indeks Keparahan Kemiskinan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 - 2023	48– II
Gambar 2.15	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 - 2023	49– II
Gambar 2.16	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 - 2023	51– II
Gambar 2.17	Perkembangan Rata-Rata Lama sekolah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 - 2023	53– II
Gambar 2. 18	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara 2021-2023	55- II

Bab III

Gambar 3.1	Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (Persen)	2– III
Gambar 3.2	Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau Tahun 2023 (persen)	3– III
Gambar 3.3	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (Persen) dan Provinsi Maluku Utara 2021-2023	5– III
Gambar 3.4	Pertumbuhan Ekspor dan Impor Maluku Utara sepanjang Triwulan IV Tahun 2023	6– III
Gambar 3.5	Pertumbuhan Ekonomi	8– III
Gambar 3.6	PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Halmahera Barat dan, (2021-2023) (Triliun Rupiah)	11– III
Gambar 3.7	Distribusi Presentase PDRB menurut Lapangan Usaha (Persen)	12– III
Gambar 3.8	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019-2023	13– III
Gambar 3.9	Perkembangan Inflasi Kota Ternate Menurut Bulan, 2023	15– III
Gambar 3.10	Jumlah Penduduk Miskin Kab. Halmahera Barat 2021-2023	17– III

Gambar 3.11	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023	18– III
Gambar 3.12	Indeks Pembangunan Manusia Kab. Halmahera Barat Tahun 2020-2023	19– III
Gambar 3.13	Indeks Gini Kab. Halmahera Barat Tahun 2020-2023	20– III
Bab IV		
Gambar 4.1	Sinergi Prioritas Pembangunan Antara Nasional, Provinsi Maluku Utara	8– IV

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 secara sistemasi mengikuti tahapan pembangunan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026. Arahan pembangunan ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan program pembangunan sehingga terarah dapat mewujudkan Visi **Halmahera Barat Yang Aman, Adil dan Sejahtera".**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Amanat Undang-Undang tersebut dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksaan rencana pembangunan daerah, dan selanjutnya pemerintah telah menetapkan peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan arahan substansi dalam pengarahan rencana kerja pemerintah daerah. RKPD adalah dokumen rancangan dalam perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif sementara, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 disusun dengan menggunakan pendekatan pengganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja sebagai gambaran dalam sebuah perencanaan.

Keberadaan RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, di mana RKPD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun berdasarkan/ berpedoman pada RPJMD 2021-2026, sehingga mengacu

pada Peraturan Menteri dalam Negeri No 86 Tahun 2017 untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini menyebabkan Dokumen RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah mengingat :

1. Secara subtansi memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju dan Perangkat daerah penanggungjawab yang dilaksanakan pemerintahan daerah dalam satu tahun.
2. Secara normatif menjadi dasar pertimbangan dalam pelaksanaan Musrenbang dengan menyaring aspirasi masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama DPRD sebagai landasan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional memuat arahan untuk meningkatkan kinerja pemerintahdibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat menjadi tanggungjawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat daerah dan;
4. Secara faktual menjadi tolak ukur menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merealisasikan program dan kegiatan dalammewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Dokumen RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 disusun dengan

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Halmahera Barat 2021-2026 dengan melihat pada Visi dan Misi, adapun Visinya yaitu : "***Mewujudkan Halmahera Barat Yang Aman, Adil dan Sejahtera".*** Dari visi tersebut dijabarkan empat misi sebagai berikut : (1) Membangun Masyarakat Yang Unggul dan Berakhlak Mulia Berlandaskan Kesetaraan Serta Nilai-nilai Luhur Agama, Pancasila dan Kearifan Lokal; (2)Membangun Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan Untuk Mengakselerasi Keterbukaan dan daya Saing Wilayah; (3) Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Dengan Mensinergikan Sektor-sektor Unggul Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata serta Sumber Daya Alam Strategis Lainnya; (4) Membangun Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Demokratis dan Melayani yang Memberikan Rasa Aman dan Adil Bagi Masyarakat.

Dari Visi dan Misi RPJMD tersebut diatas maka pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 mengusung Tema : "***Menciptakan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan"*** . Hal ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dan keselarasan antara perencanaan pusat dan daerah sehingga dapat mencapai sasaran dalam upaya peningkatan taraf hidup sosial masyarakat

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Tidore Kepulauan di Provinsi Malukuutara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan KeuanganPemerintah Pusat dan daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengengolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara 4578)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengengolaan Keuangan Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita NegaraTahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem

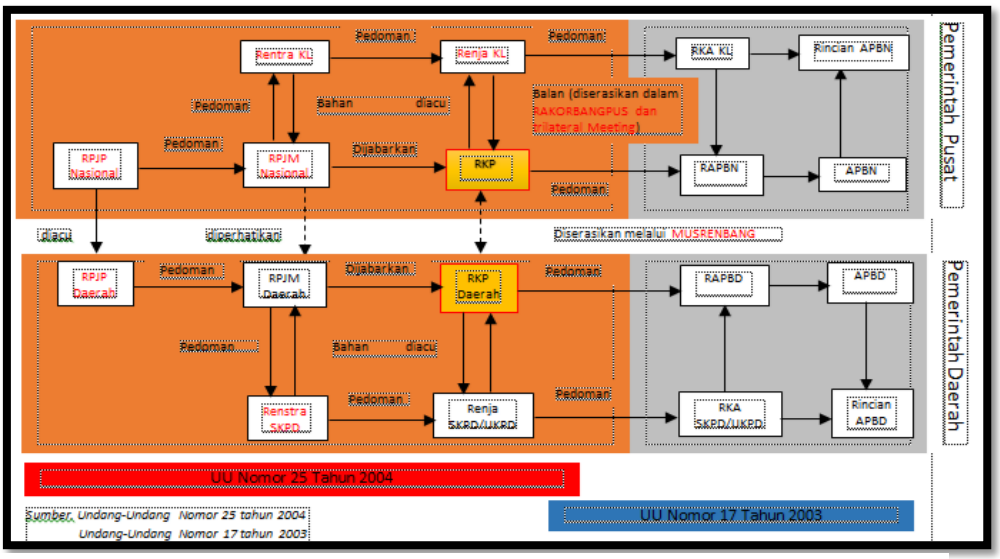
    Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggarn 2021;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang PenerapanStandar Pelayanan Minimal Tahun 2021;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025.
27. Peraturan Daerah Nomor 6. Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026.

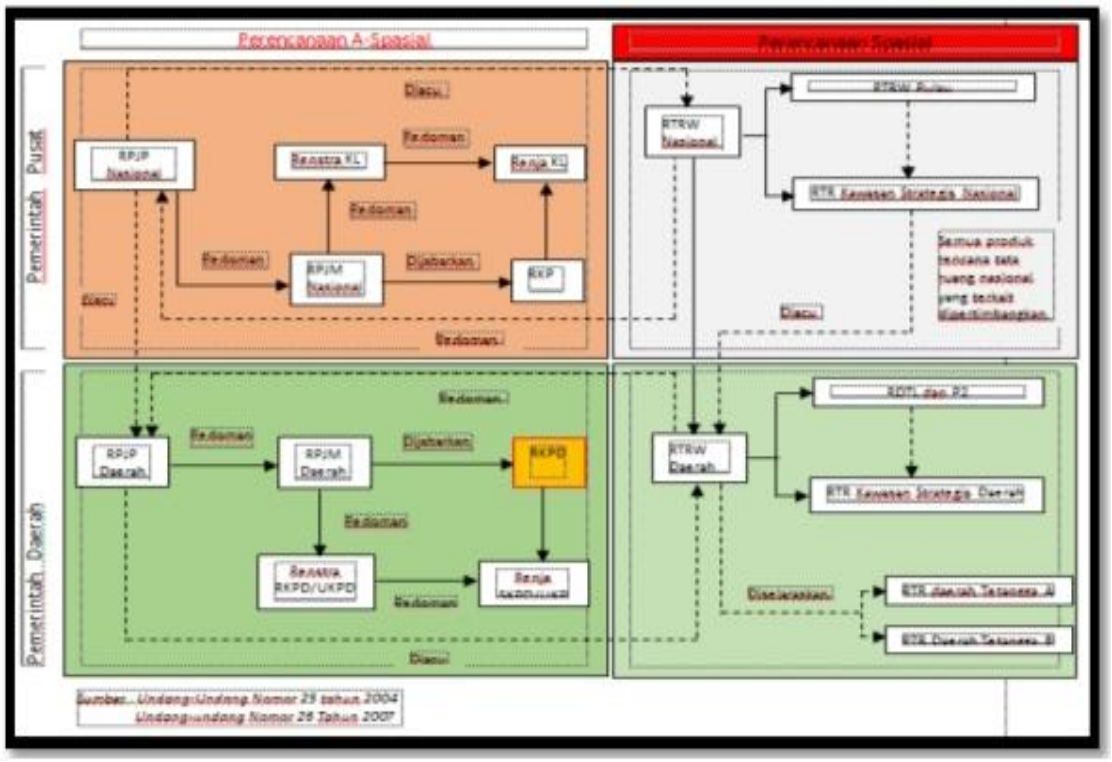
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan Negara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangkeuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dari RPJMD yang berpedoman pada RPJP Daerah. Dokumen RKPD tersebut menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun renja OPD, di mana Renja OPD akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungan dengan RKP, RKPD diselaraskan dengan RKP melalui Forum Musrenbang Nasional.

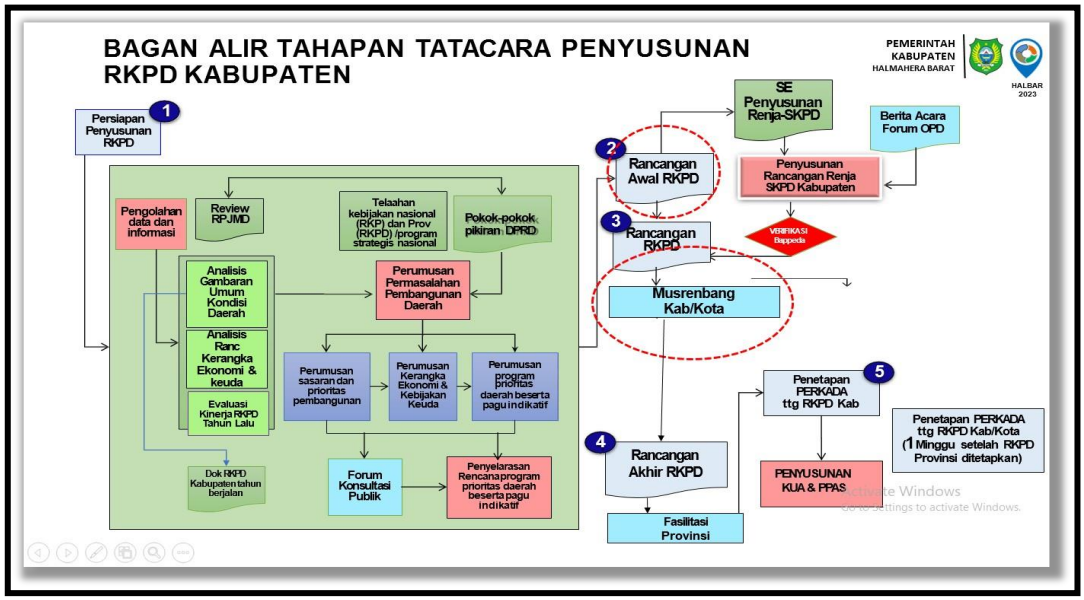


Gambar 1.1 Hubungan antar dokumen perencanaan Pusat dan Daerah

Dokumen –dokumen perencanaan sebagaimana yang terdapat pada gambar 1.1 tersebut diatas yang bersifat a-spasial perlu disinkronisasi dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, yaitu dokumen RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTR Pulau dan RTR kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintahan Pusat dan Dokumen RTRW Daerah, RDTR dan PZ serta RDTR dari daerah tetangga. Dalam hal ini posisi penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan berpedoman pada RPJPD. Disamping itu, dokumen RTRW daerah menjadi pedoman dalam menyusun RPJPD dan RPJMD. Dengan demikian korelasi antara RKPD denengan perencanaan spasial (RTRW daerah), terletak pada hubungannya dengan dokumen RPJPD dan RPJMD yang sama- sama diacu RKPD. Hubungan antara perencanaan a-spasial dan spasial, sebagaimana dijabarkan diatas dapat dilihat pada gambar 1.2



Gambar 1.2 Hubungan antar dokumen perencanaan a-spasial dan spasial



Gambar 1.3 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025 dimaksudkan menjamin sinkronisasi dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengawasan rencana pembangunan daerah, sekaligus sebagai bentuk konsistensi pemerintah daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan partisipatif untuk menjadi acuan dalam mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat di KabupatenHalmahera Barat.

Tujuan dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 yaitu :

1. Sebagai acuan Pemerintah daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten serta memuat gambaran Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025.
2. Sebagai pedoman untuk Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RENJA-PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman dan gambaran awal tentang apa, bagaimana dan sejauhmana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan. Gambaran umum kondisi daerah juga menjelaskan tentang kondisi daerah mencakup aspek geografi, iklim dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, pengambilan kebijakan baik dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

2.1.1 Sejarah Kabupaten Halmahera Barat

Kabupaten Halmahera Barat merupakan salah satu kabupaten diantara sepuluh kabupaten yang ada di Maluku Utara, yang dalam sejarahnya kabupaten ini pernah menjadi Kabupaten Induk di Maluku Utara pada Tahun 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 25 Februari 2003.

2.1.2 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi kabupaten/kota memberikan gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, dan potensi pengembangan wilayah. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada kabupaten/kota. Berdasarkan posisi geografis Kabupaten Halmahera Barat memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Kabupaten Halmahera Utara
- Sebelah Timur Kabupaten Halmahera Utara

- Sebelah Selatan — Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Timur
- Sebelah Barat — Laut Maluku dan Kota Tidore

Untuk gambaran kondisi demografi, antara lain meliputi perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada Kabupaten/Kota.

2.1.2.1 Luas dan Batas Wilayah

Secara Astronomis Kabupaten Halmahera Barat berada pada 00 48’ lintang utara sampai 10 48’ lintang utara, serta 1270 16’ 00” bujur timur sampai 1270 16’ 01” bujur timur. Luas Kabupaten Halmahera Barat tercatat 2.227,55 km^2. Luas laut 7.124,45 km^2 dan luas daratan 2.238,33 km^2 dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Loloda seluas 300,66 km^2, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan ibu 109,82 km^2. Ibu Kota Kabupaten Halmahera Barat terletak di Jailolo.

Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari 9 Kecamatan ditambah 1 kecamatan dalam proses pengajuan nomor registrasi desa yaitu Kecamatan Loloda Tengah yang sebelumnya wilayah administratif berada di kecamatan loloda. Pada saat pemekaran, Kabupaten Halmahera Barat memiliki 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Jailolo, Kecamatan Jailolo Selatan, Kecamatan Sahu, Kecamatan Ibu dan Kecamatan Loloda. Seiring perjalanan waktu dan pertumbuhan penduduk, aspirasi masyarakat serta rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemekaran Kecamatan Jailolo. Tidak berselang lama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menerbitkan kembali Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan 3 (tiga) kecamatan baru, yaitu Kecamatan Sahu Timur, Kecamatan Ibu Utara dan Kecamatan Ibu Selatan, sehingga sejak saat itu Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan. Berdasarkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017, Kecamatan Jailolo Timur masuk wilayah Pemerintahan Halmahera Utara lalu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 Kecamatan Jailolo Timur kembali masuk ke dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat dan dilakukan pemekaran wilayah Kecamatan Loloda menjadi Kecamatan Loloda dan Kecamatan Loloda Tengah dengan kode wilayah 820110, yang terletak di 122 pulau tanpa penghuni dan 2 (dua) pulau

berpenghuni yaitu Pulau Halmahera dan Pulau Nusa Kahatola. Kecamatan Loloda Tengah dalam hal database wilayah melalui Badan Pusat Statistik masih dilakukan pencatatan bersama dengan Kecamatan Loloda. Luas wilayah kecamatan dan nama jumlah desa di Kabupaten Halmahera Barat, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Per Kecamatan Di Kabupaten HalmaheraBarat.

No	Nama Kecamatan	LuasWilayah (KM^2)	Jumlah Desa
1	Jailolo	226,00	34
2	Jailolo Selatan	324,20	22
3	Sahu	122,86	19
4	Sahu Timur	271,00	18
5	Ibu	109,82	17
6	Ibu Selatan	368,33	16
7	Tabaru	220,64	16
8	Loloda	300,66	17
9	Loloda Tengah	256,55	10
	Jumlah	**2.227,56**	**173**

Sumber data : Kab. Halbar Dalam Angka, Tahun 2024 (diolah)

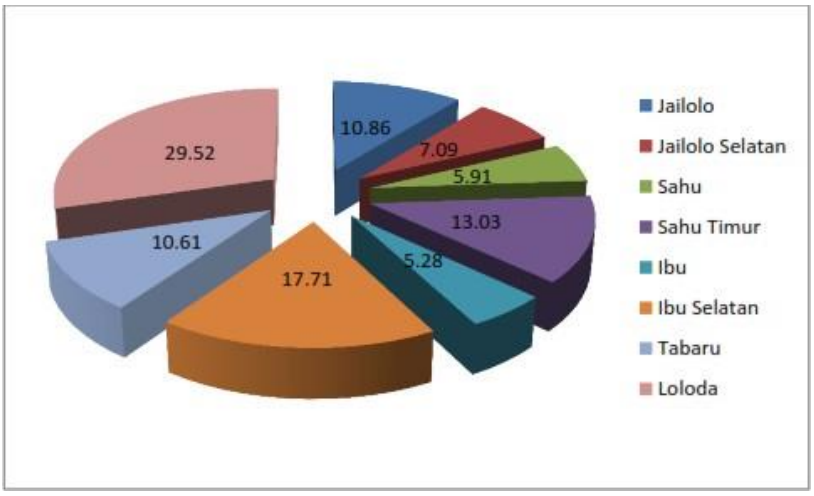
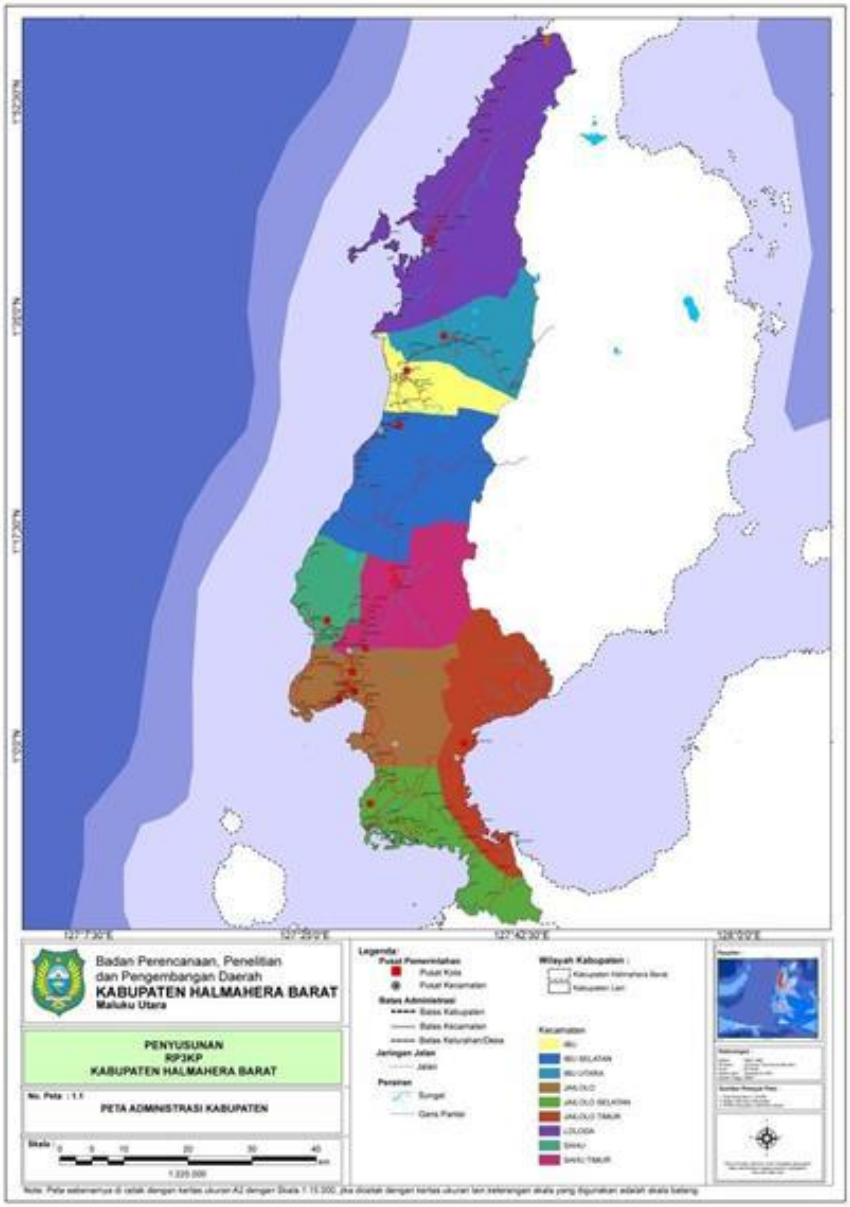


Diagram 2.1. Presentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di KabupatenHalmahera Barat, Km^2.
(Sumber: Kab. Halbar Dalam Angka, Tahun 2024)



Gambar 2.1. Peta Kabupaten Halmahera Barat.
(Sumber: Bappeda Kab. Halbar)

Kabupaten Halmahera Barat mempunyai 4 (empat) gunung berapi yang hingga saat ini masih aktif yang membentang sepanjang daratan Halmahera Barat. Gunung- gunung tersebut adalah Gunung Jailolo, Gunung Onu, Gunung Gamkonora dan Gunung Ibu. Selain itu juga, terdapat sebelas sungai besar yang melewati beberapa kecamatan dan juga empat lokasi danau alam. Salah satu danau alam yang cukup terkenal sebagai daerah wisata adalah Danau Rano atau lebih dikenal dengan sebutan Talaga Rano yang berada di Kecamatan Sahu.

Nama-nama gunung berapi yang masih aktif di Kabupaten Halmahera Barat, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Nama-Nama Gunung Berapi Yang Masih Aktif di Kabupaten Halmahera Barat

No	Nama Gunung	Tinggi Gunung (m)	Lokasi
1	Gunung Jailolo	975	Jailolo
2	Gunung Onu	1.075	Sahu
3	Gunung Gamkonora	1.525	Ibu Selatan
4	Gunung Ibu	1.025	Tabaru

Sumber data : Kab. Halbar Dalam Angka, Tahun 2024

2.1.2.2 Topografi

Topografi adalah Relief atau kenampakan alami maupun kultural permukaan bumi. Topografi wilayah Kabupaten Halmahera Barat didominasi oleh tanah curam (61,99%). Terdapatnya empat gunung berapi dan empat sungai menjadikan Kabupaten Halmahera Barat sebagai daerah yang masih relatif alami (sub sistem) dan banyak menyimpan kekayaan alam seperti kekayaan alam dari pertanian, perikanan dan pertambangan berupa andesit, batu apung, gips, kaolin, sirtu, batu bara, pasir besi, emas, dan bahan galian lainnya, serta energi panas bumi.

Keadaan Topografi berpengaruh pada hal – hal berikut :

1. Suhu udara
2. Curah hujan dan Salju
3. Bentuk Angin

Wilayah Kabupaten Halmahera Barat terletak pada ketinggian antara 0 – 2.000 meter di atas permukaan air laut (dpl). Sebagaimana data yang tersaji dalam Tabel 2.3 di halaman berikut, berdasarkan ketinggiannya, RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2032 mengelompokkan wilayah Kabupaten Halmahera Barat menjadi 2 (dua), yaitu daerah dengan ketinggian di bawah 750 meter dpl dan daerah dengan ketinggian diantara 750 – 2.000 meter dpl.

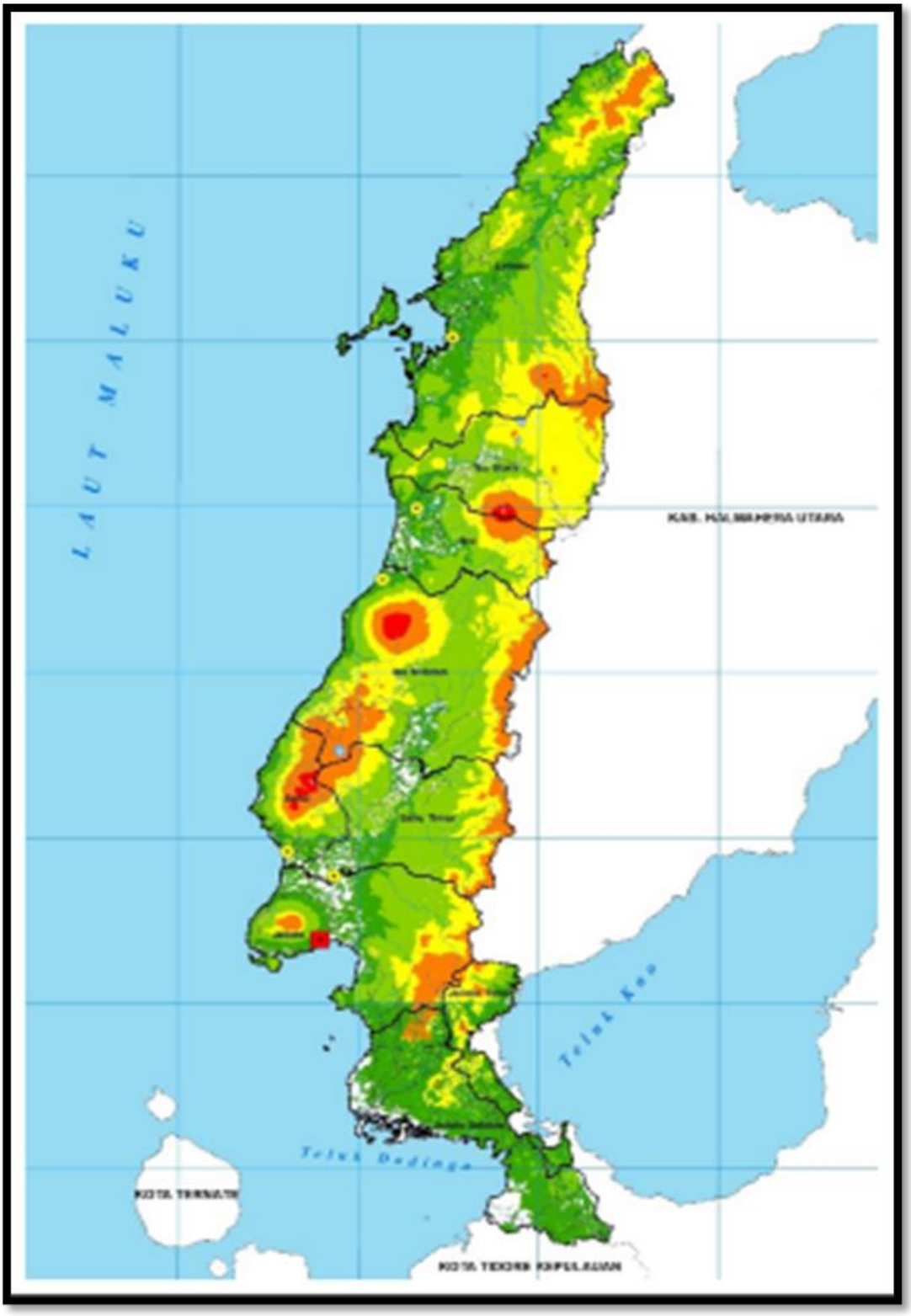
Kondisi Topografi Kabupaten Halmahera Barat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Luas Wilayah (Ha) Menurut Ketinggian di Kabupaten Halmahera Barat

No	Kecamatan	Ketinggian (Meter DPL)	
		< 750	750 – 2000
1	Jailolo	25.120,6	7,00
2	Jailolo Selatan	31.332,8	2.039,5
3	Sahu	54.336,4	1.238,5
4	Sahu Timur		
5	Ibu	49.314,8	4.316,6
6	Ibu Selatan		
7	Tabaru		
8	Loloda	55.409	351,5
9	Loloda Tengah		
Halmahera Barat		**215.513,6**	**7.953,1**

Sumber : RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2032

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah daratan Kabupaten Halmahera Barat berada pada ketinggian di bawah 750 mdpl yaitu seluas 215.513,6 Ha atau 96 persen dari luas wilayah daratan secara keseluruhan. Wilayah dengan ketinggian di atas 750 mdpl sebagian besar terdapat pada Kecamatan Ibu yaitu seluas 4.316,6 atau 54,3 persen dari luas wilayah dengan ketinggian 750 – 2.000 mdpl. Sementara berdasarkan hasil penelitian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau Papua dan Kepulauan Maluku, diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Halmahera Barat berada pada kemiringan lereng 0-8% dan 8-16%. Gambaran selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel di halaman berikut.



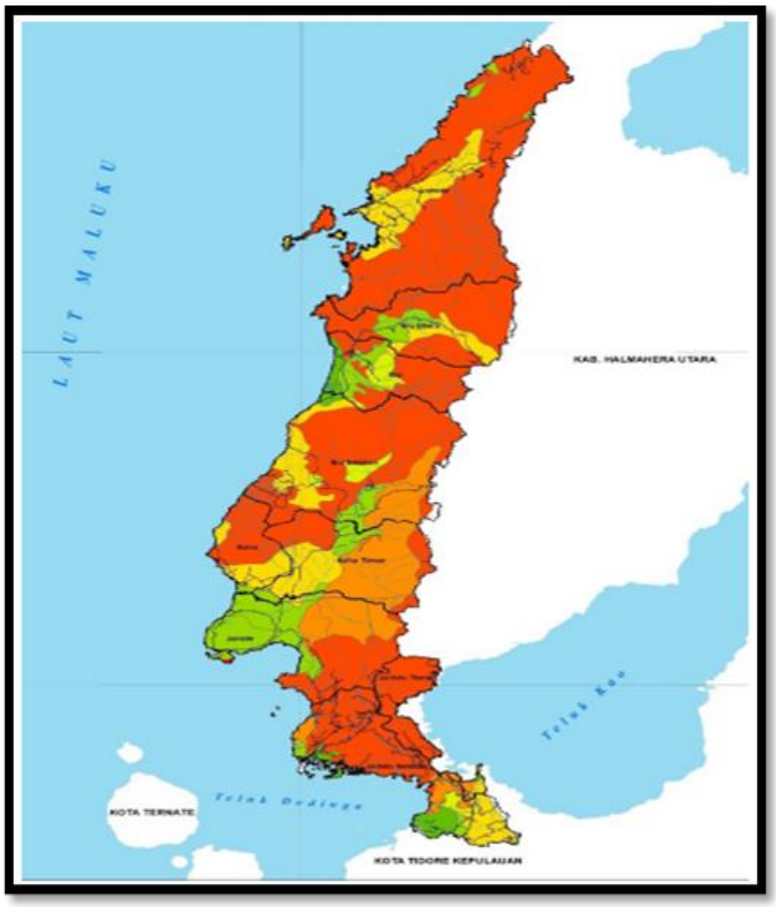
Gambar. 2.2
Peta Topografi Kabupaten Halmahera Barat
Sumber : RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2032

Tabel 2.4.
Kemiringan Lereng dan Luasnya di Kabupaten Halmahera Barat.

Kemiringan Lereng	0-8%	8-16%	16-24%	24-32%	31-40%	>40%	Total
Luas (Ha)	67.203,8	53.054,9	38.923,2	21.668,2	12.277,2	9.223,0	202.350,6
Persentase Luas (%)	33,21	26,22	19,24	10,71	6,07	4,56	100,00

Sumber : Buku Data dan Analisis RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2032

Kabupaten Halmahera Barat memiliki 173 desa, dimana 78 atau 44,57 persen diantaranya adalah Desa di wilayah pesisir. Wilayah dengan proporsi desa pesisir terbesar adalah Kecamatan Jailolo Timur dan Ibu Selatan. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.



Gambar. 2.3
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Halmahera Barat
Sumber : RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2032

2.1.2.3 Geologi

Formasi geologi Pulau Halmahera berdasarkan pada peta geologi, lembar Ternate terbagi dalam tiga mandala (bagian utama) yaitu Mandala Halmahera Timur, Halmahera Barat termasuk Pulau Morotai, dan Busur Kepulauan Gunung Api Kuarter yang meliputi pulau-pulau kecil di bagian barat Pulau Halmahera. Mandala Halmahera Barat meliputi bagian Utara dan lengan Selatan Halmahera.

Morfologi Mandala berupa perbukitan yang tersusun atas Batuan Sedimen, pada Batugamping berumur Neogen dan Morfologi Karst dan di beberapa tempat terdapat morfologi kasar yang merupakan cerminan batuan gunung api berumur oligosen. Mandala busur kepulauan gunung api kuarter meliputi pulau-pulau kecil di sebelah barat pulau Halmahera. Deretan pulau ini membentuk suatu busur kepulauan gunung api kuarter. Sebagian pulaunya mempunyai kerucut gunung-gunung api yang masih aktif.

Kondisi fisiologi Kabupaten Halmahera Barat cukup bervariasi, yakni pada bagian timur dilalui oleh jalur Gunung Api Kuarter yang terdiri dari barisan gunung api aktif dan non aktif dengan bentuk dan struktur yang sangat khas. Luas daerah bukit/pegunungan di Halmahera Barat adalah 138.499.5 Ha atau sekitar 61,98 % dari luas wilayah. Pada bagian timur yang berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Utara hingga pesisir Pantai Jailolo di lalui Gunung Api Kuarter sehingga wilayah ini mempunyai pegunungan yang rapat dengan beberapa gunung api yang masih aktif. Di semenanjung pantai bagian barat yaitu pada Kecamatan Ibu dan Sahu merupakan daerah pegunungan dengan lereng yang curam (> 40 %).

Struktur geologi wilayah Halmahera Barat merupakan batuan jenis tertua yang berupa Batu-batuan Gunung Api Oligo Miose, Batuan Sedimen yang berumur Miosen sampai Poliosem dengan karakter Sedimen Tufaan. Struktur geologi wilayah Halmahera Barat umumnya terbentuk pada Jaman Pratersier hingga Kwarter. Formasi Geologi Jaman Pratersier terdiri dari batuan Kristal, Phylit, Batu Sabah, Serpih Liat, Batu Liat, Batu Gamping, dan Eroptip. Sedangkan formasi jaman Kwarter terdiri dari Alluvium, Pasir Lumpur, Krikil, dan Koral.

Berdasarkan jenis batuannya maka struktur batuan yang ada sebagian besar tersusun atas batuan sedimen dan vulkanik dengan struktur lipatan berupa sentuhan (contact) dan patahan (fault). Jenis batuan sedimen terdapat di Kecamatan Loloda

Selatan, Ibu, Ibu Utara, Ibu Selatan, Sahu, Sahu Timur, dan Jailolo. Sedangkan jenis Batuan Vulkanik terdapat di Kecamatan Jailolo Selatan.

Adapun karakteristik tanah di Kabupaten Halmahera Barat menunjukan sifat-sifat yang berbeda mulai dari Kecamatan Jailolo Selatan di bagian selatan hingga Kecamatan Loloda Selatan di bagian utara Halmahera Barat yang dipengaruhi oleh proses-proses geologi dan iklim. Menurut jenis medianya dan proses geologi yang mempengaruhinya, jenis tanah pada Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari Jenis Tanah Alluvial, Latosol, Regosol, dan Podsolik Merah Kuning. Sebaran dari masing-masing jenis tanah didaerah Kabupaten Halmahera Barat antara lain:

1) Jenis Tanah Alluvial terdapat pada Kecamatan Jailolo Selatan dan Jailolo Timur;
2) Jenis Tanah Latosol terdapat pada Kecamatan Jailolo Selatan, Jailolo Timur, Jailolo dan Loloda Selatan;
3) Jenis Tanah Regosol terdapat pada kecamatan Jailolo, Sahu, Sahu Timur, Ibu, Ibu Utara, Ibu Selatan, dan Loloda Selatan; dan
4) Jenis Tanah Podsolik Merah Kuning terdapat pada Kecamatan Loloda Selatan.

Sedangkan Menurut Taxonomy USDA tahun 1998, tanah diwilayah Kabupaten Halmahera Barat dapat di kelompokan sebagai berikut:

- Kelompok A : Dystrudepts, Eutrudepts, Hapludalfs, Hapludoxs, Eutrudoxs.
- Kelompok B: Dystrudepts, Eutrudepts, Hapludalfs, Hapludoxs, Eutrudoxs, Udipsaments.
- Kelompok C: Hapludalfs, Hapludults, Dystrudepts, Eutrudepts, Hapludolls.
- KelompokD: Hapludults, Hapludalfs, Dystrudepts, Eutrudepts, Hapludands, Udorthents.
- Kelompok E : Hapludalfs, Hapludults, Dystrudepts, Eutrudepts, Hapludolls.
- Kelompok F : Sulfaquents, Sulfihemists, Sulfaquents.



Gambar 2.4: **Peta Geologi Kabupaten Halmahera Barat**
Sumber : RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2032

2.1.2.4 Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari sungai, danau dan air permukaan tanah. Sumber air laut, air tanah dan air permukaan tanah selain berasal laut, dari dasar tanah dan permukaan tanah juga berasal dari danau, sungai dan kali, seperti Sungai Ake Diri, Ake Lamo, Ake Todowongi, Ake Sidangoli, Ake Nyinyiwit, Ake Sasur, Ake Tacici, Ake Ngibut, Ake Tahafo, Ake Duono dan Ake Tafangu.

Nama-nama sungai-sungai yang besar yang melalui beberapa kecamatan, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Nama-nama Sungai Yang Melalui Beberapa Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat

No	Nama Sungai	Panjang (M)	Nama Kecamata
1	Ake Diri	8.12	Jailolo
2	Ake Lamo	6.59	Jailolo
3	Ake Todowongi	9.76	Jailolo
4	Ake Sidangoli	3.80	Jailolo Selatan
5	Ake Nyinyiwit	9.54	Jailolo Selatan
6	Ake Sasur	3.44	Sahu
7	Ake Tacici	2.11	Sahu
8	Ake Ngibut	3.46	Sahu Timur
9	Ake Tahafo	5.69	Ibu
10	Ake Duono	5.01	Tabaru
11	Ake Tafangu	7.79	Ibu Selatan

Sumber data : Kab. Halbar Dalam Angka, Tahun 2024

Secara hidrologi, Kabupaten Halmahera Barat selain dilalui oleh sebelas sungai, juga memiliki 4 (empat) danau. Nama-nama danau dan lokasinya, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6
Nama-nama Danau di Halmahera Barat

No	Nama Danau	Lokasi
1	Danau Rano	Kecamatan Sahu
2	Danau Gamkonora	Kecamatan Ibu
3	Danau Duono	Kecamatan Tabaru
4	Danau Todoke	Kecamatan Tabaru

Sumber data : Kab. Halbar Dalam Angka, Tahun 2024

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Air tersebut bergerak di dalam ruang antar butir-butir tanah dan meresap ke dalam tanah lalu bergabung membentuk lapisan di dalam tanah yang disebut akuifer. Berdasarkan data Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku Utara dalam Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Halmahera Utara (termasuk Halmahera Barat), Daerah sekitar Jailolo, Susupu, Ibu dan Goin di Pulau Halmahera merupakan daerah paling prospektif kandungan air tanahnya, mengingat daerah tersebut merupakan bagian kaki gunung Strato, dimana aliran air tanah yang berasal dari puncak dan tubuh gunung api tertahan oleh batuan padu yang berumur lebih tua.

Akuifer terpenting di daerah gunung Strato adalah lava basal berstruktur versikuler dan tufa, tercatat munculnya beberapa mata air dari akuifer tersebut dengan debit dapat mencapai lebih dari 100 l/dt. Akuifer di daerah perbukitan bergelombang umumnya mempunyai produktifitas rendah dan setempat berarti, air tanah dengan jumlah terbatas masih dapat diperoleh di lembah-lembah. Kelompok batuan vulkanik tak teruraikan dapat diharapkan bertindak sebagai sebagai akuifer produktif dengan kelulusan sedang. Potensi debit mata air yang terdapat di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.7
Nama Mata Air, Lokasi dan Debitnya di Kabupaten Halmahera Barat

No	Nama Mata Air	Lokasi (Kecamatan)	Debit (lt/dt)
1	Sosa iku 1	Ibu	100,0
2	Sosa iku 2	Ibu	500,0
3	Pancuran	Ibu	10,0
4	Akeboso	Ibu	300,0
5	Goiu	Ibu	0,5
6	Tuladi	Ibu	0,2
7	Kawao	Sahu	0,5
8	Gamkonora	Sahu	500,0
9	Duter	Jailolo	200,0
10	Gurutu	Jailolo	100,0
11	Golo	Jailolo	30,0
12	Aketola	Jailolo	500,0
13	Rugasi	Jailolo	1,0
14	Jailolo	Jailolo	300,0
15	Gurango	Jailolo	400,0

Sumber : Buku Data dan Analisis RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012 -2032

Tabel 2.8
Potensi Cekungan Air Tanah Di Kabupaten Halmahera Barat

	Cekungan Air Tanah (CAT)		Jumlah Air Tanah [juta m3/tahun]		Kategori CAT	
No. CAT	Nama	Luas [Km^2]	Bebas (Q1)	Tertekan (Q2)	Prov	Kab/ Kota
320	Ibu	756	454	249	X	
322	Jailolo-Sidangoli	1576	531	177	X	

	Total	**2.332**	**985**	**426**	**2**	

Sumber : Buku Data dan Analisis RTRW Kabupaten Halmahera Barat 2012-2032

Dari tabel, di wilayah Kabupaten Halmahera Barat juga terdapat Cekungan Air Tanah (CAT) yang merupakan CAT kategori provinsi.

2.1.2.5 Klimatologi

Klimatologi berasal dari bahasa Yunani klima yang berarti wilayah dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah klimatologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang iklim, cara kerja sistem iklim, variasi dan penyimpangannya, serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Klimatologi dapat diartikan pula sebagai gejala alam yang berkaitan dengan iklim dan kualitas udara

Iklim sendiri dalam arti sempit didefinisikan sebagai kondisi cuaca rata-rata pada lokasi tertentu dan periode waktu tertentu.. Rata- rata keadaan cuaca setidaknya selama 30 tahun agar dapat membentuk pola cuaca di suatu wilayah. Selain itu, iklim juga sering diartikan sebagai nilai statistik cuaca jangka panjang di suatu wilayah. Oleh karena itu, iklim adalah hal yang berbeda dengan cuaca. Perbedaan tersebut terlihat dari rentang waktu serta jangkauannya. Cuaca memiliki rentang waktu yang singkat dan dalam lokasi yang sempit. Sementara itu, iklim memiliki rentang waktu yang lama dan dalam lokasi yang luas.

Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari iklim, cara kerja sistem iklim, variasi dan penyimpangannya, serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Klimatologi juga dapat diartikan sebagai gejala alam yang berkaitan dengan iklim dan kualitas udara

Kondisi klimatologi Kabupaten Halmahera Barat secara umum adalah iklim laut tropis dan iklim musim dengan curah hujan antara 1500 – 3500 mm/tahun. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah Kabupaten Halmahera Barat merupakan perairan laut yang luas, sehingga iklim yang terjadi sangat dipengaruhi perkembangan cuaca laut yang berlangsung seiring dengan musim yang ada.

Wilayah Kecamatan Jailolo dan Jailolo Selatan memiliki curah hujan rata-rata sebesar 1500-2000 mm, Wilayah Kecamatan Sahu, Sahu Timur pada daratan

rendah mulai dan pesisir pantai memiliki curah hujan rata-rata 2501-3000 mm, sedangkan bagian timur wilayah kecamatan curah hujan rata-rata sebesar 1501-2000 mm, Wilayah Kecamatan Ibu Utara, Kecamatan Ibu, Kecamatan Ibu Selatan dan Kecamatan Loloda memiliki curah hujan rata-rata 2501-3000 mm.

Data perkembangan cuaca sepanjang tahun 2022 di Kabupaten Halmahera Barat, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9
Kondisi Klimatologi Kabupaten Halmahera Barat.

	Uraian	Persentase
1	Suhu (0C) : a. Maksimum. b. Minimum. c. Rata-rata.	 33,80 23,00 26,90
2	Kelembaban Udara : a. Maksimum b. Minimum c. Rata-rata	 98,00 52,00 81,90
3	Tekanan Udara (mb)	1.0007,50

Sumber data : Kabupaten Halbar Dalam Angka, Tahun 2022

Kondisi cuaca Kabupaten Halmahera Barat yang meliputi suhu udara, kelembaban udara, dan tekanan udara sepanjang tahun 2022 disajikan pada table berikut :

Tabel 2.10
Kondisi Cuaca Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022

Bulan	Suhu Udara (^oC)	Kelembaban Udara (persen)	Tekanan Udara (mb)

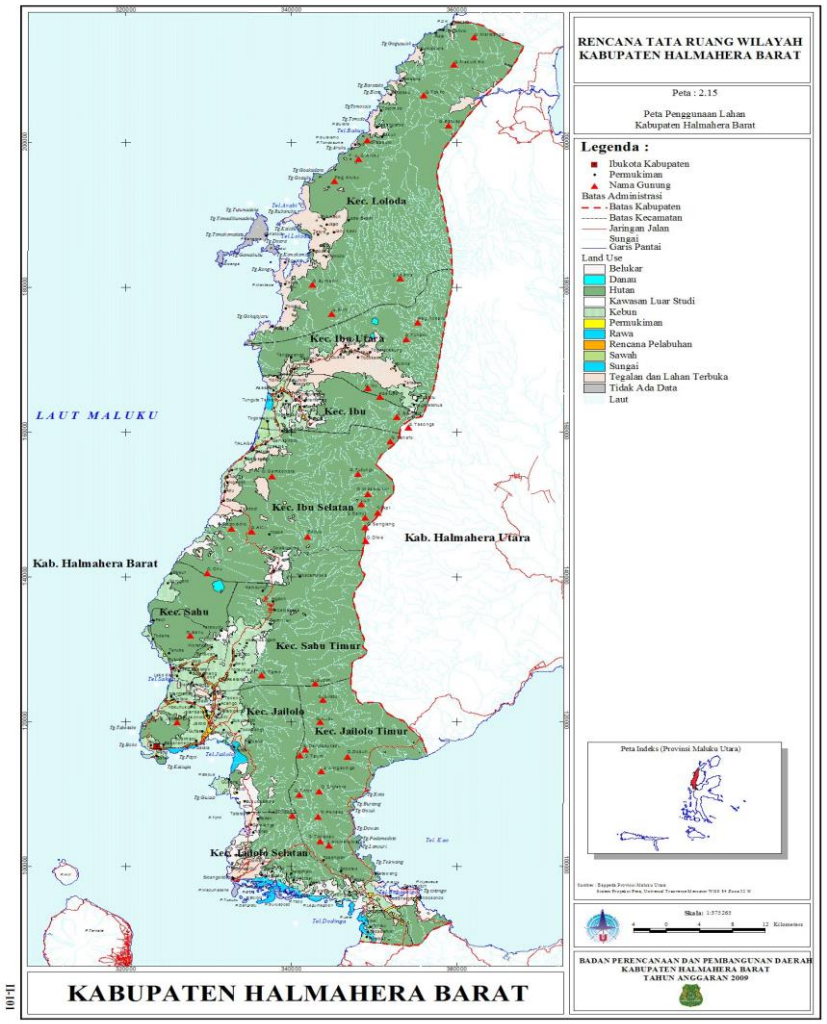
	Min	Rerata	Max	Min	Rerata	Max	Min	Rerata	Max
Januari	23,8	27,4	33,0	67,0	83,6	97,0	1.001,8	1.006,8	1.011,8
Februari	23,8	28,0	33,2	64,0	83,9	98,0	1003,6	1.007,7	1.011,6
Maret	24,0	28,0	33,6	67,0	86,5	98,0	1003,5	1.007,3	1.011,1
April	24,2	28,1	33,5	68,0	86,9	98,0	1003,7	1.007,3	1.010,6
Mei	24,6	28,4	33,6	60,0	85,7	98,0	1001,7	1.006,7	1.011,7
Juni	23,6	27,4	33,4	70,0	87,6	99,0	1003,2	1.006,7	1.010,4
Juli	23,6	26,9	32,4	69,0	87,8	100,0	1.003,0	1.006,1	1.009,7
Agustus	23,6	27,3	33,0	60,0	84,9	98,0	1003,1	1.006,8	1.010,6
September	23,0	27,0	33,0	60,0	87,3	97,0	1.002,1	1006,6	1.010,5
Oktober	23,4	27,3	33,4	60,0	87,0	97,0	1.002,2	1.005,8	1.010,4
November	24,0	27,6	33,2	63,0	87,4	98,0	1.002,2	1.006,0	1.010,0
Desember	23,8	27,7	32,6	44,0	85,4	98,0	1.001,0	1.005,2	1.009,0

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2022

2.1.2.6 Penggunaan Lahan

Berdasarkan luas wilayah daratan Kabupaten Halmahera Barat, yaitu 2.239.114 km^2, sampai dengan akhir tahun 2023 pemanfaatannya telah terpetakan digunakan untuk beberapa aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, antara lain sebagai berikut :

(i) kegiatan pemerintahan; (ii) kegiatan pendidikan; (iii) kegiatan sosial; (iv) perumahan termasuk untuk komplek kantor pemerintah, mess swasta; (v) kegiatan pertanian dalam arti luas; (vi) kegiatan perindustrian dan perdagangan; (vii) kegiatan pertambangan dan energy lainnya; (viii) kegiatan transportasi; dan (ix) kegiatan lainnya.



Gambar 2.5. Peta Pengguaan Lahan Kabupaten Halmahera Barat.
(Sumber: Dokumen RTRW Kab. Halmahera Barat)

2.1.2.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah adalah proses untuk meningkatkan kualitas wilayah dengan cara meningkatkan potensi yang dimiliki serta memunculkan potensi baru. Pengembangan wilayah jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, secara umum berorientasi pada meningkat atau menurunnya produktivitas wilayah dengan indikatornya adalah jumlah penduduk, pendapatan, kesempatan kerja, dan *additional value* (nilai tambah) dari sektor industri pengolahan.

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang sosial, pengembangan wilayah berfokus terhadap tujuan 10 agar terjadinya perubahan dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang atau maju yang terjadi secara bertahap dan diharapkan dapat membantu pengembangan daerah sekitarnya. kabupaten di Kabupaten Halmahera Barat dalam perkembangannya terdapat beberapa kawasan strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan ini perlu diprioritaskan pengembangan atau penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu rencana.

Ada 7 (Tujuh) hal penting dalam pembangunan yang dapat berpengaruh terhadap pengembangan potensi wilayah yaitu:

1. Sumber daya lokal : sumber daya lokal merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan karena sumber daya lokal merupakan kondisi alam yang dimiliki wilayah yang sifatnya berasal dari dalam daerah itu sendiri dan dapat memberi nilai positif bagi daerah, selain itu sumber daya lokal juga dapat dikembangkan untuk meningkatkan daya saing. Contohnya adalah keberadaan barang tambang yang melimpah, tanah yang subur, dan lain sebagainya.
2. Pasar : Pasar merupakan tempat bagi daerah untuk memasarkan produk yang dihasilkan wilayah tersebut dalam proses produksi
3. Tenaga kerja : merupakan sumber daya yang bertugas sebagai pengolah sumber daya lokal yang fungsinya adalah meningkatkan nilai jual produk yang berasal dari hasil proses produksi wilayah tersebut.
4. Investasi : dalam mengembangkan wilayah memerlukan investasi bberupa penanaman modal dalam setiap kegiatannya. Semakin stabil kondisi

wilayah dan meningkat atau dengan kata lain kondusif maka akan semakin besar investasi yang masuk.

5. Kemampuan pemerintah : kehadiran pemerintah dianggap penting dalam pengembangan wilayah karena pemerintah mempunyai peran sebagai pengarah, selain itu pemerintah juga sebagai katalisator pembangunan
6. Transportasi dan komunikasi : mengingat pentingnya wilayah satu dan wilayah lainnya untuk terhubung membuat peran transportasi dan komunikasi menjadi penting. Dengan adanya penghubung yang baik antara wilayah satu dan lainnya dapat menimbulkan terciptanya arus pergerakan barang, jasa, dan informasi dengan begitu akan memberi pengaruh juga terhadap pengembangan wilayah.
7. Teknologi : teknologi menjadi komponen penting karena teknologi dapat membantu proses produksi di wilayah agar menghasilkan output dan kinerja yang meningkat.

Untuk menyusun rencana bagi pengembangannya, terlebih dahulu perlu diidentifikasi kawasan strategis kabupaten tersebut. Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap :

1. Tata ruang di wilayah sekitarnya;
2. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya;dan/atau
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jenis kawasan strategis, antara lain adalah :
    1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat;
    2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
    3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
    4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;

5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil analisis, Kabupaten Halmahera Barat mempunyai beberapa kawasan strategis yang diprioritaskan (karena keberadaan atau untuk mendukung pengembangan sektor yang diprioritaskan) didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain yaitu :

1. Pengembangannya tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga mempunyai pengaruh terhadap wilayah yang lebih luas (provinsi bahkan nasional);
2. Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan itu akan membutuhkan lahan dalam skala besar;
3. Pengembangannya mempunyai prospek ekonomi yang cerah;
4. Pengembangannya dapat memacu perkembangan wilayah sekitarnya yang miskin dan terkebelakang;
5. Pengembangannya dapat mengurangi permasalahan di wilayah sekitarnya;
6. Sektor yang akan diakomodasikan mempunyai prioritas tinggi dalam pengembangan kawasan;
7. Adanya minat dan kecenderungan investasi swasta dan pemerintah yang cukup tinggi.

Selain didasarkan pada keberadaan sektor-sektor strategis yang perlu dikembangkan, penentuan kawasan strategis ini juga didasarkan pada tingkat kepentingan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya yang telah ditetapkan. Kawasan dengan fungsi lindung merupakan kawasan yang diprioritaskan penggunaannya untuk kawasan lindung, sedangkan penggunaan untuk kawasan budidaya ditentukan jika kawasan lindung telah ditetapkan.

Berdasarkan parameter tersebut diatas, maka diidentifikasi kawasan strategis di Kabupaten Halmahera Barat yang perlu diprioritaskan pengembangan dan penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu rencana adalah :

A. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi;

Kawasan strategis dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi ini adalah kawasan yang ditentukan memiliki fungsi strategis dalam mengembangkan ekonomi

wilayah sekitarnya. Dalam wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Barat, beberapa kawasan yang ditentukan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, meliputi :

1) Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Jailolo-Sidangoli-Sofifi

Kawasan pertumbuhan Ekonomi Jailolo-Sidangoli-Sofifi adalah koridor yang pusat kegiatan di Kabupaten Halmahera Barat yang diidentifikasi menjadi pusat pertumbuhan skala regional, dan juga merupakan Regional Gateway ke wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Ketersediaan sarana prasarana seperti jaringan jalan utama dan Pelabuhan Laut Jailolo di kawasan ini menjadi pusat koleksi dan distribusi potensi sumberdaya di wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Adapun sektor yang diarahkan dikembangkan di kawasan ini meliputi perdagangan dan jasa.

2) Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Tongute Ternate-Duono- Kedi

Kawasan pertumbuhan ekonomi Tongute Ternate-Duono- Kedi adalah koridor yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah utara Kabupaten Halmahera Barat. Pengembangan jaringan jalan darat nantinya yang menghubungkan koridor Tongute Ternate – Duano – Kedi dimungkinkan kegiatan ekonomi akan berkembang di sepanjang koridor ini. Sektor yang ditekankan pada pengembangan kawasan ini meliputi sektor perikanan, pertanian dan kehutanan, perkebunan dan jasa, dan kegiatan pengolahan.

3) Kawasan Perikanan Terpadu Loloda

Kawasan perikanan terpadu Loloda ini adalah kawasan yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah utara Kabupaten Halmahera Barat. Pusat kawasan berada di Kedi yang merupakan Ibukota Kecamatan Loloda. Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan ini adalah perikanan tangkap dan budidaya perikanan darat.

B. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Kawasan strategis dengan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Halmahera Barat, adalah kawasan lindung di laut. Kawasan

Lindung di Laut adalah kawasan lindung yang ada di laut dan merupakan habitat berkembang biaknya berbagai jenis flora dan fauna, khususnya berbagai jenis ikan dan flora lainnya. Mengingat keberadaanya yang penting terkait keunikan kawasan dan fungsinya, maka perlu dilindungi keberadaan dan ekosistem di kawasan lindung tersebut.

Perlindungan yang dilakukan, diantaranya mencegah kegiatan penangkapan berlebihan terhadap sumberdaya hayati, dan melarang kegiatan wisata masuk ke wilayah yang dilindungi.

C. Kawasan Strategis Dari Sudut Pandang Budaya.

1) Kawasan Sentra Budaya;

Kawasan sentra budaya ini meliputi kawasan-kawasan yang merupakan sentra kegiatan budaya suku asli yang terdapat di Kecamatan Ibu Selatan, tepatnya berada di Desa Talaga, Gamsungi, dan Gamkonora dan Kecamatan Sahu serta Sahu Timur.

2) Kawasan Situs Wisata

Kawasan situs wisata adalah kawasan-kawasan yang diidentifikasi sebagai kawasan situs-situs wisata yang telah dikaji sebelumnya dan ditetapkan sebagai warisan leluhur. Untuk itu keberadaanya hendaknya dipertahankan dan dilindungi. Kawasan situs wisata ini, diantaranya: 1) Rumah Adat di Kecamatan Sahu; 2) Pantai Marimbati yang dikenal sebagai pantai tempat peristirahatan Sultan Ternate, di Kecamatan Jailolo; 3) situs sejarah Kesultanan Jailolo, berupa benteng – benteng dan peninggalan Pahlawan Banau.

3) Rencana Pengelolaan Kawasan Strategis

Rencana pengelolaan kawasan strategis, meliputi rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut pandang budaya dan rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- Mendorong pengembangan sarana prasarana dasar untuk menstimulasi masuk dan berkembangnya investasi ke kawasan.
- Mendorong kemudahan aksesibilitas intra kawasan dan inter kawasan dan pengembangan jaringan telekomunikasi untuk merangsang kemudahan pencapaian dan informasi ke kawasan.
- Menetapkan kawasan khusus dalam areal tertentu yang dialokasikan sebagai kawasan potensial untuk pengembangan kegiatan ekonomi seperti kawasan berikat dan sejenisnya.
- Memberlakukan kebijakan insentif bagi masuknya investasi di kawasan tersebut.

Rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut pandang budaya, yaitu :

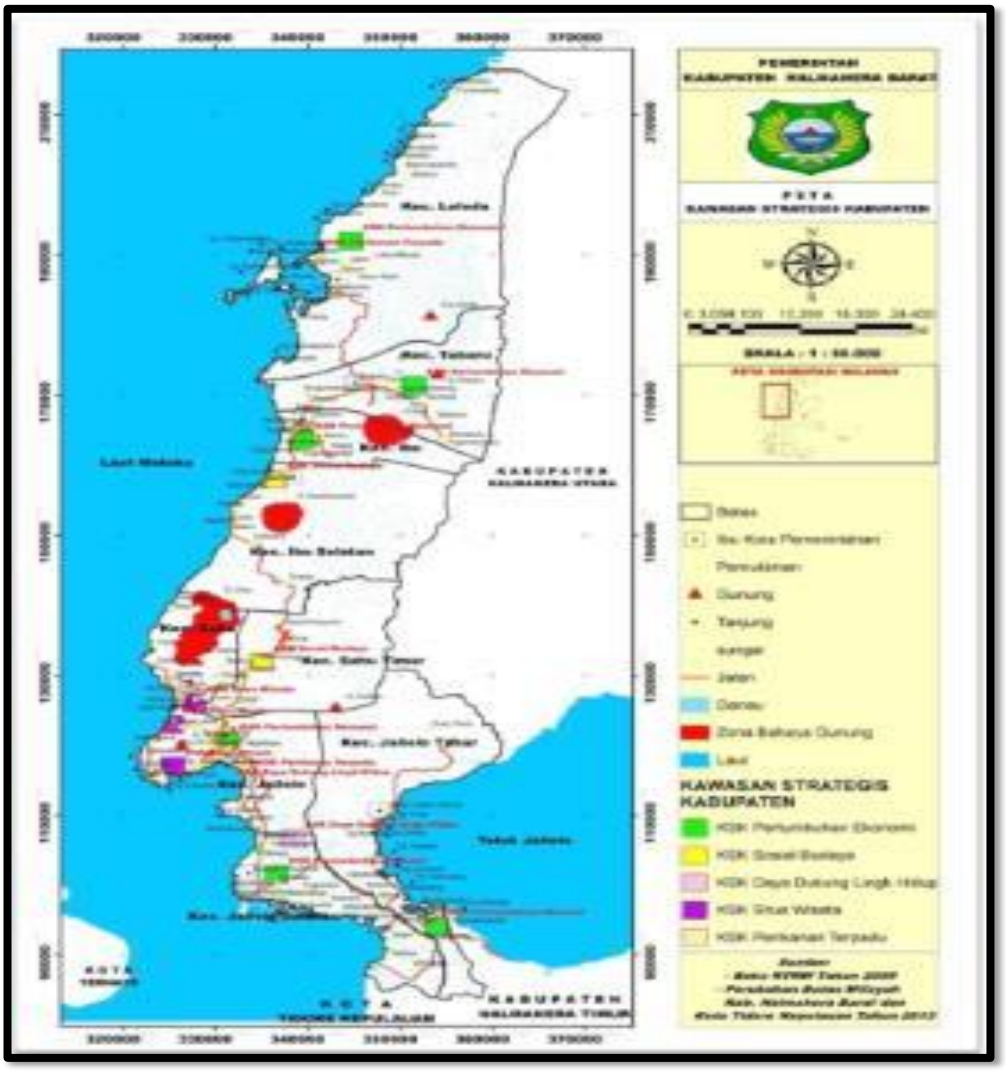
- Penetapan lokasi secara spesifik melalui peraturan daerah sehingga kawasan dapat dikelola secara optimal.
- Perlindungan dan pengelolaan kawasan dilakukan oleh dinas dan atau instansi terkait.
- Pelestarian pada situs-situs wisata daerah serta memberikan kesadaran tehadap masyarakat setempat untuk turut serta dalam pengelolaan dan pelestarian situs wisata tersebut.
- Mengenalkan potensi kawasan melalui situs dan atau media lainnya sehingga dikenal oleh publik.

Rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu :

- Penetapan batas area yang definitif dari kawasan strategis lingkungan hidup ini melalui dokumen peraturan yang berlaku.
- Pembatasan penggunaan lahan pada areal kawasan strategis lingkungan hidup maupun di area sekitarnya yang berpotensi memberikan dampak negatif bagi keberadaan kawasan strategis lingkungan hidup tersebut.
- Penetapan badan pengelola oleh badan pengelola tertentu dan atau instansi terkait.

- Memelihara keseimbangan alamiah pada kawasan strategis lingkungan hidup ini.
- Memberikan sanksi pidana pada perusak lingkungan hidup pada kawasan strategis lingkungan hidup ini.
- Penyadaran terhadap masyarakat sekitar akan kelestarian lingkungan dan dampaknya apabila terjadi kerusakan.

Kawasan-kawasan strategis Kabupaten Halmahera Barat dapat dilihat pada Gambar Peta berikut ini :



Gambar 2.6. Peta Kawasan Strategis dalam RTRW Kabupaten Halmahera Barat.
(Sumber : Peninjauan kembali (PK) RTRW Kab. Halmahera Barat,2020)

2.1.2.8 Wilayah Rawan Bencana

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa bencana adalah kondisi atau karakteristik geologi, biologi, hidrologi, klimatologi, geografi, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu untuk mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Tabel 2.11
Kawasan Rawan Bencana Di Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2022.

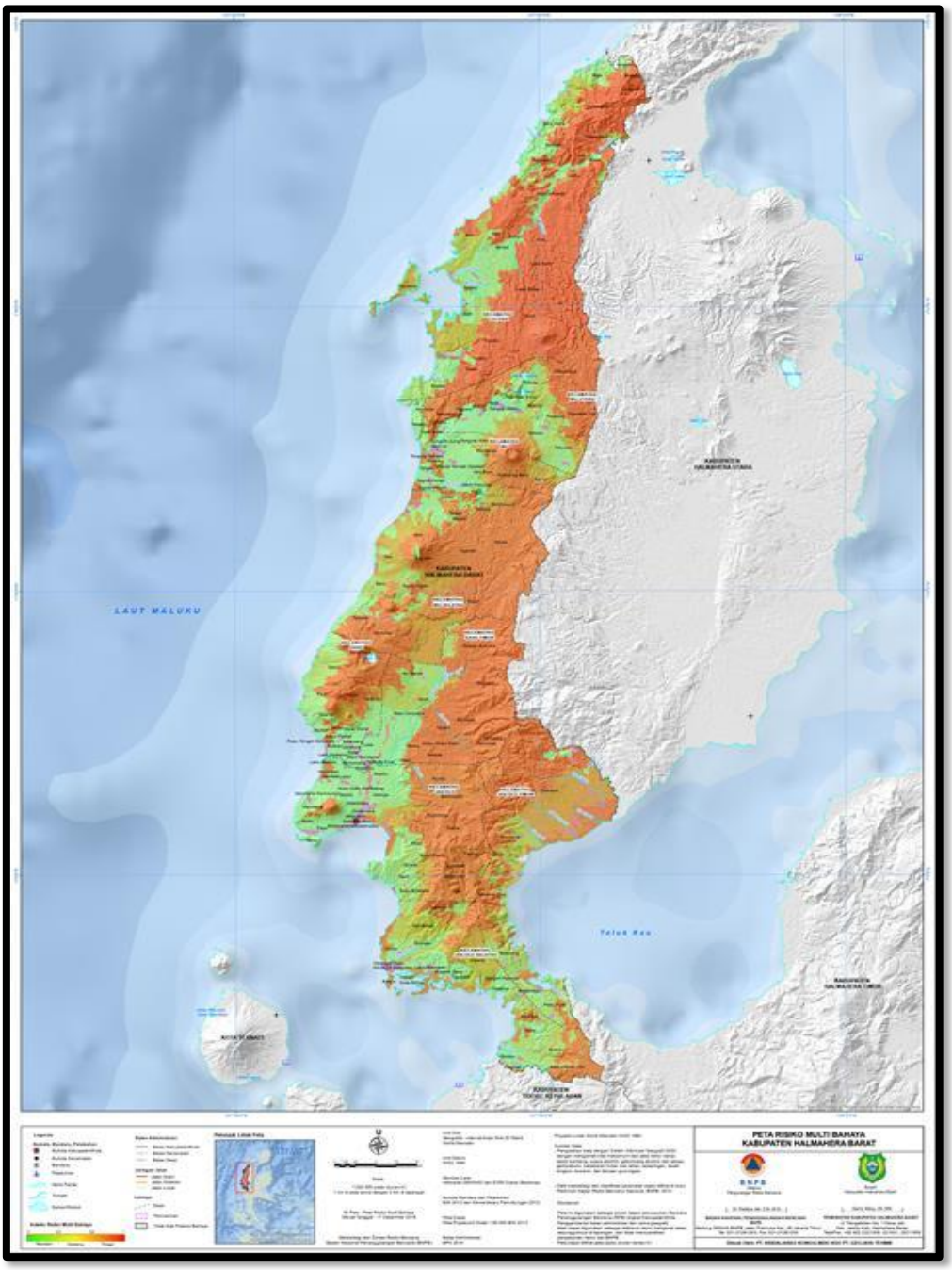
No	Jenis Bencana	Wilayah (Kecamatan)
1	Banjir	Ibu, Jailolo, Jailolo Selatan, Loloda, Sahu, dan Sahu Timur
2	Banjir Bandang	Loloda
3	Cuaca Ekstrim	Berpotensi di semua wilayah
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Loloda, Sahu, Ibu Selatan, dan Jailolo Selatan
5	Gempa Bumi	Berpotensi di semua wilayah
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	Jailolo Selatan
7	Kekeringan	Jailolo Selatan, dan Sahu
8	Letusan Gunung Api	Tabaru, Ibu dan Ibu Selatan
9	Tanah Longsor	Loloda, Ibu, Jailolo, dan Jailolo Selatan
10	Tsunami	Berpotensi di semua wilayah

Sumber : BPBD Kabupaten Halmahera Barat (diolah), 2024

Dengan karakteristik wilayah Kabupaten Halmahera Barat yang sebagian besar wilayah daratannya berupa gunung berapi yang masih aktif, maka ada beberapa kawasan yang memerlukan perhatian secara lebih intens. Dengan sering terjadinya gempa bumi akhir-akhir ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melakukan pendataan dan pemetaan secara teritegrasi dengan tujuan untuk melakukan antisipasi terjadi gelombang bencana alam dimaksud. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka langkah kebijakan yang akan ditempuh, antara lain sebagai berikut: (i) melakukan pendataan terhadap lokasi (kecamatan) bencana dan jenis bencana; (ii) pendataan terhadap jenis dan

durasi terjadinya bencana; (iii) pendataan terhadap wilayah aman bencana untuk evaluasi: dan (iv) meningkatkan kuantitas dan kualitas sosialisasi bencana kepada masyarakat.

Gambar berikut menyajikan peta risiko multi bahaya bencana di Kabupaten Halmahera Barat.



Gambar 2.7. Peta Resiko Multi Bahaya Bencana Kabupaten Halmahera Barat *(Sumber: Inarisk.bnpb.go.id)*

Langkah-langkah untuk mengatasi bencana diluar yang telah diuraikan tersebut diatas, maka perlu juga menetapkan langkah-langkah untuk menangani bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Halmahera Barat. Sebagai bencana yang memerlukan penanganan yang bersifat permanen dan berkesinambungan, sehingga penanganannya lebih spesifik dibandingkan aktivitas yang lain. Pemetaan kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanah longsor di Kecamatan Jailolo, Ibu, Ibu Selatan, Tabaru, dan Loloda.

Kawasan rawan bencana gelombang pasang di Kecamatan Loloda, Ibu, Ibu Selatan, Jailolo dan Jailolo Selatan. Kawasan rawan bencana banjir di Kecamatan Jailolo, Jailolo Selatan, Sahu, Sahu Timur, Ibu, Ibu Selatan dan Loloda. Kawasan rawan bencana alam geologi meliputi kawasan rawan letusan gunung berapi, terdapat di Kecamatan Ibu Utara dan Kecamatan Ibu Selatan. Kawasan rawan gempa bumi, tersebar di daerah Kecamatan Loloda, Kecamatan Ibu Utara, Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Ibu, Kecamatan Sahu, Kecamatan Sahu Timur, Kecamatan Jailolo, Kecamatan Jailolo Timur dan Kecamatan Jailolo Selatan.

Kawasan rawan gerakan tanah, terdapat di Kecamatan Jailolo, Kecamatan Ibu Utara dan Kecamatan Loloda. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif, terdapat di Kecamatan Ibu Selatan. Kawasan rawan tsunami, terdapat disebelah Barat Kecamatan Loloda, Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Sahu, Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Jailolo Selatan. Kawasan rawan abrasi terdapat di Kecamatan Loloda, Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Ibu, Kecamatan Sahu, dan Kecamatan Jailolo Selatan. Oleh karena itu, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026, penanggulangan dampak bencana alam di Kabupaten Halmahera Barat akan dilakukan melalui pendekatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan sasaran setiap warga individu yang terkena dampak.

2.1.2.9 Demografi

Sampai dengan tahun 2024 penduduk Kabupaten Halmahera Barat berjumlah 137.543 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 70.281 jiwa dan

penduduk perempuan berjumlah 67.262 Jiwa. Data dan informasi tentang pertumbuhan penduduk per kecamatan dan tingkat kepadatan penduduk, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12
Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk
		Km2	%	Jiwa	%	(jiwa/Km)
1	Jailolo	226.00	10.09	368.54	26,7%	163.07
2	Jailolo Selatan	-	-	246.80	17,9%	-
3	Sahu	122.86	5.49	123.52	8,98%	100.54
4	Sahu Timur	271.00	12.1	113.31	8,24%	41.81
5	Ibu	109.82	4.9	129.20	9,39%	117.64
6	Ibu Selatan	368.33	16.45	156.73	11,3%	42.55
7	Tabaru	220.64	9.85	98.98	7,20%	44.86
8	Loloda	-	-	91.91	6,68%	-
9	Loloda Tengah	-	-	46.44	3,38%	-
	Jumlah	**2.239.114**	**100**	**137. 543**	**100.00**	**61.43**

Sumber Data : Kab. Halbar Dalam Angka, Tahun 2024 (Hasil Analisa, BP3D)

Kepadatan penduduk yang relatif tinggi ini, kiranya dapat dijadikan masukan dalam merumuskan berbagai strategi, kebijakan dan program/kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Optimalisasi pemanfaatan program/kegiatan oleh seluruh masyarakat dapat terjadi jika dokumen perencanaan pembangunan daerah berkualitas. Sebaran penduduk di 9 (Sembilan) kecamatan dalam periode tahun 2023 dan pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Halmahera Barat, dapat dilihat sebagaimana data dan informasi yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Halmahera Barat Tahun 2023.

Kelompok Umur *Age Groups*	Jenis Kelamin/*Sex*		
	Laki-Laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
0–4	---	---	**7.455**
5–9	---	---	**11.250**
10–14	---	---	**12.017**
15–19	---	---	**13.922**
20–24	---	---	**13.733**
25–29	---	---	**11.901**
30–34	---	---	**10.697**
35–39	---	---	**10.856**
40–44	---	---	**10.879**
45–49	---	---	**9.580**
50–54	---	---	**7.664**
55–59	---	---	**5.790**
60–64	---	---	**4.425**
65–69	---	---	**3.330**
70–74	---	---	**1.970**
75+	---	---	**2.074**
Halmahera Barat	**70.281**	**67.262**	137.543

Sumber data : Kab. Halbar Dalam Angka, Tahun 2024 (Diolah BP3D)

Selain data sebagaimana telah diuraikan diatas, untuk melengkapi informasi tentang potensi geografi yang akan dikelola sebagai salah satu kekuatan yang akan mendorong untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat sepanjang tahun 2023, perlu dilakukan gambaran tentang presentase penduduk yang berstatus bekerja dan pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan pertumbuhan penduduk berdasarkan kelompok usia.

Total pencari kerja kelompok usia 15 Tahun ke atas dengan pendidikan di mulai dari tingkat pendidikan usia dini hingga Perguruan Tinggi mencapai 68.277 jiwa dan tingkat pengangguran kelompok usia 15 Tahun ke atas dengan pendidikan di mulai dari Tingkat pendidikan usia dini hingga perguruan Tinggi mencapai 2.672 jiwa

dengan jumlah angkatan kerja mencapai 70.949 jiwa sehingga persentase bekerja terhadap angkatan kerja adalah 96,23%.

Dari data di atas dapat diketahui, bahwa penduduk yang dapat menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dari pada pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) dalam pengaruh angkatan kerja, lebih sedikit. Artinya rata-rata tingkatan angkatan kerja sesuai pendidikan pada masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat, relatif memiliki ijazah sekolah dasar (SD). Sementara itu, dari sisi pertumbuhan penduduk berdasarkan kelompok usia terlihat, bahwa 5 (lima) besar pertumbuhan penduduk sepanjang tahun 2023 di Kabupaten Halmahera Barat adalah pada penduduk pada uisa 5- 9 tahun, berikutnya penduduk usia 10-14 tahun, lalu pendudukan uisa 15- 19 tahun dan penduduk dengan usia 30-34 tahun.

Terkait dengan data dan informasi tersebut diatas, maka langkah mendesak untuk dijadikan agenda kerja dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan antara lain adalah (i) membangun ruang kelas baru pendidikan wajib belajar (wajar) 12 (dua belas) tahun; dan (ii) meningkatkan promosi dibidang investasi dengan mengundang investor, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk dapat berinvestasi di Kabupaten Halmahera Barat. Strategi dan program yang mendesak terkait dengan maksud tersebut diatas, adalah pembangunan dan pengembangan berbagai infrastruktur fisik dan non fisik dalam upaya menarik investor untuk mau menanamkan investasinya di Kabupaten Halmahera Barat.

Informasi tambahan mengenai karakteristik penduduk di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023 adalah kelompok penduduk berdasarkan agama atau keyakinan yang dipeluknya. Sebagian besar Penduduk Kabupaten Halmahera Barat penganut Kristen Protestan yaitu 57.76 persen dan Agama Islam 41.42 persen.

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1 Pertumbuhan PDRB

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB Indonesia di kabupaten/Kota yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil

(DBH), inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pengeluaran pemerintah daerah, dan tenaga kerja.

Kemajuan ekonomi di Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang terus meningkat. Dinamika perekonomian Kabupaten Halmahera Barat secara agregat yang tercermin dalam pertumbuhan PDRB dan distribusinya dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (penggunaan). Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Barat menurut lapangan usaha tahun 2020-2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.14
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

No	Komponen PDRB Menurut Lapangan Usaha	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
		2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	949,750.17	1,00,6722.94	1,062,623.80
2	Pertambangan dan Penggalian	2,519.39	2,749.04	2,902.51
3	Industri Pengolahan	96,838.95	103,238.42	111,304.11
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,533.54	2,808.32	2,984.00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,457.44	4,731.85	5,120.18
6	Konstruksi	123,202.87	142,938.11	139,814.87
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	354,877.59	385,896.76	410,918.96
8	Transportasi dan Pergudangan	50,300.14	59,190.87	65,863.75
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,525.16	5,948.72	6,128.86
10	Informasi dan Komunikasi	66,967.28	72,057.26	74,601.49
11	Jasa Keuangan dan	68,534.26	75,172.75	78,477.86

No	Komponen PDRB Menurut Lapangan Usaha	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
		2021	2022	2023
	Asuransi			
12	Real Estate	1,720.44	1,762.18	1,831.89
13	Jasa Perusahaan	3,920.05	4,190.10	4,381.44
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	470,798.03	509,869.69	530,137.07
15	Jasa Pendidikan	73,304.04	76,862.70	83,161.81
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61,634.04	64,417.48	70,407.85
17	Jasa Lainnya	10,343.99	10,892.12	11,321.64
	Produk Domestik Regional Bruto	**2,347,227.38**	**2,529,449.32**	**2,661,982.09**

Sumber : BPS Kab. Halmahera Barat, 2024

Dari Tabel 2.14, nilai PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2023 telah mencapai 2,661 trilyun rupiah. Secara riil, nilai PDRB telah mengalami kenaikan sebesar 0.13 Milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang baru sebesar 2,529 trilyun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini tentunya dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya pengaruh inflasi. Terlihat bahwa pada tahun 2023 nilai output lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki nilai paling tinggi, yaitu Rp. 1.062 Milyar, dibandingkan kondisi pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.011 Milyar.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, nilai output lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih tetap yang terbesar dibandingkan lapangan usaha lainnya. Lapangan usaha lain yang juga memiliki nilai output cukup tinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai Rp. 530.14 milyar; serta Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai Rp.410.92 milyar. Beberapa Lapangan usaha dengan nilai output terkecil adalah Real Estate, yaitu sebesar Rp. 1,83 Milyar, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp. 2,98 Milyar, Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp. 2,90 Milyar, serta Jasa Perusahaan sebesar Rp. 4,38 Milyar.

Kontribusi dari sektor lapangan usaha Primer, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2023 mencapai 39,93 persen, dan lapangan usaha

Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,11 persen. Gabungan kedua lapangan usaha mengambil share sebesar 40,04 persen. Dengan demikian maka ekonomi Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2023 masih bertumpu pada lapangan usaha primer. Adapun kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan baru mencapai 4,18 persen. Perkembangan distribusi PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Barat menurut lapangan usaha tahun 2021-2023 selengkapnya disajikan dalam tabel 2.15 berikut.

Tabel 2.15
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2021-2023

No	Komponen PDRB Menurut Lapangan Usaha	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
		2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	40,6	39,93	39.93
2	Pertambangan dan Penggalian	0,11	0,11	0.11
3	Industri Pengolahan	4,12	4,08	4.18
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0.11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,19	0,19	0.19
6	Konstruksi	5,24	5,58	5.25
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,08	15,24	15.44
8	Transportasi dan Pergudangan	2,14	2,34	2.47
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,24	0,24	0.23
10	Informasi dan Komunikasi	2,85	2,85	2.8
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,91	2,97	2.95
12	Real Estate	0,07	0,07	0.07
13	Jasa Perusahaan	0,17	0,17	0.16
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	20,01	20,14	19.92
15	Jasa Pendidikan	3,12	3,04	3,12
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,62	2,54	2,64
17	Jasa Lainnya	0,44	0,43	0.43
	Produk Domestik Regional Bruto	**100**	**100**	**100,00**

Sumber : BPS Kab. Halmahera Barat, 2024

Dari sisi permintaan (pengeluaran), sampai dengan tahun 2023 struktur perekonomian Kabupaten Halmahera Barat belum mengalami perubahan. Dalam hal ini struktur perekonomian masih didominasi oleh komponen konsumsi, baik konsumsi rumah tangga ataupun konsumsi pemerintah, serta investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto. Kontribusi komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,14 basis poin dari tahun sebelumnya. Adapun Net ekspor barang dan jasa masih bernilai negatif. Ini mengindikasikan Kabupaten Halmahera Barat mengimpor barang dan jasa lebih banyak dari daerah lain, dibanding mengirimkan barang dan jasa ke luar daerah. Perkembangan nilai PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Barat menurut komponen pengeluaran tahun 2021-2023 disajikan dalam Tabel 2.16 berikut.

Tabel 2.16
PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)		
	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.523.542,16	1.623.527,74	1,760.10
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	99.149,40	111.675,95	122.7
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	624.242,26	684.244,32	737.3
Pembentukan Modal Tetap Bruto	241.239,83	366.912,04	274.7
Perubahan Inventori	-17.697,96	1.838,03	-1.5
Net Ekspor Barang dan Jasa	-117.781,78	-255.971,89	-231.3
Produk Domestik Regional Bruto	**2.352.693,91**	**2.532.226,19**	**2,662.00**

Sumber : BPS Kab. Halmahera Barat, 2024

Adapun gambaran perkembangan distribusi PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Barat menurut pengeluaran dalam kurun waktu tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel 2.17 berikut.

Tabel 2.17
Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2021-2023

PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Persen)		
	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	64,76	64,11	66,12
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,21	4,41	4,61
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	26,53	27,02	27,70
Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,25	14,49	10,32
Perubahan Inventori	-0,75	0,07	-0,06
Net Ekspor Barang dan Jasa	-5,01	-10,11	-8,69
Produk Domestik Regional Bruto	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS Kab. Halmahera Barat, 2022

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2023 mencapai Rp. 1,602 Trilyun, meningkat lebih dari 3,12% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi permintaan, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terus meningkat selama tiga tahun terakhir, sementara Net ekspor barang jasa dengan tren yang masih negatif. Gambaran selengkapnya dapat dilihat dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.18
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

No	Komponen PDRB Menurut Lapangan Usaha	PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
		2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	574.729,43	595.329,96	605.126,46
2	Pertambangan dan Penggalian	1.571,63	1.669,08	1.733,46
3	Industri Pengolahan	71.799,71	73.551,26	75.009,11
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.921,03	2.021,42	2.160,26
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.345,21	3.504,99	3.735,51
6	Konstruksi	79.385,56	85.468,47	80.959,41

7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	259.099,05	269.560,66	277.173,16
8	Transportasi dan Pergudangan	32.052,5	35.400,93	36.380,21
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.564,93	3.743,5	3.684,08
10	Informasi dan Komunikasi	57.188,4	60.315,75	60.884,17
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	42.896,41	43.399,7	44.530,92
12	Real Estate	1.213,97	1.221,33	1.251,52
13	Jasa Perusahaan	2.793,79	2.905,91	2.911,28
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	321.506,93	323.307,42	331.600,39
15	Jasa Pendidikan	50.096,11	51.298,57	52.118,93
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	41.885,16	42.574,22	44.100,44
17	Jasa Lainnya	7.027,41	7.284,48	7.379,42
	Produk Domestik Regional Bruto	**1.530.002,4**	**1.552.077,23**	**1.630.738,73**

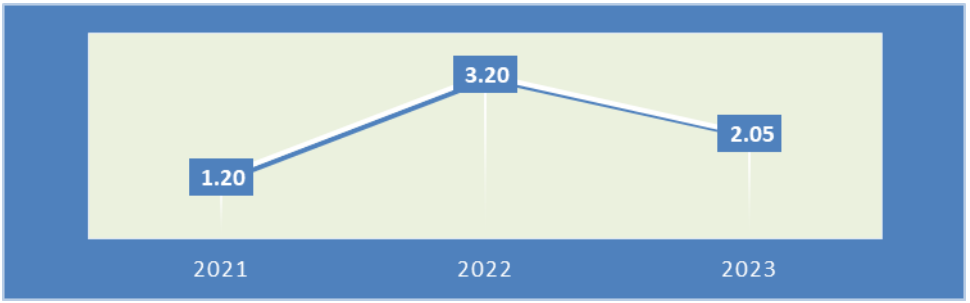
Sumber : BPS Kab. Halmahera Barat, 2024

Tabel 2.19
PDRB ADHK Menurut Pengeluaran
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 20201-2023

PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	**PDRB ADHK Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)**		
	2021	**2022**	**2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.023.974,45	1.064.479,12	1,102.50
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	65.487,93	71.370,67	75.690,97
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	411.980,89	440.912,57	463.366,84
Pembentukan Modal Tetap Bruto	152.124,32	222.042,22	156.297,07
Perubahan Inventori	-6.995,77	1.079,89	- 217,82
Net Ekspor Barang dan Jasa	-94.494,60	-197.326,82	- 166.905,94
Produk Domestik Regional Bruto	**1.552.077,23**	**1.602.557,65**	**1.630.738,73**

Sumber : BPS Kab. Halmahera Barat, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 2.18 dan 2.19, dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Barat dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Barat tercatat sebesar 2.05 persen, dibanding tahun sebelumnya sebesar 3.20 persen mengalami menurun sebesar 0.56 persen sebagai dampak penurunan sector pertanian, penyedia Akomudasi dan Makan Minum menurun informasi dan komunikasi perdagangan dan penggalian Transportasi dan Pergadangan. Tren laju pertumbuhan ekonomi tersaji pada grafik berikut.



Gambar 2.8. Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023
Sumber : BPS Kab. Halmahera Barat, 2024

Dari sisi produksi, pada tahun 2023 terdapat beberapa lapangan usaha yang laju pertumbuhannya sudah mulai membaik yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dari 4,78 persen pada Tahun 2022 naik menjadi 6,58 pada Tahun 2023. Penurunan terbesar terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10.45 persen pada tahun 2022 menjadi 2.84 persen pada tahun 2023, kemudian jasa konstruksi yakni sebesar 7.60 persen pada tahun 2022 menjadi -5,28 persen pada tahun 2023 disusul jasa pertambangan dan penggalian sebesar 6.30 persen pada tahun 2022 menjadi 3.86 persen pada tahun 2023 dan jasa perusahaan sebesar Untyuk sector pertanianpun mengakami poenurunan dari 3.58 persen pada tahun 2022 menjadi 2.41c persen pada tahun 2023. Sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1.8 basis poin dari 4.78 persen pada tahun 2022 menjadi 6,58 persen pada tahun 2023,. Tren pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 2.20 berikut.

Tabel 2.20
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2021-2023

No	Komponen PDRB Menurut Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
		2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,28	3,58	2,41
2	Pertambangan dan Penggalian	3,54	6,2	3,86
3	Industri Pengolahan	-8,56	2,44	1,98
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,73	5,23	5,87
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,22	4,78	6,58
6	Konstruksi	4,1	7,66	-5,28
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,03	4,04	2,82
8	Transportasi dan Pergudangan	3,23	10,45	2,84
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,82	5,01	0,76
10	Informasi dan Komunikasi	8,43	5,47	0,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,93	1,17	2,61
12	Real Estate	3,7	0,61	2,47
13	Jasa Perusahaan	4,1	4,01	0,18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,13	0,56	2,57
15	Jasa Pendidikan	0,88	2,4	1,60
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,94	1,65	3,58
17	Jasa Lainnya	4,48	3,66	1,30
	Produk Domestik Regional Bruto	**1.20**	**3,20**	**2,05**

Sumber : BPS Kab. Halmahera Barat, 2024

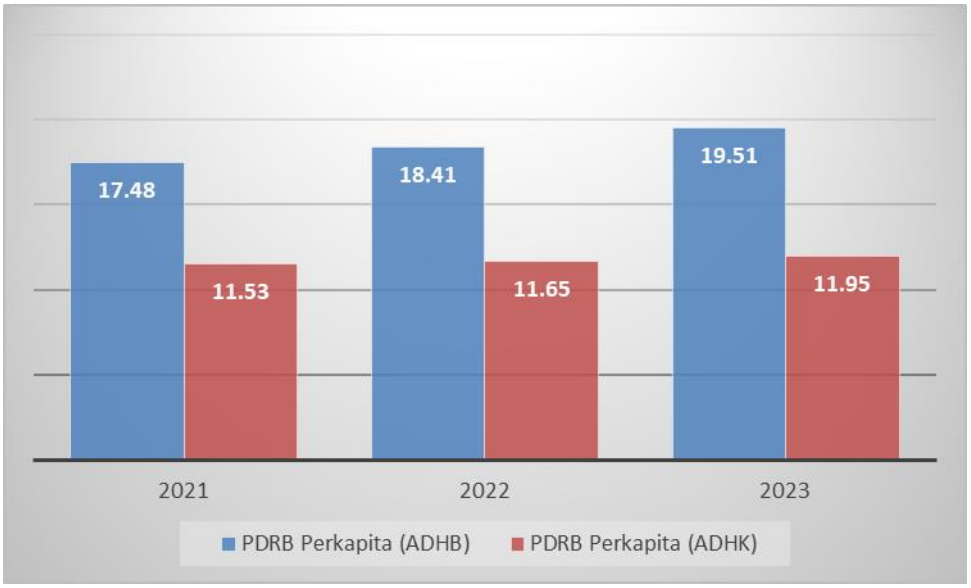
Tabel 2.21
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2021-2023

PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (persen)		
	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah	4.73	3.96	3.57

Tangga			
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3.09	8.98	6.05
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-11.60	7.02	5.09
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-6.66	45.96	-29.61
Perubahan Inventori	-0,78	0,06	-0,06
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto	**1,20**	**3,20**	**2,05**

Sumber : BPS Kab. Halmahera Barat, 2024

Secara nominal, pendapatan perkapita Kabupaten Halmahera Barat mengalami peningkatan pada tahun 2022. Pada tahun 2020 PDRB per kapita ADHB Kabupaten Halmahera Barat telah mencapai Rp. 17,28 juta per kapita per tahun, setelah sempat mengalami penurunan pada masa pandemic Covid-19 pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 17,48 juta perkapita pertahun, dan kemudian kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 18,41 juta rupiah perkapita.



Gambar 2.9. Perkembangan Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah) Kab. Halmahera Barat 2021-2023
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara, 2024

2.1.3.2 Laju Inflasi

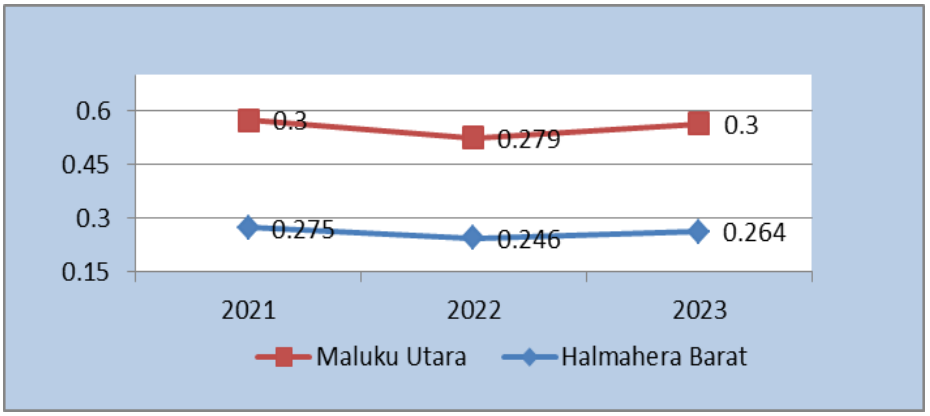
Inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli masyarakat yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara. Inflasi juga bisa merupakan suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (absolut) yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu cukup lama. Seirama dengan kenaikan harga-harga tersebut, nilai uang turun secara tajam pula.

Inflasi Maluku Utara yang direpresentasikan oleh inflasi Kota Ternate pada triwulan II 3,14 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2024 sebesar 103,66 naik 0,77 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Secara akumulasi sampai dengan april 2024, tercatat bahwa Provinsi Maluku Utara mengalami inflasi sebesar 2.93% (ytd), Inflasi sepanjang triwulan berjalan diprakirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan II 2024 sebagai dampak dari meningkatnya mobilitas masyarakat. Kemudian, risiko geopolitik juga berpengaruh terhadap kenaikan harga minyak dunia dan kebutuhan pangan global yang dapat meningkatkan harga kebutuhan pangan di Maluku Utara.

2.1.3.3 Indeks Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Indeks Gini Kabupaten Halmahera Barat 3 (Tiga) Tahun terakhir dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara disajikan pada tabel berikut:



Gambar 2.10. Indeks Gini Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2023
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara 2024), Diolah

Dari grafik, Indeks Gini Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya akan tetapi masih lebih kecil dari Indeks Gini Provinsi Maluku Utara yang pada Tahun 2023 bernilai 0,30. Peningkatan dan penurunan Gini Ratio karena perilaku dari masyarakat 40 persen lapisan ke bawah, 40 persen lapisan menengah, dan 20 persen lapisan atas itu berbeda-beda,"

Secara keseluruhan Indeks Gini Provinsi Maluku Utara maupun Kabupaten Halmahera Barat masih berada pada rentang ketimpangan rendah (<0,4).

2.1.3.4 Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan adalah Prosentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara/daerah. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untukmemenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Adapun indikator kemiskinan terdiri dari : ***Pertama***,*Head Count Index* (HCI = P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK); ***Kedua***, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index = P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan; ***Ketiga***, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index = P2) yang memberikan gambaran mengenai

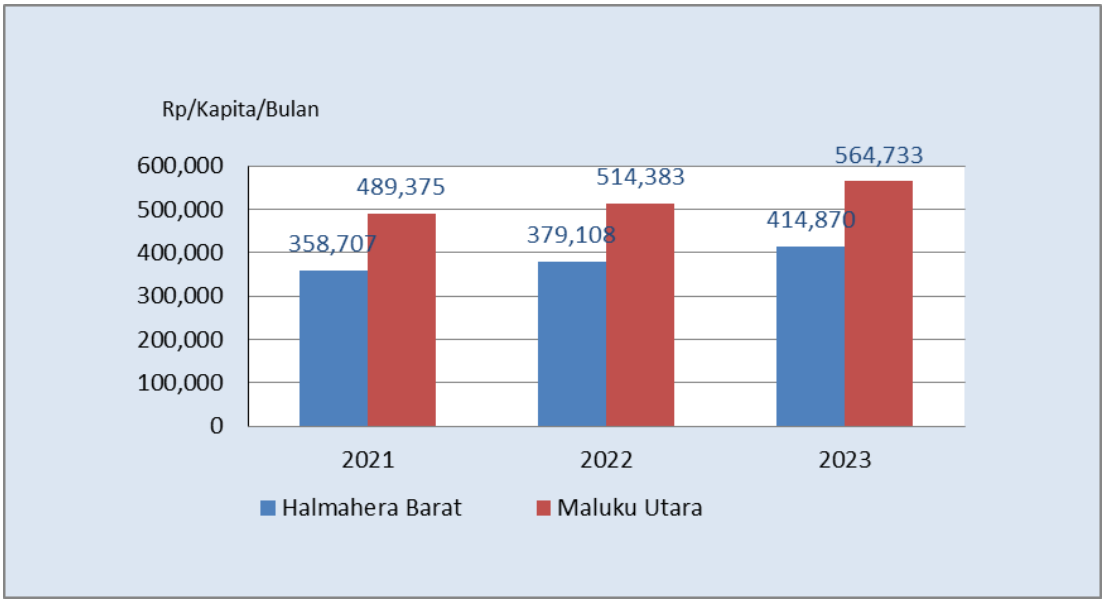
penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Kemiskinan juga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kerja.

1) Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh pengaruh inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga komoditi pembentuk garis kemiskinan yang meliputi komoditi makanan dan komoditi non makanan.

Garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp. 414,870 perkapita/bulan atau tumbuh sebesar 8,74 persen dari tahun 2022 yang sebesar 379,108 Rp perkapita/bulan. Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Maluku Utara, garis kemiskinan Halmahera Barat selalu lebih rendah.

Tren garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat dalam tiga tahun terakhir dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji dalam gambar berikut;



Gambar 2.11 Tren Garis Kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2023
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara 2024), Diolah

Tabel 2. 22
Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara
Tahun 2021-2023

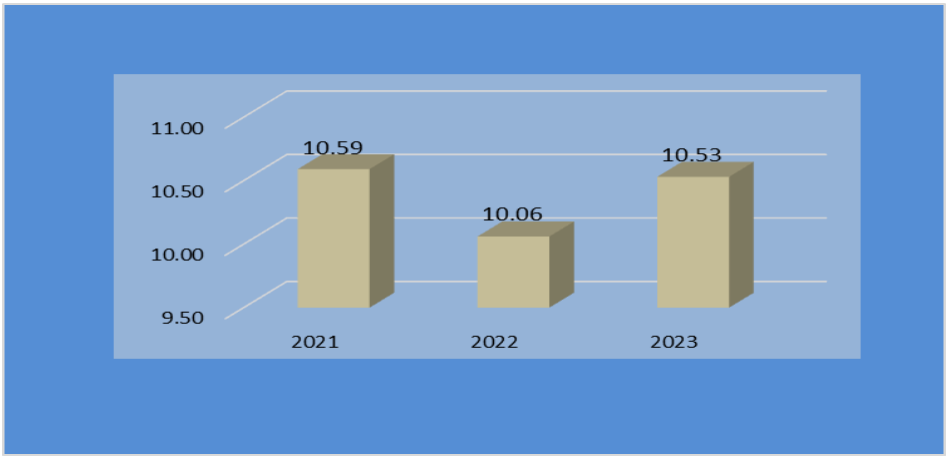
Wilayah	Garis Kemiskinan Kab/Kota Prov. Maluku Utara (Rupaih/Kapita/Bulan)					
	2021	Rank	2022	Rank	2023	Rank
Halmahera Barat	358 707,00	4	379 108,00	4	414 870,00	4
Halmahera Tengah	491 657,00	8	507 555,00	8	552 350,00	6
Kepulauan Sula	391 912,00	5	414 512,00	5	453 476,00	5
Halmahera Selatan	343 323,00	3	362 100,00	3	400 768,00	3
Halmahera Utara	263 507,00	1	301 041,00	1	378 968,00	2
Halmahera Timur	600 339,00	9	624 983,00	9	631 233,00	9
Pulau Morotai	291 879,00	2	301 712,00	2	379 931,00	1
Pulau Taliabu	425 241,00	6	448 735,00	6	491 203,00	8
Ternate	629 463,00	10	661 459,00	10	668 074,00	10

Wilayah	Garis Kemiskinan Kab/Kota Prov. Maluku Utara (Rupaih/Kapita/Bulan)					
	2021	Rank	2022	Rank	2023	Rank
Tidore Kepulauan	472 651,00	7	484 983,00	7	540 752,00	7
Maluku Utara	489 375,00		514 383,00		564 733,00	

(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara 2024), Diolah

2) Persentase Penduduk Miskin (P0)

Dari sisi jumlah, selama lima tahun terakhir, penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat cenderung mengalami fluktuatif. Jika pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 10,59 ribu jiwa, mengalami penurunan menjadi 10,06 ribu jiwa di tahun 2022. Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat kembali naik menjadi 10,53 ribu jiwa. Grafik pada gambar berikut memberikan ilustrasi tren perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat dalam kurun tahun 2021-2023.



Gambar 2.12. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

(*Sumber: Halmahera Barat DalamAngka, 2024), Diolah*

Jumlah penduduk miskin sebagaimana tersaji dalam grafik tentunya sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Dalam hal ini penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin sebagaimana tersaji dalam grafik tentunya

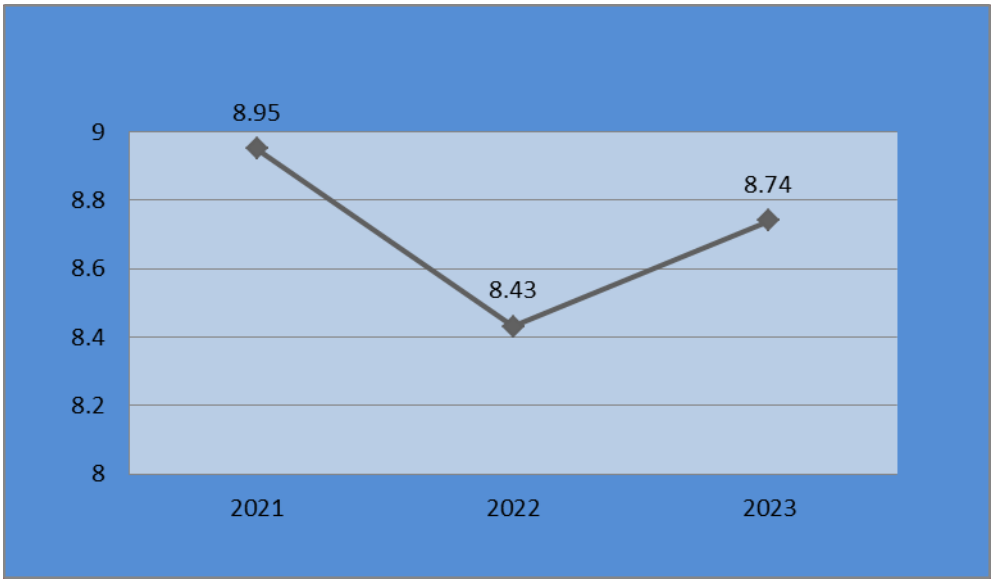
sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Dalam hal ini penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (Garis Kemiskinan Makanan – GKM) ditambah kebutuhan minimum non makanan (Garis Kemiskinan Non Makanan – GKNM). Dalam hal Garis Kemiskinan Makanan (GKM), paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 36 jenis komoditi (perumahan, listrik, minyak tanah, dll). Bagaimanapun, jumlah penduduk miskin tentunya juga berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Oleh karena itu profil lengkap kemiskinan di Kabupaten Halmahera Barat dapat dijelaskan melalui angka persentase penduduk miskin.

Persentase penduduk miskin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah penduduk yang ada pada suatu wilayah. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2022 sebesar 8,43 persen atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 8,95 persen. Penurunan persentase kemiskinan pada tahun 2022 pemulihan ekonomi pasca pandemic COVID – 19. Pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 8,74 persen.

Perkembangan tingkat miskin di Kabupaten Halmahera Barat terlihat sebagaimana gambar sebagai berikut :



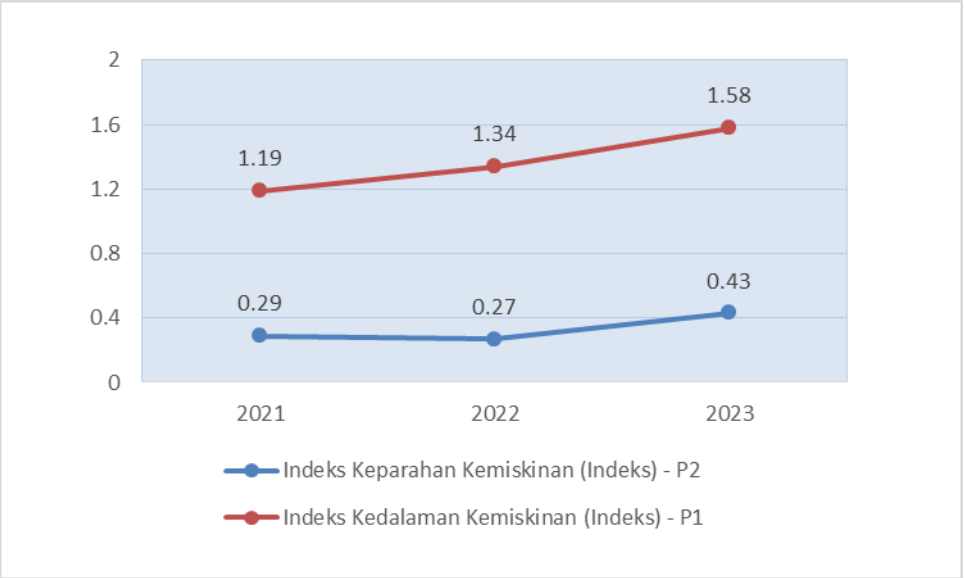
Gambar 2.13. Tingkat Miskin Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara ,2024

3) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

lndeks kedalaman kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan indeks sebesar 0,24 poin meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 0.15 poin. Hal ini dapat dimaknai bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat semakin menjauhi garis kemiskinan. Dengan kata lain, terdapat penurunan secara rata-rata pada standar hidup penduduk miskin.

4) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan variasi pengeluaran antar rumah tangga penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Halmahera Barat mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2023 yaitu sebesar 0,16 poin. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaten Halmahera Barat mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Gambar 2.14. Indeks Keparahan Kemiskinan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023
Sumber : BPS Prov. Maluku Utara, 2024

2.1.3.5 Indeks Pembangunan Manusia

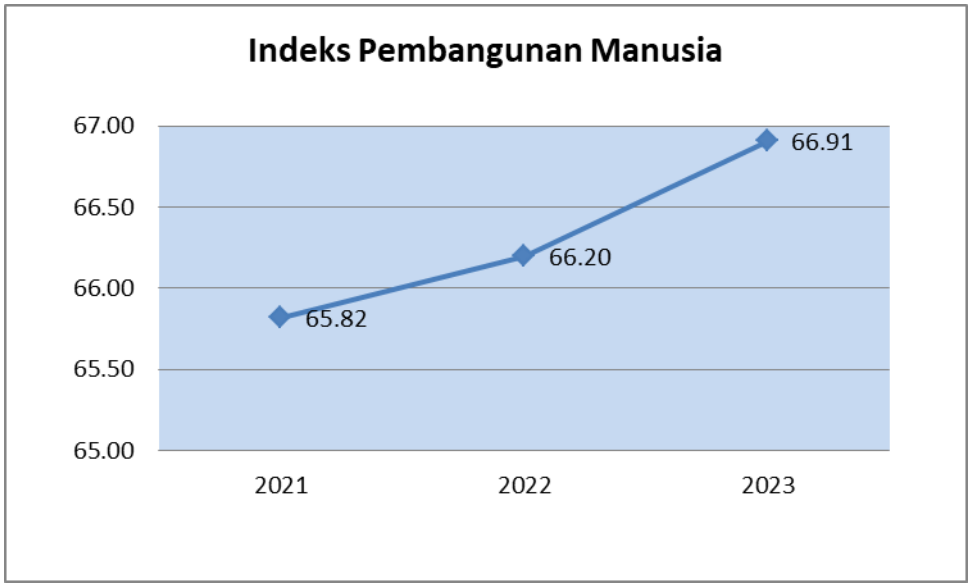
Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator komposit terkait dengan kesejahteraan manusia.

Pencapaian dalam pembangunan manusia di suatu wilayah dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Kelompok tersebut adalah 1) kelompok IPM rendah dengan nilai pembangunan manusia dibawah 60 ; 2) Kelompok IPM sedang dengan nilai IPM diantara 60 hingga 70; 3) kelompok IPM tinggi dengan IPM diantara 70 hingga 80 ; dan 4) kelompok IPM sangat tinggi dengan nilai IPM di atas 80.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yang meliputi dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan).

IPM Kabupaten Halmahera Barat dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 65,82 pada tahun 2021 menjadi 66,20 pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 menjadi 66,91 atau meningkat sebesar 0,71 poin dati tahun sebelumnya. Dengan demikian IPM

Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2023 masih berada pada kategori Sedang (60=IPM<70). Sebagaimana diilustrasikan pada grafik berikut :



Gambar 2.15. Indeks Pembangunan Manusia Kab. Halmahera Barat Tahun 2021-2023
(Sumber : BPS provinsi Maluku Utara, 2024)

Tabel 2.23
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara
Tahun 2021 – 2023

Kab/Kota	Indeks Pembangunan Manusia					
	2021	Rank	2022	Rank	2023	Rank
Halmahera Barat	65,56	6	66,20	6	66.91	6
Halmahera Tengah	65,82	5	66,49	5	67,48	5
Kepulauan Sula	63,80	8	64,70	8	65,29	8
Halmahera Selatan	64,19	7	65,06	7	65,83	7
Halmahera Utara	67,82	3	68,38	3	69,05	3
Halmahera	67,00	4	67,93	4	68,82	4

Timur						
Pulau Morotai	62,90	9	63,80	9	64,73	9
Pulau Taliabu	60,73	10	61,64	10	62,31	10
Ternate	80,14	1	80,81	1	81,35	1
Tidore Kepulauan	70,99	2	71,55	2	72,40	2
Maluku Utara	**68,76**		**69,47**		**70,21**	

Sumber (BPS Provinsi Maluku Utara, Tahun 2024),(Diolah)

Halmahera Barat menduduki perinkat ke 6 dari 10 Kabupaten Kota dengan IPM66,91 berada di atas Halmahera Tengah dan di bawah Provinsi Maluku Utara.

2.1.3.6 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Halmahera Barat Pada Tahun 2023 AMH sdh mencapai 98,53 Persen. ini menunjukan bahwa sistem pendidikan dasar sdh berjalan dengan baik f dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari berjalan maksimal.

Tabel 2.24
Angka Melek Huruf Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023.

No	Tahun	Angka Melek Huruf
1	2021	98,57
2	2022	98,66
3	2023	98,53

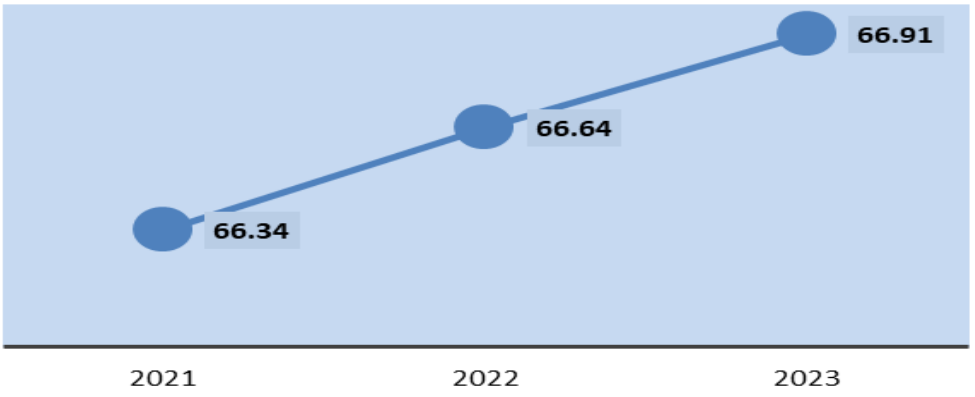
Sumber Data : Halmahera Barat Dalam Angka, 2024

2.1.3.7 Usia Harapan Hidup

1. Usia Harapan Hidup (Tahun)

Usia Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Angka Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu negara.

Target Indeks Kesehatan Daerah (IKD) pada tahun 2023 adalah 73,46 sedangkan realisasi capaian Indeks Kesehatan adalah sebesar 72,17 dengan persentase capaian mencapai 98,03 persen. Meskipun IKD belum mencapai target namun realisasi capaian dari tahun 2019 terus menunjukan peningkatan sejalan dengan peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.16. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023
Sumber : BPS Kab. Halmahera Barat, 2024

Tabel 2.25
Usia Harapan Hidup (Tahun) 10 Kabupaten/Kota Provinsi Malauku Utara

Wilayah	Angka Harapan Hidup (Tahun)		
	2021	2022	2023
Halmahera Barat	66,34	66,64	66,91
Halmahera Tengah	64,15	64,61	65,06
Kepulauan Sula	63,39	63,68	63,94
Halmahera Selatan	65,93	66,22	66,50

Halmahera Utara	69,61	69,88	70,11
Halmahera Timur	69,08	69,50	69,90
Pulau Morotai	67,35	67,74	68,10
Pulau Taliabu	62,22	62,53	62,79
Ternate	71,06	71,38	71,70
Tidore Kepulauan	69,43	69,75	70,10
Maluku Utara	68,45	68,79	69,11

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 20224 (Diolah)

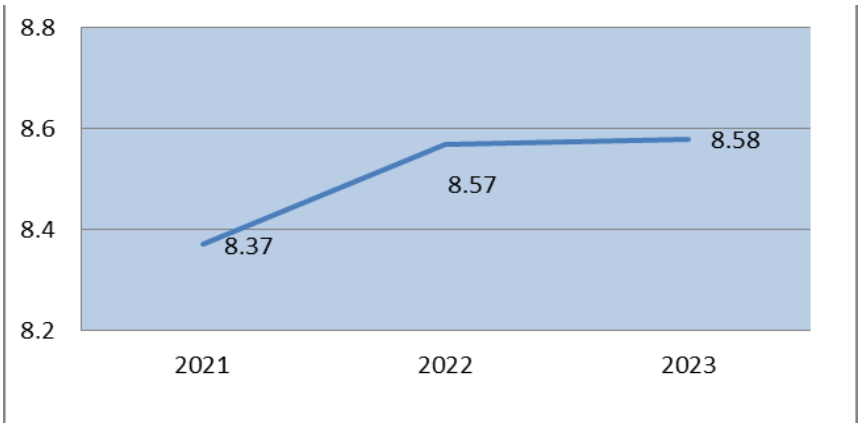
Dari 10 Kabupaten/Kota angka usia harapan hidup Halmahera Barat berada pada 66,91 Tahun masih rendah dari Kabupaten/Kota terdekat yaitu Halmahera Utara yg berada pada anggka 70,11 Tahun, Ternate pada Angka 71,71 Tahun. Sementara Provinsi Maluku Utara berada pada Angka 69,11 Tahun. Ini berarti umur rata – rata orang Halmahera Barat hanya mencapai 66 Tahun.

2. Rata – Rata Lama Sekolah

Mengukur kualitas penduduk suatu daerah dapat dilakukan dengan mengetahui tingkat kemampuan dalam setiap individu dalam mengakses ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir. Oleh karena itu, landasan dasar suatu masyarakat untuk dapat mengakses pengetahuan dimaksud dapat dilakukan antara lain dengan mengukur capaian bidang pendidikan yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu.

Seiring dengan program wajib belajar 12 tahun sejak tahun 2015 maka idealnya RLS minimal adalah 12 tahun. Angka RLS Kabupaten Halmahera Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya sejak tahun 2018 sehingga mencapai angka tertingginya 8,58 tahun di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia > 25 tahun di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2019 hingga 2023 telah menempuh pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II). Tren kenaikan ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas dan daya saing sumber daya manusia Halmahera Barat yang lebih baik.

Capaian kinerja bidang pendidikan yang dapat dicapai di Kabupaten Halmahera Barat dapat diukur dari Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Pada tahun 2021 sampai 2023 menunjukan kenaikan Rata-Rata Lama Sekolah dari 8.37 tahun menjadi 8,58 tahun.



Gambar 2.17. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023
(Sumber : BPS Kab. Halmahera Barat, 2024)

Tabel 2.26
Rata – Rata Lama Sekolah (Tahun) 10 kabupaten/ Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 - 2023

Wilayah	Rata – Rata Lama Sekolah (Tahun)		
	2020	**2021**	**2023**
Halmahera Barat	8,37	8,57	8.58
Halmahera Tengah	9,01	9,02	9,19
Kepulauan Sula	9,00	9,02	9,04
Halmahera Selatan	8,10	8,16	8,17
Halmahera Utara	8,62	8,63	8,65
Halmahera Timur	8,27	8,52	8,66
Pulau Morotai	7,40	7,42	7,55
Pulau Taliabu	7,67	7,94	7,97
Ternate	11,81	12,06	12,07
Tidore Kepulauan	9,95	9,96	9,97
Maluku Utara	**9,09**	**9,24**	9,26

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022 (Diolah)

Dari Tabel diatas terlihat rata – rata lama sekolah di Kabupaten Halmahera Barat masih jauh di bawa provinsi Maluku Utara yaitu 9,28 Tahun sedangkan Rata – rata lama Sekolah tertinggi masi di pegang kota Ternate yaitu 12,07 Tahun. Ini masih mencerminkan bahwa kesadaran pentingnya pendidikan masi rendah di Kabupaten Halmahera Barat walaupun secara signifikan terjadi kenaikan dari Tahun Sebelumnya**.**

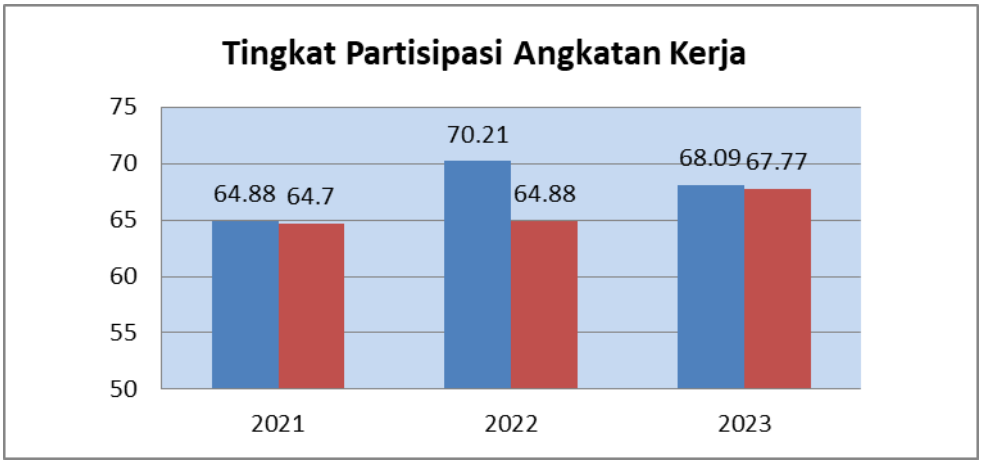
2.1.3.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tinggi adalah sangat baik untuk pembangunan suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi TPAK, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena semakin banyak pasokan tenaga kerja (labour supply) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

TPAK menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah atau negara. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Halmahera Barat cenderung fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. TPAK pada Agustus 2021 tercatat sebesar 64,88 persen, meningkat menjadi 70,21 persen pada tahun 20201yaitu sebesar 5.33 poin. Meningkatnya TPAK memberikan indikasi adanya peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Halmahera Barat diperkirakan sebanyak 104.202 orang meningkat 15,722 orang dibandingkan Agustus 2023 yang berjumlah 88.48 orang. Dari jumlah tersebut, 70,949 persen merupakan angkatan kerja, sedangkan 33,253 persen bukan merupakan angkatan kerja (Sekolah, Mengurus Rumah Tangga, dan aktiftas Lainnya). Berdasarkan definisinya, penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Pada tahun 2023, TPAK Kabupaten Halmahera Barat lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Maluku Utara yaitu 64,70 Persen, Gambaran perkembangan TPAK Kabupaten Halmahera Barat dibandingkan dengan rata-rata pata tingkatan Provinsi Maluku Utara pada sepanjang periode 2020-2022 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.18. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara2021-2023
(Sumber : BPS, Provinsi Maluku Utara, Agustus 2023)

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

. Perkembangan penduduk usia kerja di Kabupaten Halmahera Barat pada periode 2021-2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut

Tabel 2.27
Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023.

Uraian	2021	2022	2023
Penduduk Usia Kerja (15+)	79,708	88.48	104.202
Angkatan Kerja	**56.74**	**62.121**	**70.949**
- Bekerja	54.63	58.49	68.277
- Pengangguran	1.841	2.141	2.62
Bukan Angkatan Kerja	**22.968**	**26.355**	**33.253**
- Sekolah	5.078	5.570	7.79
- Mengurus Rumah Tangga	15.890	16.56	19.72
- Lainnya	3.000	4.221	5.74

Sumber; BPS Halmahera Barat dalam Angka Tahun 2024

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

A. Layanan Urusan Wajib Dasar

1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Angka Partisipasi Sekolah (APS), dapat dilakukan dengan mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah muridtidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya angka partisipasi sekolah. Keberhasilan kinerja APS juga dapat dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah, sehingga angka partisipasi sekolah seyogyanya terus menerus meningkat dari waktu ke waktu.

Untuk melihat komposisi pendidikan di Kabupaten Halmahera Barat maka dapat digunakan indikator Angka Partisipasi. Indikator yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai banyaknya penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Semakin tinggi APS menunjukan bahwa semakin banyak anak yang bersekolah di suatu

daerah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan pada suatu wilayah. APS didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Nilai ideal APS adalah 100 persen dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 persen, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah. Pada tahun 2023, APS penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Halmahera Barat mencapai 99,26 persen, APS Penduduk Usia 7 – 12 mengalami tend fluktuatif. Sedangkan APS penduduk usia 13-15 tahun pada tahun 2023 sebesar 99,38 persen dan meningkat beberapa tahun terakhir. Secara keseluruhan, baik APS usia 7-12 tahun yang merepresentasikan jenjang SD maupun APS usia 13-15 tahun yang merepresentasikan jenjang SMP, menunjukkan tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Kebudayaan meliputi sub urusan: 1) Kebudayaan (Pengelolaan kebudayaan; Pelestarian tradisi; Pembinaan lembaga adat); 2) Kesenian Tradisional (Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota); 3) Sejarah (Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota); 4) Cagar Budaya (Penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota; Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah); dan 5) Pengelolaan museum kabupaten/kota.

Halmahera Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang

memiliki keragaman suku dan budaya. Penduduk Halmahera Barat terdiri dari masyarakat Kesultanan Jailolo, Suku Sahu, Ternate, Wayoli, Gorap, Loloda, Gamkonora, dan Tabaru. Setiap suku di Halmahera Barat memiliki keunikan dan nilai-nilai kearifan budaya yang masih dipegang teguh oleh masyarakatnya. Namun nilai-nilai luhur dalam budaya Halmahera Barat ini masih belum diidentifikasi dan dikelola secara optimal untuk menambah referensi bagi peningkatan khasanah kebudayaan dan penguatan pendidikan karakter masyarakat.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

APK (Angka Partisipasi Kasar) mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK juga bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

APK Sekolah Dasar (SD) didefinisikan sebagai persentase jumlah murid Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. APK pada jenjang SD di Kabupaten Halmahera Barat memperlihatkan tren yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Jika pada tahun 2019 APK pada jenjang SD sebesar 105,89 persen, menurun sehingga menjadi 100,59 persen pada tahun 2020, lalu kemudian meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 108,87 persen dan kemudian menurun lagi pada tahun 2022 menjadi 108,05 dan kemudian meningkat kembali menjadi 111,42 pensen pada tahun 2023. Meskipun mengalami fluktuatif namun dalam lima tahun terakhir APK masih berada di atas 100 persen. Ini mengindikasikan masih ada anak di Kabupaten Halmahera Barat yang bersekolah pada jenjang SD di luar batasan usia terbaiknya untuk bersekolah di jenjang SD, yaitu 7 sampai dengan 12 tahun.

Sementara APK pada jenjang SMP pada tahun 2022 sebesar 88,35 persen atau mengalami penurunan pada tahun 2023 yaitu 85,60. Kondisi ini juga mengindikasikan masih ada anak di Kabupaten Halmahera Barat yang belum berkesempatan bersekolah pada jenjang SMP diluar batasan usia terbaik di jenjang SMP, yaitu 13 sampai dengan 15 tahun.

Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK, dikarenakan APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. APM jenjang SD di Kabupaten Halmahera Barat menunjukkan tren yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. APM jenjang SD tiga tahun terakhir pengalami peningkatan yaitu pada tahun 2021 sebesar 97,20 persen, meningkat menjadi 97,27 persen pada tahun 2022 dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 97,63 persen. Sedangkan untuk APM Jenjang SMP mengalami mengalami tren fluktuatif. Gambaran perkembangan APS, APK dan APM pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Barat dalam kurun tahun tiga tahun terakhir. selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 2.28
Perkembangan Angka Partisipati Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 - 2023

Uraian	Persentase		
	2021	2022	2023
Angka Partisipasi Sekolah (APS)*			
7-12 Tahun	99,13	99.12	99,26
13-15 Tahun	98,73	99,20	99,38
Angka Partisipasi Kasar (APK)**			
SD	108,07	108,05	111,42
SMP	87,99	88,35	85,60
Angka Partisipasi Murni (APM)**			
SD	97,20	97,27	97,63
SMP	77,03	77,41	76,91

*Sumber: *) Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat; **) BPS Halmahera Barat, 2024*

c. Rasio Ketersediaan Sekolah/Murid Usia Sekolah.

Persentase ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Ketersediaan jumlah sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah yaitu kapasitas daya tampung semua sekolah dasar pada suatu daerah yang ada, berbanding dengan jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Data dan informasi tentang jumlah ketersediaan sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah dalam masa 3 (tiga) tahun terakhir di Kabupaten Halmahera Barat, dapat dilihat sebagaimana data dan informasi yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.29
Rasio Jumlah Guru /Jumlah Sekolah dan Siswa
Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2021 – 2023

Uraian	2021	2022	2023
SD			
Jumlah Sekolah	175	175	179
Jumlah Siswa	13.307	13.307	13.462
Jumlah Guru	1.227	1.227	1.320

Uraian	2021	2022	2023
Rasio Guru/Satuan Pendidikan	7	7	7
Rasio Guru/Siswa	11	11	11
SMP			
Jumlah Sekolah	65	65	64
Jumlah Siswa	5.988	5.988	5.678
Jumlah Guru	636	636	652
Rasio Guru/Satuan Pendidikan	10	10	10
Rasio Guru/Siswa	9	9	9
SMU			
Jumlah Sekolah	19	19	19
Jumlah Siswa	5.785	4.133	
Jumlah Guru	315	339	
Rasio Guru/Satuan Pendidikan	17	18	
Rasio Guru/Siswa	54	82	

Sumber data : BPS Kab. Halmahera Barat dan Dinas Pendidikan (diolah BP3D Tahun 2024

d. Pendidikan Anak Usia Dini & Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Sampai dengan tahun 2023, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Halmahera Barat baru mencapai 28,93 persen, atau menurun dibandingka APK tahun sebelumnya yang sebesar 31,35 persen. Tabel berikut menyajikan kondisi perkembangan APK PAUD di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2019-2023 yang dilengkapi data jumlah peserta didik PAUD berdasarkan jenis PAUD.

Tabel 2.30
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2021-2023

Uraian		2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Usia 3-6 Tahun (BPS)		11.094	11.094	10.202
Siswa PAUD Formal	TK/TKLB	2.703	2.647	2.674
	RA	181	172	196
Siswa PAUD Non Formal	KB	473	499	499
	SPS	121	133	133
Jumlah Siswa PAUD	Kemendikbud + Kemenag	3.478	3.209	3.478
APK PAUD	**Kemendikbud + Kemenag**	31,35%	28,93%	34,09%

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat (2024)

Program PAUD merupakan salah satu program prioritas nasional, mengingat sebagian desar masyarakat, terutama di perdesaan masih menganggap bahwa pendidikan usia dini kurang begitu penting dibanding masuk sekolah dasar. Sampai dengan tahun 2023, sudah tersedia 162 satuan pendidikan anak usia dini dalam bentuk layanan, antara lain: Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), serta Raudatul Athfal (RA) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Tabel dibawah menyajikan jumlah sebaran PAUD berdasarkan bentuk layanan termasuk RA menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2023.

Tabel 2.31
Jumlah PAUD dan RA Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2023

No	Kecamatan	TK	KB	SPS	RA*	Total
1	Jailolo	27	8	2	1	38
2	Jailolo Selatan	17	1	1	4	23
3	Jailolo Timur	2	1	-	-	3
4	Sahu	13	1	-	1	15
5	Sahu Timur	15	3	-	-	18
6	Ibu	13	2	-	-	15

7	Ibu Selatan	15	4	-	-	19
8	Tabaru	10	2	-	-	12
9	Loloda	17	1	1	-	19
Halmahera Barat		**129**	**23**	**4**	**6**	**162**

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat (2023)

e. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan atau akses bagi warga masyarakat khususnya para pemuda yang putus sekolah dan putus lanjut di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Pendidikan nonformal sendiri menurun UU dan Peraturan Pemerintah RI tentang pendidikan menyatakan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dilaksanakan terstruktur dan berjenjang. Pendidikan kesetaraan ini dapat berbentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yaitu sebuah lembaga pendidikan yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat serta diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat agar mampu membangun dirinya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

PKBM berperan sebagai tempat pembelajaran masyarakat terhadap berbagai pengetahuan atau keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana dan potensi yang ada di sekitar lingkungannya, agar masyarakat memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup. Pendidikan kesetaraan ini juga dilaksanakan dan dijalankan dengan standar kompetensi dan kelulusan yang sama dengan pendidikan formal. Sampai dengan tahun 2023 terdapat 11 layanan PKBM di Kabupaten Halmahera Barat. Sebaran PKBM dan jumlah siswanya di Kabupaten Halmahera Barat menurut kecamatan pada tahun 2021-2023, sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut :

Tabel 2.32
Sebaran PKBM Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2021-2023

No	Kecamatan	2021		2022		2023	
		Jml PKBM	Jml Siswa	Jml PKBM	Jml Siswa	Jml PKBM	Jml Siswa
1	Jailolo	5	87	5	87	4	145
2	Jailolo Selatan	1	10	1	10	1	122
3	Jailolo Timur	0	0	0	0	0	
4	Sahu	1	20	1	20	1	31
5	Sahu Timur	3	131	3	131	2	92
6	Ibu	1	0	1	0	1	0
7	Ibu Selatan	1	21	1	21	1	28
8	Tabaru	1	0	1	0	0	0
9	Loloda	1	30	1	30	1	37
Halmahera Barat		**14**	**299**		**14**	**11**	**445**

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat (2024)

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Adapun keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa capaian kinerja selama beberapa periode. Adapun capaian ini untuk Kabupaten Halmahera Barat sampai pada Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Angka Kematian Ibu

Salah satu agenda utama SDGs adalah menurunkan angka kematian ibu dan kematian Balita. Pemeriksaan antenatal yang berkualitas dan teratur selama kehamilan akan menentukan status kesehatan ibu hamil dan bayi yang dilahirkan.

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *maternal mortality ratio*

didefinisikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Berdasarkan data Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, AKI di Kabupaten Halmahera Barat pernah mengalami penurunan yang signifikan dalam kurun tahun 2021-2023. Angka Kematian Ibu (AKI) atau *maternal mortality ratio* didefinisikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Berdasarkan data Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, AKI di Kabupaten Halmahera Barat pernah mengalami fluktuatif kurun tahun 2021-2023, dari 146 per 100.000 KH menjadi 222 per 100.000 KH pada Tahun 2023. Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya jauh diatas Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030 sebesar 70 per 100.000 KH. Kondisi jumlah kelahiran hidup dan kasus kematian ibu serta AKI di Kabupaten Halmahera Barat dalam 3 (tiga) tahun terakhir menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.

Tabel 2.33
Angka Kematian Ibu Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2021-2023

Kecamatan	2021			2022			2023		
	LH	KI	AKI	LH	KI	AKI	LH	KI	AKI
Jailolo	576	0	0	562	0	0	544	1	184
Jailolo Selatan	304	1	328	254	2	787	306	0	0
Jailolo Timur	71	0	0	43	0	0	147	0	0
Sahu	174	0	0	162	0	0	155	0	0
Sahu Timur	142	0	0	129	0	0	161	0	0
Ibu	222	2	900	204	0	0	226	1	442
Ibu Selatan	205	0	0	223	0	0	157	0	0
Tabaru	193	0	0	146	0	0	92	2	2174
Loloda	162	0	0	164	0	0	16	0	0
Halmahera Barat	**2.049**	**3**	**146**	**1.887**	**2**	**106**	**1.804**	**4**	**222**

Keterangan: LH (Lahir Hidup); KI (Jumlah Kasus Kematian Ibu); AKI (per 100.000 Kelahiran Hidup)
Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, 2024

b. Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal (*Neonatal Mortality Rate*) adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup (KH) pada satu tahun tertentu. Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal ini menggambarkan banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, Angka Kematian Neonatal (AKN) dalam empat tahun terakhir masih memperlihatkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021 AKN di Halmahera Barat mencapai 14 dan 12 per 1.000 KH dan dan meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 13 per 1.000 KH kemudian menurun kembali pada menjadi sebesar 7 per 1.000 KH pada Tahun 2023.Secara keseluruhan, kondisi AKN pada tahun 2023 telah mencapai target TPB 2030 menetapkan untuk menekan AKN sehingga di bawah 12 per 1.000 kelahiran Hidup. Tabel berikut menyajikan kondisi AKN di Kabupaten Halmahera Barat menurut kecamatan dalam kurun tahun 2021-2023.

Tabel 2.34
Angka Kematian Neonatal Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmaher Barat Tahun 2021-2023

Kecamatan	2021			2022			2023		
	LH	KN	AKN	LH	KN	AKN	LH	KN	AKN
Jailolo	576	8	13	562	7	12	544	3	6
Jailolo Selatan	304	5	16	254	4	15	306	3	10
Jailolo Timur	71	0	0	43	0	0	147	2	14
Sahu	174	2	11	162	0	0	155	1	6
Sahu Timur	142	0	0	129	0	0	161	1	6
Ibu	222	3	14	204	3	15	226	1	4
Ibu Selatan	205	2	10	223	7	31	157	0	0
Tabaru	193	3	16	146	1	7	92	2	22
Loloda	162	1	6	164	3	18	16	0	0
Halmahera Barat	**2.049**	**24**	**12**	**1.887**	**25**	**13**	**1,804**	**13**	**7**

Keterangan: LH (Lahir Hidup); KN (Jumlah Kasus Kematian Neonatal); AKN (per 1000 Kelahiran Hidup)
Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, 2024

c. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (In*fant Mortality Rate*) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan.

Angka Kematian Bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup (KH) pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). AKB seringkali dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah.

Berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, AKB di Halmahera Barat dalam kurun tahun 2020-2023 menunjukkan tren yang meningkat. Walaupun di tiga tahun sebelumnya masih diatas target TBP 2030 yaitu 12 per 1000 KH akan tetapi pada Tahun 2023 AKB mengalami penurunan menjadi 7 per 1.000 kelahiran hidup. Kondisi AKB di Kabupaten Halmahera Barat menurut kecamatan dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Angka Kematian Bayi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Barat Tahun 2021-2023

Kecamatan	2021			2022			2023		
	LH	KB	AKB	LH	KB	AKB	LH	KB	AKB
Jailolo	576	15	26	562	12	21	544	3	6
Jailolo Selatan	304	5	16	254	4	15	306	0	0
Jailolo Timur	71	0	0	43	0	0	147	0	0
Sahu	174	0	0	162	0	0	155	0	0
Sahu Timur	142	2	14	129	0	0	161	3	19
Ibu	222	5	23	204	4	20	226	5	22
Ibu Selatan	205	5	24	223	8	36	157	2	13
Tabaru	193	3	16	146	1	7	92	0	0
Loloda	162	2	12	164	6	37	16	0	0
Halmahera Barat	**2.05**	**37**	**18**	**1.89**	**35**	**19**	**1,804**	**13**	**7**

Keterangan: LH (Lahir Hidup); KN (Jumlah Kasus Kematian Neonatal); AKN (per 1000 Kelahiran Hidup)
Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, 2023

d. Prevalensi Balita Underweight, Stunting dan Wasting

Merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995//2010, pengertian Gizi Kurang dan Gizi Buruk adalah status gizi yang didasarkan pada Indeks Berat Badan menurut Umum (BB/U) yang merupakan padanan istilah *underweight* (gizi kurang) dan *severely underveight* (gizi buruk). Pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah stunted (pendek) dan sangat pendek (severely stunted). Selain underweight dan stunting, wasting adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan permasalahan gizi anak, ketika bobot tubuhnya jauh di bawah normal. Wasting menandakan bahwa nutrisi anak tidak terpenuhi dengan cukup. Wasting merupakan gabungan dari istilah kurus (wasted) dan sangat kurus (severe wasted) yang didasarkan pada indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB). WHO selaku badan kesehatan dunia, menyatakan bahwa wasting adalah salah satu masalah kesehatan utama. Sebab kondisi ini berhubungan langsung dengan angka kejadian suatu penyakit (morbiditas). Secara umum suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut bila prevalensi balita kurus sebesar 5% atau lebih. Tabel berikut menyajikan kondisi prevalensi Balita Underweight, Stunting dan Wasting menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2023.

Tabel 2.36
Prevalensi Balita Underweight, Wasting dan Stunting Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Diukur	Underweight		Wasting		Stunting	
			Jumlah	Prev(%)	Jumlah	Prev(%)	Jumlah	Prev(%)
1	Jailolo	2058	156	7.58	150	7.29	232	11.27
2	Jailolo Selatan	710	160	22.54	63	8.87	155	21.83
3	Sahu	698	51	7.31	28	4.01	59	8.45
4	Sahu Timur	487	12	2.46	21	4.31	39	8.01
5	Ibu	341	58	17.01	33	9.68	51	14.96
6	Ibu Selatan	610	93	15.25	25	4.10	65	10.66
7	Tabaru	544	138	25.37	31	5.70	98	18.01
8	Loloda	502	87	17.33	32	6.37	94	18.73
9	Loloda Tengah	138	33	23.91	23	16.67	38	27.54
Halmahera Barat		**6088**	**788**	**12.94**	**406**	**6.67**	**831**	**13.65**

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, 2024

10 Kab kota Provinsi Maluku utara mempunyai kasus pravelensi Stunting dan Untuk Saat ini ada 5 (lima) Kabupaten di Maluku Utara telah berhasil menurunkan angka Pravelensi Stunting Yang salah 1 nya adalah Halmahera Barat yang pada Tahun 2021 berdasarkan SSGI berada di angka 30% menurun menjadi 23,7 persen Pada Tahun 2023. Upaya pemerintah daerah menurunkan angka pravelensi Stunting sebesar 14% pada Tahun 2024 menuntut kerja keras kita semua untuk melakukan aksi nyata melalui komunikasi,koordinasi, komitmen dan Kolaborasi dari tingkat pemerintahan terkecil yaitu Desa. Sesuai Dengan SK Bupati Nomor 71/KTPS/III/2023 Tentang Penetapan Desa Lukus Prioritas Penanganan Stunting Dalam Wilayah Kab. Halmahera Barat Tahun 2024 terdapat 6 Kecamatan dan 19 Desa Lokus.

e. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan diperlukan Standar Teknis SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan, terdapat 12 Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

a) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d) Pelayanan kesehatan balita;
e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan

k) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus-HIV).

Beberapa Tabel berikut menyajikan capaian pemenuhan SPM Bidang Kabupaten Halmahera kesehatan sampai pada Tahun 2023.

Tabel 2.37
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran Ibu Hamil	Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	
			Jumlah	Persentase
1	Jailolo	618	454	73
2	Jailolo Selatan	343	192	56
3	Sahu	184	135	73
4	Sahu Timur	153	110	72
5	Ibu	231	134	58
6	Ibu Selatan	251	184	73
7	Tabaru	208	110	53
8	Loloda	142	103	73
9	Loloda Tengah	62	28	45
Halmahera Barat		**2192**	**1,450**	**66**

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, 2024

Tabel 2.38
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran Ibu Bersalin	Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	
			Jumlah	Persentase
1	Jailolo	585	545	93
2	Jailolo Selatan	327	307	94
3	Jailolo Timur	175	149	85
4	Sahu	146	146	100

5	Sahu Timur	221	142	64
6	Ibu	240	206	86
7	Ibu Selatan	198	140	71
8	Tabaru	136	91	67
9	Loloda	59	13	22
Halmahera Barat		**2,087**	**1,739**	**83**

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, 2024

Tabel 2.39
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir	Bayi baru Lahir yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	
			Jumlah	Persentase
1	Jailolo	628	519	83
2	Jailolo Selatan	343	307	90
3	Sahu	184	156	85
4	Sahu Timur	139	143	103
5	Ibu	210	160	76
6	Ibu Selatan	237	220	93
7	Tabaru	189	136	72
8	Loloda	129	92	71
9	Loloda Tengah	56	13	23
Halmahera Barat		**2115**	**1,746**	**83**

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, 2024

Tabel 2.40
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran Balita	Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			Jumlah	Persentase
1	Jailolo	3223	1349	42
2	Jailolo Selatan	1922	791	41
3	Sahu	971	315	32
4	Sahu Timur	889	382	43
5	Ibu	962	434	45
6	Ibu Selatan	1195	415	35
7	Tabaru	865	267	31
8	Loloda	750	309	41
9	Loloda Tengah	381	0	0
Halmahera Barat		**11,158**	**4,262**	**38**

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, 2024

Tabel 2.41
Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran Anak Usia Pendidikan Dasar	Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			Jumlah	Persentase
1	Jailolo	511	484	95
2	Jailolo Selatan	310	298	96
3	Sahu	54	54	100
4	Sahu Timur	74	74	100
5	Ibu	0	0	0
6	Ibu Selatan	0	0	0
7	Tabaru	161	106	66
8	Loloda	0	0	0

9	Loloda Tengah	0	0	0
Halmahera Barat		**1.110**	**1,016**	**92**

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, 2024

Tabel 2.42
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai StandarMenurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran Warga negara usia 60 tahun keatas	Warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	
			Jumlah	Persentase
1	Jailolo	1639	933	57
2	Jailolo Selatan	1191	1011	85
3	Sahu	548	532	97
4	Sahu Timur	594	501	84
5	Ibu	525	509	97
6	Ibu Selatan	690	610	88
7	Tabaru	558	456	82
8	Loloda	637	379	59
9	Loloda Tengah	0	0	0
Halmahera Barat		**6.382**	**4,931**	**77**

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, 2024

Tabel 2.43
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran Penderita Hipertensi	Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			Jumlah	Persentase
1	Jailolo	1950	677	34.72
2	Sahu	667	445	66.72
3	Sahu Timur	692	83	11.99
4	Jalsel	1430	116	8.11
5	Jaltim	332	82	24.70

6	Ibu selatan	845	193	22.84
7	Ibu tengah	655	166	25.34
8	Ibu utara	633	110	17.38
9	Loloda	512	41	8.01
Halmahera Barat		**7716**	**1913**	**24.79**

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, 2024

Tabel 2.44
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran Penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			Jumlah	Persentase
1	Jailolo	201	142	70
2	Jailolo Selatan	59	32	54
3	Jailolo Timur	23	18	78
4	Sahu	51	34	66
5	Sahu Timur	71	77	108
6	Ibu	77	20	25
7	Ibu Selatan	86	6	6,9
8	Tabaru	43	8	18,6
9	Loloda	89	48	53
Halmahera Barat		**613**	**385**	**62**

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, 2024

Tabel 2.45
Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran ODGJ Berat	ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			Jumlah	Persentase
1	Jailolo	39	20	51
2	Jailolo Selatan	13	13	100
3	Jailolo Timur	2	2	100
4	Sahu	3	2	67
5	Sahu Timur	11	7	64
6	Ibu	5	0	0

7	Ibu Selatan	18	18	100
8	Tabaru	1	0	0
9	Loloda	6	5	83
Halmahera Barat		**98**	**67**	68

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, 2024

Tabel 2.46
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberclosis Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran Orang Terduga Tuberclosis	Orang Terduga Tuberclosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			Jumlah	Persentase
1	Jailolo	754	65	8.62
2	Jailolo Selatan	355	21	5.92
3	Jailolo Timur	77	9	11.69
4	Sahu	139	21	15.11
5	Sahu Timur	193	31	16.06
6	Ibu	217	36	16.59
7	Ibu Selatan	374	41	10.96
8	Tabaru	191	23	12.04
9	Loloda	253	23	9.09
Halmahera Barat		**2.553**	**270**	**10,57**

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, 2024

Tabel 2.47
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV Sesuai Standar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Sasaran Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV	Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			Jumlah	Persentase
1	Jailolo	770	11	1.43
2	Jailolo Selatan	426	1	0.23
3	Jailolo Timur	91	0	-
4	Sahu	233	4	1.72
5	Sahu Timur	187	0	-
6	Ibu	279	2	0.72
7	Ibu Selatan	271	2	0.74
8	Tabaru	243	0	-
9	Loloda	226	2	0.88
Halmahera Barat		**2.726**	**22**	8.07

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, 2024

F. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan (sering diakronimkan sebagai faskes) adalah setiap lokasi yang menyediakan pelayanan kesehatan, mulai dari klinik kecil hingga rumah sakit yang besar dengan fasilitas yang lengkap. Jumlah dan kualitas faskes di suatu daerah atau negara merupakan salah satu parameter yang umum dipakai untuk menilai kemakmuran dan kualitas hidup daerah tersebut.

Fasilitas pelayanan kesehatan merujuk kepada sarana atau prasarana atau perlengkapan yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang disenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta bagi masyarakat dengan tujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan melalui tindakan preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Perkembangan jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat dan sebaran fasilitas dalam tiga tahun terakhir tersaji dalam tabel-tabel dibawah.

Tabel 2.48
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

URAIAN	2021	2022	2023
Jumlah Rumah Sakit	1	1	1
Status Akreditasi RSUD	C	C	C
Jumlah Puskesmas	14	15	15
Jumlah Puskesmas Terakreditasi	11	11	12
Persentase Puskesmas Terakreditasi	78,56%	73,33%	73,33%
Jumlah Puskesmas Rawat Inap	3	3	3
Persentase Puskesmas Mampu Rawat Inap	21,42%	20%	20%
Jumlah Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Kesehatan Tradisional	14	15	15
Persentase Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Kesehatan Tradisional			
Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu)	13	13	13
Jumlah Pondok Bersalin Desa (Polindes)	57	57	57
Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	28	28	28

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, 2024

Tabel 2.49
Sebaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Polindes	Poskesdes
1	Jailolo	1	2	13	10	11
2	Jailolo Selatan		2	3	17	17
3	Jailolo		2	2	7	-

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Polindes	Poskesdes
	Timur					
4	Sahu		2	1	3	9
5	Sahu Timur		2	1	3	1
6	Ibu		1	2	1	8
7	Ibu Selatan		2	1	7	-
8	Tabaru		1	1	1	6
9	Loloda		2	3	3	3
10	Loloda Tengah		1	2	2	0
Halmahera Barat		**1**	**15**	**30**	**54**	**55**

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, 2024

g. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Peran tenaga kesehatan menjadi sangat penting dalam implementasi sistem kesehatan. Di sisi lain tantangan seperti rendahnya komptensi menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan sistem kesehatan.

SDMK adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Perkembangan keadaan tenaga kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2023sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.50
Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Dokter			
Dokter Umum	34	35	29
Dokter Spesialis	16	11	15
Dokter Gigi	3	5	10
Jumlah	**53**	**51**	**54**
Bukan Dokter			
Perawat	202	237	215
Bidan	232	343	331
Tenaga Farmasi	24	33	26
Tenaga Kesmas	63	78	75
Tenaga Gizi	25	44	44
Tenaga Tekmed	9	27	10
Tenaga Terapis	5	6	4
Tenaga Kesling	10	14	14
Tenaga Analisis	6	6	6
Tenaga Tekbio	19	27	30
Lainnya	4	4	4
Jumlah	**599**	**819**	**749**

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, 2024

Dari 3 (tiga) terakhir jumah tenaga kesehatan baik dokter dan bukan dokter terus meningkat. Adapun jumlah tenaga kesehatan bukan dokter pada tahun 2022 sebanyak 819 orang, secara keseluruhan jumlah perawat mengalami peningkatan terbesar atau meningkat sebesar 47,8 persen dalam tiga tahun terakhir. Terjadi penurunan tenaga bukan dokter yaitu perawat, bidan dan tenaga Kesmas disebabkan perpindahan tempat tugas mengikuti suami, dianggat sebagai PNS di tempat tugas yang baru karena sebagian besar honorer.

Merujuk pada standar WHO (World Health Organisation) dimana rasio ideal 1 (satu) dokter melayani 2.500 orang, maka rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2023 sebesar 1 : 2.465 telah memenuhi target minimum yang disyaratkan WHO. Tabel-tabel berikut

menyajikan sebaran jumlah tenaga kesehatan menurut kecamatan (Puskesmas) dan RSUD pada tahun 2023.

Tabel 2.51
Sebaran Tenaga Kesehatan Dokter Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023

Kecamatan/ Puskesmas	Dokter Umum	Dokter Spesialis	Dokter Gigi	Jumlah	Keterangan
Jailolo	11	15	5	31	
Jailolo Selatan	2	-	1	3	
Jailolo Timur	-	-	-	-	
Sahu	2	-	-	2	
Sahu Timur	3	-	1	4	
Ibu	2	-	1	3	
Ibu Selatan	4	-	2	6	
Tabaru	1	-	-	1	
Loloda	3	-	-	3	
Loloda Tengah	1	-	-	1	
RSUD	10	-	2	2	
Halmahera Barat	**39**	**15**	**12**	**55**	

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, 2024

Tabel 2.52
Sebaran Tenaga Kesehatan Bukan Dokter Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023

Kecamatan/ Puskesmas	Perawat	Bidan	Farmasi	Kesmas	Gizi	Tekmed	Terapis	Tekbio	Tenaga Analisis	Kesling
Jailolo	120	107	10	45	9	4	3	20	1	3
Jailolo Selatan	21	46	4	10	3	1	0	2	0	0
Jailolo Timur	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sahu	14	34	1	4	6	1	0	1	0	1
Sahu Timur	10	37	-	2	3	2	-	1	0	3
Ibu	17	3	2	3	4	-	1	2	0	2
Ibu Selatan	8	27	2	7	4	1	0	2	0	1
Tabaru	13	24	2	1	2	1	0	1	0	0

Loloda	11	22	3	3	2	-	0	1	0	2
Loloda Tengah	2	3	1	-	-	-	-	-		
RSUD	106	47	14	24	10	11	4	13	0	1
Halmahera Barat	**322**	**352**	**39**	**97**	**43**	**21**	**8**	**43**	**1**	**14**

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, 2024

h. Pengendalian Penyakit

Pengendalian penyakit sebagai upaya penurunan insidens, prevalens, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit mempunyai peranan penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Indikator yang digunakan dalam menilai derajat kesehatan suatu masyarakat adalah angka kesakitan dan kematian penyakit. Tabel berikut menyajikan data jumlah kasus penyakit di Kabupaten Halmahera Barat sepanjang tahun 2023.

Tabel 2.53
Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Penyakit dan Jumlah Kasus						
		Malaria	Kusta	HIV/AIDS	IMS	DBD	Diare	TBC
1	Jailolo	2	27	11	0	64	272	65
2	Jailolo Selatan	1	9	1	0	3	220	21
3	Jailolo Timur	-	-	0	0	-	19	9
4	Sahu	1	7	4	0	13	74	21
5	Sahu Timur	-	10	0	0	7	98	31
6	Ibu	-	8	2	0	5	0	36
7	Ibu Selatan	2	5	2	0	1	136	41
8	Tabaru	-	-	1	0	1	44	23
9	Loloda	-	8	1	0	10	89	23
Halmahera Barat		**6**	**74**	**22**	**0**	**104**	**952**	**270**

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, 2024

i. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan merupakan suatu proses pembangunan manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku, dan pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan. Untuk pencapaian kemandirian kesehatan, pemberdayaan masayrakat merupakan unsur penting yang tidak bisa diabaikan. Pemberdayaan kesehatan di bidang kesehatan merupakan sasaran utama dari promosi kesehatan.

Masyarakat merupakan salah satu dari strategi global promosi kesehatan pemberdayaan (empowerment) sehingga pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat sebagai primary target memiliki kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

Gerakan pemberdayaan masyarakat juga merupakan cara untuk menumbuhkan dan mengembangkan norma yang membuat masyarakat mampu untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Tabel-tabel berikut menyajikan beberapa indikator yang menggambarkan peran serta masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat dalam membangun kapasitas kesehatan secara mandiri, melaui penerapatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan penyelenggaraan secara aktif Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di desa, pada tahun 2023

Tabel 2.54

Persentase Desa Menerapkan STBM Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa	2021		2022		2023	
			Desa STBM	%	Desa STBM	%	Desa STBM	%
1	Jailolo	34	13	38,2	7	20.6	7	20.6

2	Jailolo Selatan	22	3	13,6	3	13,6	3	13.6
3	Jailolo Timur	6	2	33,3	-	0	0	0
4	Sahu	19	9	47,4	5	27,8	5	27,8
5	Sahu Timur	18	7	38,9	7	41,2	7	41,2
6	Ibu	17	5	29,4	5	29,4	9	52,9
7	Ibu Selatan	16	3	18,8	1	6,3	1	6.3
8	Tabaru	16	2	12,5	2	11,8	2	11.8
9	Loloda	27	9	33,3	3	10,7	3	10.7
	Jumlah	**175**	**53**	**30,3**	**33**	**18,9**	**37**	**21.1**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, 2024

Salah satu upaya peningkatan pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan adalah memaksimalkan layanan posyandu. Posyandu adalah salah satu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Yang bertujuan

i. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
ii. Membudayakan NKKBS.
iii. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
iv. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Tabel 2.55
Persentase Posyandu Aktif Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

No	Kecamatan	2021			2022			2023		
		Jumlah Posyandu	Posyandu Aktif		Jumlah Posyandu	Posyandu Aktif		Jumlah Posyandu	Posyandu Aktif	
			Jml	%		Jml	%		Jml	%
1	Jailolo	42	35	83	42	35	83	42	18	100
2	Jailolo Selatan	32	27	84	32	27	84	38	56	100
3	Jailolo Timur	8	3	38	8	4	50	6	6	100
4	Sahu	20	17	85	20	18	90	20	12	100
5	Sahu Timur	19	17	89	19	17	89	19	20	100
6	Ibu	17	15	88	17	15	88	17	17	100
7	Ibu Selatan	17	17	100	17	17	100	16	17	100
8	Tabaru	16	16	100	16	16	100	19	16	100
9	Loloda	31	14	45	31	20	65	12	7	100
10	Loloda Tengah	31	14	45	31	20	65	12	12	100
	Halmahera Barat	**202**	**161**	**80**	**202**	**169**	**84**	**200**	**175**	**100**

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, 2024

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Panjang Jalan Kab. Halmahera Barat yaitu 512,94 KM Sebagian besar ruas jalan Kabupaten Halmahera Barat dalam kondisi baik, yaitu 305,28 KM atau 59,52 persen. Capaian kinerja pembangunan dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Halmahera Barat disajikan berikut ini.

A. Infrastruktur jalan dan jembatan

Jaringan jalan merupakan aspek penting dalam pengembangan wilayah sehingga sangat penting untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Tabel berikut menyajikan kinerja penyelenggaraan jalan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023. Rasio jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang yaitu 59,52% adapun Target dalam RPJMD kemantapan jalan kabbupaten adalah 65,00%,

dan Indeks kemantapan Jalan Daerah sesuai dengan target RPJMD yaitu 87,00%.

Tabel 2.56
Kinerja Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Di Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2021-2023

Jenis Permukaan/Kondisi	2021		2022		2023	
	Panjang (Km)	Proporsi (%)	Panjang (Km)	Proporsi (%)	Panjang (Km)	Proporsi (%)
Jalan						
Jenis Permukaan						
Asphalt/Penetrasi Macadam	286,31	55,82	287,308	56,01	317.58	61.91
Sirtu/Kerikil Telford	34,31	6,69	34,312	6,69	73,5	14,32
Tanah/Belum Tembus	192,32	37,49	191,32	37,30	121.86	23,75
Total	512,94	100	512,94	100	512.94	100
Kondisi						
Baik	270,71	52,78	281,908	54,96	305.28	59.52
Sedang	24,21	4,72	5,2	1,01	17.7	3.45
Rusak Ringan	48,42	9,44	10,862	2,12	60.6	11.81
Rusak Berat	169,60	33,06	214,97	41,91	129.36	25.22
Total	**512,94**	**100**	**512,94**	**100**	**512.94**	**100**
Proporsi Panjang Jalan Kondisi Mantap (Baik & Sedang) (Persen)		57,50		55,97		66.27
Total Panjang Jalan Kewenangan Provinsi di Kab. Halmahera Barat (Km)	181,39		181,39		181,39	
Total Panjang Jalan Kewenangan Nasional di Kab. Halmahera Barat (Km)	144,75		144,75		144,75	
Jembatan						
Jumlah Kebutuhan Jembatan di Ruas Jalan Kabupaten (Buah)	79		79		79	
Jumlah Jembatan yang telah dibangun di Ruas Jalan Kabupaten (Buah)	60		69		69	

Proporsi Jembatan yang telah dibangun di Ruas Jalan Kabupaten (Buah)	75,95		87,34		87,34	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat, 2024

B. Air Minum dan Sanitasi

Hingga tahun 2022, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sumber air minum bersih di Kabupaten Halmahera Barat baru mencapai 63,03 persen. Adapun persentase rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak, sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 50,0 persen. Rincian per kecamatan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.57
Persentase Rumah Tangga Mengakses Sumber Air Minum Bersih Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Mengakses Sumber Air Minum Bersih	Persentase Rumah Tangga Mengakses Sumber Air Minum Bersih
Jailolo	7.809	6.508	83,34%
Jailolo Selatan	4.318	2.159	50,00%
Jailolo Timur	933	n/a	0,00%
Sahu	2.439	1.219	49,98%
Sahu Timur	2.202	1.835	83,33%
Ibu	2.697	1.348	49,98%
Ibu Selatan	3.518	1.759	50,00%
Tabaru	1.981	1.800	90,86%
Loloda	2.947	982	33,32%
Halmahera Barat	**27.911**	**17.610**	**63,09%**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat, 2022

Tabel 2.58
Persentase Rumah Tangga Mengakses Sanitasi Layak Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Mengakses Sanitasi Layak	Persentase Rumah Tangga Mengakses Sanitasi Layak
Jailolo	7.809	3.905	50,01%
Jailolo	4.318	2.159	50,00%

Selatan			
Jailolo Timur	933	n/a	0,00%
Sahu	2.439	1.219	49,98%
Sahu Timur	2.202	1.101	50,00%
Ibu	2.697	1.348	49,98%
Ibu Selatan	3.518	1.759	50,00%
Tabaru	1.981	990	49,97%
Loloda	2.947	1.474	50,02%
Halmahera Barat	**27.911**	**13.955**	**50,00%**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat, 2022

C. Pengembangan Sumber Daya Air

Sumber daya air memiliki peran yang besar bagi sektor pertanian. Air sebagai *renewable resources* digunakan untuk memenuhi produksi pertanian. Peningkatan produktivitas air pertanian memiliki peran yang penting dalam menghadapi kelangkaan dan kopetisi penggunaan sumber daya air, pencegahan terhadap kerusakan lingkungan dan ketahanan pangan. Capaian kinerja pengembangan Sumber Daya Air di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2020, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.59
Kinerja Pengembangan Sumber Daya Air Di Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
	Irigasi			
1	Panjang Jaringan Irigasi Terbangun (meter) – kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya	1500	0	0
2	Total Luas Daerah Irigasi (Ha)	1.847	1.847	1.847
3	Luas Daerah Irigasi yang telah dialiri air melalui jaringan irigasi (Ha)	630	630	630
	Rasio Luas Daerah Irigasi yang telah dialiri air melalui jaringan irigasi	**34,11 %**	**34,11%**	**34,11%**
	Infrastruktur Pencegah/Pengendali Bencana			
4	Total Panjang Talud/Bronjong Terbangun (meter) – kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya	2683	3108	3368

No	Uraian	2021	2022	2023
	Irigasi			
5	Total panjang Talud/Bronjong yang dibutuhkan untuk dibangun (sesuai Master Plan) (meter)			
	Rasio Infrastruktur Pencegah/ Pengendali Bencana yang terbangun	**7,67 %**	**8,88%**	**9,62%**
6	Total panjang saluran Drainase terbangun (meter) – kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya	5.882	6.308	0
7	Total panjang Saluran Drainase yang dibutuhkan untuk dibangun (sesuai Master Plan) (meter)			
	Rasio Infrastruktur Drainsae yang terbangun	**14,705**	**15,77**	**0**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat, 2024

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah (papan) merupakan kebutuhan primer manusia. Sebagaimana Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Jaminan kesejahteraan bagi setiap warga terhadap kebutuhan dasar merupakan tanggung jawab pemerintah yang wajib dipenuhi. Regulasi tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayahnya. Tabel berikut menyajikan kondisi rumah di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2023.

Tabel 2.60
Kondisi Perumahan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023

Uraian	Unit	Proporsi
Jumlah Rumah	34.157	
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	2.874	11,87%
Jumlah Rumah Layak Huni	31,283	88.13%

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat, 2024

Data rumah yang disajikan dapat disimpulkan bahwasannya lebih dari 50 persen penduduk Halmahera Barat menempati rumah yang layak dihuni.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah: 1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; Penegakan Perda Kabupaten dan peraturan bupati; dan Pembinaan PPNS kabupaten); 2) Penanggulangan bencana kabupaten; dan 3) Kebakaran (Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten).

Tabel 2.61
Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 – 2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah Personil Satpol PP	299	299	299
2	Jumlah Personil PPNS	-	1	1
3	Frekuensi Patroli dalam sehari (kali)	1	1	1
4	Frekuensi Patroli dalam Setahun (Hari)	312	312	312
5	Frekuensi Patroli Gabungan TNI-Polri (kali dalam setahun)	75	85	85
6	Jumlah Personil Linmas	656	656	656
7a	Jumlah Perda yang memuat sanksi yang Harus ditegakkan	6	6	7
7b	Jumlah Perda yang yang memuat sanksi yang telah ditegakkan	4	3	5
8a	Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diterima oleh Satpol-PP	5	7	7
8b	Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diterima oleh Satpol-PP dan dapat ditindaklajuti/ diselesaikan	4	5	5
9a	Jumlah Kejadian Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran	14	8	8

No	Uraian	2021	2022	2023
	(WMK)			
9b	Tingkat waktu tanggap (*response time*) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit)	15	14,4	14,4
10	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	100	100

Sumber : Satpol PP Kabupaten Halmahera Barat, 2023; BPBD Kabupaten Halmahera Barat, 2023

6. Sosial

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Sosial adalah: 1) Pemberdayaan Sosial (Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpecil/KAT; Penerbitan izin pengumpulan sumbangan; Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial; Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota; 2)Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; 3) Rehabilitasi Sosial; 4) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Pemeliharaan anak-anak terlantar; Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/ kota); 5) Penanganan Bencana (Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota; Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota); dan 6) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasionalkabupaten/kota.

Tabel 2.62
Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1a	Jumlah jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tingkat kabupaten yang telah dikembangkan atau diberdayakan (jenis, kumulatif)	9	10	10
1b	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	263	263	263

	tingkat kabupaten yang telah dikembangkan atau diberdayakan (orang, kumulatif)			
2a	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis **yang harus dipenuhi** kebutuhan dasarnya di luar panti	-	6.945	6945
2b	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis **yang sudah ditangani atau dipenuhi** kebutuhan dasarnya di luar panti	-	534	140
3a	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan	9.608	9.118	6.980
3b	Jumlah Penerima PKH	7.419	6.920	6.224

Sumber: Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Halmahera Barat,2024

Kemajemukan penduduk Halmahera Barat menjadi salah satu karunia Tuhan YME dengan hidup berdampingan antar sesama pemeluk agama. Sarana dan prasarana ibadah bagi setiap pemeluk agama apapun, merupakan bagian yang sangat penting dan mendasar yang dibutuhkan dan harus tersedia pada setiap permukiman penduduk. Demikian pentingnya sarana dan prasarana ibadah, maka salah satu indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah seberapa banyak tersedianya sarana dan prasarana ibadah pada suatu komunitas masyarakat. Ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana peribadatan yang ada di Kabupaten Halmahera Barat sebagai berikut :

Tabel 2.63
Pertumbuhan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah Kabupaten Halmahera Barat

Tahun	Masjid	Langgar/ Mushola	Gereja protestan	Gereja Khatolik
2021	87	20	181	1
2022	81	55	248	10
2023	78	45	225	-
Total	**75**	**58**	**117**	**-**

Sumber data :Kab. Halbar Dalam Angka 2024

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam konteks ini Sumber Daya Manusia (SDM), yang tentunya termasuk angkatan kerja kompeten dan produktif, merupakan modal dasar utama suatu bangsa, sehingga kualitas SDM angkatan kerja akan menentukan kemajuan perekonomian suatu bangsa. Angkatan kerja yang bekerja, yang berkategori unggul, akan mengerjakan pekerjaannya dengan produktif, sehingga usaha yang dikerjakannya juga akan produktif, baik usaha mandiri di sektor informal ataupun usaha di sektor formal di perusahaan tempatnya bekerja bersama pekerja lainnya.

Capaian kinerja urusan ketenagakerjaan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.64
Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Penduduk Usia Kerja (15+)	79,708	88.48	104.202
Angkatan Kerja	**56.74**	**62.121**	**70.949**
- Bekerja	54.63	58.49	68.277
- Pengangguran	1.841	2.141	2.62
Bukan Angkatan Kerja	**22.968**	**26.355**	**33.253**
- Sekolah	5.078	5.570	7.79
- Mengurus Rumah Tangga	15.890	16.56	19.72
- Lainnya	3.000	4.221	5.74

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2022, 2023, 2024

2.2.1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kesetaraan gender merupakan hak pada semestinya didapatkan oleh semua pihak, baik laki-laki dan perempuan agar memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Perbedaan

gender pun terlihat dari kecenderungan peran masing-masing, yaitu berperan dalam publik atau domestik. Peran publik diartikan dengan aktivitas yang dilakukan di luar rumah dan bertujuan mendapatkan penghasilan. Secara keseluruhan apakah perempuan di Kabupaten Halmahera Barat dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan salah satu indeks yang menunjukkan tolak ukur keaktifan perempuan pada ranah sosial, ekonomi dan politik, yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Perkembangan IDG 10 Kabupaten kota Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada table Berikut :

Tabel 2.65
Indeks Pemberdayaan GenderMenurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
Halmahera	**88,4**	**88,8**	89,1
Halmahera	89,7	90,18	90,4
Kepulauan Sula	92,3	92,77	92,8
Halmahera	87,3	87,38	87,5
Halmahera Utara	89,3	89,73	90,0
Halmahera Timur	81,5	82,09	82,5
Pulau Morotai	69,7	70,85	71,5
Pulau Taliabu	83,2	83,81	84,5
Ternate	91,8	92,28	92,3
Tidore	95,8	96,04	96,3
Maluku Utara	**89,7**	**90,3**	90,5

Sumber: BPS provinsi Maluku Utara 2024

Capaian kinerja pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.66
Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1a	Jumlah Kasus KDRT	44	54	72
1b	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,03	0,06	0,04
2a	Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaporkan	14	31	30
2b	Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaporkan yang diselesaikan oleh Instansi terkait	11	11	30
3a	Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak yang dilaporkan	12	28	42
3b	Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak yang dilaporkan yang diselesaikan oleh Instansi terkait	12	8	41
4	Jumlah jenis data gender dan anak sesuai Permen PPPA No. 5/2014 yang telah dapat disajikan dalam kelembagaan data tingkat kabupaten (kumulatif)	43,070	36,487	5
5	Jumlah jenis indikator Kabupaten Layak Anak yang telah terpenuhi (kumulatif)	17	17	24

Sumber: Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Halmahera Barat, 2023

2. Urusan Pangan

Capaian kinerja pembangunan urusan Pangan di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.67
Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan Tingkat Daerah (Perda/Perbup)	0	0	0

2a	Jumlah desa yang masuk dalam kategori tidak rawan pangan	117	146	135
2b	Jumlah desa yang masuk dalam kategori rawan pangan	52	23	34
2c	Jumlah desa yang masuk dalam kategori rawan pangan yang sudah ditangani	0	0	0
3	Tingkat Ketersedian Pangan Utama (Ton)	31.279	41.881	58.264,44
a	Beras	24.432	35.036	49.632,00
b	Gula Pasir	1.524	1.373	1.741,02
c	Minyak Goreng	1.836	1.473	1.572,06
d	Daging Ayam	564	725	936
e	Daging Sapi	36	319	36
f	Telur Ayam	1.145	838	844,8
g	Bawang Merah	216	545	642
8	Bawang Putih	120	368	511,68
i	Cabe keriting	39,60		763,2
j	Cabe Rawit	11	416	624,48
k	Tepung terigu	1.356	788	999,2
4	Skor PPH Ketersediaan	74,71	74,71	74,71

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat, 2024

3. Urusan Linkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Halmahera Barat diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Capaian kinerja pembangunan urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.68
Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
	Perencanaan LH			
1	Perda tentang RPPLH	Tdk Ada	Tdk Ada	Tdk Ada
	Pengawasan izin Lingkungan			
1	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang Izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang telah DIAWASI	1	27	12
2	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang Izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang telah diawasi dan PATUH	1	2	4
	Pencemaran Lingkungan			
1	Jumlah Objek pencemaran/kerusakan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang dilaporkan	0	0	0
2	Jumlah Objek pencemaran/kerusakan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang dilaporkan dan sudah ditangani	0	0	0
	Pengaduan Masyarakat			
1	Jumlah Pengaduan Masyarakat terkait izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten	0	0	0
2	Jumlah Pengaduan Masyarakat terkait izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten yang ditangani/ ditindaklanjuti	0	0	0
	Pengelolaan Sampah			
1	Volume potensi timbulan sampah perkotaan (M3)	34.564	35.043	36.473
2	Volume Timbulan Sampah Perkotaan yang terangkut (M3)	1145	1584	1.434

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat, 2024

Kabupaten Halmahera Barat mempunyai 6 (Enam) Lokasi Pembuangan Sampah yang terdapat di beberapa desa kecamatan jailolo dan kecamatan sahu sebagaimana pada Tabel Berikut :

Tabel 2.69
Lokasi Tempat Pembunagan Sampah Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2023

No	Lokasi		Volume	Keterangan
	Desa	Kecamatan		
1	Payo	Jailolo		berfungsi
2	Pasar Jailolo Gufasa	Jailolo	6 m3	berfungsi
3	Hatebicara	Jailolo	6 m3	berfungsi
4	Porniti	Jailolo	6 m3	berfungsi
5	Acango	Jailolo		berfungsi
6	Lako akediri	Sahu	6 m3	berfungsi

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat, 2024

Sampai pada Tahun 2023, Volume timbunan sampakh kecamatan jailolo adalah 8.5 Ton perhari dengan total terlayani adalah 6.3 Ton/Hari atau 74% dan Kecamatan Sahu adalah 4.4 Ton/Hari dan terlayani 3.2 ton/hari atau 73% Totam masuk ke TPA adalah 9.8 ton/hari Dengan sistem Kumpul,angkut dan buang.

4. Urusan Pertanahan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Pertanahan meliputi sub urusan: 1) Izin Lokasi; 2) Penyelesaian sengketa tanah garapan; 3) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah; 4) Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; 5) Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; 6) Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota dan Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota; 7) Penerbitan izin membuka tanah; dan 8) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.70
Kinerja Urusan pertanahan Kab. Halmahera Barat
Tahun 2021-2023

No	Jenis Hak	2021	2022	2023
1	Hak milik	2.616	5.028	4.668
2	Hak Guna Bangunan	175	100	28
3	Hak Pakai	119	690	389
4	Wakaf		14	11
Jumlah		**2.91**	**5.832**	**5.096**

Sumber: Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat, 2023

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Adapun peran pendaftaran penduduk dalam pembangunan adalah pendayagunaan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan penduduk dan kondisi daerah setempat, hal tersebut penting mengingat kondisi antara daerah sangat bervariasi, selain itu data hasil pendaftaran penduduk berupa statistik kependudukan dan laporan-laporan merupakan aset bangsa yang sangat berharga karena dapat didayagunakan oleh semua pihak baik untuk kepentingan pelayanan publik maupun untuk perencanaan pembangunan yang berwawasan kependuduk (*people centered developement*).

Capaian kinerja pembangunan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.71
Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
A	**Administrasi Kependudukan**			
1a	Jumlah Penduduk Wajib ber-KTP	99.105	101.018	104,356
1b	Jumlah Penduduk yang sudah ber-KTP	100.453	74.026	77,449
1c	Persentase Penduduk yang sudah ber-KTP	**101,36**	**73,28**	**74,22**
2a	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang wajib ber-KIA	37.045	36.676	35,915
2b	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	17.928	15.631	14,784
2c	Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	**48,40**	**42,62**	**41,16**
B	**Pencatatan Sipil**			
1a	Jumlah anak usia 0 - 18 tahun	43.070	39.712	38,775
1b	Jumlah anak usia 0 - 18 tahun yang sudah memiliki Akta Lahir	37.225	35.973	35,575
1c	Persentasi anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki Akta Lahir	**86,43**	**90,58**	**91,75**
2	Akta Kematian	2.760	3.471	4,124
3	Akta Perkawinan	11.759	34.648	39,067
4	Akta Perceraian	82	284	338
C	**Pengelolaan Informasi Kependudukan**			
1	Jumlah organisasi Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	5	5	0

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, 2024

Dari tabel, persentase penduduk wajib KTP yang sudah ber-KTP pada tahun 2022 sebesar 74,22 persen, Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA mencapai 41,16 persen. Setiap tahun terdapat penambahan jumlah akta pencatatan sipil, yang mengindikasikan meningkatnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat akan pentingnya kepemilikan akta pencatatan sipil

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengembangkan Indeks Desa Membangun. Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2023 adalah berkembang dengan skor 0,6337. Skor IDM di tahun 2023 ini mengalami sedikit kenaikan, yaitu 7,84 persen dari skor tahun 2022 sebesar 0,5553.

Sementara dari 9 kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat, Kecamatan Sahu Timur merupakan wilayah dengan peringkat terbaik pada tahun 2023. Status IDM Kecamatan Sahu Timur pada tahun 2023 adalah Berkembang dengan skor 0,6211, sedikit mengalami kenaikan sebesar 2,03 persen dibanding skor tahun sebelumnya 0,6008 Peningkatan skor IDM yang cukup signifikan terjadi pada Kecamatan Sahu, yaitu dari 0,5600 pada tahun 2021 menjadi 0,5951 atau 6,28 persen, namun masih termasuk dalam status tertinggal. Sementara Kecamatan Ibu yang pada tahun 2022 berstatus tertinggal dengan skor IDM 0,5987 mengalami kenaikan sebesar 2,19 persen menjadi 0,6206 pada tahun 2023 dengan status berkembang.

Tabel 2.72
Status Indeks Desa Membangun menurut Kecamatan
di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa Menurut Status IDM					Rata-Rata IDM
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
1	Jailolo	-	-	18	10	6	0.5887
2	Jailolo Selatan	-	-	10	9	7	0.5658

3	Jailolo Timur	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Sahu	-	2	12	2	3	0.6211
5	Sahu Timur	-	1	11	6	0	0.6091
6	Ibu	-	1	11	4	1	0.6206
7	Ibu Selatan	-	-	4	10	1	0.5638
8	Tabaru	-	-	6	9	0	0.585
9	Loloda	-	-	1	11	5	0.4929
10	Loloda Tengah	-	-	-	2	8	0.486
Halmahera Barat		**0**	**4**	**73**	**63**	**31**	**0.6337**
Persentase		**-**	**2.34**	**4,27**	**3,68**	**18,12**	

Sumber : KemenDesPDTT, 2024

Tabel 2.73
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023

No	Nama Desa	Ketua Bumdes	Kecamatan	Status
1	Guaimaadu	Bum Desa Posi Posi Guaimaadu	Jailolo	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
2	Bobo	Bum Desa Masigaro Ahu Bobo	Jailolo	Nama Terverifikasi
3	Toboso	Bum Desa Mau Mete Toboso	Jailolo	Nama Terverifikasi
4	Buku Matiti	Bum Desa Lembah Hijau Buku Matiti	Jailolo	Nama Terverifikasi
5	Tuada	Bum Desa Jiko Banau Tuada	Jailolo	Nama Terverifikasi
6	Matui	Bum Desa Jiko Maogo Matui	Jailolo	Nama Terverifikasi
7	Buku Bualawa	Bum Desa Maku Dudara Buku Bualawa	Jailolo	Nama Terverifikasi
8	Guaria	Bum Desa Babua Indah Guaria	Jailolo	Nama Terverifikasi
9	Bobo Jiko	Bum Desa Bangkit Bersama Bobo Jiko	Jailolo	Nama Terverifikasi
10	Buku Maadu	Bum Desa Sinyinga Moi Buku Maadu	Jailolo	Nama Terverifikasi
11	Bakun Pante	Bum Desa Baru Terbit Bakun Pante	Loloda	Nama Terverifikasi
12	Barataku	Bum Desa Maleo Barataku	Loloda	Nama Terverifikasi
13	Gam Kahe	Bum Desa Wori Moi Gam Kahe	Loloda	Nama Terverifikasi
14	Tosomolo	Bum Desa Doku Marawongo Tosomolo	Loloda	Nama Terverifikasi
15	Bilote	Bum Desa Anugerah Bilote	Loloda	Nama Terverifikasi
16	Maritango	Bum Desa Kharisma Maritango	Ibu	Nama Terverifikasi
17	Naga	Bum Desa Pomarimoi Naga	Ibu	Nama Terverifikasi
18	Lako Akelamo	Bum Desa Tongungano Lako Akelamo	Sahu	Nama Terverifikasi
19	Taruba	Bum Desa Mari Rete Taruba	Sahu	Nama Terverifikasi

20	Peot	Bum Desa Jere Ma Kolano Peot	Sahu	Nama Terverifikasi
21	Goro Goro	Bum Desa Surya Pagi Goro Goro	Sahu	Nama Terverifikasi
22	Balisoang	Bum Desa Kampalar Balisoang	Sahu	Nama Terverifikasi
23	Golo	Bum Desa Kie Manuru Golo	Sahu	Nama Terverifikasi
24	Lako Akederi	Bum Desa Pd. Saicico Mandiri Lako Akederi	Sahu	Nama Terverifikasi
25	Jara Kore	Bum Desa Talaga Rano Jara Kore	Sahu	Nama Terverifikasi
26	Dere	Bum Desa Rion Rion Dere	Sahu	Nama Terverifikasi
27	Balisoan Utara	Bum Desa Ma'usigaro Balisoan Utara	Sahu	Nama Terverifikasi
28	Domato	Bum Desa Bidadari Domato	Jailolo Selatan	Nama Terverifikasi
29	Gamlenge	Bum Desa Usbar Gamlenge	Jailolo Selatan	Nama Terverifikasi
30	Dodinga	Bum Desa Bina Bersama Dodinga	Jailolo Selatan	Nama Terverifikasi
31	Braha	Bum Desa Pribumi Mandiri Braha	Jailolo Selatan	Nama Terverifikasi
32	Bobane Dano	Bum Desa Baru Terbit Bobane Dano	Jailolo Selatan	Nama Terverifikasi
33	Ratem	Bum Desa Fomarimoi Ratem	Jailolo Selatan	Nama Terverifikasi
34	Todoke	Bum Desa Danau Pareta Todoke	Ibu Utara	Nama Terverifikasi
35	Gamomeng	Bum Desa Sinar Kasih Gamomeng	Sahu Timur	Nama Terverifikasi
36	Awer	Bum Desa Ma'u Rion Awer	Sahu Timur	Nama Terverifikasi
37	Aketola	Bum Desa Masa Bangun Aketola	Sahu Timur	Nama Terverifikasi
38	Gamiyel	Bum Desa Boloar Gamiyel	Sahu Timur	Nama Terverifikasi
39	Golago Kusuma	Bum Desa Sri Rejeki Golago Kusuma	Sahu Timur	Nama Terverifikasi
40	Gamsugi	Bum Desa Talaga Rano Gamsugi	Sahu Timur	Nama Terverifikasi
41	Campaka	Bum Desa Tegerese Campaka	Sahu Timur	Nama Terverifikasi
42	Air Panas	Bum Desa Sumber Arum Air Panas	Sahu Timur	Nama Terverifikasi

Sumder DPMPD Ka. Halmahera Barat 2024

7. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui

pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk. Dengan penduduk tumbuh seimbang, maka daya tampung dan daya dukung lingkungan dapat tetap terjaga..

Dalam upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat terus berupaya menggalakkan Keluarga Berencana. Keluarga Berencana (KB) merupakan gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. KB bermakna perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran.

Capaian kinerja pembangunan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam berikut.

Tabel 2.74
Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Total Fertility Rate (TFR)	2,33	2,31	1,33
Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun (tahun)	31,07	30,05	11,7
Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,0	2,9	3,5
Rasio akseptor KB (persen)	53,31	53,75	53,91
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-50 tahun (persen)	86	86	68,89
Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	20,01	18,86	22,07

Uraian	2020	2021	2022
Total Fertility Rate (TFR)	2,05	2,33	2,31
Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun (tahun)	31,4	31,07	30,05
Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,1	3,0	2,9
Rasio akseptor KB (persen)	88,22	53,31	53,75
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-50 tahun (persen)	74	86	86
Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	10,6	20,01	18,86

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Halmahera Barat, 2024

8. Urusan Perhubungan

Capaian kinerja pembangunan urusan Perhubungan di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi wilayah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Hingga tahun 2022, di Kabupaten Halmahera Barat terdapat 21.285 kendaraan yang didominasi sepeda motor (89,78 persen) (sumber : http://rc.korlantas.polri.go.id). Dari total 51 ruas jalan di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, baru 5 (lima) atau 9,62 persennya yang telah dilengkapi sarana perlengkapan jalan secara

memadai. Jumlah desa yang terlayani trayek angkutan umum tetap baru sebanyak 32 desa. Tercatat jumlah penumpang angkutan umum menunjukkan tren peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dari 85.112 orang pada tahun 2021 menjadi 112.564 orang di tahun 2022 dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 140.705 orang. Adapun jumlah terminal angkutan umum tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 2023, yaitu sebanyak 5 (lima) terminal, terdiri dari:

1) Terminal Jailolo, di Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo
2) Terminal Payo, di Desa Payo, Kecamatan Jailolo
3) Terminal Goal, di Desa Golago Kusuma, Kecamatan Sahu Timur
4) Terminal Sidangoli, di Desa Sidangoli, Kecamatan Jailolo Selatan
5) Terminal Boso, di Desa Boso, Kecamatan Jailolo Selatan

Dari kelima terminal yang ada, hanya 2 (dua) terminal yang beroperasi aktif, yaitu Terminal Sidangoli dan Terminal Boso.

Dari kelima terminal yang ada, hanya 2 (dua) terminal yang beroperasi aktif, yaitu Terminal Sidangoli dan Terminal Boso.

b. Perhubungan Laut

Sampai dengan tahun 2022 telah terdapat 17 pelabuhan/dermaga yang terbagi dalam 6 (enam) jenis pelabuhan. Terkecuali pelabuhan khusus dan beberapa pelabuhan lokal/Speed Boat, semua pelabuhan dibangun (dimiliki) oleh Kementerian Perhubungan, sebagai berikut:

1) Pelabuhan Regional
    a) Pelabuhan Kelas III Jailolo, di Desa Gufasa Kecamatan Jailolo
2) Pelabuhan Lokal
3) Pelabuhan Kedi, di Desa Kedi Kecamatan Loloda
4) Pelabuhan Dodinga, di Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan
5) Pelabuhan Bobaneigo, di Desa Bobaneigo Kecamatan Jailolo Timur
6) Pelabuhan Bataka, di Desa Bataka Kecamatan Ibu
7) Pelabuhan Penyeberangan
    a) Pelabuhan Ferry Sidangoli, di Desa Sidangoli Kecamatan Jailolo Selatan
8) Pelabuhan Lokal/Speed Boat (SB)

a) Pelabuhan SB Jailolo, di Desa Gufasa Kecamatan Jailolo
b) Pelabuhan SB Sidangoli, di Desa Sidangoli Kecamatan Jailolo Selatan
c) Pelabuhan SB Dodinga, di Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan
d) Pelabuhan SB Bobaneigo, di Desa Bobaneigo Kecamatan Jailolo Timur
e) Pelabuhan SB Kedi, di Desa Kedi Kecamatan Loloda
f) Pelabuhan SB Tongute Ternate, di Desa Tongute Ternate Kecamatan Ibu
g) Pelabuhan SB Payo, di Desa Payo Kecamatan Jailolo

9) Pelabuhan Kontainer
a) Pelabuhan Matui, di Desa Matui Kecamatan Jailolo

10) Pelabuhan Khusus
a) Pelabuhan PT. Taiwi Sidangoli, di Kecamatan Jailolo Selatan
b) Pelabuhan Perikanan Tuada, di Kecamatan Jailolo
c) Pelabuhan Perikanan Ruba-Ruba, di Kecamatan Loloda

Secara keseluruhan, gambaran perkembangan kinerja urusan perhubungan di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut

Tabel 2.75
Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2021-2023

No	Uraian	2022	2023
A	**Arus Penumpang**		
1	Jumlah Penumpang Angkutan Umum (orang)	112.564	140.705
2	Jumlah Penumpang Kapal Laut/Pel. Penyeberangan (orang)	155.983	100.158
B	**Arus Barang (Kapal Laut)**		
1	Bongkar (Ton)	28.945	30.149
2	Muat (Ton)	2.745	11.829
C	**Terminal/Pelabuhan**		
1a	Jumlah Terminal Angkutan Umum	5	5
1b	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang beroperasi	2	2
2	Jumlah Pelabuhan/Dermaga	17	17

No	Uraian	2022	2023
D	**Trayek Angkutan Umum**		
1	Jumlah Desa terlayani trayek angkutan umum tetap	32	32
E	**Sarana Keselamatan Jalan**		
1	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten	51	51
2	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten yang telah di pasang Rambu-rambu secara lengkap	5	5
F	**Kecelakaan LLAJ**		
1	Jumlah Kecelakaan	15	18
2	Jumlah Korban Meninggal dunia	15	20
G	**Uji Kir Kendaraan Bermotor**		
1	Jumlah Kir Angkutan Umum	-	
2	Jumlah Kir Bentor	-	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat, 2024

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Dinas Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian memiliki tupoksi merumuskan kebijakan pelaksanaan dan evaluasi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi di lingkup pemerintah daerah; Penyediaan konten lintas sektoral, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, serta layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan layanan keamanan informasi *e-government*.

Dari sisi Informasi dan Komunikasi Publik, penyebarluasan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dilakukan melaui sejumlah media/sarana, antara lain website pada alamat: http://halbar.go.id/; dan Facebook pada

https://www.facebook.com/KominfoHalbar. Laman http://halbar.go.id/ merupakan sarana utama penyebarluasan informasi meliputi: a) Data SKPD yang memuat data/informasi; Laporan Kinerja (LKj); Dokumen Perencanaan; b) Regulasi yang memuat data/informasi antara lain: Instruksi Bupati, Nota Dinas, Peraturan Bupati, Peraturan Daerah, Standar Operasi Prosedur (SOP),; dan c) Pengumuman, yang memuat data/infomasi agenda atau peristiwa-peristiwa penting di daerah. Namun demikian, data/informasi yang tersaji dalam webiste belum terkelola secara optimal dimana masih banyak data/informasi dari perangkat daerah yang belum diperbaharui secara reguler.

Tabel 2.76
Kinerja Urusan Kominfo, Statistik dan Persandian Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
A	**Komunikasi dan Informatika**			
1	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0	9	9
2	Akses telekomunikasi (persentase desa tersedia sinyal/jaringan telekomunikasi seluler)	64	82	92
B	**Statistik**			
1	jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	1	1	1
2	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	1	1	1
C	**Persandian**			
1				
2				

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat, 2024

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi UKM di Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM berdasarkan Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Halmahera Barat. Capaian kinerja pembangunan urusan Koperasi dan UKM di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.77
Perkembangan Koperasi dan UKM Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
A	**Koperasi**			
1	Jumlah Koperasi	180	182	184
2	Jumlah Anggota	8243	8740	8840
3	Jumlah Koperasi Aktif	30	30	34
4	Jumlah Koperasi Sehat	0	0	0
5	**Persentasi Koperasi Aktif**	**16,67**	**16,48**	**16,51**
B	**UMKM**			
1	Jumlah Usaha Mikro	3.524	4.570	4.590
2	Jumlah Usaha Kecil	38	40	0
3	Jumlah Usaha Menengah	22	24	0
4	Jumlah UMKM	3.584	4.634	4.590

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat, 2024

11.Urusan Penanaman Modal

Perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.78
Perkembangan Realisasi Investasi
di Kabupaten Halmahera Tahun 2021-2023

No	Sumber Investasi/ Sektor	2021		2022		2023	
		Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
A	**PMA***						
1	Pertambangan	-	-	-	-	1	750.000.000.000
	Total PMA	**-**	**-**			**1**	**750.000.000.000**
B	**PMDN****			-	-		
1	Pertambangan	-	-	-	-	3	1.499.000.000.000
2	Industri Mineral Non Logam	-	-			2	50.000.000.000
3	Konstruksi			1	128,300.00	26	50.000.000.000
4	Perdagangan dan Reparasi	2	0,0	1	0,0	-	-
5	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	-	-	1	1,5000.000.000	1	56.000.000.000
6	Listrik, Gas dan Air	1	677,8	-	-	2	2.500.000.000
	Total PMDN	**3**	**677,8**	**49**	**13.568,000.000**	**35**	**2.407.500.000.000**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Halmahera Barat, 2024 (nswi.bkpm.go.id)
**) Nilai investasi dalam Ribu USD*
***) Nilai investasi dalam Rp. Juta*

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja pembangunan urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.79
Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
A	**Kepemudaan**			
1	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten (Organisasi Nasional yang memiliki perwakilan/ cabang di Kabupaten)	20	21	21
2	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Desa/Kecamatan (Organisasi yang dibentuk/didirikan hanya dalam skala lokal Kabupaten/kecamatan/desa, dan terdaftar atau sepengetahuan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/Desa)	172	172	172
3	Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Internasional/Nasional/Provinsi	1	1	1
B	**Olahraga**			
1	Jumlah Organisasi Olahraga Tingkat Kabupaten (Organisasi Nasional yang memiliki perwakilan/ cabang di Kabupaten)	21	21	21
2	Jumlah Klub Olahraga Tingkat Desa/Kecamatan (Klub yang dibentuk/didirikan hanya dalam skala lokal Kabupaten/kecamatan/desa, dan terdaftar atau sepengetahuan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/ Desa)	67	70	75
3	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Internasional/ Nasional/Provinsi (PON/Kejurnas/Porda/Kejurda)	21	28	32
4	Jumlah Atlet Pelajar Berprestasi Tingkat Internasional/ Nasional/Provinsi (POPNAS/POPDA/dll)	45	60	65
C	**Pramuka**			
1	Jumlah Satuan Karya (SAKA) Pramuka yang telah terbentuk di tingkat Kabupaten	4	4	5
2	Jumlah Kecamatan memiliki Kwartir Ranting Pramuka	6	6	6
3	Jumlah Sekolah Memiliki Gugus Depan Pramuka			
	a. SD/sederajat	26	26	41
	b. SMP/sederajat	53	53	57
	c. SMA/sederajat	32	38	40

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat, 2024

13. Urusan Kebudayaan

Halmahera Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keragaman suku dan budaya. Penduduk Halmahera Barat terdiri dari masyarakat Kesultanan Jailolo, Suku Sahu, Ternate, Wayoli, Gorap, Loloda, Gamkonora, dan Tabaru. Setiap suku di Halmahera Barat memiliki keunikan dan nilai-nilai kearifan budaya yang masih dipegang teguh oleh masyarakatnya. Namun nilai-nilai luhur dalam budaya Halmahera Barat ini masih belum dikelola secara optimal untuk menambah referensi bagi peningkatan khasanah kebudayaan dan penguatan pendidikan karakter masyarakat

14. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Capaian kinerja pembangunan urusan Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.80
Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
A	**Perpustakaan**			
1	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah	1	1	1
2	Jumlah Perpustakaan milik non Pemerintah Daerah (termasuk Perpustakaan di Desa)	56	56	56
3	Total Perpustakaan (1+2)	57	57	57
B	**Koleksi Buku**			
1	Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah (exp)	6.417	6.417	7.316
2	Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Desa (exp)	3.221	3.221	3.221
3	**Total Koleksi Buku (1+2)**	9.638	9.638	10.582
C	**Pengunjung**			
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemerintah Daerah	427	54	193
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Non Pemerintah Daerah	50	186	245
3	Total Pengunjung Perpustakaan	477	240	437

	(1+2)			
D	**Kearsipan**			
1	Jumlah organisasi perangkat daerah yang sudah mengelola arsip secara baku	3	6	6

Sumber: Dinas Perpustakan dan Kearsipan Kabupaten Halmahera Barat, 2024

C. Layanan urusan Pilihan

1. Urusan kelautan dan perikanan

Capaian kinerja pembangunan urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.81
Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Kapal Penangkapam Ikan Menurut Jenisnya			
Perahu Motor Tempel	368	399	419
Perahu Tanpa Motor	207	156	145
Pajeko/Purse Seine dan Kapal Motor	56	62	67
Total	**631**	**617**	**631**
Produksi dan Konsumsi Perikanan			
Perikanan Tangkap (Ton)	17.165	17.980	17.945
Perikanan Budidaya (Ton)	308	309,6	300,7
Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	65	65	65
Rumah Tangga Perikanan			
Jumlah Rumah Tangga Perikanan	1680	1685	1705
Kelompok Binaan Kelautan dan Perikanan			
Usaha Bersama (KUB)	480	487	487
Pembudidaya-Ikan Kecil (POKDAKAN)	140	143	143
Pengolahan Pemasar (POKLAHAR)			
Masyarakat Pengawas (POKMAWAS)	1	1	1

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat, 2024

2. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata di Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat No. 30 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata.

Capaian kinerja pembangunan urusan Pariwisata di Kabupaten rat sampai dengan tahun 2023, tersaji dalam tabel berikut

Tabel 2.82
Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
A	**Destinasi**			
1	Jumlah Potensi Destinasi/ODTW	115	120	122
2	Jumlah Potensi Destinasi/ODTW yang telah dikembangkan (oleh Pemda/ Swasta/masyarakat)	12	13	15
B	**Kunjungan Wisatawan**			
1	Wisatawan Mancanegara (orang)	75	243	478
2	Wisatawan Nusantara (orang)	9.802	75.718	81.917
C	**Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan**			
1	Wisatawan Mancanegara (Hari)	2	2	2
2	Wisatawan Nusantara (Hari)	3,5	3,5	3,5
D	**Ekonomi Kreatif**			
1	Jumlah Pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang telah mendapatkan fasilitasi pemberdayaan (kumulatif)	15	15	15
E	**Fasilitas Akomodasi**			
1	Restoran/RumahMakan/Kafe	82	91	93
2	Hotel/Penginapan	21	21	21
3	Jumlah Kamar	240	237	235
4	Jumlah Tempat Tidur	254	251	248

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat, 2024

3. Urusan Pertanian

Capaian kinerja pembangunan urusan Pertanian di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.83
Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2021 - 2023

No	Uraian	2021	2022	2023
A	**Produksi Pertanian**			
1	Tanaman Pangan (Ton)			
	- Padi	1.023	593	320,7
	- Jagung	1.698	1.784	3.342,0
	- Ubi Kayu	3.540	3.000	500,0
	- Ubi Jalar	800	1.400	340,0
2	Tanaman Perkebunan (Ton)			
	- Kelapa	32.915	35.566	35.566
	- Pala	653	653	653
	- Cengkeh	448	448	448
3	Tanaman Hortikultura (Kuintal)			
	- Bawang Merah	30,00	2.862	1.229,60
	- Petsai	10.322	8.069,65	6.300,90
	- Cabe	13.136	11.404	10.88,56
	- Tomat	16.507	16.479,45	15.426,45
	- Terung	11.062	12.310,90	10.918,65
	- Ketimun	6.482	4.120,50	4.140,60
	- Alpukat	923,35	4.072,12	4.087,36
	- Duku/Langsat/Kokosan	2.674,55	66.878,66	67.786,84
	- Durian	2.859,48	77.287,08	80.071,68
	- Jeruk	1.338,0	2.171,40	2.169,51
	- Mangga	1.504,0	31.955,20	31.684,80
	- Nenas	241,85	1.834,74	958,82
	- Pepaya	305,45	10.821,54	5.361,66
	- Pisang	10.274,10	62.635,50	59.198,40
	- Rambutan	5.343,80	129.160	75.504,66
	- Salak	286,35	10.696,51	13.463,88
B	**Produksi Peternakan (Populasi/ Ekor)**			
	- Sapi	26.338	26.558*	26.655*
	- Kambing	23.184	23.184*	23.599*
	- Itik	12.797	12.797*	12.871*

No	Uraian	2021	2022	2023
	- Babi	46.008	46.008*	46.872*
	- Ayam Petelur	16.000	16.000*	16.000*
	- Ayam Kampung	193.940	193.940*	203.735*
	- Ayam Pedaging	5.400	5.400*	5.200*
C	**Produksi Daging (Ton)**			
	- Daging Sapi	45.547	47.547*	68.922*
	- Daging Kambing	1.250	1.250*	1.250*
	- Daging Babi	1.109.350	1.109.550*	1.031.030*
	- Ayam Kampung	256.001	259.001*	268.932*
	- Ayam Pedaging	46.094	46.094*	44.387*
	- Itik	7.038	7.038*	7.097*
D	Jumlah Kelembagaan Petani/Kelompok Tani	570	340*	304
E	Jumlah Kelembagaan Petani/ Kelompok Tani yang ditingkatkan kapasitasnya	148	89*	111

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat, 2024
**) Menunggu Verifikasi dan Validasi Pada Musrenbangtan Tk. Propinsi Malut, Maret 2024*
**) Jumlah kelompok tani berkurang karena sementara dilakukan validasi data kelompok oleh Kementerian Pertanian*

4. Urusan Perdagangan

Sampai dengan tahun 2023, jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 1.624 yang meliputi Pasar Umum sebanyak 22 unit, Pasar Desa 0 Unit, Toko 171 unit dan Kios 1.525 unit. Perkembangan jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Halmahera Barat sepanjang periode 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.84
Perkembangan Sarana Perdagangan
Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Pasar umum	21	22	22
2	Pasar desa	0	0	0
3	Toko	160	160	171
4	Kios	1436	1525	1525

Sumber : Dinas PerindagKopUKM Kabupaten Halmahera Barat, 2024

Secara umum pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, meningkatkan pendapatan produsen terutama produsen hasil pertanian rakyat dan pedagang, melindungi kepentingan konsumen, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja.

6. Urusan Perindustrian

Industri merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam perekonomian Kabupaten Halmahera Barat. Namun kontribusi sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian daerah mengalami tren penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Kontribusi sektor industri pengolahan pada tahun 2022 sebesar 4,08 persen atau telah berkurang 0,04 persen poin dari tahun 2021 yang tercatat sebesar 4,12 persen. Hingga tahun 2022, sektor industri di Kabupaten Halmahera Barat masih didominasi oleh perusahaan industri kecil, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.85
Perkembangan Perusahaan Industri
Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
A	**Perusahaan Industri Besar**			
1	Jumlah Perusahaan	-	-	-
2	Jumlah Tenaga Kerja	-	-	-
B	**Perusahaan Industri Sedang**			
1	Jumlah Perusahaan	-	-	-
2	Jumlah Tenaga Kerja	-	-	-
C	**Perusahaan Industri Kecil**			
1	Jumlah Perusahaan	430	436	-
2	Jumlah Tenaga Kerja	2.105	2.136	-

Sumber : Dinas PerindagKopUKM Kabupaten Halmahera Barat, 2024

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Unsur pendukung urusan pemerintahan diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Capaian kinerja dalam penyelenggaraan unsur

pendukung urusan pemerintaan di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.86
Kinerja Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
A	Sekretariat Daerah			
1	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	C	C	Proses penilaian
2	Nilai/Skor SAKIP	44,46	48,80	Proses Penilaian
3a	Jumlah kerjasama daerah (MoU) (kumulatif)	6	15	11
3b	Jumlah kerjasama daerah (MoU) yang ditindaklanjuti	6	14	10
4	Jumlah lembaga keagamaan/organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan fasilitasi bina mental spiritual	5	51	51
B	Sekretariat DPRD			
1	Jumlah Ranperda dalam Prolegda	9	9	9
2	Jumlah Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda	6	6	6

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat, 2023; Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Barat, 2024

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur penunjang urusan pemerintahan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Keuangan), Badan Kepegawaian dan Diklat (Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan).

Capain kinerja dalam penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintaan di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.87
Kinerja Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

No	Uraian	Capaian Kinerja

		2021	2022	2023
A	**Perencanaan**			
1	Tingkat capaian kinerja penyelenggraan pemerintahan daerah (persen)	44,46	Proses Penilaian	Proses Penilaian
B	**Keuangan**			
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (persen)	10,17	11,50	4,90
2	Rasio Efektifitas PAD (persen)	13,66	29,86	
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	Proses Penilaian
C	**Kepegawaian**			
1	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)	3.717	3.581	3.546
2	Kedisiplinan Aparatur			
	– Jumlah pelanggaran disiplin (kasus)	1	3	-
	– Jumlah pelanggaran disiplin (ASN)	1	2	2
2	Eseloneering			
	– Jumlah jabatan eseloneering yang tersedia	532	534	331
	– Jumlah jabatan eseloneering yang terisi	506	473	302
D	**Pendidikan dan Pelatihan**			
1	Rasio pegawai ASN berkualifikasi pendidikan tinggi (persen)	73,93	77,41	57
2	Rasio pegawai ASN fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan)	28,30	32,47	29
E	**Penelitian dan Pengembangan**			
1	Indeks Inovasi Daerah	50,20	38,83	39,18

2	Jumlah Inovasi Daerah yang terdaftar pada portal indeks inovasi daerah Kementerian Dalam Negeri	4	2	8
3	Indeks SDM Penelitian & Pengembangan Daerah	-	-	-

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Halmahera Barat, 2023; BPKD Kabupaten Halmahera Barat, 2023; BKD Kabupaten Halmahera Barat, 2024

F. Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan

Layanan unsur pengawasan diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat, dengan capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.88
Kinerja Layanan Unsur Pengawasan
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
1a	Jumlah Temuan Hasil Pengawasan	218	324	35
1b	Jumlah Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	8	26	33
2a	Jumlah Pengaduan Masyarakat	19	9	10
2b	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	7	9	5
3	Level Marturitas Sistem Pengendalian Intern Pemda (SPIP) (berdasarkan hasil QA BPKP)	Level 3	Level 3	Level 3
4	Skor Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) (berdasarkan hasil QA BPKP)	3,00	3,00	3,00

Sumber : Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat, 2024

G. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Layanan unsur pemerintahan umum diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Barat, dengan

capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.89
Kinerja Layanan Unsur Pemerintahan Umum
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
1	Jumlah partai politik dan lembaga pendidikan tingkat kabupaten yang memperoleh fasilitasi Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (kumulatif)	16 9	18 9	18 9
2	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan (kumulatif)	10 79	- 88	- 92
3	Tingkat partisipasi politik masyarakat (persen)	-	-	-
4	Persentase Konflik Skala Kabupaten yang Diselesaikan	1	0	1
5	Persentase Pengurangan resiko gangguan konflik/ konflik yang teridentifikasi	90	90	90

Sumber : Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Halmahera Barat, 2024

2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merepresentasikan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Aspek daya saing daerah dapat mencakup antara lain: kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Gambaran kondisi aspek daya saing di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran rumah tangga

atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga dalam hal ini berfungsi sebagai konsumen akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia. Perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga per Kapita penduduk Kabupaten Halmahera Barat selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.90
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita(Rp)	1.008.889	1.067,139	1.237,360
Pangan (Rp)	437.499	545.698	617.527
Non Pangan (Rp)	601.249	461.440	619.833
Persentasi pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	48,33	45,82	54,18

Sumber: Provinsi Maluku Utara Dalam Angka, 2021 -2023

. Pada tahun 2023, persentase pengeluaran konsumsi non makanan sebesar 54,18 persen atau meningkat 8,36 persen poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 45,82 persen. Dalam tiga tahun terakhir proporsi pengeluaran konsumsi non makanan mengalami Fkuktuatif dari 48,33 Persen menurun menjadi 45,82 Persen dan meningkat kembali menjadi 54,18 persen.

Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani di suatu wilayah, karena mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untukusaha maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Semakin tinggi NTP atau peningkatan NTP suatu periode, maka makin tinggi pula kenaikan kesejahteraan petani pada wilayah tersebut. Nilai Tukar Petani yang baik sangat penting bagi Maluku Utara karena sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencahariannya pada sektor ini. NTP adalah perbandingan indeks harga diterima oleh

petani terhadap indeks harga yang dibayar oleh petani. Istilah yang berkaitan dengan NTP adalah sebagai berikut:

1) Bila NTP lebih besar dari 100, maka dapat diartikan bahwa perubahan harga yang dibayar petani secara rata-rata lebih kecil dibandingkan yang diterima petani dari usaha pertaniannya,
2) Bila NTP suatu periode lebih besar dibandingkan periode sebelumnya maka dapat diartikan bahwa kemampuan daya beli atau tingkat kesejahteraan petani periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya,
3) NTP dihitung menurut subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman perkebunan rakyat, subsektor peternakan dan subsektor perikanan,
4) Bila NTP diperbandingkan antar subsektor atau antar wilayah, NTP dapat diartikan sebagai insentif untuk berusaha.

Subsektor atau wilayah dengan NTP yang lebih besar, berarti berusaha di bidang pertanian pada subsektor atau wilayah tersebut lebih menguntungkan dibandingkan pada subsektor atau wilayah lain, karena memberikan insentif yang lebih besar. Merujuk pada Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara pada periode tahun 2021 - 2023, memperlihatkan kecenderungan yang menurun pada tahun 2023. Adapun indeks harga yang diterima petani (It) pada tahun 2021 sebesar 118,23 atau mengalami kenaikan pada tahun 2022 yaitu sebesar 125,23 atau sebesar sebesar 7,00 dan mengalami penurunan kembali menjadi 122,66 PADA Tahun 2023 atau sebesar 2,57 Sementara pada indeks harga yang dibayar petani (lb) dimana pada tahun 2021 sebesar 109,12 atau mengalami peningkatan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 114,89 atau 5,77 dan meningkat kembali pada Tahun 2023 menjadi 118,32 atau 3,43.

Gambaran perkembangan rata-rata NTP Provinsi Maluku Utara pada kurun waktu tahun 2021-20223 sebagaimana tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.91
Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 – 2023

Uraian	2021	2022	*2023*
Indeks harga yang diterima petani (It)	118,23	125,23	*122,66*
Indeks harga yang dibayar petani(Ib)	109,12	114,89	*118,32*
Nilai Tukar Petani (NTP)	**108,34**	**101,71**	***103,37***

Sumber : Statistik Nilai Tukar Petani Tahun 2023

Secara keseluruhah Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2021 sampai 2023 berada didiatas 100 yang artinya petani di Provinsi Maluku Utara mengalami surplus Dalam hal ini perubahan harga yang dibayar petani secara rata-rata lebih kecil dibandingkan yang diterima petani dari usaha pertaniannya. Ini mengindikasikan sektor pertanian yang merupakan tumpuan utama sebagian besar masyarakat sudah cukup memadai untuk memberikan kesejahteraan walaupun masih sangat kecil dan terbatas.

2.1.5.2 Fokus Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di suatu daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah dan infrastruktur, maka semakin berdaya saing wilayah tersebut.

A. Fasilitas Perbankan

Pada tahun 2023, jumlah kantor bank (Kantor Pusat, cabang, dan cabang pembantu) di Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 13 kantor, meningkat 85,7 persen dibandingkan tahun 2015 yang baru berjumlah 7 kantor. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut

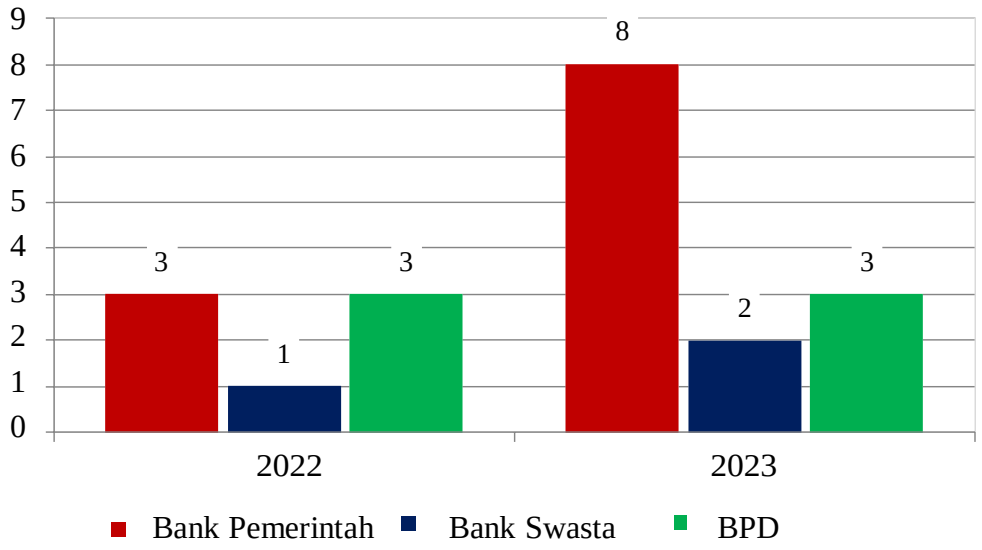


Diagram 2.3 Perkembangan Jumlah Kantor Bank Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 - 2023

(Sumber: halbar dalam anggka 2022, 2023)

Dengan semakin banyaknya kantor Bank yang beoperasi, maka diharapkan dapat meningkatkan peran perbankan dalam memacu perekonomian daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh tidak langsungnya yaitu melalui kredit yang diberikan terhadap pelaku ekonomi seperti: Kredit Konsumsi, Kredit Produktif yang meliputi Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit UMKM yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap peningkatan kegiatan perekonomian dan kesempatan kerja di daerah, serta lebih lanjut akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, daya beli, usaha yang nantinya akanberpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

B. Fasilitas Akomodasi

Fasilitas akomodasi merupakan sarana yang penting dalam menunjang pariwisata daerah. Seiring dengan berkembangnya pariwisata di daerah maka permintaan akan fasilitas akomodasi yang memadai juga akan meningkat. Pada tahun 2023, jumlah fasilitas akomodasi (hotel dan penginapan) di Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 21 buah, dan jumlah kunjungan wisatawan fluktuatif dalam 4 (Empat) Tahun terakhir.

Tabel 2.92
Jumlah Wisatawan, Kunjungan dan Fasilitas Akomodasi
Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 – 2023

No	Uraian	2020	2021	*2022*
A	**Destinasi**			
1	Jumlah Potensi Destinasi/ODTW	115	*120*	122
2	Jumlah Potensi Destinasi/ODTW yang telah dikembangkan (oleh Pemda/ Swasta/masyarakat)	12	*13*	15
B	**Kunjungan Wisatawan**			
1	Wisatawan Mancanegara (orang)	75	*243*	478
2	Wisatawan Nusantara (orang)	9.802	*75.718*	81.917
C	**Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan**			
1	Wisatawan Mancanegara (Hari)	2	*2*	2
2	Wisatawan Nusantara (Hari)	3,5	*3,5*	3,5
D	**Ekonomi Kreatif**			
1	Jumlah Pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang telah mendapatkan fasilitasi pemberdayaan (kumulatif)	15	*15*	15
E	**Fasilitas Akomodasi**			
1	Restoran/RumahMakan/Kafe	82	*91*	
2	Hotel/Penginapan	21	*21*	*21*
3	Jumlah Kamar	308	240	235
4	**Jumlah Tempat Tidur**	**331**	**254**	248

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat, 2024

Keberadaan hotel masih terbatas pada tiga wilayah kecamatan, dengan ketersediaan terbanyak di Kecamatan Jailolo yang merupakan pusat ibukota pemerintahan KabupatenHalmahera Barat.

C. Infrastruktur Transportasi

Prasarana transportasi memiliki peran penting dalam menentukan kinerja logistik suatu wilayah. Aktivitas utama logistik yang mencakup transportasi dan pergudangan, memerlukan infrastruktur pelabuhan udara (*airport*), pelabuhan laut

(*seaport*), dan jalan raya *(road*). Prasarana jalan penting untuk menghubungkan transportasi antardaerah, terutama dari desa ke kota, dari kota kabupaten ke kota provinsi. Hingga tahun 2023, total panjang jalan yang terbangun di Kabupaten Halmahera Barat sepanjang 839,08 Km, yang meliputi 144,75 Km Jalan Nasional, 181,39 Km Jalan Provinsi dan 512,94 Km Jalan Kabupaten. Grafik berikut menyajikan komposisi panjang jalan di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2022 menurut kewenangan pembinaan.

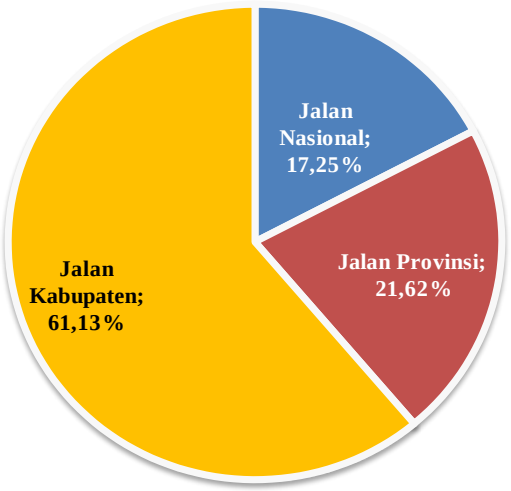


Diagram 2.4 Komposisi Panjang Jalan Menurut Kewenangan Pembinaan Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023
(Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Barat,BPS Provinsi Maluku Utara, 2023)

Adapun jumlah beberapa informasi tentang kinerja pembangunan urusan perhubungan diuraikan sebagai barikut :

Lalu-lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi wilayah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Hingga tahun 2022, di Kabupaten Halmahera Barat terdapat 20.852 kendaraan

yang didominasi sepeda motor (89,47 persen) (sumber : http://rc.korlantas.polri.go.id). Dari total 52 ruas jalan di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, baru 5 (lima) atau 9,62 persennya yang telah dilengkapi sarana perlengkapan jalan secara memadai. Jumlah desa yang terlayani trayek angkutan umum tetap baru sebanyak 32 desa. Tercatat jumlah penumpang angkutan umum menunjukkan tren peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dari 60.448 orang pada tahun 2022 menjadi 112.564 orang di tahun 2023. Adapun jumlah terminal angkutan umum tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 2023, yaitu sebanyak 5 (lima) terminal, terdiri dari:

1.Terminal Jailolo, di Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo
2. Terminal Payo, di Desa Payo, Kecamatan Jailolo
3.Terminal Goal, di Desa Golago Kusuma, Kecamatan Sahu Timur
4.Terminal Sidangoli, di Desa Sidangoli, Kecamatan Jailolo Selatan
5.Terminal Boso, di Desa Boso, Kecamatan Jailolo Selatan

Dari kelima terminal yang ada, hanya 2 (dua) terminal yang beroperasi aktif, yaitu Terminal Sidangoli dan Terminal Boso.

Adapun untuk perhubungan laut, Sampai dengan tahun 2023 telah terdapat 17 pelabuhan/dermaga yang terbagi dalam 6 (enam) jenis pelabuhan. Terkecuali pelabuhan khusus dan beberapa pelabuhan lokal/Speed Boat, semua pelabuhan dibangun (dimiliki) oleh Kementerian Perhubungan, sebagai berikut:

11) Pelabuhan Regional
    a) Pelabuhan Kelas III Jailolo, di Desa Gufasa Kecamatan Jailolo
12) Pelabuhan Lokal
13) Pelabuhan Kedi, di Desa Kedi Kecamatan Loloda
14) Pelabuhan Dodinga, di Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan
15) Pelabuhan Bobaneigo, di Desa Bobaneigo Kecamatan Jailolo Timur
16) Pelabuhan Bataka, di Desa Bataka Kecamatan Ibu
17) Pelabuhan Penyeberangan
    a) Pelabuhan Ferry Sidangoli, di Desa Sidangoli Kecamatan Jailolo Selatan
18) Pelabuhan Lokal/Speed Boat (SB)
    a) Pelabuhan SB Jailolo, di Desa Gufasa Kecamatan Jailolo
    b) Pelabuhan SB Sidangoli, di Desa Sidangoli Kecamatan Jailolo Selatan

c) Pelabuhan SB Dodinga, di Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan

d) Pelabuhan SB Bobaneigo, di Desa Bobaneigo Kecamatan Jailolo Timur

e) Pelabuhan SB Kedi, di Desa Kedi Kecamatan Loloda

f) Pelabuhan SB Tongute Ternate, di Desa Tongute Ternate Kecamatan Ibu

g) Pelabuhan SB Payo, di Desa Payo Kecamatan Jailolo

19) Pelabuhan Kontainer

a) Pelabuhan Matui, di Desa Matui Kecamatan Jailolo

20) Pelabuhan Khusus

a) Pelabuhan PT. Taiwi Sidangoli, di Kecamatan Jailolo Selatan

b) Pelabuhan Perikanan Tuada, di Kecamatan Jailolo

c) Pelabuhan Perikanan Ruba-Ruba, di Kecamatan Loloda

Secara keseluruhan, gambaran perkembangan capaian kinerja urusan perhubungan di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.93
Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
A	**Arus Penumpang**			
1	Jumlah Penumpang Angkutan Umum (orang)	85.112	112.564	140.705
2	Jumlah Penumpang Kapal Laut/Pel. Penyeberangan (orang)	135.562	155.983	100.158
B	**Arus Barang (Kapal Laut)**			
1	Bongkar (Ton)	24.642	28.945	30.149
2	Muat (Ton)	2.537	2.745	11.829
C	**Terminal/Pelabuhan**			
1a	Jumlah Terminal Angkutan Umum	5	5	5
1b	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang beroperasi	2	2	2
2	Jumlah Pelabuhan/Dermaga	17	17	17
D	**Trayek Angkutan Umum**			
1	Jumlah Desa terlayani trayek angkutan umum tetap	32	32	32

E	**Sarana Keselamatan Jalan**			
1	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten	51	51	51
2	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten yang telah di pasang Rambu-rambu secara lengkap	5	5	5
F	**Kecelakaan LLAJ**			
1	Jumlah Kecelakaan	10	15	18
2	Jumlah Korban Meninggal dunia	8	15	20
G	**Uji Kir Kendaraan Bermotor**			
1	Jumlah Kir Angkutan Umum	-	-	
2	Jumlah Kir Bentor	-	-	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat, 2024

D. Infrastruktur Energi

Tenaga listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik untuk kegiatan industri, kegiatan komersial maupun dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Energi listrik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan juga proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan alat-alat/mesin industri. Hingga tahun 2022, jumlah pembangkit listrik di Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 15 unit dengan daya terpasang 7.240 Kw dan daya mampu 5.240 Kw. Sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.70, jumlah pembangkit listrik terbanyak berada pada rayon Jailolo yaitu 8 unit dengan daya terpasang 4.800 Kw dan daya mampu 3.450 Kw.

Tabel 2.94
Unit Pembangkit Listrik, Daya Terpasang, dan Daya Mampu Menurut Unit Ranting PLN di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022

Unit Ranting	Unit Pembangkit Listrik	Daya Terpasang (Kw)	Daya Mampu (Kw)
Rayon Jailolo	8	4.800	**3.450**
KP Ibu	4	1.950	**1.500**
KP Kedi	3	490	**290**
Total	**15**	**7.240**	**5.240**

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2021

Tabel berikut menyajikan perkembangan jumlah pelanggan PLN menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022.

Tabel 2.95
Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019–2022

No	Kecamatan	2019	2020	2021
1	Jailolo	13.317	9.215	**9.515**
2	Jailolo Selatan	2.595	2.647	**2.574**
3	Sahu	-	2.391	**2.625**
4	Sahu Timur	-	2.505	**2.348**
5	Ibu	6.782	2.294	**2.572**
6	Ibu Selatan	-	2.537	**3.036**
7	Tabaru	-	1.745	**2.116**
8	Loloda	1.228	1.410	**1.259**
Halmahera Barat		**23.922**	**24.744**	**26.045**

Sumber :BPS Kab. Halmahera Barat, 2022

E. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Peranan dan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di segala sektor kehidupan tanpa sadar telah membawa dunia ke gerbang globalisasi tanpa batas dan tidak mengenal jarak. Dalam konteks ini siapapun dapat berkomunikasi dan mengakses segala informasi yang di butuhkan dengan cepat dan dimanapun keberadaannya. Dari sisi Informasi dan Komunikasi Publik, penyebarluasan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dilakukan melaui sejumlah media/sarana, antara lain website pada alamat: http://halbar.go.id/; dan Facebook pada https://www.facebook.com/KominfoHalbar. Laman http://halbar.go.id/ merupakan sarana utama penyebarluasan informasi meliputi: a) Data SKPD yang memuat data/informasi; Laporan Kinerja (LKj); Dokumen Perencanaan; b) Regulasi yang memuat data/informasi antara lain: Instruksi Bupati,

Nota Dinas, Peraturan Bupati, Peraturan Daerah, Standar Operasi Prosedur (SOP),; dan c) Pengumuman, yang memuat data/infomasi agenda atau peristiwa-peristiwa penting di daerah. Namun demikian, data/informasi yang tersaji dalam webiste belum terkelola secara optimal dimana masih banyak data/informasi dari perangkat daerah yang belum diperbaharui secara reguler.

Gambaran perkembangan kondisi layanan infrastrukur TIK di Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2022, sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.96
Kinerja Urusan Kominfo, Statistik dan Persandian
Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
A	**Komunikasi dan Informatika**			
1	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0	9	9
2	Akses telekomunikasi (persentase desa tersedia sinyal/jaringan telekomunikasi seluler)	64	82	92
B	**Statistik**			
1	jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	1	1	1
2	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	1	1	1
C	**Persandian**			
1				
2				

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat, 2023

2.1.5.3 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut seberapa banyak penduduk usia produksi di suatu wilayah. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas akan menjadi beban bagi pembangunan daerah. Sedangkan kualitas SDM berkenaan dengan mutu SDM yang menyangkut antara lain kemampuan, baik kemampuan fisik,

maupun nonfisik.

A) Kualitas Tenaga Kerja

Untuk meningkatkan daya saing bagi wilayah maka kualitas pasokan tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja yang tersedia pada suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Persentase Penduduk Lulusan S1, S2 dan S3 adalah proporsi penduduk usia 15 ke atas yang tamat S1, S2 dan S3 terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Tabel berikut menyajikan perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Halmahera BaratTahun 2017-2020.

Tabel 2.97
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2018-2020

Uraian	**2018**	**2019**	***2020***
Jumlah lulusan S1/S2/S3	4.522	5.980	*6.564*
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	79.245	81.108	*85.869*
Rasio Lulusan S1/S2/S3 (persen)	**5,71**	**7,37**	***7,64***

Sumber : Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

B) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan *(dependency ratio)* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktifdan tidak produktif lagi.

Pengelompokan jumlah atau persentase penduduk di tiap kelompok umur, akan dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) termasuk bayi dan anak (usia 0-4 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif (65 tahun ke atas). Di samping itu, melalui rasio ketergantungan juga dapat diketahui berapa persen penduduk yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan yaitu penduduk usia produktif atau yang berusia 15-64 tahun.

Tabel berikut menyajikan rasio ketergantungan Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022

Tabel 2.98
Rasio Ketergantungan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020-2022

Tahun	Kelompok Umur	Proporsi (%)	Rasio Ketergantungan
2020	Non Produktif (<15 & >64 Tahun)	35,12	**75,13**
	Produktif (15 - 64 Tahun)		
2021	**Non Produktif (<15 & >64 Tahun)**	40,18	**67,18**
	Produktif (15 - 64 Tahun)	59,82	
2022	**Non Produktif (<15 & >64 Tahun)**	35,12	**54,13**
	Produktif (15 - 64 Tahun)	64,88	

Sumber : Kabupaten Halmahera Barat Dalam Angka, 2023

Dari tabel, rasio ketergantungan Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020 sebesar 75,03, kemudian berkurang menjadi 67,18 persen pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 54,13 persen atau semakin membaik. Merujuk definisinya, *dependency ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan usia non produktif) dibandingkan dengan jumlah pendduk usia 15-64 tahun (usia produktif, dinyatakan dalam persen. Berdasarkan rasio ketergantungan 54,13 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) masih mempunyai tanggungan sebanyak 54 s/d 55 orang yang belum produktif dan dianggap tidak

produktif lagi. Secara umum besaran rasio ketergantungan menunjukkan beban ekonomi bagi penduduk umur produktif (usia kerja) yang menanggung penduduk pada umur tidak produktif.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pelaksanaan evaluasi capaian kinerja perencanaan pembangunan sampai tahun berjalan berdasarkan evaluasi RKPD tahun lalu dan RPJMD Tahun 2021-2026 pada program dan kegiatan yang besumber dari telaan hasil evaluasi pelakasanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Realisasi Renstra Perangkat daerah atau laporan pertanggung jawaban APBD tahun bekenan.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu secara keseluruhan yang dievaluasi dan dikelompokkan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. TelaanHasil Evaluasi mencakup :

1. Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaranyang direncanakan
2. Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yangdirencanakan
3. Realisasi Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja atau hasil yang direncanakan
4. Faktor-faktor tidak tercapainyan, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dankegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunandaerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untukmengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi program dan kegiatan pada RKPD tahun berjalan dapat dilihat pada Tabel 2.96 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Tahun BerjalanKabupaten Halmahera Barat, berikut ini :

Tabel 2.99

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Tahun Berjalan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun .... (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						**89.86**	**143,833,574,061**	**100**								Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENGELOLAAN							**53,439,490,064**				-		**0.00**			Dinas Pendidikan	

		PENDIDIKAN																
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Angka Partisipasi Murni SD/sederajat**	**88.54**	**49,718,945**				**27,915,176,896**		**11,567,702,939**	**100**	**0.41**	**0**	**11,567,702,939**	**0**	**232.6187444**	**Dinas Pendidikan**	
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					3 Ruang	401,921,800	**3**	392,433,060		0.98	3	392,433,060	-	-	Dinas Pendidikan	
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			3		1 Ruang	286,978,000		261,189,554		0.91	3	261,189,554	-	-	Dinas Pendidikan	
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah					3 Ruang	303,000,000		302,997,000		1.00	-	302,997,000	-	-	Dinas Pendidikan	

			Dibangun															
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					5 Unit	1,387,725,690		1,237,176,299		0.89	-	1,237,176,299	-	-	Dinas Pendidikan	
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun					11 Unit	2,459,979,000		2,430,120,877		0.99	-	2,430,120,877	-	-	Dinas Pendidikan	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/ Berat					1 Ruang	502,355,406		415,908,000		0.83	-	415,908,000	-	-	Dinas Pendidikan	

		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					3 Paket	135,000,000		135,000,000		1.00	-	135,000,000	-	-	Dinas Pendidikan	
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan					4 Unit	1,047,500,000		1,043,444,560		1.00	-	1,043,444,560	-	-	Dinas Pendidikan	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia					27 Paket	3,375,000,000		3,375,000,000		1.00	-	3,375,000,000	-	-	Dinas Pendidikan	
		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggaraka					… Satuan Pendidikan	154,941,000		119,941,000		0.77	-	119,941,000	-	-	Dinas Pendidikan	

			n Proses Belajar dan Ujian															
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					173 Sekolah	15,994,968,000		-		0.00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun					6 Ruang	1,865,808,000		1,830,194,667		0.98	-	1,830,194,667	-	-	Dinas Pendidikan	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Angka Partisipasi Murni SMP/sederajat**	**73,76**					**20,546,181,999**		**9,985,896,037**		**0.49**	**-**	**9,985,896,037**	**-**	**-**	**Dinas Pendidikan**	
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangu					9 unit	5,305,638,000		5,224,570,903		0.98	-	5,224,570,903	-	-	Dinas Pendidikan	

			n															
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun					1 Ruang	299,000,000		295,784,418		0.99	-	295,784,418	-	-	Dinas Pendidikan	
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun					10 unit	2,940,400,000		2,894,817,716		0.98	-	2,894,817,716	-	-	Dinas Pendidikan	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/					1 unit	250,000,000		248,400,000		0.99	-	248,400,000	-	-	Dinas Pendidikan	

			Berat															
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia					42 paket	1,382,331,999		1,322,323,000		0.96	-	1,322,323,000	-	-	Dinas Pendidikan	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi						1,420,000,000				0.00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
		Pengelolaan Dana BOS	Jumlah Sekolah					65 Sek	8,948,812				0.00	-	-	-	-	Dinas Pendidi	

		Sekolah Menengah Pertama	Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					olah	,000								kan	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		**32.85**					**3,596,163,574**		**590,515,600**		**0.16**	**-**	**590,515,600**	**-**	**-**	**Dinas Pendidikan**	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia						280,000,000		280,000,000		1.00	-	280,000,000	-	-	Dinas Pendidikan	
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar						99,988,004		72,465,600		0.72	-	72,465,600	-	-	Dinas Pendidikan	
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan						99,995,570		13,050,000		0.13	-	13,050,000	-	-	Dinas Pendidikan	

			Melaksanakan Rekomendasi															
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi						100,000,000		100,000,000		1.00	-	100,000,000	-	-	Dinas Pendidikan	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan						250,000,000		125,000,000		0.50	-	125,000,000	-	-	Dinas Pendidikan	

			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen															
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP					2,766,180,000				0.00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan						**1,381,967,595**		**1,110,446,274**		**0.80**	**-**	**1,110,446,274**	**-**	**-**	**Dinas Pendidikan**	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia					2 Paket	582,644,595		482,644,595	0.83	-	482,644,595	-	-	Dinas Pendidikan	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/K	Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang					3 Sekolah	250,000,000		250,000,000	1.00	-	250,000,000	-	-	Dinas Pendidikan	

		esetaraan	Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen															
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP					1 Paket	169,020,000			0.00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun					1 Ruang	380,303,000		377,801,679	0.99	-	377,801,679	-	-		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentasi capaian kinerja Kegiatan/sub kegiatan penunja**	**90**	**80.044.828**				**90,394,083,997**			**0.00**	-	-	-	-		

			ng urusan pemerintahan daerah															
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						**124,167,401**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pendidikan**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	63,000,000			0.00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan					1 Dokumen	34,167,401			0.00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	

			Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	27,000,000				0.00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**89,535,133,561**		**82,183,404,201**		**0.92**	**-**	**82,183,404,201**	**-**	**-**	**Dinas Pendidikan**	

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					.. Orang/ bulan	89,468,733,561		82,144,704,401		0.92	-	82,144,704,401	-	-	Dinas Pendidikan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					1 Laporan	44,266,800		38,699,800		0.87	-	38,699,800	-	-	Dinas Pendidikan	

		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 Dokumen	22,133,200			0.00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							**51,935,672**		24,050,000		**0.46**	**-**	**24,050,000**	**-**	**-**	**Dinas Pendidikan**	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					.. Laporan	51,935,672		24,050,000		0.46	-	24,050,000	-	-	Dinas Pendidikan	

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						**50,000,000**				0.00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					.. Orang	50,000,000				0.00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						**523,847,363**		**467,880,000**			0.89	-	467,880,000	-	-	Dinas Pendidikan	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediak					1 Paket	44,783,835		23,280,000		0.52	-	23,280,000	-	-	Dinas Pendidikan	

			an															
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	303,063,528		301,000,000		0.99	-	301,000,000	-	-	Dinas Pendidikan	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	45,000,000		31,500,000		0.70	-	31,500,000	-	-	Dinas Pendidikan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediak					1 Dokumen	31,000,000		16,000,000		0.52	-	16,000,000	-	-	Dinas Pendidikan	

			an															
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	100,000,000		96,100,000		0.96	-	96,100,000	-	-	Dinas Pendidikan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**60,000,000**				0.00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					-	-				#DIV/0!	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air					1 Laporan	60,000,000				0.00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	

			dan Listrik yang Disediakan															
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					-	-			#DIV/0!	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**49,000,000**		**41,000,000**		**0.84**	-	**41,000,000**	-	-	**Dinas Pendidikan**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihar										#DIV/0!	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	

		Dinas Operasional atau Lapangan	a dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya															
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						**479,938,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pendidikan**	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Cakupan pengembangan kebudayaan daerah (persentase capaian terhadap seluruh target kegiatan tahun berkenaan)**	**100**	**438**			**100**	**349,502,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pendidikan**	

		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						**69,502,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Pendidikan**	
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisiona					1 Laporan	69,502,000			0.00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						**280,000,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Pendidikan**	
		Pembinaan Sumber Daya Manusia,	Jumlah Sumber Daya					… Orang	180,000,000			0.00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	

		Lembaga, dan Pranata Adat	Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina															
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi					1 Unit	100,000,000			0.00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**Cakupan pengembangan kesenian tradisional (persentase capaian terhadap seluruh target kegiatan**	100	200.000.000			**100**	**130,436,000**			0.00	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	

			tahun berkenaan)															
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						**130,436,000**		**130,436,000**		**1.00**	**-**	**130,436,000**	**-**	**-**	**Dinas Pendidikan**	
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)					70 Orang	84,886,000		84,886,000		1.00	-	84,886,000	-	-	Dinas Pendidikan	
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisio					5 Lembaga	45,550,000		45,550,000		1.00	-	45,550,000	-	-	Dinas Pendidikan	

		Kesenian Tradisional	nal yang Ditingkatkan Kapasitasnya																
		RSUD JAILOLO																	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						**56,505,912,410**	**Prog Khus us**			**0.00**		**-**	**-**	**-**	**RSUD**	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Status Akreditasi RSUD**	C	44.834.204			**C**	**26,499,334,334**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**RSUD**	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan						**23,701,897,537**		**14,292,857,629**		**0.60**	**-**	**14,292,857,629**	**-**	**-**	**RSUD**	

		Daerah Kabupaten/ Kota																
		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur					1 Unit	16,040,000,000		1,997,649,637		0.12	-	1,997,649,637	-	-	RSUD	

			Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000															
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit					Unit	2,411,897,537		5,443,309,659		2.26	-	5,443,309,659	-	-	RSUD	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayana					Unit	1,200,000,000		5,458,364,979		4.55	-	5,458,364,979	-	-	RSUD	

			n Kesehatan yang Disediakan															
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (unit)					3,000,000,000		1,330,981,423		0.44	-	1,330,981,423	-	-	RSUD	
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan (paket)					900,000,000		2,249,923,490		2.50	-	2,249,923,490	-	-	RSUD	
		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehata					50,000,000		11,650,000		0.23	-	11,650,000	-	-	RSUD	

			n yang Dilakukan Pemeliharaan (unit)															
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							100,000,000			0.00	-	-	-	-	RSUD	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							**1,397,436,797**			**0.00**	-	-	-	-	**RSUD**	
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				Dokumen	1,097,436,797		1,585,398,089		1.44	-	1,585,398,089	-	-	RSUD	

			(dokumen)															
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota					Unit	300,000,000			0.00	-	-	-	-	RSUD	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi							**1,400,000,000**		**469,050,000**	**0.34**	**-**	**469,050,000**	**-**	**-**	**RSUD**	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					Dokumen	1,300,000,000			0.00	-	-	-	-	RSUD	
		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehata					Unit	100,000,000			0.00	-	-	-	-	RSUD	

			n dan Jaringan Internet yang Disediakan															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentasi capaian kinerja Kegiatan/sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**90**	**80.044.828**				**30,006,578,076**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**RSUD**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**133,560,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**RSUD**	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar					1 Laporan	133,560,000				0.00	-	-	-	-	RSUD	

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**19,949,021,186**		**45,237,019,931**		**2.27**	**-**	**45,237,019,931**	**-**	**-**	**RSUD**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					19,677,791,186		122,560,000		0.01	-	122,560,000	-	-	RSUD	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							271,230,000				0.00	-	-	-	-	RSUD	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							**135,800,000**		**116,890,000**		**0.86**	**-**	**116,890,000**	**-**	**-**	**RSUD**	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	135,800,000				0.00	-	-	-	-	RSUD	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**47,700,000**		**17,417,000**		**0.37**	**-**	**17,417,000**	**-**	**-**	**RSUD**	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan					Orang	47,700,000				0.00	-	-	-	-	RSUD	

			Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan															
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						**724,940,900**		**4,156,000**		**0.01**	**-**	**4,156,000**	**-**	**-**	**RSUD**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	50,000,000		13,032,000		0.26	-	13,032,000	-	-	RSUD	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediak					1 Paket	124,940,900		35,480,000		0.28	-	35,480,000	-	-	RSUD	

			an															
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	100,000,000		102,040,985		1.02	-	102,040,985	-	-	RSUD	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	100,000,000		132,067,800		1.32	-	132,067,800	-	-	RSUD	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	150,000,000		103,083,580		0.69	-	103,083,580	-	-	RSUD	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material					1 Paket	100,000,000		297,163,500		2.97	-	297,163,500	-	-	RSUD	

			yang Disediakan															
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	100,000,000			0.00	-	-	-	-	RSUD	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**768,345,990**		**7,545,000**		**0.01**	**-**	**7,545,000**	**-**	**-**	**RSUD**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	10,000,000		471,176,513		47.12	-	471,176,513	-	-	RSUD	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air					1 Laporan	508,345,990		189,200,000		0.37	-	189,200,000	-	-	RSUD	

			dan Listrik yang Disediakan															
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	250,000,000				0.00	-	-	-	-	RSUD	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**150,010,000**		**49,080,170**		**0.33**	**-**	**49,080,170**	**-**	**-**	**RSUD**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayark					1 Unit	50,000,000		25,820,000		0.52	-	25,820,000	-	-	RSUD	

		atau Lapangan	an Pajak dan Perizinannya															
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliharaa					1 Unit	100,010,000				0.00	-	-	-	-	RSUD	
		Peningkatan Pelayanan BLUD							**8,097,200,000**		**6,187,217,700**		**0.76**	**-**	**6,187,217,700**	**-**	**-**	**RSUD**	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit kerja	8,097,200,000				0.00	-	-	-	-	RSUD	
		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDU												-	-	-	-		

		K DAN KB																
												#DIV/0!	-	-	-	-	RSUD	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase Puskesmas terakreditasi**				**61.9**	**61,070,954,015**	**78.57**		126.93	0.00	79	-	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						**14,343,186,092**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Kesehatan dan KB**	
		Pembangunan Puskesmas						3,016,258,174		2,685,796,391		0.89	-	2,685,796,391	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Pembangunan Fasilitas						334,662,0		306,881,		0.92	-	306,8	-	-	Dinas Kesehat	

		Kesehatan Lainnya							00		000				81,000			an dan KB	
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan							2,385,000,000		2,249,923,490		0.94	-	2,249,923,490	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							4,385,439,250		5,443,309,659		1.24	-	5,443,309,659	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Pengadaan Obat, Vaksin							3,378,050,568		5,458,364,979		1.62	-	5,458,364,979	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Pengadaan Bahan Habis Pakai							843,776,100		1,330,981,423		1.58	-	1,330,981,423	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/							**46,305,303,621**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Kesehatan dan KB**	

		Kota																
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						1,478,837,458		1,433,575,000		0.97	-	1,433,575,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						680,287,000		511,837,000		0.75	-	511,837,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						2,333,801,000		2,089,913,000		0.90	-	2,089,913,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						264,863,700		264,863,700		1.00	-	264,863,700	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						4,363,368,348		4,348,886,548		1.00	-	4,348,886,548	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						718,226,000		718,226,000		1.00	-	718,226,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Pengelolaan Pelayanan						681,779,2		681,779,		1.00	-	681,7	-	-	Dinas Kesehat	

		Promosi Kesehatan							00		200				79,200			an dan KB	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan							250,500,000				0.00	-	-	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus							3,123,655,915		3,047,662,915		0.98	-	3,047,662,915	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							2,186,050,000		2,145,775,000		0.98	-	2,145,775,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							12,639,680,000		8,002,426,800		0.63	-	8,002,426,800	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Operasional Pelayanan Puskesmas							15,664,455,000		15,664,455,000		1.00	-	15,664,455,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							474,800,000		474,800,000		1.00	-	474,800,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di							1,445,000,000		1,585,398,089		1.10	-	1,585,398,089	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	

		Kabupaten/Kota																
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi						**422,464,302**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kesehatan dan KB**	
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan						178,194,150		178,194,000		1.00	-	178,194,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						244,270,152		469,050,000		1.92	-	469,050,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Rasio dokter umum per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)**	22	892.512.000			**24**	**265,750,000**	**24.21**		100.88	0.00	24	-	1.10	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya						**65,750,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kesehatan dan KB**	

		Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota																
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar						65,750,000		65,750,000		1.00	-	65,750,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						**200,000,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Kesehatan dan KB**	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya						200,000,000		200,000,000		1.00	-	200,000,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	

		Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase tindaklanjut perizinan, pengendalian dan pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT, TPM, DAM, Industri Rumah Tangga**	100	264.538.000			**100**	**300,000,000**	**100**		100.00	0.00	100	-	1	-	Dinas Kesehatan dan KB	

		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						**150,000,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Kesehatan dan KB**	
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						150,000,000		150,000,000		1.00	-	150,000,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	

		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga						**150,000,000**			**-**	**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kesehatan dan KB**	
		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan						150,000,000		150,000,000	-	1.00	-	150,000,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	

		Rumah Tangga																
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase Desa memiliki Posyandu Aktif**	41.77	337,803,000			**80.93**	**377,650,000**	**83**		1.03	0.00	83	-	1.99	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							**377,650,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kesehatan dan KB**	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan							377,650,000		120,000,000		0.32	-	120,000,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	

		Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		90	76,921,507				**27,819,477,300**				0.00	-	-	-	0	Dinas Kesehatan dan KB	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**421,195,000**		**421,195,000**		**1.00**	**-**	**421,195,000**	**-**	**-**	**Dinas Kesehatan dan KB**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	421,195,000		421,195,000		1.00	-	421,195,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**27,081,970,300**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kesehatan dan**	

																	KB	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						27,081,970,300		45,237,019,931		1.67	-	45,237,019,931	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							**24,000,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Kesehatan dan KB**	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							24,000,000		24,000,000		1.00	-	24,000,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**292,312,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Kesehatan dan KB**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan					1 Paket	13,332,000		13,032,000		0.98	-	13,032,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	

			Perlengkapan Kantor yang Disediakan															
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	23,980,000		35,480,000		1.48	-	35,480,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	32,000,000		102,040,985		3.19	-	102,040,985	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,000,000		132,067,800		66.03	-	132,067,800	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	5,000,000		5,000,000		1.00	-	5,000,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	216,000,000		297,163,500		1.38	-	297,163,500	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCA							**3,097,927,300**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Kesehatan dan KB**	

		NA																
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Rata-rata jumlah anak per keluarga**	**3.1**	**438,464**			**3.1**	**104,324,600**	**3**		**100.00**	**0.00**	**3**	**-**	**1**	**-**	**Dinas Kesehatan dan KB**	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota							**104,324,600**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kesehatan dan KB**	
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya					1 Dokumen	1,124,600		1,124,000		1.00	-	1,124,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data					1 Dokumen	103,200,000		103,200,000		1.00	-	103,200,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	

		Pelayanan KB	Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB															
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Rasio akseptor KB (persen)**	**89.5**	**2,155,083,000**			**90.9**	**1,960,782,700**	**90**		**99.01**	**0.00**	**90**	**-**	**1.01**	**-**	**Dinas Kesehatan dan KB**	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal							**716,275,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kesehatan dan KB**	
		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi					Organisasi	4,375,000		4,375,000		1.00	-	4,375,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	

			Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga					1 Dokumen	25,000,000		25,000,000		1.00	-	25,000,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	

			, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal															
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan					1 Dokumen	70,640,000		70,640,000		1.00	-	70,640,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	

			Elektronik serta Media Luar Ruang															
		Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK						87,000,000		82,000,000		0.94	-	82,000,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependu					1 Laporan	124,800,000		124,800,000		1.00	-	124,800,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	

		Lokakarya (Minilok)	dukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)															
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh					1 Laporan	364,500,000		364,500,000		1.00	-	364,500,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	

			an Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)															
		Pengendalian Program KKBPK							39,960,000		39,960,000		1.00	-	39,960,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							**811,200,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Kesehatan dan KB**	
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader					Orang	811,200,000		811,200,000		1.00	-	811,200,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	

			Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)															
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota						**174,587,700**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kesehatan dan KB**	
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang					1 Laporan	9,600,000		9,600,000		1.00	-	9,600,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	

		Jejaringnya	Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya															
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					1 Laporan	155,422,700		143,370,000		0.92	-	143,370,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan					1 Laporan	9,565,000		9,565,000		1.00	-	9,565,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	

		di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya															
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							**258,720,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kesehatan dan KB**	

		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB					Kampung	258,720,000		258,720,000		1.00	-	258,720,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA							**898,320,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Kesehatan dan KB**	

		SEJAHTERA (KS)																
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						**898,320,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Kesehatan dan KB**	
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi					Orang	898,320,000		898,320,000		1.00	-	898,320,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	

			Keluarga /UPPKS)															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**134,500,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kesehatan dan KB**	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						**8,847,500**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kesehatan dan KB**	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	8,847,500		103,083,580		11.65	-	103,083,580	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**30,640,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kesehatan dan KB**	

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1,560,000		7,545,000		4.84	-	7,545,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	11,080,000		471,176,513		42.52	-	471,176,513	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	18,000,000		189,200,000		10.51	-	189,200,000	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		Pemeliharaan Barang Milik							**95,012,500**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Kesehatan**	

		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															**dan KB**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					1 Unit	95,012,500		49,080,170		0.52	-	49,080,170	-	-	Dinas Kesehatan dan KB	
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												-	-	-	-	**Dinas PU**	
														-	-	-	-		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM							**274,870,714,546**		**229,164,059,448**		**0.83**	-	**229,164,059,448**	-	-	**Dinas PU**	

		DAN PENATAAN RUANG																
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Peningkatan rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen poin dari tahun sebelumnya)**	**1.19**	**4,966,352,000**			**21.14**	**2,465,011,493**		**2,205,712,447**		**0.89**	**-**	**2,205,712,447**	**-**	**0.44**	**Dinas PU**	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1							**2,265,011,493**		**2,106,712,447**		**0.93**	**-**	**2,106,712,447**	**-**	**-**	**Dinas PU**	

		(satu) Daerah Kabupaten/ Kota																
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun					Dokumen	-		-		#DIV/0!	-	-	-	-	Dinas PU	
		Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangu					Km	570,273,275		518,457,677		0.91	-	518,457,677	-	-	Dinas PU	

			n															
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun					Km	1,232,738,218		1,132,238,218		0.92	-	1,132,238,218	-	-	Dinas PU	
		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun					Km	462,000,000		456,016,552		0.99	-	456,016,552	-	-	Dinas PU	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha							**200,000,000**		**99,000,000**		**0.50**	**-**	**99,000,000**	**-**	**-**	**Dinas PU**	

		dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota																
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun					Dokumen	200,000,000		99,000,000		0.50	-	99,000,000	-	-	Dinas PU	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Peningkatan cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber**	**1.58**	**4,649,946,000**			**2.14**	**4,216,647,000**	**67.08**	**4,166,646,999**		**0.99**	**67**	**4,166,646,999**	**42.46**	**0.90**	**Dinas PU**	

			air minum bersih (persen poin dari tahun sebelumnya)															
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota						**4,216,647,000**		**4,166,646,999**		**0.99**	**-**	**4,166,646,999**	**-**	**-**	**Dinas PU**	
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat					SR	4,216,647,000		4,166,646,999		0.99	-	4,166,646,999	-	-	Dinas PU	

		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Peningkatan cakupan Rumah Tangga memiliki askes pada sanitasi layak (persen poin dari tahun sebelumnya)**	**1.25**	**3,836,296,000**			**2.47**	**5,784,920,415**	**53.72**	**5,431,616,700**		**0.94**	**54**	**5,431,616,700**	**42.98**	**1.41584922**	**Dinas PU**	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota							**5,784,920,415**		**5,431,616,700**		**0.94**	**-**	**5,431,616,700**	**-**	**-**	**Dinas PU**	
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung					RT	5,784,920,415		5,431,616,700		0.94	-	5,431,616,700	-	-	Dinas PU	

		Skala Permukiman	dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman															
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Rasio infrastruktur drainase yang terbangun (persentase terhadap rencana induk)**	**18.4**	**1,999,950,000**			**21.03**	**2,999,950,000**	**90**	**2,219,992,695**		**0.74**	**90**	**2,219,992,695**	**4.89**	**1.11002409 8**	**Dinas PU**	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam							**2,999,950,000**		**2,219,992,695**		**0.74**	**-**	**2,219,992,695**	**-**	**-**	**Dinas PU**	

		Daerah Kabupaten/ Kota																
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun					Meter	2,999,950,000		2,219,992,695		0.74	-	2,219,992,695	-	-	Dinas PU	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN							**850,000,000**		**639,395,200**		**0.75**	**-**	**639,395,200**	**-**	**-**	**Dinas PU**	
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota							**850,000,000**		**639,395,200**		**0.75**	**-**	**639,395,200**	**-**	**-**	**Dinas PU**	
		Pembangunan dan Pengembangan	Jumlah Sistem Jaringan Prasaran					Sistem Jaringa	850,000,000		639,395,200		0.75	-	639,395,200	-	-	Dinas PU	

		Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	a dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					n										
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Rasio kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan**					**100**	**13,684,013,262**	**100**	**11,356,520,321**		**0.83**	**100**	**11,356,520,321**	**-**	**-**	**Dinas PU**	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat							**13,684,013,262**		**11,356,520,321**		**0.83**	**-**	**11,356,520,321**	**-**	**-**	**Dinas PU**	

		Laik Fungsi Bangunan Gedung																
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	13,684,013,262		11,356,520,321		0.83	-	11,356,520,321	-	-	Dinas PU	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Rasio efektifitas pemeliharaan bangunan gedung milik**					**65**	**29,900,000,000**	**30.7**	**21,464,891,169**		**0.72**	**31**	**21,464,891,169**	**-**	**-**	**Dinas PU**	

			pemerintah kabupaten (persen)															
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota						**29,900,000,000**		**21,464,891,169**		**0.72**	**-**	**21,464,891,169**	**-**	**-**	**Dinas PU**	
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan					29,350,000,000		21,161,181,169		0.72	-	21,161,181,169	-	-	Dinas PU	

			Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																
		Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan /Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan					1 Dokumen	550,000,000		303,710,000		0.55	-	303,710,000	-	-	Dinas PU	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Peningkatan rasio jalan kabupaten dalam kondisi mantap (persen poin dari**	**0.85**	**42,768,977,000**			**1.45**	**208,225,978,454**	**1.45**	**175,375,950,992**		**0.84**	**1**	**175,375,950,992**	**1.71**	**4.10054117**	**Dinas PU**	

			tahun sebelumnya)															
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota						**208,225,978,454**		**175,375,950,992**		**0.84**	**-**	**175,375,950,992**	**-**	**-**	**Dinas PU**	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian					10 Dokumen	2,947,580,800	10 Dokumen	2,044,978,100		0.69	10 Dokumen	2,044,978,100	-	-	Dinas PU	
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun					Km	177,388,501,000		154,189,958,611		0.87	-	154,189,958,611	-	-	Dinas PU	

		Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun					Meter	27,889,896,654		19,141,014,281		0.69	-	19,141,014,281	-	-	Dinas PU	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Rasio proyek konstruksi/ infrastruktur yang menjadi kewenangan kabupaten tanpa kecelakaan konstruksi (persen)**						**10,900,000**		**10,900,000**		**1.00**	**-**	**10,900,000**	**-**	**-**	**Dinas PU**	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota							**10,900,000**		**10,900,000**		**1.00**	**-**	**10,900,000**	**-**	**-**	**Dinas PU**	

		Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi					1 Dokumen	10,900,000	1 Dokumen	10,900,000		1.00	1 Dokumen	10,900,000	-	-	Dinas PU	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Persentase ketersediaan Rencana Rinci Tata Ruang (terhadap jumlah RRTR yang harus tersedia)**	**11.1**	**345,176,000**			**11.1**	**1,382,650,000**		**1,303,310,800**		**0.94**	**-**	**1,303,310,800**	**-**	**3.77578626**	**Dinas PU**	

		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota						**1,382,650 ,000**		**1,303,31 0,800**		**0.94**	**-**	**1,303, 310,8 00**	**-**	**-**	**Dinas PU**	
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota					1,382,650 ,000		1,303,31 0,800		0.94	-	1,303, 310,8 00	-	-	Dinas PU	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**90**				**5,350,643 ,922**		**4,989,12 2,125**		**0.93**	**-**	**4,989, 122,1 25**	**-**	**-**	**Dinas PU**	

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						**1,000,000,000**		**1,000,000,000**		**1.00**	**-**	**1,000,000,000**	**-**	**-**	**Dinas PU**	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1,000,000,000	1 Laporan	1,000,000,000	1.00	1 Laporan	1,000,000,000	-	-	Dinas PU	

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**3,435,223,922**		**3,327,652,125**		**0.97**	-	**3,327,652,125**	-	-	**Dinas PU**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					3,031,018,922		2,923,447,125		0.96	-	2,923,447,125	-	-	Dinas PU	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	404,205,000		404,205,000		1.00	-	404,205,000	-	-	Dinas PU	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						**869,890,000**		**615,940,000**		**0.71**	-	**615,940,000**	-	-	**Dinas PU**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P				1 Paket	4,609,200		4,609,200		1.00	-	4,609,200	-	-	Dinas PU	

		Kantor	eneranga n Bangunan Kantor yang Disediak an															
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengk apan Kantor yang Disediak an					1 Pak et	127,120,0 00		27,120,0 00		0.21	-	27,12 0,000	-	-	Dinas PU	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggan daan yang Disediak an					1 Pak et	7,702,400		7,702,40 0		1.00	-	7,702, 400	-	-	Dinas PU	
		Penyediaan Bahan/Materi al	Jumlah Paket Bahan/M aterial yang Disediak					1 Pak et	13,708,40 0		13,708,4 00		1.00	-	13,70 8,400	-	-	Dinas PU	

			an															
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	716,750,000		562,800,000		0.79	-	562,800,000	-	-	Dinas PU	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-		-		-	-	-	-	-	**Dinas PU**	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							-		-		-	-	-	-	-	Dinas PU	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**45,530,000**		**45,530,000**		**1.00**	-	**45,530,000**	-	-	**Dinas PU**	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					1 Unit	45,530,000	1 Unit	45,530,000		1.00	1 Unit	45,530,000	-	-	Dinas PU	
													-	-	-	-	-	Dinas PU	
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP											-	-	-	-	-	**Dinas Perumahan**	
													-	-	-	-	-		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN							**13,803,393,188**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Perumahan**	

		PERMUKIMAN																
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Persentase Rumah Tidak Layak Huni (Kumuh)**	**23.05**	**3,368,280,000**			**21.99**	**5,950,133,800**	**37.87**		**172.21**	**0.00**	**38**	**-**	**1.64**	**-**	**Dinas Perumahan**	
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota							**5,950,133,800**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perumahan**	
		Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban					1 Dokumen	5,950,133,800		5,152,133,800		0.87	-	5,152,133,800	-	-	Dinas Perumahan	

		Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi															
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Persentase kebutuhan peningkatan PSU yang tertangani (terhadap rencana dalam setahun)**	**100**	**500,000,000**			**100**	**452,584,400**	**49.64**		**49.64**	**0.00**	**50**	**-**	**0.50**	**-**	**Dinas Perumahan**	
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan							**452,584,400**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perumahan**	

		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan					1 Dokumen	452,584,400		45,504,400		0.10	-	45,504,400	-	-	Dinas Perumahan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							**7,400,674,988**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Perumahan**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**9,960,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Perumahan**	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja					1 Laporan	9,960,000		9,710,000		0.97	-	9,710,000	-	-	Dinas Perumahan	

		Kinerja SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**7,019,075,088**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Perumahan**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					6,964,475,088		6,547,237,778		0.94	-	6,547,237,778	-	-	Dinas Perumahan	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan				1 Dokumen	54,600,000		40,950,000		0.75	-	40,950,000	-	-	Dinas Perumahan	

			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						**57,913,200**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perumahan**	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	5,163,200		5,163,000	1.00	-	5,163,000	-	-	Dinas Perumahan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	2,100,000		2,100,000	1.00	-	2,100,000	-	-	Dinas Perumahan	

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	50,650,000		50,288,000		0.99	-	50,288,000	-	-	Dinas Perumahan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**127,355,700**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Perumahan**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	40,318,200		32,431,200		0.80	-	32,431,200	-	-	Dinas Perumahan	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan					1 Laporan	56,600,000		-		0.00	-	-	-	-	Dinas Perumahan	

			dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan															
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	30,437,500		30,426,000		1.00	-	30,426,000	-	-	Dinas Perumahan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**186,371,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Perumahan**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihar					1 Unit	164,616,000		39,616,000		0.24	-	39,616,000	-	-	Dinas Perumahan	

		Dinas Operasional atau Lapangan	a dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya															
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliharaa/Direhabilitasi					1 Unit	21,755,000		21,755,000		1.00	-	21,755,000	-	-	Dinas Perumahan	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							**2,284,335,500**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perumahan**	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase ketersediaan dokumen PPLH (terhadap jumlah**	**100**				**100**	**600,000,000**	**33.30**		**33.3**	**0.00**	**33**	**-**	**0.33**	**-**	**Dinas Perumahan**	

			KRP yang wajib menyediakan dokumen PPLH)															
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota						**600,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perumahan**	
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun					1 Dokumen	600,000,000		382,200,000		0.64	-	382,200,000	-	-	Dinas Perumahan	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNG	**Persentase penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan**	**100**				**100**	**93,050,000**	**0.13**			**0.00**	**0**	**-**	**0.00**	**-**	**Dinas Perumahan**	

		AN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**yang izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang diawasi**															
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota						**93,050,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perumahan**	
		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas	Jumlah Rekomendasi dan/atau					Orang	50,000,000		50,000,000		1.00	-	50,000,000	-	-	Dinas Perumahan	

		Lingkungan Hidup	Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan															
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi					1 Laporan	43,050,000		43,050,000		1.00	-	43,050,000	-	-	Dinas Perumahan	

			oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Volume timbulan sampah perkotaan yang terangkut setiap tahunya (M3)**	**1**	**2,271,662,000**			**123 2**	**1,591,285,500**	**786.58**		**63.85**	**0.00**	**787**	**-**	**733.75**	**-**	**Dinas Perumahan**	
		Pengelolaan Sampah							**1,591,285,500**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perumahan**	
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					Ton	806,285,500		797,785,500		0.99	-	797,785,500	-	-	Dinas Perumahan	

		TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat					Kelompok	375,000,000		375,000,000		1.00	-	375,000,000	-	-	Dinas Perumahan	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanga					Unit	410,000,000		300,000,000		0.73	-	300,000,000	-	-	Dinas Perumahan	

		TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	nan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir															
		SATUAN POLISI PAMONGPRAJA											**#DIV/0!**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Satpol PP**	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						**10,106,724,744**					**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Satpol PP**	

		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**22**	**67,925,000**				**410,789,900**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Satpol PP**	
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota							**310,797,400**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Satpol PP**	
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya					Orang	150,000,000		150,000,000		1.00	-	150,000,000	-	-	Satpol PP	

		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan					1 Dokumen	160,797,400		160,797,400		1.00	-	160,797,400	-	-	Satpol PP	
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							**49,992,500**				**0.00**	-	-	-	-	**Satpol PP**	
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran					1 Laporan	49,992,500		49,992,500		1.00	-	49,992,500	-	-	Satpol PP	

			Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP															
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota						**50,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Satpol PP**	
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan					1 Laporan	50,000,000		50,000,000		1.00	-	50,000,000	-	-	Satpol PP	

			Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**9,695,934,844**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Satpol PP**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						**14,391,100**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Satpol PP**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangka				1 Dokumen	14,391,100		14,391,100		1.00	-	14,391,100	-	-	Satpol PP	

			t Daerah															
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**9,041,805,274**				**0.00**	-	-	-	-	**Satpol PP**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					9,006,725,274		11,211,186,861		1.24	-	11,211,186,861	-	-	Satpol PP	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	35,080,000		35,080,000		1.00	-	35,080,000	-	-	Satpol PP	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						**293,650,770**				**0.00**	-	-	-	-	**Satpol PP**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan				1 Paket	1,433,970		1,433,970		1.00	-	1,433,970	-	-	Satpol PP	

		Kantor	dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan															
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	2,006,400		3,856,400		1.92	-	3,856,400	-	-	Satpol PP	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	4,010,400		4,010,400		1.00	-	4,010,400	-	-	Satpol PP	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	286,200,000		331,750,000		1.16	-	331,750,000	-	-	Satpol PP	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**35,007,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Satpol PP**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1,008,000		2,808,000		2.79	-	2,808,000	-	-	Satpol PP	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	33,999,000		51,778,670		1.52	-	51,778,670	-	-	Satpol PP	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha						**311,080,700**				**0.00**	-	-	-	-	**Satpol PP**	

		n Daerah																
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharaa dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					1 Unit	311,080,700		365,406,200		1.17	-	365,406,200	-	-	Satpol PP	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH											**#DIV/0!**	-	-	-	-	**Satpol PP**	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN						**3,044,405,483**					**0.00**	-	-	-	-	**BPBD**	

		MASYARAKAT																
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana**	**100**	**1,530,894,000**			**100**	**180,622,398**	**50**		**50**	**0.00**	**50**	**-**	**0.50**	**-**	**BPBD**	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							**126,800,726**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BPBD**	
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyedia					1 Dokumen	61,106,076				0.00	-	-	-	-	BPBD	

		Kabupaten/Kota	an Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota															
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota							25,894,650		25,894,650		1.00	-	25,894,650	-	-	BPBD	
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya					Orang	39,800,000				0.00	-	-	-	-	BPBD	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							**53,821,672**				**0.00**	-	-	-	-	**BPBD**	

		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat					Dokumen	53,821,672		26,910,834		0.50	-	26,910,834	-	-	BPBD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							**2,863,783,085**				**0.00**	-	-	-	-	**BPBD**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**2,614,325,483**				**0.00**	-	-	-	-	**BPBD**	

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						2,594,405,483				0.00	-	-	-	-	BPBD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					1 Laporan	19,920,000				0.00	-	-	-	-	BPBD	
		Administrasi Umum							**149,153,2**				**0.00**	-	-	-	-	**BPBD**	

		Perangkat Daerah						**62**										
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	21,351,262				0.00	-	-	-	-	BPBD	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	7,112,000				0.00	-	-	-	-	BPBD	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	2,340,000				0.00	-	-	-	-	BPBD	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelen					1 Laporan	118,350,000				0.00	-	-	-	-	BPBD	

		dan Konsultasi SKPD	ggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					n										
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**45,978,840**				**0.00**	-	-	-	-	**BPBD**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1,800,000				0.00	-	-	-	-	BPBD	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	26,178,840				0.00	-	-	-	-	BPBD	

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	18,000,000			0.00	-	-	-	-	BPBD	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**54,325,500**			**0.00**	-	-	-	-	**BPBD**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharaan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					1 Unit	54,325,500			0.00	-	-	-	-	BPBD	

		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										**#DIV/0!**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						**9,635,105,562**			**#DIV/0!**	**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tingkat kabupaten yang telah dikembangkan atau diberdayakan (jumlah jenis, kumulatif)**	**10**	**179.700.000**			**11**	**2,102,972,200**	**85**			**0.00**	**85**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	

		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota						**2,102,972,200**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Sosial**	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					**Orang**	**35,210,000**		**35,210,000**		1.00	-	35,210,000	-	-	Dinas Sosial	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupat					Orang	88,800,000		88,800,000		1.00	-	88,800,000	-	-	Dinas Sosial	

			en/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota															
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota					Lembaga	1,978,962,200	**85**	1,034,000,000		0.52	85	1,034,000,000	-	-	Dinas Sosial	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase peyandang disabilitas terlantar, anak terlanta**	**41.7**	**50.000.000**			**47.6**	**35,210,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	

			r, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis yang sudah ditangani atau dipenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti															
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						**35,210,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	

		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					Orang	35,210,000				0.00	-	-	-	-	Dinas Sosial	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		**0.81**	**125,926,000**				**2,864,884,600**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Sosial**	

		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar						**144,690,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Sosial**	
		Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota					Orang	144,690,000		144,690,000		1.00	-	144,690,000	-	-	Dinas Sosial	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota						**2,720,194,600**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Sosial**	
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata					Orang	258,406,500				0.00	-	-	-	-	Dinas Sosial	

		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota					Keluarga	261,790,000		152,435,000		0.58	-	152,435,000	-	-	Dinas Sosial	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					Keluarga	2,199,998,100		2,163,698,100		0.98	-	2,163,698,100	-	-	Dinas Sosial	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase korban bencana alam dan**	**100**				**100**	**407,410,000**	**60**			**0.00**	**60**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	

			sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten															
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota						**225,250,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	
		Penyediaan Makanan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan					Orang	225,250,000		159,900,000		0.71	-	159,900,000	-	-	Dinas Sosial	

			Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota															
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota						**182,160,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenan					Orang	182,160,000			0.00	-	-	-	-	Dinas Sosial	

			gan Kabupaten/Kota															
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						**750,000,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Sosial**	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota						**750,000,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Sosial**	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota					Makam	750,000,000		750,000,000		1.00	-	750,000,000	-	-	Dinas Sosial	

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**3,474,628,762**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Sosial**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						**6,000,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Sosial**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	6,000,000		6,000,000	1.00	-	6,000,000	-	-	Dinas Sosial	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**3,232,323,162**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Sosial**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan					1 Dokumen	3,084,123,162		2,877,008,797	0.93	-	2,877,008,797	-	-	Dinas Sosial	

			Tunjangan ASN															
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1 Laporan	148,200,000				0.00	-	-	-	-	Dinas Sosial	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						-				#DIV/0!	-	-	-	-	Dinas Sosial	
		Administrasi Umum						**1 Pa**	**115,599,6**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	

		Perangkat Daerah						**ket**	**00**									
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	10,000,000		9,913,500		0.99	-	9,913,500	-	-	Dinas Sosial	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Laporan	9,999,600		9,999,500		1.00	-	9,999,500	-	-	Dinas Sosial	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						95,600,000		95,090,000		0.99	-	95,090,000	-	-	Dinas Sosial	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha						**1 Laporan**	**69,620,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Sosial**	

		n Daerah																
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	5,000,000		4,991,000		1.00	-	4,991,000	-	-	Dinas Sosial	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	38,820,000		24,120,000		0.62	-	24,120,000	-	-	Dinas Sosial	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						25,800,000		25,800,000		1.00	-	25,800,000	-	-	Dinas Sosial	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**1 Unit**	**51,086,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Sosial**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					1 Unit	39,636,000		32,736,000		0.83	-	32,736,000	-	-	Dinas Sosial	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						11,450,000		11,450,000		1.00	-	11,450,000	-	-	Dinas Sosial	

		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**47.6**	**2,921,782,100**	**50**			**0.00**	**50**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)**	**46.8**	**299.914.000**				**1,220,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan							**1,020,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	

		Kabupaten/ Kota																
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan						1,020,000,000		969,984,200		0.95	-	969,984,200	-	-	Dinas Sosial	

			Kabupaten/Kota															
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota						**Orang**	**200,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang					**0.01**	200,000,000	**0.01**			0.00	0	-	-	-	Dinas Sosial	

			Mendapat Peningkatan Kapasitas															
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**	**0.01**	**517,604,000**				**609,052,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota						**1 Dokumen**	**220,048,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					Perangkat Daerah	150,450,000		150,450,000		1.00	-	150,450,000	-	-	Dinas Sosial	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan						69,598,000				0.00	-	-	-	-	Dinas Sosial	

		Kabupaten/Kota	Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota															
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota						**Orang**	**389,004,000**			**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupat					Layanan	39,960,000			0.00	-	-	-	-	Dinas Sosial	

		Kewenangan Kabupaten/Kota	en/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan															
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					349,044,000		241,813,500		0.69	-	241,813,500	-	-	Dinas Sosial	

		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						**Orang**	-				**#DIV/0!**	-	-	-	-	**Dinas Sosial**	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapa					1 Dokumen	-				#DIV/0!	-	-	-	-	Dinas Sosial	

			t Peningkatan Kapasitas															
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					**100**	-	**100**			#DIV/0!	100	-	-	-	Dinas Sosial	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Persentasi korban kekerasan terhadap perempuan dan**	**100**	**499,996,000**				**399,998,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	

			anak yang terlayani dan/atau ditangani hingga selesai oleh instansi terkait															
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						**1 Laporan**	**399,998,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningka					**5**	399,998,000	**32**	399,998,000		1.00	32	399,998,000	-	-	Dinas Sosial	

		Kabupaten/Kota	tan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota															
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Jumlah jenis data gender dan anak sesuai Permen PPPA No. 5/2014 yang telah dapat disajikan dalam kelembagaan data tingkat kabupaten (kumulatif dari tahun sebelum**	**4**	**199,988,000**				**230,043,900**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	

			nya)															
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						**1 Dokumen**	**230,043,900**			**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia					27	230,043,900	45	229,245,900		1.00	45	229,245,900	-	-	Dinas Sosial	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK	**Jumlah jenis indikato**	**26**	**665,550,000**				**290,784,200**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	

		ANAK (PHA)	**r Kabupaten Layak Anak yang telah dipenuhi (kumulatif dari tahun sebelumya)**															
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota						**Organisasi**	**99,984,200**			**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia						99,984,200			0.00	-	-	-	-	Dinas Sosial	

		Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha															
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak						**Orang**	**190,800,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	

		Kewenangan Kabupaten/ Kota																
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	40,800,000			0.00	-	-	-	-	Dinas Sosial	
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan						150,000,000			0.00	-	-	-	-	Dinas Sosial	

			Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota															
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						**171,904,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					**1 Dokumen**	**69,598,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar					69,598,000				0.00	-	-	-	-	Dinas Sosial	

		Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota															
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						**1 Dokumen**	**102,306,000**			**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	

		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota						102,306,000		102,306,000		1.00	-	102,306,000	-	-	Dinas Sosial	
		SEKRETARIAT DAERAH							**1,000,000,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Sosial**	

		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		**100**	**1,008,329,000**				**1,000,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							**1,000,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**	
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual							1,000,000,000		800,000,000		0.80	-	800,000,000	-	-	Dinas Sosial	
													#DIV/0!	-	-	-	-		
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											**#DIV/0!**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**2,811,520,273**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	

		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Persentasi anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki Akta Lahir**	**84.78**	**400,136,000**			**85.21**	**108,862,000**	**90.56**			**0.00**	**91**	**-**	**1.07**	**-**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Pelayanan Pencatatan Sipil							**108,862,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting					Dokumen	108,862,000		108,862,000		1.00	-	108,862,000	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Persentasi Organisasi Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama**	**2.5**	**521,885,000**			**7.5**	**699,449,834**	**5.0**			**0.00**	**5**	**-**	**2**	**-**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							**580,459,904**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	

		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun					1 Dokumen	580,459,904		199,515,974		0.34	-	199,515,974	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Penyelenggaraan Pengelolaan							**118,989,930**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kependuduk**	

		Informasi Administrasi Kependudukan															**an dan Pencatatan Sipil**	
		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					1 Laporan	118,989,930		118,989,930		1.00	-	118,989,930	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**80**					**2,003,208,439**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**1,682,758,659**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						1,648,558,659		1,567,486,521		0.95	-	1,567,486,521	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							34,200,000				0.00	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**231,017,780**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	26,367,780		26,366,780		1.00	-	26,366,780	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan					1 Laporan	204,650,000		112,100,000		0.55	-	112,100,000	-	-	Dinas Kependudukan dan	

		Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														Pencatatan Sipil	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**56,976,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	2,376,000		2,376,000	1.00	-	2,376,000	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	36,600,000		18,101,220	0.49	-	18,101,220	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	18,000,000		18,000,000		1.00	-	18,000,000	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**32,456,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					1 Unit	32,456,000		32,456,000		1.00	-	32,456,000	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
													#DI			-	-		

													V/0!	-	-				
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											**#DIV/0!**	-	-	-	-	**DPMPD**	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**8,372,166,308**					**0.00**	-	-	-	-	**DPMPD**	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Persentase peningkatan desa berstatus maju dan mandiri (persen poin)**	**0.003**	**2,625,284,000**			**0.53**	**3,929,968,755**	**2.9**			**0.00**	**3**	-	**966.67**	-	**DPMPD**	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi							**3,929,968,755**				**0.00**	-	-	-	-	**DPMPD**	

		Pemerintahan Desa																
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas					170 Orang	139,394,000		139,394,000		1.00	-	139,394,000	-	-	DPMPD	
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa					1 Laporan	3,790,574,755		3,741,236,650		0.99	-	3,741,236,650	-	-	DPMPD	

		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Peningkatan indeks ketahanan ekonomi desa (basis poin/tahun)**	**0.41**	**74,525,000**			**1.51**	**1,000,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DPMPD**	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya							**1,000,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DPMPD**	

		Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota																
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					1 Dokumen	1,000,000,000		1,000,000,000		1.00	-	1,000,000,000	-	-	DPMPD	

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**80**					**3,442,197,553**				**0.00**	-	-	-	-	**DPMPD**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**3,182,891,553**				**0.00**	-	-	-	-	**DPMPD**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						3,182,891,553		2,922,948,596		0.92	-	2,922,948,596	-	-	DPMPD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**137,506,000**				**0.00**	-	-	-	-	**DPMPD**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediak					1 Paket	8,800,000		8,800,000		1.00	-	8,800,000	-	-	DPMPD	

			an															
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	10,006,000		8,100,000		0.81	-	8,100,000	-	-	DPMPD	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	118,700,000		113,530,000		0.96	-	113,530,000	-	-	DPMPD	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**21,100,000**				**0.00**	-	-	-	-	**DPMPD**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat					1 Laporan	21,100,000		18,898,100		0.90	-	18,898,100	-	-	DPMPD	

			Menyurat															
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**24,500,000**				**0.00**	-	-	-	-	**DPMPD**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharaa dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					1 Unit	24,500,000		24,446,750		1.00	-	24,446,750	-	-	DPMPD	
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						**76,200,000**				**0.00**	-	-	-	-	**DPMPD**	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunik					1 Laporan	76,200,000		76,010,900		1.00	-	76,010,900	-	-	DPMPD	

			asi Pimpinan															
												#DIV/0!						
		DINAS PERHUBUNGAN										**#DIV/0!**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perhubungan**	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						**11,223,913,790**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perhubungan**	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Persentase ruas jalan kabupaten yang telah di pasang rambu-rambu secara lengkap**	**40**	**2,518,031,000**			**13.73**	**6,988,780,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perhubungan**	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota							**5,013,660,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perhubungan**	

		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia					100 Unit	5,013,660,000		3,844,784,141		0.77	-	3,844,784,141	-	-	Dinas Perhubungan	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C							-				**#DIV/0!**	-	-	-	-	**Dinas Perhubungan**	
		Pembangunan Gedung Terminal							-				#DIV/0!	-	-	-	-	Dinas Perhubungan	
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota							**57,120,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Perhubungan**	
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkuta					1 Laporan	57,120,000		28,560,000		0.50	-	28,560,000	-	-	Dinas Perhubungan	

			n Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota															
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						**1,918,000 ,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perhub ungan**	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)					Unit	1,918,000 ,000		951,950, 000		0.50	-	951,9 50,00 0	-	-	Dinas Perhub ungan	

			Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia															
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**Peningkatan lalulintas penumpang kapal laut/pelabuan penyeberangan (orang/tahun)**	**114.271**	**2,349,875,000**			**128495**	**950,000,000**	**109,221**			**0.00**	**109,221**	**-**	**955.81**	**-**	**Dinas Perhubungan**	
		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha							**350,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perhubungan**	

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Laporan	350,000,000		248,080,000		0.71	-	248,080,000	-	-	Dinas Perhubungan	

		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/ Kota							**600,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perhubungan**	
		Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujui					1 Dokumen	600,000,000		591,600,000		0.99	-	591,600,000	-	-	Dinas Perhubungan	

		dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	nya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota																
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATE		**80**					**3,285,133,790**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perhubungan**	

		N/KOTA																
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						**85,717,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Perhubungan**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	68,917,000		68,917,000	1.00	-	68,917,000	-	-	Dinas Perhubungan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi					1 Laporan	16,800,000		14,000,000	0.83	-	14,000,000	-	-	Dinas Perhubungan	

			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**3,014,313,890**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Perhubungan**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					2,951,913,890		2,895,165,481		0.98	-	2,895,165,481	-	-	Dinas Perhubungan	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						44,400,000		44,400,000		1.00	-	44,400,000	-	-	Dinas Perhubungan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir				1 Laporan	18,000,000		15,000,000		0.83	-	15,000,000	-	-	Dinas Perhubungan	

		Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						**55,000,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Perhubungan**	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	25,000,000		25,000,000	1.00	-	25,000,000	-	-	Dinas Perhubungan	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan					1 Dokumen	30,000,000		30,000,000	1.00	-	30,000,000	-	-	Dinas Perhubungan	

			Barang Milik Daerah SKPD															
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						**80,342,900**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Perhubungan**	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	52,592,900		46,391,600		0.88	-	46,391,600	-	-	Dinas Perhubungan	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	27,750,000		27,750,000		1.00	-	27,750,000	-	-	Dinas Perhubungan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**49,760,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Perhubungan**	

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1,800,000		1,800,000		1.00	-	1,800,000	-	-	Dinas Perhubungan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	27,960,000		27,960,000		1.00	-	27,960,000	-	-	Dinas Perhubungan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	20,000,000		20,000,000		1.00	-	20,000,000	-	-	Dinas Perhubungan	
									11,223,913,790				0.00						

		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN										**#DIV/0!**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian**	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**4,529,847,968**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian**	
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Peningkatan jumlah OPD memiliki portal/web sesuai standar (kumulatif)**	**6**	**654,160,000**			**7**	**1,613,173,100**	**7**			**0.00**	**7**	**-**	**1.17**	**-**	**Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian**	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik							**1,613,173,100**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Komunikas, Informatika,**	

		Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota															**Statistik dan Persandian**	
		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik					1 Dokumen	100,000,000		100,000,000		1.00	-	100,000,000	-	-	Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah					1 Dokumen	300,000,000		299,650,000		1.00	-	299,650,000	-	-	Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian	

		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik					1 Dokumen	443,173,100		443,173,100		1.00	-	443,173,100	-	-	Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik					1 Dokumen	200,000,000		194,824,200		0.97	-	194,824,200	-	-	Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media					Layanan	220,000,000		20,000,000		0.09	-	20,000,000	-	-	Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian	

		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan					1 Dokumen	350,000,000		316,225,000		0.90	-	316,225,000	-	-	Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian	
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	**Peningkatan jumlah layanan publik yg diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	**1**	**251,794,000**			**2**	**785,600,000**	**2**			**0.00**	**2**	**-**	**2**	**-**	**Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian**	

			(kumulatif)															
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota						**785,600,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian**	
		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerint					1 Dokumen	60,600,000		50,000,000		0.83	-	50,000,000	-	-	Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian	

			ahan Daerah Kabupaten/Kota															
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah						725,000,000		13,000,000		0.02	-	13,000,000	-	-	Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**80**				**2,131,074,868**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						**17,100,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian**	

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	17,100,000		10,260,000		0.60	-	10,260,000	-	-	Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**1,722,947,868**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						1,705,847,868		1,575,225,132		0.92	-	1,575,225,132	-	-	Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan					1 Laporan	17,100,000		10,260,000		0.60	-	10,260,000	-	-	Dinas Komunikas, Informatika, Statisti	

		ulanan/Semesteran SKPD	an/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD															k dan Persandian	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-				-	-	-	-	-	**Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengk				1 Paket	-				-	-	-	-	-	Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan	

			apan														Persandian	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						**232,401,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	49,401,000		48,974,800	0.99	-	48,974,800	-	-	Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	20,000,000		19,965,000	1.00	-	19,965,000	-	-	Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian	

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	3,000,000			0.00	-	-	-	-	Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					Laporan	10,000,000		9,950,000	1.00	-	9,950,000	-	-	Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	150,000,000		142,100,000	0.95	-	142,100,000	-	-	Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian	

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						**112,671,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					Unit	112,671,000		111,556,000		0.99	-	111,556,000	-	-	Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**32,000,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura					1 Laporan	2,000,000		2,000,000		1.00	-	2,000,000	-	-	Dinas Komunikas, Informatika, Statisti	

			t														k dan Persandian	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	30,000,000		8,500,000		0.28	-	8,500,000	-	-	Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**13,955,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak					1 Unit	13,955,000		12,785,000		0.92	-	12,785,000	-	-	Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian	

		Lapangan	dan Perizinannya															
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						**50,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian**	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Peningkatan jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah**	**1**	**48,200,000**			**3**	**50,000,000**	**3**			**0.00**	**3**	**-**	**3**	**-**	**Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian**	

			(kumulatif)															
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota						**50,000,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral					1 Dokumen	50,000,000		38,000,000		0.76	-	38,000,000	-	-	Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian	

		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP											-	-	-	-	-	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
													-	-	-	-	-		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							**3,790,324,154**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentasi nilai komitmen investasi PMA/PMDN yang direalisasikan**	**100**	**393,383,000**			**100**	**369,698,360**	**137**			**0.00**	**137**	-	**1.37**	-	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/							**369,698,360**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	

		Kota																
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal					Kegiatan usaha	83,198,360		83,198,000		1.00	-	83,198,000	-	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksan						198,000,000		198,000,000		1.00	-	198,000,000	-	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	

			aan Penanaman Modal															
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan						88,500,000		88,500,000		1.00	-	88,500,000	-	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		**100**	**149,490,000**				**519,890,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan							**519,890,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	

		yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan					1 Dokumen	519,890,000		519,890,000		1.00	-	519,890,000	-	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**80**					**2,900,735,794**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**2,700,747,554**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						2,700,747,554		2,278,513,243		0.84	-	2,278,513,243	-	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**79,898,300**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor					1 Paket	16,098,300		16,098,300		1.00	-	16,098,300	-	-	Dinas Penanaman Modal dan	

			yang Disediakan														PTSP	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	20,000,000		19,960,000		1.00	-	19,960,000	-	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	43,800,000		43,800,000		1.00	-	43,800,000	-	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**76,426,340**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunik					1 Laporan	74,966,340		26,600,000		0.35	-	26,600,000	-	-	Dinas Penanaman Modal dan	

		Listrik	asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan														PTSP	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1,460,000		1,460,000		1.00	-	1,460,000	-	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**43,663,600**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau					1 Unit	43,663,600		38,171,800		0.87	-	38,171,800	-	-	Dinas Penanaman Modal dan	

		, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipeliharaan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya														PTSP	
												#DIV/0!						
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN										**#DIV/0!**					**Dinas Perpustakaan**	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						**6,223,230,820**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perpustakaan**	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		**502**	**15,060,000**			**100,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perpustakaan**	
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/						**100,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perpustakaan**	

		Kota																
		Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan					Lokus	100,000,000		100,000,000		1.00	-	100,000,000	-	-	Dinas Perpustakaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**80**					**6,123,230,820**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perpustakaan**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**1,358,605,720**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perpustakaan**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji						1,325,405,720		1,295,976,344		0.98	-	1,295,976,344	-	-	Dinas Perpustakaan	

			dan Tunjangan ASN															
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							33,200,000		4,150,000		0.13	-	4,150,000	-	-	Dinas Perpustakaan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**77,142,400**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Perpustakaan**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	986,400		986,400		1.00	-	986,400	-	-	Dinas Perpustakaan	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggan					1 Paket	1,200,000		1,200,000		1.00	-	1,200,000	-	-	Dinas Perpustakaan	

			daan yang Disediakan															
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	1,440,000		1,440,000		1.00	-	1,440,000	-	-	Dinas Perpustakaan	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	3,966,000		3,966,000		1.00	-	3,966,000	-	-	Dinas Perpustakaan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	69,550,000				0.00	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan	

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						**4,648,318 ,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Perpus takaan**	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	4,648,318 ,000		4,199,428,200	0.90	-	4,199, 428,2 00	-	-	Dinas Perpust akaan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**18,872,500**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Perpus takaan**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	596,500		596,500	1.00	-	596,5 00	-	-	Dinas Perpust akaan	

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	9,276,000		9,270,000		1.00	-	9,270,000	-	-	Dinas Perpustakaan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	9,000,000		8,098,900		0.90	-	8,098,900	-	-	Dinas Perpustakaan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**20,292,200**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Perpustakaan**	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					1 Unit	20,292,200		20,292,200		1.00	-	20,292,200	-	-	Dinas Perpustakaan	
													-						
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN											-					**Dinas Kelautan dan Perikanan**	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							**7,832,247,380**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN	**Peningkatan produksi perikan**	**8.53**	**6,355,296,000**			**9.24**	**3,399,888,000**	**9.24**			**0.00**	**9**	-	**1.08**	-	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	

		TANGKAP	**an tangkap (persen/tahun)**															
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						**3,399,888,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia					Unit	3,399,888,000		3,072,674,000		0.90	-	3,072,674,000	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANA	**Peningkatan produksi**	**9.17**	**1,706,021,000**			**10.76**	**1,784,726,000**	**61.02**			**0.00**	**61**	**-**	**6.65**	**-**	**Dinas Kelautan dan Perika**	

		N BUDIDAYA	**perikanan budidaya (persen/tahun)**														**nan**	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						**1,784,726,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	15,000,000		15,000,000		1.00	-	15,000,000	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupat					Unit	1,769,726,000		1,033,667,900		0.58	-	1,033,667,900	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	

			en/Kota															
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		**816**	**100,000,000**				**100,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota							**100,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1					Ton	100,000,000		100,000,000		1.00	-	100,000,000	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	

			(Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**80**					**2,547,633,380**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**20,500,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	20,500,000		20,500,000		1.00	-	20,500,000	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**2,347,635,468**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						2,347,635,468		2,239,245,595		0.95	-	2,239,245,595	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**100,000,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					Orang	100,000,000		100,000,000		1.00	-	100,000,000	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**41,950,000**				0.00	-	-	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Penyediaan Bahan	Jumlah Paket					1 Pak	5,350,000		5,350,00		1.00	-	5,350,	-	-	Dinas Kelauta	

		Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					et			0				000			n dan Perikanan	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	2,500,000		2,500,000		1.00	-	2,500,000	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	34,100,000		34,100,000		1.00	-	34,100,000	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**22,570,412**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	
		Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan					1 Lap	1,500,000		1,500,00		1.00	-	1,500,	-	-	Dinas Kelauta	

		Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					oran			0				000			n dan Perikanan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	5,940,000		4,212,000		0.71	-	4,212,000	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	15,130,412		15,129,000		1.00	-	15,129,000	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang							**14,977,500**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	

		Urusan Pemerintahan Daerah																
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharaa dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					1 Unit	14,977,500		14,977,500		1.00	-	14,977,500	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA											**#DIV/0!**					
													#DIV/0!					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAG						**10,965,000,000**					**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga**	

		A																
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Peningkatan persentase pemuda produktif (persen poin dari tahun sebelumnya)**					**0.29**	**2,575,000,000**	**0.26**			**0.00**	**0**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga**	
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/							**1,725,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga**	

		Kota																
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya					Orang	1,500,000,000		1,350,000,000		0.90	-	1,350,000,000	-	-	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkat					Orang	225,000,000		225,000,000		1.00	-	225,000,000	-	-	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	

		Kabupaten/Kota	kan Kapasitas Daya Saingnya															
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						**850,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga**	
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan					850,000,000		790,000,000		0.93	-	790,000,000	-	-	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Persentase peningkatan jumlah atlet Berprestasi**				**25.5**	**7,690,000,000**	**10.0**			**0.00**	**10**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga**	

			Tingkat Internasional/ Nasional /Provinsi (PON/Kejurnas/ Porda/Kejurda)															
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						**5,000,000 ,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga**	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/K	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang					Unit	5,000,000 ,000		1,871,18 1,151		0.37	-	1,871, 181,1 51	-	-	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	

		ota	Tersedia dan Termanfaatkan															
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						**1,150,000,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga**	
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan					Orang	1,150,000,000		1,150,000,000		1.00	-	1,150,000,000	-	-	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						**1,540,000,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga**	
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil					Organisasi	1,540,000,000		1,540,000,000		1.00	-	1,540,000,0	-	-	Dinas Pariwisata dan	

			Pengembangan Organisasi Keolahragaan											00			Kepemudaan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**Persentase kecamatan yang mempunyai Kwartir Ranting Pramuka aktif**				**77.8**	**700,000,000**	**40.0**			**0.00**	**40**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga**	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						**700,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga**	
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat				Organisasi	100,000,000		100,000,000		1.00	-	100,000,000	-	-	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	

			Kapasitasnya															
		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya					Orang	100,000,000		100,000,000		1.00	-	100,000,000	-	-	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	
		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah					1 Laporan	100,000,000		100,000,000		1.00	-	100,000,000	-	-	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanf					Unit	100,000,000		100,000,000		1.00	-	100,000,000	-	-	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	

			aatkan															
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan					Organisasi	300,000,000		300,000,000		1.00	-	300,000,000	-	-	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							**13,431,835,154**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga**	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Persentase potensi destinasi/ODTW yang telah dikembangkan oleh pemerintah/ masyarakat/swas**	**10.4**	**1,571,219,000**			**11.4**	**7,316,999,780**	**14.0**			**0.00**	**14**	-	**1.35**	-	**Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga**	

			ta															
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota						**336,999,780**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga**	
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					1 Dokumen	336,999,780		336,999,780	1.00	-	336,999,780	-	-	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota						**6,980,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga**	

		Pengadaan/ Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Unit	6,780,000,000		5,140,624,123		0.76	-	5,140,624,123	-	-	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							200,000,000		200,000,000		1.00	-	200,000,000	-	-	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Jumlah kunjungan wisatawan asing (orang)**	**88**	**870,000,000**			**136**	**2,307,500,000**	**243**			**0.00**	**243**	**-**	**2.76**	**-**	**Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahra**	

																	ga	
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota						**2,307,500 ,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga**	
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					1 Dokumen	520,000,000		520,000,000		1.00	-	520,000,000	-	-	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	

		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri					1 Laporan	1,687,500,000		1,687,407,500		1.00	-	1,687,407,500	-	-	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri					1 Dokumen	100,000,000		100,000,000		1.00	-	100,000,000	-	-	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	

		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Peningkatan jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan (kumulatif)**	**10**	**309,994,000**			**12**	**200,000,000**	**14**			**0.00**	**14**	**-**	**1.40**	**-**	**Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga**	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							**200,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga**	
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					Orang	200,000,000		200,000,000		1.00	-	200,000,000	-	-	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahrag	

		Kreatif Tingkat Dasar	Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya														a	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**80**					**3,607,335,374**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**3,280,665,374**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						3,173,985,374		3,037,873,502		0.96	-	3,037,873,502	-	-	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan							106,680,000		106,680,000		1.00	-	106,680,00	-	-	Dinas Pariwisata dan	

		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												0			Kepemudaan Olahraga	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						**282,383,974**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	24,658,974		24,658,974	1.00	-	24,658,974	-	-	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	33,075,000		32,895,000	0.99	-	32,895,000	-	-	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan					1 Laporan	224,650,000		217,750,000	0.97	-	217,750,000	-	-	Dinas Pariwisata dan Kepem	

		Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														udaan Olahraga	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**35,498,426**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	15,698,426		10,465,617	0.67	-	10,465,617	-	-	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	19,800,000		19,800,000	1.00	-	19,800,000	-	-	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah						**8,787,600**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Pariwisata dan Kepem**	

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															**udaan Olahraga**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	8,787,600		5,858,400		0.67	-	5,858,400	-	-	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	
									24,396,835,154				0.00	-	-	-	-		
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN											**#DIV/0!**						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							**904,010,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Pertanian dan Ketahanan**	

																	Pangan	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Persentase desa yang masuk dalam kategori tidak rentan kerawanan pangan**	**60.6**	**545,333,000**			**64.0**	**904,010,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							**34,010,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	

		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan					1 Laporan	34,010,000		34,010,000		1.00	-	34,010,000	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi							**870,000,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis					1 Laporan	870,000,000		868,340,000		1.00	-	868,340,000	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

			Sumber Daya Lokal															
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						**16,051,614,692**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Produktifitas tenaga kerja sektor pertanian (Rp. juta/tahun)**	**21.12**	**1,323,008,000**			**21.51**	**4,042,093,570**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						**2,218,601,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung					1 Laporan	425,830,000		198,750,000		0.47	-	198,750,000	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

		dan Spesifik Lokasi	Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi															
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					1 Laporan	1,792,771,000		624,386,000		0.35	-	624,386,000	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota							**206,826,570**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tana	Jumlah Pelaksanaan					1 Doku	206,826,570		179,065,000		0.87	-	179,065,00	-	-	Dinas Pertanian dan	

		man	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman					men						0			Ketahanan Pangan	
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain							**1,616,666,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					Ekor	1,616,666,000		883,102,000		0.55	-	883,102,000	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMB	**Peningkatan produksi**	**7**	**9.198.805.000**			**10.0**	**372,830,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pertanian dan Ketaha**	

		ANGAN PRASARANA PERTANIAN	**tanaman Pangan (persen/tahun)**														**nan Pangan**	
		Pengembangan Prasarana Pertanian							**372,830,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	
		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan							372,830,000		349,400,000		0.94	-	349,400,000	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Persentasi Kelembagaan Petani/ Kelompok Tani yang ditingkatkan kapasitasnya**	**23.5**	**1,012,325,000**			**21.6**	**210,300,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	
		Pelaksanaan Penyuluhan							**210,300,0**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Pertani**	

		Pertanian							**00**								**an dan Ketahanan Pangan**	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan					1 Dokumen	210,300,000		56,500,000		0.27	-	56,500,000	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**80**					**11,426,391,122**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat							**278,100,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	

		Daerah																
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	278,100,000		26,095,000		0.09	-	26,095,000	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**10,998,334,122**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						10,998,334,122		2,255,002,817		0.21	-	2,255,002,817	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**120,648,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/M					1 Paket	28,148,000				0.00	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan	

			aterial yang Disediakan														Ketahanan Pangan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	92,500,000		52,059,000		0.56	-	52,059,000	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**12,936,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	12,936,000		2,838,000		0.22	-	2,838,000	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**16,373,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharaa dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					1 Unit	16,373,000		7,410,000	0.45	-	7,410,000	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM																	

		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						**3,314,306,505**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM**	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						**-**					**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM**	
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu)						**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM**	

		Daerah Kabupaten/ Kota																
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan					Unit Usaha	-				-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Peningkatan jumlah UMKM (kumulatif dari tahun sebelumnya)**	**1.642**	**77.000.000**			**1730**	**701,210,000**	**2,554**			**0.00**	**2,554**	**-**	**1,555.42**	**-**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM**	
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan							**701,210,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan,**	

		Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil															**dan Koperasi UKM**	
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi					Unit Usaha	701,210,000		695,638,900		0.99	-	695,638,900	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**80**					**2,613,096,505**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Kopera**	

																	si UKM	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						**27,105,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	26,095,000		26,095,000	1.00	-	26,095,000	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan					1 Laporan	1,010,000			0.00	-	-	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM	

			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**2,437,056,505**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					2,397,816,505		2,255,002,817		0.94	-	2,255,002,817	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM	

		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1 Dokumen	39,240,000		8,260,000		0.21	-	8,260,000	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**92,390,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	5,090,000		2,283,000		0.45	-	2,283,000	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM	

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	2,000,000		1,500,000		0.75	-	1,500,000	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	85,300,000		52,059,000		0.61	-	52,059,000	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**38,620,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa					1 Laporan	17,500,000		2,838,000		0.16	-	2,838,000	-	-	Dinas Perindustrian, Perdaga	

		Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan														ngan, dan Koperasi UKM	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	21,120,000		6,219,000		0.29	-	6,219,000	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**17,925,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM**	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	17,925,000		7,410,000		0.41	-	7,410,000	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							**265,000,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM**	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Persentase peningkatan jumlah sarana distribusi**	**3.5**				**3.7**	**215,000,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Kopera**	

			perdagangan (pasar umum/desa, toko, kios)														**si UKM**	
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						**215,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM**	
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan					Unit	215,000,000		189,670,965		0.88	-	189,670,965	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	**Persentase pengendalian ketersediaan, harga,**					**80 Persen**	**50,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan**	

		BARANG PENTING	**dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten**														**Koperasi UKM**	
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota						**50,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM**	
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuh					-				#DIV/0!	-	-	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	

		Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	an Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														UKM	
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					1 Laporan	50,000,000		50,000,000		1.00	-	50,000,000	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG							**608,510,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Dinas Perindustrian,**	

		PERINDUSTRIAN															**Perdagangan, dan Koperasi UKM**	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Persentase peningkatan jumlah perusahaan industri**	**11.8**	**6,681,987,000**			**12.1**	**608,510,000**	**60.41**			**0.00**	**60**	**-**	**5.12**	**-**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM**	
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota							**608,510,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM**	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan					1 Dokumen	7,500,000				0.00	-	-	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Kopera	

			pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														si UKM	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					1 Dokumen	1,010,000				0.00	-	-	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan					1 Dokumen	600,000,000		549,600,000		0.92	-	549,600,000	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM	

			Industri dan Peran Serta Masyarakat															
		BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI										-						
		SEKRETARIAT DAERAH						**582,585,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Persentase kerjasama daerah yang ditindaklanjuti**	**100**	**722,287,000**			**100**	**533,685,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bagian Hukum dan Organisasi**	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							**507,150,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bagian Hukum dan Organisasi**	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah							465,750,000		245,250,000		0.53	-	245,250,000	-	-	Bagian Hukum dan Organisasi	

		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum							41,400,000		41,400,000		1.00	-	41,400,000	-	-	Bagian Hukum dan Organisasi	
		Fasilitasi Kerjasama Daerah							**26,535,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bagian Hukum dan Organisasi**	
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri							26,535,000				0.00	-	-	-	-	Bagian Hukum dan Organisasi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**80**					**48,900,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bagian Hukum dan Organisasi**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**48,900,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bagian Hukum dan Organisasi**	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	48,900,000		48,900,000		1.00	-	48,900,000	-	-	Bagian Hukum dan Organisasi	
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN (HUMAS)											-						
		SEKRETARIAT							**400,000,0**				**0.00**						

		DAERAH							**00**									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							**400,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (HUMAS)**	
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							**400,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (HUMAS)**	
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan					1 Laporan	330,000,000		1,298,300,000		3.93	-	1,298,300,000	-	-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (HUMAS)	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunik					1 Laporan	70,000,000		308,500,847		4.41	-	308,500,847	-	-	Bagian Protokol dan Komunikasi	

			asi Pimpinan														Pimpinan (HUMAS)	
									400,000,000				0.00					
		BAGIAN KESRA DAN TENAGA KERJA											-					
		SEKRETARIAT DAERAH							**22,115,965,234**				**0.00**					
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Cakupan fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**100**	**1,008,329,000**			**100**	**22,115,965,234**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bagian Kesra dan Tenaga Kerja**	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							**22,115,965,234**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bagian Kesra dan Tenaga Kerja**	

		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						10,757,250,000		12,173,600,000		1.13	-	12,173,600,000	-	-	Bagian Kesra dan Tenaga Kerja	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial						4,609,360,000		3,384,510,000		0.73	-	3,384,510,000	-	-	Bagian Kesra dan Tenaga Kerja	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat						6,749,355,234		5,255,473,100		0.78	-	5,255,473,100	-	-	Bagian Kesra dan Tenaga Kerja	
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM										-						
		SEKRETARIAT DAERAH						**2,477,350,000**				**0.00**	-	-	-	-		

		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		**57.89**	**11,832,468,000**				**292,750,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam**	
		Administrasi Tata Pemerintahan							**292,750,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam**	
		Penataan Administrasi Pemerintahan							205,000,000		181,000,000		0.88	-	181,000,000	-	-	Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah							87,750,000		87,750,000		1.00	-	87,750,000	-	-	Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam	

		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeirintah (SAKIP)**	**100**	**631,798,000**			**68.42**	**109,600,000**	**78.95**			**0.00**	**79**	**-**	**0.79**	**-**	**Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam**	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							**109,600,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam**	
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan							109,600,000		109,600,000		1.00	-	109,600,000	-	-	Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**80**					**2,075,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam**	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**2,075,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi					Ha	2,075,000,000		352,500,000		0.17	-	352,500,000	-	-	Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam	
		BAGIAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA											**-**						
		SEKRETARIAT DAERAH						**390,429,496**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Cakupan penyelenggaraan pengadaan barang**	**100**	**631,798,000**			**100**	**390,429,496**	**90**			**0.00**	**90**	**-**	**0.90**	**-**	**Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang**	

			dan jasa secara elektronik														**dan Jasa**	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						**390,429,496**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						157,200,000		115,800,000		0.74	-	115,800,000	-	-	Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik						233,229,496		162,380,460		0.70	-	162,380,460	-	-	Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	

		BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN										-						
		SEKRETARIAT DAERAH						**47,868,037,747**				**0.00**						
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		**100**	**1,008,329,000**			**1,604,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan**	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						**1,604,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan**	
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					Dokumen	1,604,000,000		12,173,600,000	7.59	-	12,173,600,000	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**80**					**46,264,037,747**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**628,450,500**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan**	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	53,450,500		53,450,500		1.00	-	53,450,500	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	
		Evaluasi Kinerja Perangkat							575,000,000		500,000,000		0.87	-	500,000,00	-	-	Bagian Umum, Perenca	

		Daerah												0			naan dan Keuangan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**15,722,352,570**				**0.00**	-	-	-	-	**Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					15,722,352,570		15,474,672,729		0.98	-	15,474,672,729	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusu					1 Laporan	-			#DIV/0!	-	-	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	

			nan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan an/Semesteran SKPD															
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							**184,500,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan**	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							83,000,000		83,000,000		1.00	-	83,000,000	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							101,500,000		101,500,000		1.00	-	101,500,000	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat							**569,324,936**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bagian Umum, Perenc**	

		Daerah															**anaan dan Keuangan**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	569,324,936		569,324,936		1.00	-	569,324,936	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**9,764,611,091**				**0.00**	-	-	-	-	**Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	763,542,311		763,109,630		1.00	-	763,109,630	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	550,850,000		499,785,238		0.91	-	499,785,238	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	2,682,567,250		2,598,304,928		0.97	-	2,598,304,928	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	493,390,480		477,981,361		0.97	-	477,981,361	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang					1 Paket	577,500,000		537,500,000		0.93	-	537,500,000	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan	

			Disediakan														Keuangan	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					Laporan	841,790,300		837,144,300		0.99	-	837,144,300	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	3,854,970,750		3,652,006,717		0.95	-	3,652,006,717	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**3,432,975,312**				**0.00**	-	-	-	-	**Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan**	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							1,516,170,000		1,516,170,000		1.00	-	1,516,170,000	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	

		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						202,134,000				0.00	-	-	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	900,000,000		848,339,520		0.94	-	848,339,520	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	425,000,000		375,000,000		0.88	-	375,000,000	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				Unit	389,671,312		389,597,177		1.00	-	389,597,177	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	

			atau Bangunan Lainnya yang Disediakan															
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**2,630,732,915**				**0.00**	-	-	-	-	**Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	222,925,000		219,672,000		0.99	-	219,672,000	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak					1 Laporan	1,564,810,915		1,478,498,595		0.94	-	1,478,498,595	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	

			an															
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	218,830,000		218,350,000		1.00	-	218,350,000	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	624,167,000		584,095,208		0.94	-	584,095,208	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**6,085,883,221**				**0.00**	-	-	-	-	**Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan**	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	969,629,021		969,554,490		1.00	-	969,554,490	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					1 Unit	90,800,000		65,149,700		0.72	-	65,149,700	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan					1 Unit	5,025,454,200		4,575,086,409		0.91	-	4,575,086,409	-	-	Bagian Umum, Perencanaan	

		Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipeliharaa/Direhabilitasi														dan Keuangan	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						**995,538,957**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Orang/ Bulan	180,538,957		158,033,590		0.88	-	158,033,590	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas					Paket	265,000,000		261,825,000		0.99	-	261,825,000	-	-	Bagian Umum, Perencanaan	

		Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan														dan Keuangan	
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Orang	150,000,000		149,879,493		1.00	-	149,879,493	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjan					2 Orang/ Bulan	400,000,000		396,000,000		0.99	-	396,000,000	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuang	

		Wakil Kepala Daerah	g Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														an	
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						**4,657,968,245**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan**	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan					Paket	1,200,000,000		1,200,000,000	1.00	-	1,200,000,000	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga					Paket	900,000,000		900,000,000	1.00	-	900,000,000	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuang	

			Wakil Kepala Daerah yang Disediakan														an	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan					Paket	2,557,968,245		2,551,443,617		1.00	-	2,551,443,617	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	
		Penataan Organisasi							**273,000,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan**	
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					1 Laporan	273,000,000		245,950,000		0.90	-	245,950,000	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	

		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					1 Dokumen	-				#DIV/0!	-	-	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							**1,318,700,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan**	
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan					1 Laporan	1,028,700,000		1,298,300,000		1.26	-	1,298,300,000	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunik					1 Laporan	290,000,000		308,500,847		1.06	-	308,500,847	-	-	Bagian Umum, Perencanaan dan	

			asi Pimpinan														Keuangan	
		SEKRETARIAT DPRD											-					
		SEKRETARIAT DPRD						**37,231,064,152**					**0.00**					
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**Cakupan fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**	**100**	**8,482,246,000**			**100**	**14,697,820,640**	**100**			**0.00**	**100**	**-**	**1**	**-**	**Sekretariat DPRD**	
		Peningkatan Kapasitas DPRD						**1,353,000,000**					**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sekretariat DPRD**	
		Pendalaman Tugas DPRD						528,000,000		406,079,954			0.77	-	406,079,954	-	-	Sekretariat DPRD	
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						825,000,000		450,000,000			0.55	-	450,000,000	-	-	Sekretariat DPRD	
		Penyerapan dan Penghimpun						**4,218,050,000**					**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sekretariat DPRD**	

		an Aspirasi Masyarakat																
		Kunjungan Kerja dalam Daerah						2,660,285,000		2,213,500,000		0.83	-	2,213,500,000	-	-	Sekretariat DPRD	
		Pelaksanaan Reses						1,557,765,000		1,472,400,000		0.95	-	1,472,400,000	-	-	Sekretariat DPRD	
		Fasilitasi Tugas DPRD						**9,126,770,640**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sekretariat DPRD**	
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						9,126,770,640		8,891,105,880		0.97	-	8,891,105,880	-	-	Sekretariat DPRD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**80**				**22,533,243,512**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sekretariat DPRD**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat						**168,705,700**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sekretariat DPRD**	

		Daerah																
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	32,955,000		31,900,000		0.97	-	31,900,000	-	-	Sekretariat DPRD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan					1 Laporan	135,750,700		124,000,000		0.91	-	124,000,000	-	-	Sekretariat DPRD	

			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**3,882,726,252**				**0.00**	-	-	-	-	**Sekretariat DPRD**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					2,362,321,252		2,310,436,874		0.98	-	2,310,436,874	-	-	Sekretariat DPRD	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1,520,405,000		1,406,098,500		0.92	-	1,406,098,500	-	-	Sekretariat DPRD	

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						**523,200,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Sekretariat DPRD**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	523,200,000		521,000,000		1.00	-	521,000,000	-	-	Sekretariat DPRD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						**1,874,675,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Sekretariat DPRD**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,900,000		6,400,000		0.93	-	6,400,000	-	-	Sekretariat DPRD	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan				1 Paket	380,000,000		267,756,800		0.70	-	267,756,800	-	-	Sekretariat DPRD	

			Perlengkapan Kantor yang Disediakan															
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	58,775,000		24,701,700		0.42	-	24,701,700	-	-	Sekretariat DPRD	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1,429,000,000		1,344,077,831		0.94	-	1,344,077,831	-	-	Sekretariat DPRD	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**1,308,832,660**				**0.00**	-	-	-	-	**Sekretariat DPRD**	
		Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan					1 Lap	14,400,00		10,353,0		0.72	-	10,35	-	-	Sekretariat	

		Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					oran	0		00				3,000			DPRD	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	469,957,660		277,794,704		0.59	-	277,794,704	-	-	Sekretariat DPRD	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	824,475,000		814,010,400		0.99	-	814,010,400	-	-	Sekretariat DPRD	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang							**746,000,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Sekretariat DPRD**	

		Urusan Pemerintahan Daerah																
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	496,000,000		402,787,650		0.81	-	402,787,650	-	-	Sekretariat DPRD	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	250,000,000		207,300,000		0.83	-	207,300,000	-	-	Sekretariat DPRD	
		Penataan Organisasi							-				-	-	-	-	-	**Sekretariat DPRD**	

		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					1 Laporan	-				-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							**13,129,153,900**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sekretariat DPRD**	
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD					25 Orang / Bulan	13,054,153,900		12,106,820,612		0.93	-	12,106,820,612	-	-	Sekretariat DPRD	
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD					Orang	75,000,000		20,000,000		0.27	-	20,000,000	-	-	Sekretariat DPRD	
		Layanan Administrasi DPRD							**899,950,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Sekretariat DPRD**	

		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan					Paket	899,950,000		647,500,000		0.72	-	647,500,000	-	-	Sekretariat DPRD	
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											-						
		PERENCANAAN							**6,169,573,695**				**0.00**						
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Pemban gunan Manusia**	**80**	**1,791,264,000**			**80**	**870,296,627**	**78**	**778,090,900**		**0.89**	**78**	**778,090,900**	**0.98**	**0.43**	**BP3D**	

			dan Pemerintahan															
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						**719,838,000**		**638,113,000**		**0.89**	**-**	**638,113,000**	**-**	**-**	**BP3D**	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota					1 Berita Acara	535,782,000	1 Berita Acara	535,782,000	1.00	1 Berita Acara	535,782,000	-	-	BP3D	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)					1 Dokumen	184,056,000	1 Dokumen	102,331,000	0.56	1 Dokumen	102,331,000	-	-	BP3D	

		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						**56,149,900**		**56,149,900**		**1.00**	**-**	**56,149,900**	**-**	**-**	**BP3D**	
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)					Masukan	56,149,900		56,149,900		1.00	-	56,149,900	-	-	BP3D	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan						**94,308,727**		**83,828,000**		**0.89**	**-**	**83,828,000**	**-**	**-**	**BP3D**	

		Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah					1 Laporan	94,308,727	1 Laporan	83,828,000		0.89	1 Laporan	83,828,000	-	-	BP3D	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase capaian kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan**	**80**	**1,712,924,000**			**80**	**1,215,580,500**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BP3D**	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintaha							**456,734,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BP3D**	

		n dan Pembangunan Manusia																
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan					1 Laporan	21,370,000	1 Laporan	1,250,000		0.06	1 Laporan	1,250,000	-	-	BP3D	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia					1 Laporan	435,364,000	1 Laporan	303,126,000		0.70	1 Laporan	303,126,000	-	-	BP3D	

		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						**261,963,800**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BP3D**	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)					1 Dokumen	145,421,700		4,530,700	0.03	-	4,530,700	-	-	BP3D	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Sinkronnya Renstra/ Renja dengan					1 Laporan	116,542,100		3,976,100	0.03	-	3,976,100	-	-	BP3D	

		Pembangunan Daerah Bidang SDA	RKPD/RPJMD pada Bidang SDA															
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						**496,882,700**				**0.00**	-	-	-	-	**BP3D**	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)					1 Dokumen	70,000,300		44,350,300	0.63	-	44,350,300	-	-	BP3D	

		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan					1 Laporan	426,882,400	1 Laporan	-		0.00	1 Laporan	-	-	-	BP3D	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**80**					**4,083,696,568**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BP3D**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**36,070,000**				0.00	-	-	-	-	BP3D	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	36,070,000	1 Laporan	36,070,000		1.00	1 Laporan	36,070,000	-	-	BP3D	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**3,193,847,268**				**0.00**	-	-	-	-	**BP3D**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji						3,082,607,268		2,944,946,903		0.96	-	2,944,946,903	-	-	BP3D	

			dan Tunjangan ASN															
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1 Dokumen	111,240,000	1 Dokumen	55,620,000		0.50	1 Dokumen	55,620,000	-	-	BP3D	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**214,550,000**				**0.00**	-	-	-	-	**BP3D**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	19,800,000	1 Paket	19,800,000		1.00	1 Paket	19,800,000	-	-	BP3D	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan					Orang	194,750,000		-		0.00	-	-	-	-	BP3D	

			Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						**537,627,300**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BP3D**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	160,500,000		-	0.00	-	-	-	-	BP3D	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	18,500,000	1 Paket	18,500,000	1.00	1 Paket	18,500,000	-	-	BP3D	

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	67,895,000	1 Dokumen	43,600,000		0.64	1 Dokumen	43,600,000	-	-	BP3D	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	24,782,300	1 Paket	24,756,300		1.00	1 Paket	24,756,300	-	-	BP3D	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	265,950,000	1 Laporan	157,200,000		0.59	1 Laporan	157,200,000	-	-	BP3D	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan							**101,602,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BP3D**	

		Pemerintahan Daerah																
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	2,400,000	1 Laporan	2,400,000		1.00	1 Laporan	2,400,000	-	-	BP3D	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	45,972,000	1 Laporan	45,972,000		1.00	1 Laporan	45,972,000	-	-	BP3D	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	53,230,000	1 Laporan	41,980,000		0.79	1 Laporan	41,980,000	-	-	BP3D	

		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						**608,520,800**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BP3D**	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Peningkatan Indeks SDM penelitian dan pengembangan daerah (basis poin/tahun)**	**1.9**	**168,763,000**			**3.03**	**608,520,800**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BP3D**	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						**213,999,200**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BP3D**	
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelol					1 Laporan	213,999,200	1 Laporan	213,999,200		1.00	1 Laporan	213,999,200	-	-	BP3D	

			a dengan Baik															
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi						**394,521,600**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BP3D**	
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					1 Dokumen	233,317,000	-	-	0.00	-	-	-	-	BP3D	
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan					1 Laporan	161,204,600	1 Laporan	140,279,000	0.87	1 Laporan	140,279,000	-	-	BP3D	

			Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH											-						
													-						
		KEUANGAN							**220,297,728,021**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Indeks predikat LKPD (berdasarkan Permendagri No. 19/2020)**	**100**	**10,266,036**			**100**	**201,855,780,447**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BPKD**	
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							**1,551,601,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BPKD**	
		Koordinasi dan	Jumlah Dokume					2 Do	301,600,0	2 Do	301,600,		1.00	2 Dok	301,6	-	-	BPKD	

		Penyusunan KUA dan PPAS	n KUA dan PPAS yang Disusun					ku men	00	ku men	000			ume n	00,00 0			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokume n Perubaha n KUA dan Perubaha n PPAS yang Disusun					2 Do ku me n	350,000,0 00	2 Do ku me n	350,000, 000		1.00	2 Dok ume n	350,0 00,00 0	-	-	BPKD	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD							500,000,0 00		500,000, 000		1.00	-	500,0 00,00 0	-	-	BPKD	

		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD							400,001,000		400,001,000		1.00	-	400,001,000	-	-	BPKD	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							**1,842,998,000**				0.00	-	-	-	-	**BPKD**	
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD							250,000,000		249,500,000		1.00	-	249,500,000	-	-	BPKD	
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah							349,998,000		349,998,000		1.00	-	349,998,000	-	-	BPKD	

		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya							250,000,000		213,200,000		0.85	-	213,200,000	-	-	BPKD	
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait							275,000,000		275,000,000		1.00	-	275,000,000	-	-	BPKD	
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan							325,000,000		324,750,000		1.00	-	324,750,000	-	-	BPKD	

		dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						393,000,000		375,900,000		0.96	-	375,900,000	-	-	BPKD	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						**675,000,000**				0.00	-	-	-	-	**BPKD**	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan						225,765,000		225,765,000		1.00	-	225,765,000	-	-	BPKD	

		dan Semesteran																
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							449,235,000		449,235,000		1.00	-	449,235,000	-	-	BPKD	
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan							**197,786,181,447**				0.00	-	-	-	-	**BPKD**	

		Keuangan Daerah																
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah						14,991,150,000		2,054,988,696		0.14	-	2,054,988,696	-	-	BPKD	
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						176,391,653,250		51,704,110,638		0.29	-	51,704,110,638	-	-	BPKD	
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						5,831,608,897		5,654,832,000		0.97	-	5,654,832,000	-	-	BPKD	
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota						571,769,300				0.00	-	-	-	-	BPKD	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG	**Cakupan pengelolaan**	**100**	**600,000,000**			**100**	**1,640,399,800**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BPKD**	

		MILIK DAERAH	**BMD sesuai peraturan perundang-undangan (persen)**															
		Pengelolaan Barang Milik Daerah						**1,640,399,800**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BPKD**	
		Penyusunan Standar Harga						250,000,000		250,000,000		1.00	-	250,000,000	-	-	BPKD	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	390,000,000		390,000,000	1.00	-	390,000,000	-	-	BPKD	
		Pengamanan Barang Milik Daerah							100,000,000		100,000,000	1.00	-	100,000,000	-	-	BPKD	
		Pengawasan dan Pengendalian							274,999,800		274,999,800	1.00	-	274,999,80	-	-	BPKD	

		Pengelolaan Barang Milik Daerah												0				
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						125,400,000		125,400,000		1.00	-	125,400,000	-	-	BPKD	
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						500,000,000		500,000,000		1.00	-	500,000,000	-	-	BPKD	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (persen)**	**90**	**631,520,000**			**90**	**1,077,242,310**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BPKD**	
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah							**1,077,242,310**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BPKD**	

		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						400,489,310		400,489,310		1.00	-	400,489,310	-	-	BPKD	
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						228,629,200		228,629,200		1.00	-	228,629,200	-	-	BPKD	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah						448,123,800		448,123,800		1.00	-	448,123,800	-	-	BPKD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**90**	**76,921,507**			**24,333,042,580**				**0.00**	-	-	-	-	**BPKD**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						**365,629,800**				0.00	-	-	-	-	**BPKD**	

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	197,006,800		197,006,800		1.00	-	197,006,800	-	-	BPKD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja					1 Laporan	168,623,000		168,623,000		1.00	-	168,623,000	-	-	BPKD	

			dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**13,921,216,097**				0.00	-	-	-	-	**BPKD**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					13,514,704,497		11,753,401,156		0.87	-	11,753,401,156	-	-	BPKD	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	256,511,600		256,511,600		1.00	-	256,511,600	-	-	BPKD	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan				1 Dokumen	150,000,000		150,000,000		1.00	-	150,000,000	-	-	BPKD	

		Pemeriksaan	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan															
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						**3,011,088,447**				0.00	-	-	-	-	**BPKD**	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					1 Unit	1,301,899,947		1,148,920,000	0.88	-	1,148,920,000	-	-	BPKD	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	70,000,000		70,000,000	1.00	-	70,000,000	-	-	BPKD	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan					1 Dokumen	200,000,000		200,000,000	1.00	-	200,000,000	-	-	BPKD	

			Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					Orang	400,000,000		400,000,000		1.00	-	400,000,000	-	-	BPKD	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Orang	1,039,188,500		939,317,500		0.90	-	939,317,500	-	-	BPKD	

		Administrasi Umum Perangkat Daerah						**4,432,261,336**				0.00	-	-	-	-	**BPKD**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	25,440,436			0.00	-	-	-	-	BPKD	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	343,500,000		318,500,000	0.93	-	318,500,000	-	-	BPKD	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggan					1 Paket	627,730,400		613,094,000	0.98	-	613,094,000	-	-	BPKD	

			daan yang Disediakan															
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	980,000,000		950,000,000		0.97	-	950,000,000	-	-	BPKD	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	636,928,800		611,928,800		0.96	-	611,928,800	-	-	BPKD	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1,560,800,000		1,506,359,434		0.97	-	1,506,359,434	-	-	BPKD	

		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	257,861,700		257,861,700		1.00	-	257,861,700	-	-	BPKD	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**56,500,700**				0.00	-	-	-	-	**BPKD**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Paket	56,500,700		56,500,700		1.00	-	56,500,700	-	-	BPKD	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah							**1,928,228,200**				0.00	-	-	-	-	**BPKD**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa					1 Laporan	41,648,000		41,000,000		0.98	-	41,000,000	-	-	BPKD	

			Surat Menyurat															
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	1,838,580,200		1,796,569,658		0.98	-	1,796,569,658	-	-	BPKD	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	48,000,000		36,500,000		0.76	-	36,500,000	-	-	BPKD	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang							**618,118,000**				0.00	-	-	-	-	**BPKD**	

		Urusan Pemerintahan Daerah																
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					1 Unit	543,118,000		350,000,000		0.64	-	350,000,000	-	-	BPKD	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	75,000,000		74,000,000		0.99	-	74,000,000	-	-	BPKD	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT											**#DIV/0!**						
		KEPEGAW											**0.00**						

		AIAN						**6,188,172,680**										
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Penurunan rasio pelanggaran disiplin pegawai per 1000 ASN (basis poin/tahun)**	**0.09**	**1,655,837,000**			**0.13**	**2,463,393,705**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BKD**	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						**172,073,886**				0.00	**-**	**-**	**-**	**-**	**BKD**	
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						65,454,926				0.00	-	-	-	-	BKD	
		Pengelolaan Data Kepegawaian						69,900,000		69,900,000		1.00	-	69,900,000	-	-	BKD	

		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian							36,718,960		36,718,960		1.00	-	36,718,960	-	-	BKD	
		Mutasi dan Promosi ASN							**176,798,149**				0.00	-	-	-	-	**BKD**	
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN							150,229,581		150,229,581		1.00	-	150,229,581	-	-	BKD	
		Pengelolaan Promosi ASN							26,568,568		26,568,568		1.00	-	26,568,568	-	-	BKD	
		Pengembangan Kompetensi ASN							**1,979,584,850**				0.00	-	-	-	-	**BKD**	
		Pengelolaan Assessment Center							413,584,850		413,584,850		1.00	-	413,584,850	-	-	BKD	
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN							1,566,000,000		1,006,000,000		0.64	-	1,006,000,000	-	-	BKD	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							**134,936,820**				0.00	-	-	-	-	**BKD**	

		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai							62,932,820		62,932,820		1.00	-	62,932,820	-	-	BKD	
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN							72,004,000		72,004,000		1.00	-	72,004,000	-	-	BKD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**90**	**76,921,507**				**3,724,778,975**				**0.00**	-	-	-	-	**BKD**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**8,030,230**				0.00	-	-	-	-	**BKD**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	4,078,900		4,078,500		1.00	-	4,078,500	-	-	BKD	
		Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-					1 Doku	3,951,330		3,951,000		1.00	-	3,951,000	-	-	BKD	

		Dokumen RKA-SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					men										
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**3,281,303,717**				0.00	-	-	-	-	**BKD**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						3,205,823,717		3,118,515,316		0.97	-	3,118,515,316	-	-	BKD	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuanga					1 Dokumen	75,480,000		75,480,000		1.00	-	75,480,000	-	-	BKD	

			n SKPD															
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						**89,224,660**				0.00	-	-	-	-	**BKD**	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Orang	89,224,660		89,224,660	1.00	-	89,224,660	-	-	BKD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						**304,887,368**				0.00	-	-	-	-	**BKD**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna					1 Paket	45,600,000		43,400,000	0.95	-	43,400,000	-	-	BKD	

			n Kantor yang Disediakan															
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	72,429,900				0.00	-	-	-	-	BKD	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	10,395,000		10,395,000		1.00	-	10,395,000	-	-	BKD	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-					1 Dokumen	1,584,000		1,584,000		1.00	-	1,584,000	-	-	BKD	

			Undangan yang Disediakan															
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	17,725,000		17,725,000		1.00	-	17,725,000	-	-	BKD	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	157,153,468		156,934,000		1.00	-	156,934,000	-	-	BKD	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**25,932,500**				0.00	-	-	-	-	**BKD**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	3,987,000		3,987,000		1.00	-	3,987,000	-	-	BKD	

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	21,945,500		21,945,000		1.00	-	21,945,000	-	-	BKD	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**15,400,500**				0.00	-	-	-	-	BKD	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharaa dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					1 Unit	15,400,500		15,400,500		1.00	-	15,400,500	-	-	BKD	

		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						**1,271,035,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**BKD**	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Peningkatan rasio pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan) (basis poin/tahun)**	**0.12**	**742,809,000**			**1.99**	**1,271,035,000**	**79**			**0.00**	**79**	**-**	**658.33**	**-**	**BKD**	
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						**1,271,035,000**				0.00	**-**	**-**	**-**	**-**	**BKD**	

		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					1 Laporan	1,271,035,000		1,116,500,000		0.88	-	1,116,500,000	-	-	BKD	
		INSPEKTORAT											-	-	-	-	-		
		INSPEKTORAT DAERAH							**11,385,377,273**				**0.00**	-	-	-	-		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Persentase penyelesaian tindak**	**100**	**1,494,150,000**			**100**	**2,867,874,800**	**54.65**			**0.00**	**55**	-	**0.55**	-	**Inspektorat**	

			lanjut hasil pemeriksaan BPK															
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal						**1,742,867,400**				0.00	-	-	-	-	**Inspektorat**	
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						293,000,000		293,000,000		1.00	-	293,000,000	-	-	Inspektorat	
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						260,425,000		178,825,000		0.69	-	178,825,000	-	-	Inspektorat	
		Reviu Laporan Kinerja						120,700,400		120,700,400		1.00	-	120,700,400	-	-	Inspektorat	
		Reviu Laporan Keuangan						415,992,000		411,992,000		0.99	-	411,992,000	-	-	Inspektorat	
		Pengawasan Desa						224,550,000		224,400,000		1.00	-	224,400,000	-	-	Inspektorat	
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil						428,200,000		427,400,000		1.00	-	427,400,000	-	-	Inspektorat	

		Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						**1,125,007,400**				0.00	-	-	-	-	**Inspektorat**	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						50,000,000				0.00	-	-	-	-	Inspektorat	
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						1,075,007,400		1,064,764,400		0.99	-	1,064,764,400	-	-	Inspektorat	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Tingkat Kapabilitas APIP (berdasarkan hasil QA BPKP)**	**2.988**	**440,400,000**			**2998**	**575,131,600**				**0.00**	-	-	-	-	**Inspektorat**	
		Pendampingan dan Asistensi						**575,131,600**				0.00	-	-	-	-	**Inspektorat**	

		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						201,750,000		188,000,000		0.93	-	188,000,000	-	-	Inspektorat	
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						56,990,000				0.00	-	-	-	-	Inspektorat	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						260,650,000		260,650,000		1.00	-	260,650,000	-	-	Inspektorat	
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						55,741,600		55,741,600		1.00	-	55,741,600	-	-	Inspektorat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**90**	**76,921,507**			**7,942,370,873**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Inspektorat**	

		KABUPATEN/KOTA																
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						**20,000,000**				0.00	-	-	-	-	**Inspektorat**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	20,000,000		20,000,000		1.00	-	20,000,000	-	-	Inspektorat	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**5,853,872,873**				0.00	-	-	-	-	**Inspektorat**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					5,779,472,873			5,565,478,332		0.96	-	5,565,478,332	-	-	Inspektorat	

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	56,400,000		56,400,000		1.00	-	56,400,000	-	-	Inspektorat	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran					1 Laporan	18,000,000		18,000,000		1.00	-	18,000,000	-	-	Inspektorat	

			SKPD															
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						**452,000,000**				0.00	-	-	-	-	**Inspektorat**	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					Orang	452,000,000		442,000,000		0.98	-	442,000,000	-	-	Inspektorat	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						**1,538,342,800**				0.00	-	-	-	-	**Inspektorat**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket	510,412,800		482,643,000		0.95	-	482,643,000	-	-	Inspektorat	

			yang Disediakan															
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	372,000,000		372,000,000		1.00	-	372,000,000	-	-	Inspektorat	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	20,000,000		18,820,000		0.94	-	18,820,000	-	-	Inspektorat	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediak					1 Dokumen	156,730,000		156,530,000		1.00	-	156,530,000	-	-	Inspektorat	

			an															
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	60,000,000		59,950,500		1.00	-	59,950,500	-	-	Inspektorat	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	419,200,000		419,200,000		1.00	-	419,200,000	-	-	Inspektorat	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**38,155,200**				0.00	-	-	-	-	**Inspektorat**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	10,000,000		10,000,000		1.00	-	10,000,000	-	-	Inspektorat	

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	13,155,200			0.00	-	-	-	-	Inspektorat	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		\			1 Laporan	15,000,000		14,750,000	0.98	-	14,750,000	-	-	Inspektorat	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**40,000,000**			0.00	-	-	-	-	**Inspektorat**	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					1 Unit	40,000,000		40,000,000		1.00	-	40,000,000	-	-	Inspektorat	
		KECAMATAN JAILOLO											**#DIV/0!**	-	-	-	-		
		KECAMATAN							**28,895,607,519**				**0.00**	-	-	-	-		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**90**	**76,921,507**				**28,736,307,519**				**0.00**	-	-	-	-	**Kecamatan Jailolo**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi							**9,000,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Jailolo**	

		Kinerja Perangkat Daerah																
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	9,000,000		6,000,000		0.67	-	6,000,000	-	-	Kecamatan Jailolo	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**28,675,360,449**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Jailolo**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						28,675,360,449				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**20,250,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Jailolo**	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan					1 Laporan	20,250,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo	

			Konsultasi SKPD															
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**11,865,070**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Jailolo**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	2,865,070			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	9,000,000			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**19,832,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Jailolo**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	19,832,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Lingkungan >0,6**	**78.7**	**415,505,000**			**84.0**	**50,500,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Kecamatan Jailolo**	

		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						**50,500,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Jailolo**	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						50,500,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						**66,050,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Kecamatan Jailolo**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						**66,050,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Jailolo**	
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan						66,050,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo	

		oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun >0,6**	**61.8**	**725,982,000**			**65.56**	**42,750,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Jailolo**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							**42,750,000**				0.00	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Jailolo**	
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							20,250,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo	
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat							22,500,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo	

		Desa																
		KECAMATAN JAILOLO SELATAN										**#DIV/0!**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		KECAMATAN						**13,185,596,871**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**90**	**76,921,507**			**13,052,459,871**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Jailolo Selatan**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**12,972,986,871**				0.00	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Jailolo Selatan**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12,964,946,871				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo Selatan	

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	8,040,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo Selatan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**29,621,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Jailolo Selatan**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	2,120,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo Selatan	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan					1 Paket	2,211,600				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo Selatan	

			Penggandaan yang Disediakan															
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	960,000			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo Selatan	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	3,679,400			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo Selatan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulta					1 Laporan	20,650,000			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo Selatan	

			si SKPD															
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**16,660,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Jailolo Selatan**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1,428,000			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo Selatan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	4,320,000			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo Selatan	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa					1 Laporan	1,912,000			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo Selatan	

		Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan															
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	9,000,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo Selatan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**33,192,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Jailolo Selatan**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang					1 Unit	33,192,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo Selatan	

		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya															
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Lingkungan >0,6**	**78.7**	**415,505,000**			**84.0**	**15,973,200**	**65.32**			**0.00**	**65**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Jailolo Selatan**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							**15,973,200**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Jailolo Selatan**	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi							15,973,200				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo Selatan	

		Vertikal Terkait																
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						**63,140,800**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Jailolo Selatan**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						**63,140,800**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Jailolo Selatan**	
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						30,750,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo Selatan	
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan						32,390,800				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo Selatan	

		Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun >0,6**				**65.56**	**54,023,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Jailolo Selatan**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						**54,023,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Jailolo Selatan**	
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						19,023,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo Selatan	

		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya							14,000,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo Selatan	
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan							21,000,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Jailolo Selatan	
		KECAMATAN SAHU											**#DIV/0!**	-	-	-	-		
		KECAMATAN							**10,446,187,815**				**0.00**	-	-	-	-		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**90**	**76,921,507**				**10,312,547,815**				**0.00**	-	-	-	-	**Kecamatan Sahu**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**10,225,643,615**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Sahu**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji						10,225,643,615				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Sahu	

			dan Tunjangan ASN															
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						**43,530,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Sahu**	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	3,000,000			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Sahu	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					Laporan	5,580,000			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Sahu	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	34,950,000			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Sahu	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**23,371,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Sahu**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	2,074,000			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Sahu	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	3,297,000			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Sahu	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	18,000,000			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Sahu	

			yang Disediakan															
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**20,003,200**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Sahu**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	20,003,200				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Sahu	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAH						**63,840,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Kecamatan Sahu**	

		AN																
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						**33,950,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Sahu**	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						33,950,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Sahu	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						**29,890,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Sahu**	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						29,890,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Sahu	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase desa yang rawan gangguan keamanan dan**				**40**	**50,000,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Kecamatan Sahu**	

			ketertiban masyarakat															
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						**50,000,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Sahu**	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika						50,000,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Sahu	

		serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun >0,6**				**65.56**	**19,800,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Sahu**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						**19,800,000**				0.00	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Sahu**	
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						19,800,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Sahu	

		KECAMATAN SAHU TIMUR										**#DIV/0!**	-	-	-	-		
		KECAMATAN						**9,929,326,379**				**0.00**	-	-	-	-		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**90**	**76,921,507**			**9,775,526,379**				**0.00**	-	-	-	-	**Kecamatan Sahu Timur**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**9,708,777,679**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Sahu Timur**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					9,708,777,679				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Sahu Timur	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						**20,550,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Sahu Timur**	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelen					1 Laporan	20,550,000			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Sahu	

		dan Konsultasi SKPD	ggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					n									Timur	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**23,988,500**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Sahu Timur**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	5,988,500				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Sahu Timur	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang					1 Laporan	18,000,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Sahu Timur	

			Disediakan															
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**22,210,200**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Sahu Timur**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	22,210,200				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Sahu Timur	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Lingkun**	**78.7**	**415,505,000**			**84.0**	**10,800,000**	**65.32**			**0.00**	**65**	**-**	**0.83**	**-**	**Kecamatan Sahu Timur**	

			gan >0,6															
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						**10,800,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Sahu Timur**	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						10,800,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Sahu Timur	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase desa yang rawan gangguan keamanan dan ketertiban**				**40**	**43,050,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Kecamatan Sahu Timur**	

			masyarakat															
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						**43,050,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Sahu Timur**	
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						43,050,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Sahu Timur	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun >0,6**				**65.56**	**99,950,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Kecamatan Sahu Timur**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						**99,950,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Sahu Timur**	

		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						10,800,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Sahu Timur	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan						18,450,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Sahu Timur	
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						25,200,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Sahu Timur	
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						45,500,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Sahu Timur	
		KECAMATAN IBU										**#DIV/0!**	-	-	-	-		
		KECAMATAN						**7,959,894,812**				**0.00**	-	-	-	-		

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**90**	**76,921,507**				**7,802,619,812**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Ibu**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**7,739,346,242**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Ibu**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						7,739,346,242				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Ibu	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**20,550,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Ibu**	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	20,550,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Ibu	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**42,723,570**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Ibu**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	4,261,570			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Ibu	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	38,462,000			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Ibu	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	**Persentase desa yang rawan**				**40**	**42,500,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Ibu**	

		PEMERINTAHAN UMUM	**gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**															
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						**42,500,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Ibu**	
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						42,500,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Ibu	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun >0,6**				**65.56**	**114,775,000**				**0.00**	-	-	-	-	**Kecamatan Ibu**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan						**114,775,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Ibu**	

		dan Pengawasan Pemerintahan Desa																
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						24,000,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Ibu	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan						22,500,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Ibu	
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						39,375,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Ibu	
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan						28,900,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Ibu	

		KECAMATAN IBU SELATAN										**#DIV/0!**	-	-	-	-		
		KECAMATAN						**7,924,210,578**				**0.00**	-	-	-	-		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**90**	**76,921,507**			**7,670,210,578**				**0.00**	-	-	-	-	**Kecamatan Ibu Selatan**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**7,628,563,708**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Ibu Selatan**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					7,628,563,708				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Ibu Selatan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						**40,202,800**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Ibu Selatan**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan				1	Paket	19,552,800				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Ibu

		Kantor	dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan														Selatan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	20,650,000			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Ibu Selatan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**1,444,070**			0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Ibu Selatan**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang					1 Laporan	1,444,070			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Ibu Selatan	

			Disediakan															
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Lingkungan >0,6**					**84.0**	**144,900,000**	**65.32**			**0.00**	**65**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Ibu Selatan**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							**144,900,000**				0.00	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Ibu Selatan**	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							144,900,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Ibu Selatan	

		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase desa yang rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**					**40**	**44,450,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Ibu Selatan**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							**44,450,000**				0.00	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Ibu Selatan**	
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa							44,450,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Ibu Selatan	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun >0,6**					**65.56**	**64,650,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Ibu Selatan**	

		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						**64,650,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Ibu Selatan**	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						22,400,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Ibu Selatan	
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						14,850,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Ibu Selatan	
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan						27,400,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Ibu Selatan	
		KECAMATAN TABARU										-	-	-	-	-		
		KECAMAT										**0.00**			-	-		

		AN						**6,303,828,738**					**-**	**-**				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**90**	**76,921,507**			**6,188,728,238**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Tabaru**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**6,083,578,738**				0.00	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Tabaru**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					6,083,578,738				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Tabaru	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						**26,732,000**				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Tabaru	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan					1 Paket 2,337,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Tabaru	

			n Bangunan Kantor yang Disediakan															
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1,800,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Tabaru	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	2,345,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Tabaru	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	20,250,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Tabaru	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**38,417,500**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Tabaru**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1,200,000			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Tabaru	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	1,817,500			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Tabaru	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengk					1 Laporan	12,000,000			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Tabaru	

			apan Kantor yang Disediakan															
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	23,400,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Tabaru	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**40,000,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Tabaru**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang					1 Unit	40,000,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Tabaru	

		Dinas Jabatan	Dipeliharaan dan dibayarkan Pajaknya															
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Lingkungan >0,6**				**84.0**	**23,000,000**	**65.32**			**0.00**	**65**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Tabaru**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						**23,000,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Tabaru**	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						23,000,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Tabaru	

		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase desa yang rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**					**40**	**24,207,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Tabaru**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							**24,207,000**				0.00	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Tabaru**	
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa							24,207,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Tabaru	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun >0,6**					**65.56**	**67,893,500**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Tabaru**	

		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						**67,893,500**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Tabaru**	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						17,200,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Tabaru	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan						10,834,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Tabaru	
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						14,859,500				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Tabaru	
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di						25,000,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Tabaru	

		Wilayah Kecamatan																
		KECAMATAN LOLODA										-	-	-	-	-		
		KECAMATAN							**8,048,375,735**			**0.00**	-	-	-	-		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**90**	**76,921,507**				**7,852,945,735**			**0.00**	-	-	-	-	**Kecamatan Loloda**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**7,728,138,318**			0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Loloda**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						7,728,138,318			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**34,254,417**			0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Loloda**	

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	2,004,417				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	2,000,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	10,000,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelen					1 Lapora	20,250,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda	

		dan Konsultasi SKPD	ggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					n										
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**38,945,000**			0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Loloda**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1,950,000			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	4,000,000			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda	

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	32,995,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**51,608,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Loloda**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	21,620,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda	

		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	29,988,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Lingkungan >0,6**					**84.0**	**91,500,000**	**65.32**			**0.00**	**65**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Loloda**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							**91,500,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Loloda**	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan							91,500,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda	

		dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase desa yang rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**				**40**	**40,230,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Loloda**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						**40,230,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Loloda**	
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						40,230,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN	**Persentase desa dengan**				**65.56**	**63,700,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Loloda**	

		PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Indeks Desa Membangun >0,6**															
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						**63,700,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Loloda**	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						15,000,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan						28,700,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda	
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						20,000,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda	

		KECAMAMATAN LOLODA TENGAH										-	-	-	-	-		
		KECAMATAN						**5,200,901,206**				**0.00**	-	-	-	-		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**90**	**76,921,507**			**5,037,751,206**				**0.00**	-	-	-	-	**Kecamatan Loloda Tengah**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**3,729,709,339**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Loloda Tengah**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					3,729,709,339				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda Tengah	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						**25,392,292**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Loloda Tengah**	

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	2,022,292				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda Tengah	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	3,120,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda Tengah	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	20,250,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda Tengah	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**68,688,140**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Loloda Tengah**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	5,100,000			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda Tengah	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	5,588,140			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda Tengah	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	58,000,000			0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda Tengah	

			yang Disediakan															
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**1,213,961,435**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Loloda Tengah**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharaa dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	54,520,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda Tengah	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihar					1 Unit	75,000,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda Tengah	

			a															
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1,084,441,435				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda Tengah	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Lingkungan >0,6**					**84.0**	**64,500,000**	**65.32**			**0.00**	**65**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Loloda Tengah**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							**64,500,000**				0.00	-	-	-	-	**Kecamatan Loloda Tengah**	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan							64,500,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda Tengah	

		Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase desa yang rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**				**40**	**52,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Loloda Tengah**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						**52,000,000**				0.00	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Loloda Tengah**	
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						52,000,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda Tengah	

		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun >0,6**				**65.56**	**46,650,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Loloda Tengah**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						**46,650,000**				0.00	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kecamatan Loloda Tengah**	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						10,500,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda Tengah	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan						15,300,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda Tengah	

		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif							20,850,000				0.00	-	-	-	-	Kecamatan Loloda Tengah	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH											**#DIV/0!**	-	-	-	-		
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**9,019,101,789**				**0.00**	-	-	-	-		
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							**321,094,611**				**0.00**	-	-	-	-	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila							**321,094,611**				0.00	-	-	-	-	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**	

		dan Karakter Kebangsaan																
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						150,000,000		150,000,000		1.00	-	150,000,000	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,						34,200,000		34,000,000		0.99	-	34,000,000	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	

		Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							74,635,400				0.00	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran							62,259,211				0.00	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	

		Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Jumlah partai politik dan lembaga pendidikan tingkat kabupaten yang memperoleh fasilitasi Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (kumulatif)**	**16**	**567,944,000**			**18**	**1,862,790,000**	**9**			**0.00**	**9**	**-**	**0.56**	**-**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**	

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							**1,862,790,000**				0.00	-	-	-	-	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**	

		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							128,000,000		128,000,000		1.00	-	128,000,000	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	

		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah							411,630,000		400,230,000		0.97	-	400,230,000	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	

		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah							1,123,160,000		1,123,160,000		1.00	-	1,123,160,000	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,							200,000,000		200,000,000		1.00	-	200,000,000	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	

		Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan (kumulatif)**				**13**	**712,506,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**	

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						**712,506,000**				0.00	-	-	-	-	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**	
		Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						250,000,000		29,300,000		0.12	-	29,300,000	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	

		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						112,506,000				0.00	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						250,000,000		250,000,000		1.00	-	250,000,000	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	

		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							100,000,000				0.00	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							**100,000,000**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan							**100,000,000**				0.00	-	-	-	-	**Badan Kesatuan Bangsa dan**	

		Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya															**Politik Daerah**	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						100,000,000		100,000,000		1.00	-	100,000,000	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKA	**Peningkatan indeks ketahanan sosial (basis poin/tah**	**0.64**	**2,684,722**			**0.95**	**3,604,535,300**	**0.01**			**0.00**	**0**	**-**	**-**	**-**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**	

		TAN KUALITAS DAN FASILITAS I PENANGA NAN KONFLIK SOSIAL	**un)**															
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaa n Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						**3,604,535 ,300**				0.00	-	-	-	-	**Badan Kesatu an Bangsa dan Politik Daerah**	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga						491,127,0 00		491,127, 000		1.00	-	491,1 27,00 0	-	-	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Daerah	

		Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi							310,920,000		310,920,000		1.00	-	310,920,000	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	

		Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan							300,000,000				0.00	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	

		Konflik di Daerah																
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di							270,398,300				0.00	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	

		Daerah																
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta							117,600,000		53,900,000		0.46	-	53,900,000	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	

		Penanganan Konflik di Daerah																
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						2,114,490,000		2,114,490,000		1.00	-	2,114,490,000	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**90**	**76,921,507**			**2,418,175,878**				**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						**2,280,000**				0.00	-	-	-	-	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	2,280,000		2,280,000		1.00	-	2,280,000	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**1,939,613,078**				0.00	-	-	-	-	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**	
		Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang						1,939,613		1,832,46		0.94	-	1,832,	-	-	Badan Kesatua	

		Tunjangan ASN	yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						,078		6,713				466,713			n Bangsa dan Politik Daerah	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**42,000,000**				0.00	-	-	-	-	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	42,000,000				0.00	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**246,762,800**				0.00	-	-	-	-	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengk					1 Paket	100,440,000		100,440,000		1.00	-	100,440,000	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan	

			apan Kantor yang Disediakan														Politik Daerah	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	6,040,000		544,400		0.09	-	544,400	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	11,482,800		3,000,000		0.26	-	3,000,000	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	128,800,000		127,100,000		0.99	-	127,100,000	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**175,835,000**				0.00	-	-	-	-	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1,500,000		300,000		0.20	-	300,000	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	12,000,000				0.00	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan					1 Laporan	162,335,000		2,110,000		0.01	-	2,110,000	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

			Perlengkapan Kantor yang Disediakan														Daerah	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**11,685,000**				0.00	-	-	-	-	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	11,685,000		2,065,600		0.18	-	2,065,600	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Pembangunan yang Berhubungan Dengan Prioritasdan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Pada Tahun 2023, berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pembangunan pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan isu strategis dapat diidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta berbagai kemajuan yang telah dicapai sampai dengan tahun 2023. Adapun masalah mendesak dan tantangan utama pembangunan daerah yang dapat diuraikan menurut bidang kewenangan pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, maka beberapa permasalahan perlu untuk segera di selesaikan antara lain:

a. Anggaran adalah salah satu faktor penunjang peningkatan kinerja, keterlambatan pada tahapan pencairan masih dialami sehingga proses pelaksanaan program dan kegiatan tidak optimal;
b. Belum optimalnya pendidikan karakter bangsa dapat dilihat dari rata – rata lama sekolah yang meningkat dari tahun sebelumnya tapi masih berada di

bawah provinsi dan beberapa kab/Kota yang ada di Maluku utara.

c. Belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan ini dapat dilihat dari angka APS, APK dan APM yang masih Fluktuatif dalam 3 Tahun Terakhir
d. Salah satu Faktor APK PAUD yang menurun dari Tahun 2022 adalah mahalnya biaya yang harus di keluarkan terutama untuk PAUD Swasta
e. Berdasarkan Permendikbud No 22 Tahun 2016 maka dapat disampaikan bahwa untuk robongan belajar SD dan SMP masih berda di bawa ketentuan maksimumnya yaitu SD 28 dan SMP 32.
f. Rendahnya Kesempatan Pemerataan pendidikan dapat dilihat dari sebaran sarana dan prasarana pendidikan di 9 kecamatan menjadi salah satu Faktor yang mempengaruhi nilai APK dan APM SPM yang Dalam 3 Tahun
g. Walaupun jumlah angka melek huruf bertambah setiap tahunnya akan tetapi minat baca peserta didik masih rendah disebabkan beberapa sekolah belum memiliki perpustakaan dengan standar nasional.

Sementara dari sisi kebudayaan, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membuka peluang terjadinya interaksi budaya antar daerah maupun antar bangsa yang dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan dan perubahan orientasi nilai dan perilaku masyarakat di Halmahera Barat. Namun, di sisi lain, hal tersebut dapat juga menimbulkan pengaruh negatif, seperti menurunnya penghargaan pada nilai budaya, bahasa, dan nilai solidaritas sosial. Oleh karena itu tantangan pokok dalam memperkukuh jati diri dan karakter masyarakat, adalah

a. Melestarikan nilai-nilai tradisi luhur yang menjadi identitas budaya;
b. Meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah;
c. Meningkatkan upaya pelindungan dan pengembangan kebudayaan
d. Anggaran bidang Kebudayaan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten belum didasarkan pada analisis kebutuhan Pemajuan Kebudayaan.

e. Ketersediaan infrastruktur Kebudayaan belum merata;

f. Kurangnya infrastruktur publik milik pemerintah yang pengelolaan dan penyusunan programnya dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan para pelaku seni dan budaya sebagai pemangku kepentingan bidang Kebudayaan.

Isu Kebudayaan tidak dapat diabaikan karena sangat berpengah terhadap jati diri suatu daerah. Oleh karena itu pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan perlu mengambiil langkah – langkah konkrit dalam menentukan Regulasi, dukungan program, kurikulum yang inklusif menuju pertahanan budaya yang berkelanjutan.

2. Bidang Kesehatan

Beberapa permasalah dalam bidang kesehatan sebagai berikut :

1. Kasus Kematian Ibu dalam tiga Tahun terakhir mengalami fluktuatif ini dapat dilihat dalan angka AKI yang tersaji.
2. Angka kematian Neonatal mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022. Salah satu penyebab adalah faktor bawaan sejak lahir yang sangat dipengaruhi saat kehamilan. pendampingan oleh tenaga kesehatan sangat diperlukan dari semenjak merencanakan kehamilan sampai pada persalinan.
3. Tahun 2023 Angka Kematin Bayi mengalami penurunan dan angka tersebut dalam tiga tahun terakhir fluktuatif salah satu faktor yang berpengaruh terhadap AKB adalah kualitas hidup dan kondisi ibu saat mengandung
4. Sampai tahun 2023 kasus Underweight, Wasting dan Stunting masih dengan jumlah kasus yang cukup tinggi
5. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar kesehatan baru 38 persen dari total balita yaitu 11.158 balita
6. Warna Negara usia diatas 69 tahun yang mendapat skinning kesehatan sesuai standar kesehatan baru 77 persen dari total lansia

6.382 orang

7. Penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan baru 24,79 persen dari total 7.716 orang
8. PenderitaDiabetes yang mendapat pelayanan kesehatan baru 62 persen dari total 613 orang
9. ODGJ yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar baru 68 persen dari total 613 orang
10. Kasus penyakit menular dalam hal ini TBC cukup tinggi total sasaran 2.553 orang dan baru mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 10.57 persen.
11. Untuk penderita HIV baru sebesar 8.07 Persen atau 22 orang yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar dari total sasaran sebanyak 2.726 orang.
12. Belum meratanya sebaran sarana dan prasarana kesehatan di 9 kecamatan

Untuk bidang KB sendiri bebepara kendala dan permasalahan dihadapi antara lain :

a. Belum meratanya akses pelayanan KB yang ditandai dengan masih rendah dan tidak signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi, masih tingginya kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need) di masyarakat dan masih rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB;
b. Rendahnya kualitas pelayanan KB yang ditandai dengan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB, kurang efektifnya pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang/MKJP, masih tingginya angka drop-out (termasuk kegagalan dan komplikasi) dalam pemakaian alat kontrasepsi;
c. Masih lemahnya pelaksanaan advokasi serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang ditandai oleh masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan pasangan usia subur tentang KB dan kesehatan

reproduksi;

d. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan ketenagaan program KKB;
e. Lemahnya pembinaan dan pemberdayaan keluarga dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kesertaan ber-KB, serta meningkatkan kesertaan KB mandiri.
f. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan KIE dan pemanfaatan kegiatan KB momentum sebagai sarana pembinaan akseptor oleh para PLKB, PKB, TPD/TPK.

3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Saat ini pembangunan fisik dan infrastruktur masih belum merata terutama di wilayahUtara. Dikarenakan sebagian besar kegiatan pemerintahan, pendidikan, ekonomi dan sosial masyarakat masih berpusat di Ibu Kota Kabupaten. Selain pembangunan fisik dan infrastruktur yang belum merata, ada beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan dukungan infrastruktur dasar antara lain:

a. Masih ada ruas-ruas jalan utama yang menghubungkan antar kecamatan rusak sedang dan berat akibat kondisi jalan yang kurang terawat. Ini dapat dilihat dari panjang jalan dengan kondisi rusak berat yaitu 129.36 KM atau sebesar 25,55Persen. Hal ini disebabkan berbagai faktor yaitu dari segi manajemen, kurangnya pendanaan, maupun teknis pelaksanaan dan sistem penyelenggaraannya,
b. Masih ada kecamatan dan desa yang belum terjangkau dengan sarana jalan,
c. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum akibat terbatasnya armada angkutan darat, khususnya untuk daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah terisolasi.
d. Tingginya tingkat kerusakan daerah tangkapan air dan perubahan iklim yang menyebabkan frekuensi dan intensitas bahaya banjir semakin meningkat disebabkan belum terbangunannya sistem drainase makro dan

mikro.

e. Belum semua masyarakat dapat mengakses sanitasi yang layak dan menikmati akses air minum yang bersih hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kwalitas kesehatan masyarakat.

4. Lingkungan Hidup dan Perumahan

Salah satu permasalahan yang ada pada lingkungan Hidup dan Permukiman yaitu pemukiman kumuh. Tahun 2023, dari jumlah rumah 34.157 unit rumah yang tidak kayak huni sebanyak 2.874 unit atau 11,87 persen jumlah ini lebih kecil dari tahun sebelumnya akan tetapi masalah ini tidak serta merta diabaikan karena masih ada masyarakat yang menempati rumah yang tidak layak huni Ini artinya penyediaan perumahan dan permukiman yang layak sampai saat ini masih belum seratus persen memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, beberapa tantangan yang dihadapi perumahan antara lain adalah:

a. terbatasnya akses MBR terhadap penguasaan dan legalitas lahan;
b. terbatasnya akses MBR terhadap pembiayaan perumahan.

Adapun dari segi kelayakan dan kwalitas air yang dikonsumsi, air minum layak sudah dapat dinikmati lebih 50 persen dari total jumlah rumah yang ada. Akan tetapi terkait sanitasi dan air minum, beberapa kendala dapat digambarkan yaitu belum memadainya perangkat peraturan, terbatasnya penyedia layanan yang kredibel dan professional, belum optimalnya sistem perencanaan; dan terbatasnya ketersediaan pendanaan.

5. Perencanaan Pembangunan

Permasalah dan tantangan pokok yang diahadapi dalam menata lembaga perencanaan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah masih terkait dengan (1)semakin kompleksnya objek dan ruang lingkup atau

wilayah perencanaan dan/atau penelitian itu sendiri; (2) kapasitas dan kompotensi perencana yang rendah; (3) lemahnya koordinasi lintas sektoral, lintas PD, dan lintas pemerintah daerah, serta antara pemerintah daerah dengan provinsi maupun dengan pemerintah pusat; (4) kualitas dokumen perencanaan yang rendah; (5) pelaksanaan output perencanaan (dokumen) yang belum konsisten; (6) pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya melibatkan stakeholder; (7) belum optimal menggunakan data dan sistem TIK dalam perencanaan; (8) belum optimal pelaksanaan pengendalian pembangunan yang melibatkan stakeholder, serta (9) belum mantapnya mekanisme perencanaan yang mengatur kedudukan dan fungsi setiap pemangku kepentingan dalam setiap proses perencanaan, antara dan DPRD serta unsur masyarakat dan swasta.

6. Perhubungan

Permasalahan dan tantangan dalam bidang perhubungan dan tranportasi antara lain:

1. Pengembangan sistem dan pola transportasi masih belum mampu mengurangi hambatan-hambatan geografis, sehingga kebutuhan terhadap aksesibilitas pelayanan transportasi bagi masyarakat di perdesaan dan belum terpenuhi secara baik;
2. Kompetensi dan jumlah SDM dan kinerja kelembagaan transportasi belum mampu memenuhi tuntutan dalam mewujudkan tata kelola standar pelayanan minimal.
3. Sistem transportasi daerah belum memadai;
4. Koordinasi antara sektoral dan daerah belum berjalan secara optimal dalam mensinergikan pola transportasi yang selama ini masih parsial untuk mewujudkan “domestic connectivity” yang mendukung distribusi manusia dan hasil-hasil produksi masyarakat.
5. Jumlah terminal belum berfungsi maksimal karena dari 5 terminal yang ada baru beroperasi 2 terminal

6. Baru 1 rambu yang terpasang dari total 5 jalan dan jembatan sehingga berpengaruh terhadap keselamatan pengguna jalan ini mengakibatkan peningkatan kecelakan dari tahun sebelumnya yaitu 15 menjadi 18 kecelakaan dan mengakibatkan 20 korban

7. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan sektor komunikasi dan informatika adalah

a. Terbatasnya ketersediaan spektrum jaringan Telkom, telkomsel dan indosat sebagai penyedia layanan telekomunikasi, informasi dan komunikasi saat ini;
b. Masih rendahnya kemampuan masyarakat di bidang TIK (e-literasi);
c. Masih rendahnya e- leadership, kesadaran, dan keterbukaan instansi pemerintah daerah untuk saling berbagi data/informasi sehingga menyulitkan penguatan sistem back office pemerintah daerah yang terpadu termasuk pertukaran dan validasi data.
d. Terbatasnya alokasi dana untuk pengembangan jaringan komunikasi
e. Terbatasnya sumberdaya manusia bidang telematika baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
f. Masih mahalnya harga bandwidth internet yang berkualitas;
g. Masih ada sekitar 8 persen masarakat yang belum menikmati jaringan telekomunikasi secara maksimal

8. Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi antara lain :

a. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia baik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil masih belum mencukupi baik jumlah maupun kapabilitas pegawai

b. Dengan penyediaan data kependudukan yang akurat dan up to date melalui pengembangan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) secara online, penerapkan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang dilengkapi biometrik (perekaman sidik jari) dan chip untuk mengeliminasi KTP ganda dan KTP palsu, masih sangat dipengaruhi ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, rendahnya SDM pengelolaan kependudukan.
c. Pemerintah daerah belum mengoptimalkan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), serta masih adanya penduduk dengan KTP ganda, NIK ganda; serta NIK yang diterbitkan tidak mencerminkan data yang faktual.
d. Demografis dan geografis daerah sangat berpengaruh pada mobilisasi atau perekaman
e. Masih ada sekitar 22,6 persen warga yang belum memiliki identitas kependudukan
f. Masih ada sekitar 26 persen warga yang belum memiliki Akte Kelahira

9. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa masalah sosial yang dihadapi sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah penduduk miskin dari 10,06 jiwa pada Tahun 2022 menjadi 10,53 jiwa pada Tahun 2023. meningkatnya jumlah penganggungan di daerah dari 2.14 juta tahun 2022 menjadi 2.62 juta tahun 2023 menjadi salah satu masalah yang harus pendapat perhatian serius oleh pemerintah
2. Keterbatasan jangkauan atau cakupan manfaat bantuan program pemerintah juga masih menjadi masalah. Hal ini disebabkan kuota

atau alokasi dana yang kurang memadai dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat miskin. Keterlambatan penyaluran dana bantuan seperti pada program Jamkesmas, Jamkesda, PKH, dan Bantuan Siswa Miskin juga menyebabkan masyarakat miskin tidak dapat memanfaatkan bantuan pada saat dibutuhkan. Selanjutnya dari sisi penanggulangan bencana, permasalahan dan tantangan pada tahun 2013 antara lain terkait dengan (i) kapasitas kelembagaan bencana didaerah harus terus ditingkatkan; (ii) peningkatan kapasitas dan pengurangan risiko bencana, dan (iii) peningkatan kapasitas penanganan kedaruratan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai.

3. Khusus penerima manfaat pada daerah-daerah lokus stunting belum dapat dilaksanakan secara maksimal
4. Belum terbentuknya sistem dan manajemen penanganan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antar instansi dan profesi sehingga penangangan tidak bersifat sektoral dan terputus, termasuk di dalamnya terkait kebijakan lokal mengenai pelayanan sosial;
5. Belum optimalnya peran serta dan pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pemberdayaan, pembinaan dan pendampingan lembaga kesejahteraan sosial sebagai mitra kerja pemerintah yang strategis dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Beberapa permasalahan sosial yang perlu penangan serius oleh pemerintah daerah sebagai berikut :

a. Jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja
b. Kualitas tenaga kerja relatif rendah;
c. Belum terintegrasinya antara kebutuhan dunia usaha dengan

kemampuan tenaga kerja.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pemenuhan hak-hak anak dan perempuan diantaranya :

a. Belum sepenuhnya pelaksanaan perlindungan anak sesuai dengan Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak-hak anak mencakup hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, serta mendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi, dan diskriminasi. Hal ini dapat dilihat dengan masih ada kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan, masih ditemukan tindak kekerasan pada anak dan Kasus KDRT
b. Kurangnya pemahaman dan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, serta koordinasi pelaksanaannya;
c. Keterbatasan anggaran sehingga dalam pelakasanaan pelayanan pendampingan kasus tersendat dan kurang maksimal.
d. Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal;
e. Penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
f. Penerapan Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran belum optimal;
g. Lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang ada belum banyak berperan secara maksimal;
h. Fasilitas sarana prasarana publik yang tersedia belum semuanya responsif gender.

10. Penanaman modal dan PTSP

Permasalahan dan tantangan penanaman modal antara lain :

a. Belum optimalnya proses Pelayanan Perizinan. Hal ini cukup dirasakan pada pengurusan perizinan ditingkat birokrasi misalnya lamanya waktu perizinan dan biaya.
b. Kurangnya dukungan infrastruktur misalnya infrastruktur jalan dan transportasi sangat berkaitan dengan distribusi barang dan jasa
c. Belum optimalnya ketersediaan Sumber Daya yang dibutuhkan bagi perluasan usaha penanaman modal.
d. Kebijakan ekomoni pemerintah daerah yang belum maksimal mengurangi minat investor untuk berinvestasi di daerah

11. Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan dan tantangan dibidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga antara lain :

a. Daya saing destinasi pariwisata masih rendah karena belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata, belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pariwisata, terutama transportasi darat dan laut, dan ketersediaan fasilitas umum; belum optimalnya kemitraan dan kerja sama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat;
b. Pemasaran promosi pariwisata yang belum efektif karena belum optimalnya kemitraan antar pemangku kepentingan; belum optimalnya pemanfaatan media media cetak dan elektronik (TIK) sebagai sarana promosi yang didukung oleh ketersediaan informasi dan basis data pariwisata;
c. Terbatasnya daya saing sumber daya manusia dibidang pariwisata.
d. Belum Memadainya Infrastruktur Pariwisata di Beberapa Daerah
e. Masih Kurangnya Investasi di Sektor Pariwisata dan Kurang Diperhatikannya Aspek Lingkungan Hidup.

Pemuda memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat berkualitas. Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan masa depan. Karena merupakan pelaku pembangunan masa depan, peran serta pemuda sebagai kekuatan moral, pelaku sosial dan agen perubahan perlu ditingkatkan. Masalah masalah kepemudaan diantaranya :

a. Masih minimnya keikut sertaan kegiatan kepemudaan dan olah raga
b. Maraknya masalah sosial kepemudaan misalnya kriminal, penyalahgunaan narkotika dan miras
c. Masih kurangnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga olahragaan yang berpartisipasi
d. Masih kurangnya keterampilan dan kecakapan hidup pemuda

12. Pemerintahan umum, administrasi keuangan, pengawasan dankepegawaian daerah

a. **Tata Kelola Pemerintahan Daerah;** Dalam rangka pencapaian terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, tantangan yang dihadapi semakin berat dan kompleks akibat dinamika perubahan yang cepat. Tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan terkait dengan tata kelolah pemerintah daerah antara lain meliputi kelembagaan, otonomi daerah, sumber daya manusia aparatur, regulasi, sinergi pusat dan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan penegakan hukum. Permasalahan utama dalam kelembagaan menyangkut struktur yaitu masih banyak instansi pemerintah daerah yang struktur organisasi dan tatalaksananya belum sepenuhnya mendukung tupoksi sehingga berdampak pada rendahnya kinerja. Sesuai visi RPJMD membangun dengan Kasih, wujudkan Halmahera Barat yang Berbudaya, Mandiri, Adil Dan Makmur; serta motto “melayani bukan dilayani” maka tantangan utama adalah meraih kepercayaan masyarakat bahwa

birokrasi telah berubah; membangun mental melayani; meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur; memperluas reformasi birokrasi untuk berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik.

b. **Regulasi dan Legislasi Daerah;** tantangannya adalah melakukan percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di daerah serta peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyusun peraturan daerah yang berkualitas.

c. **Pengelolaan Keuangan Daerah;** Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain:

   1) Permasalahan bidang pendapatan daerah, antara lain tidak tercapainya target penerimaan sesuai APBD, terutama pendapatan yang bersumber dari PAD dan lain-lain pendatan yang sah. Hal ini disebabkan oleh (1) belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah; (2) masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolah yang memenuhi harapan organisasi dan masyarakat; (3) belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan dan peningkatan pendatan daerah, sera (4) belum efektifnya sistem pengawasan. (5) minimnya sumber-sumber pendapatanyang harus dikelolah

   2) Permasalahan bidang belanja belanja daerah antara lain (1) masih terbatasnya fiskal daerah, dipihak lain tingginya kebutuhan belanja untuk percepatan pembangunan daerah untuk mendukung kegiatan ekonomi dalam memacu pertumbuhan (pro growth), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job), serta mengurangi kemiskinan (pro poor); (2) belum optimalnya pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan dan belanja daerah; (3) masih rendahnya efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah sebagai dampak dari belum sinkronnya penggunaan belanja sesuai sumber pendapatan serta belum sinergi program lintas PD;

3) Permasalahan bidang pembiayaan daerah adalah: (1) besarnya defisit APBD pada tahun berjalan yang mendorong besarnya utang pemerintah daerah yang terbawa pada tahun berikutnya; (2) minimnya penerimaan pembiayaan daerah; (3) tingginya beban pembayaran utang pemerintah daerah; (d) belum tercapainya kesepahaman antara pemerintah daerah dan DPRD tentang efisiensi dan efektivitas pemanfaatan utang daerah sebagai penerimaan pembiayaan daerah untuk menutupi deficit APBD yang setiap tahun terjadi.

4) Permasalahan bidang perbendaharaan daerah adalah: (1) penyiapan berbagai peraturan yang terkait dengan perbendaharaan; (2) masih adanya keterlambatan transfer ke rekening pemerintah daerah menyebabkan sering terjadi keterlambatan dalam realisasi pembayaran SPM dan SP2D dari BUD ke bendahara PD; (3) pelaksanaan pengelolaan kas (cash management) yang belum dapat dilaksanakan secara optimal dan pemanfaatan idle cash yang juga belum optimal;

5) Permasalahan bidang pengelolaan kekayaan dan asset daerah adalah:

   (1) belum tersedianya peraturan perundang-undangan secara lengkap terkait dengan pengelolaan kekayaan dan asset daerah; (2) belum optimalnya pendataan kekayaan dan asset daerah; (3) belum optimalnya pengamanan barang milik /asset daerah, baik secara administratif, hukum, dan fisik; (4) belum optimalnya pemanfaatan asset daerah yang berada di kota Ternate; (5) masih lemahnya koordinasi antara Dinas PPKAD dan PD, terkait penilaian barang milik/asset daerah. berada di kota Ternate; (5) masih lemahnya koordinasi antara Dinas PPKAD dan PD, terkait penilaian barang milik/asset daerah.

d. Pengawasan dan Akuntabilitas;

Permasalahan yang dihadapi dalam menata serta meningkatkan sistem pengawasan dan akuntabilitas antara lain belum diterapkannya secara luas sistem manajemen kinerja pada instansi pemerintah daerah;

a. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing lingkungan instansi pemerintah daerah masih bersifat parsial dan terbatas sehingga kurang terkoordinasi dan belum komprehensif dalam implementasinya;
b. Masih terjadi praktek KKN dalam birokrasi;
c. Masih tingginya opini disclaimer dari BPK yang dibarengi dengan belum memadainya kapasitas SDM aparatur pengelola keuangan di PD;
d. Tindak lanjut hasil audit belum didukung komitmen pimpinan, dan penanganan atas pengawasan oleh masyarakatbelum optimal;
e. Sinergi lembaga intern dan ekstern yang memiliki tugas dalam pengawasan dan audit belum optimal.
f. Masih lemahnya SPIP di Perangkat Daerah. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif.

e. **Kepegawaian dan SDM Aparatur**;

Permasalahan utama adalah meningkatkan integritas, kompetensi, netralitas, kesejahteraan dan profesionalisme. Disamping itu, rekruitmen, mutasi dan promosi, serta pemberian penghargaan belum dilaksanakan atas dasar kompetensi dan kinerja. Tantangan utama adalah menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, diantaranya adalah melalui pengembangan sumberdaya aparatur, penyempurnaan manajemen kepegawaian terutama sistem penilaian kinerja pegawai dan

sistem remunerasi berbasis kinerja, salah satunya dengan pemberlakuan sistem reward and punishment yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, perlunya upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme PNS dengan didukung sistem manajemen kinerja pada setiap PD.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan desa

Tantangan dan permasalahan utama dalam pemberdayaan masyarakat dan desa antaralain :

a. Kurangnya pendampingan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan kelompok usaha ekonomi perdesaan; -
b. Model pemberdayaan yang masih sektoral dan belum terpadu; - Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum optimal; -
c. Teknologi Tepat Guna belum dimanfaatkan secara optimal.
d. Rendahnya kapasitas aparat pemerintah desa;
e. Program pemberdayaan masyarakat membutuhkan dana pendamping yang besar.
f. Masih ada desa yang berstatus desa Tertinggal ini dapat dilihat IDM yang walaupun meningkat tetapi point sangat kecil

14. Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Permasalahan utama dalam bidang perpustakaan dan kearsipan daerah antara lain :

a. Terbatasnya kualitas SDM dengan keahlian : (i) arsiparis, (ii) tenaga IT kearsipan, (iii) pustakawan, (iv) tenaga IT perpustakaan.
b. Ketersediaan ASN arsiparis dan pustakawan.
c. Kapasitas dan kualitas perpustakaan dan depo arsip yang kurang memadai.

d. Belum efektifnya sistem data dan informasi yang akurat dan terintegrasi
e. Rendahnya minat dan budaya membaca;
f. Minimnya fasilitas pendukung perpustakaan;
g. Kurangnya tenaga Arsiparis sehingga standar kearsipan masih kurang tertata

15. Pertanian dan Ketahanan Pangan

Beberapa permasalahan dan tantangan dihadapi dibidang pertanian sebagai upayan peningkatan ketahan pangan lokal antara lain :

a. terkait dengan aspek lahan, infrastruktur, penelitian dan pengembangan, investasi dan pembiayaan, pangan dan gizi, serta adanya perubahan iklim.
b. terkait dengan aspek lahan, pengembangan kawasan, dan tata ruang, ketersediaan dan kualitas sumberdaya alam (lahan, air, dan kelautan) semakin menghadapi tekana melalui alih fungsi lahan pertanian pangan ke penggunaan lain masihterus terjadi.
c. pemanfaatan lahan kering masih terkendala oleh ketersediaan air irigasi. Sedangkan, pemanfaatan lahan terlantar masih belum dapat secara efektif dilakukan.
d. permasalahan deforestasi, degradasi lahan, akan menyebabkan penurunan kualitas lahan dan penurunan dukungan ketersediaan air. Tata ruang harus terus diefektifkan sebagai bentuk nyata dukungan sumberdaya alam terhadap pemanfaatan dan perlindungan lahan pertanian guna mendukung ketahanan, baik di daerah maupun ketahanan pangan nasional.

Selanjutnya, aspek sarana dan prasarana pertanian dan perdesaan, dukungan infrastruktur pertanian, perikanan, dan kehutanan masih perlu ditingkatkan. Selain kerusakan yang memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi, sarana dan prasarana

pertanian dan perdesaan belum sepenuhnya mampu melayani seluruh wilayah produsen.Pembangunan sarana dan prasarana pertanian juga masih sangat diperlukan untuk mendukung pemanfaatan lahan kering dan lahan terlantar.Selain itu jaringan irigasi yang ada masih belum berfungsi secara optimal sehingga memerlukan upaya peningkatan dan rehabilitasi terutama di sentra produksi pangan dan daerah-daerah irigasi.

Aspek lain yang penting peranannya yaitu penelitian dan pengembangan pertanian terutama dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan nilai tambah komoditas bahan pangan. Mutu produksi pangan dan pertanian, serta perikanan dan kehutanan selama ini masih memerlukan upaya keras untuk ditingkatkan, baik untuk memenuhi tuntutan konsumsi maupun standar pemasaran.Selain itu, penyediaan induk dan benih unggul varietas bernilai tinggi juga masih memerlukan dukungan penuh dari hasil inovasi penelitian dan pengembangan pertanian.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi bidang penyuluhan antara lain rendahnya kualitas penyuluh serta terbatasnya fasilitas pendukung penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Untuk mendukung ketahanan pangan, maka cakupan penyuluhan serta kualitas penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan juga tetap akan menjadi tantangan berat pencapaian ketahanan pangan kedepan.

16. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan dan tantangan pokok pembangunan kelautan dan perikanan antara lain :

a. Masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan;
b. Rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan dan tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir;

c. Masih rendahnya akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap permodalan, layanan usaha, dan diseminasi teknologi pengolahan produk perikanan;
d. Usaha perikanan masih sektoral dan masih bersifat tradisional serta belum dilaksanakan secara terintegrasi sebagai satu kesatuan sistem agribisnis pada wilayah tertentu;
e. Masih rendahnya sarana dan prasarana perikanan yang ada untuk menjangkau perairan yang luas;
f. Menurunnya kualitas lingkungan pesisir dan pulau- pulau kecil, serta menurunnya kualitas air baku dan lingkungan budidaya perikanan akibat aktivitas manusia di daratan.
g. Masih banyak terjadi penebangan hutan mangrove; -
h. Masih tingginya pencemaran laut melalui pembuangan limbah rumah tangga
i. Pengelolaan sumberdaya laut belum dilaksanakan secara lestari dan berkelanjutan.

17. Pertambangan dan Energi

Permasalahan dan tantangan pembangunan energi antara lain secara nasional adalah :

a. Belum dikelolanya potensi pertambangan secara maksimal
b. Ancaman perusakan lingkungan pasca tambang
c. Pengawasan dan penertiban izin pertambangan
d. Dibidang ketenagalistrikan, belum optimalnya kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi yang relatif murah dan berkelanjutan (sustainable) sehingga akses masyarakat pada pemanfaatan sumber energi ini dapat terjangkau.
e. Kurangnya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana listrik untuk mendorong pemerataan pembangunan serta membuka isolasi

masyarakat terpencil.

18. Perindustrian Perdagangan Koperasi, UMKM dan ekonomi kreatif

Secara umum masalah dan tantangan yang akan dihadapi sektor perdagangan adalah

a. Tingkat persaingan produk ekspor di pasar regional dan global akan semakin ketat dan harga komoditas tidak stabil;
b. Adanya serbuan produk impor dari negara lain akibat diberlakukan era perdagangan bebas. Sedangkan perdagangan dalam negeri, masalah utama yang masih dihadapi antara lain (1) efisiensi dan efektivitas sistem logistik yang belum optimal, (2) masih kurangnya sarana prasarana perdagangan, (3) belum lancarnya arus distribusi antar kecamatan dan antar daerah; (4) penguatan kelembagaan perdagangan dalam upaya perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat masih belum optimal; serta (5) permasalahan dalam pembinaan perindustrian antara lain menciptakan iklim dan fasilitasi bagi industri agar mampu melaksanakan revitalisasi dalam bentuk pembaharuan teknologi produksi maupun keterkaitan dalam mata rantai pertambahan nilai, terutama industri-industri kecil dan menengah maupun industri rumah tangga belum optimal.
c. Masih rendahnya daya saing produk daerah.
d. Belum terbangunnya sistim informasi dan akses pemasaran produk unggulan daerah

Berbagai permasalahan dan tantangan pada industri pengolahan antara lain yaitu:

a. Belum kuatnya postur populasi usaha industri;
b. Struktur industri belum kuat;
c. Masih rendahnya produktivitas usaha industri pengolahan itu sendiri.

Permasalahan dan tantangan usaha kecil dan menengah antara lain :

a. Masih minim penyediaan fasilitas pembiayaan dan penyediaan teknologi,

b. Perbaikan kinerja wadah kelembagaan usahanya melalui koperasi.

c. Kurangnya penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia KUMKM;

d. Belum adanya kerja sama antar koperasi , UKM dan lembaga keuangan (Perbankan) yang maksimal.

e. Belum optimalnya penguatan kapasitas kelembagaan, bantuan permodalan, kesadaran berkoperasi serta motivasi pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendampingan, minimnya bantuan permodalan, rendahnya kesadaran berkoperasi dan motivasi kewirausahaan pelaku usaha, belum tersedianya regulasi yang mendukung serta belum terbangunnya kerjasama yang baik antara pemerintah, perbankan, koperasi, pelaku usaha dan lembaga.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2025 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2025. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Halmahera Barat baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

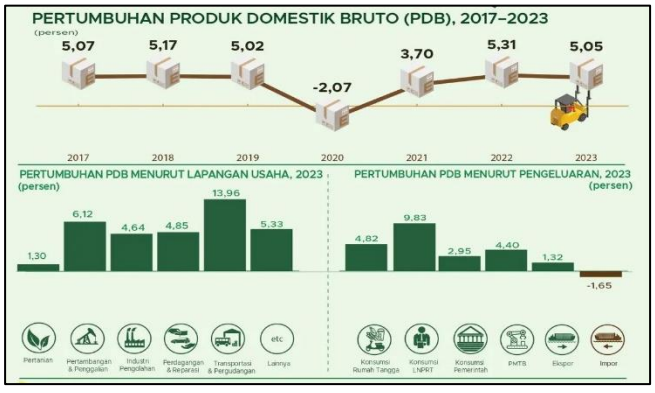
Dalam rangka implementasi visi dan misi pembangunan, diperlukan suatu arahan kebijakan ekonomi dan keuangan, sebagai payung dalam menetapkan prioritas pembangunan. Kebijakan ekonomi Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 dirumuskan dengan memperhatikan kondisi perekonomian Tahun 2024 dan perkiraan pertumbuhan pada Tahun 2025, Kebijakan Nasional, Regional Provinsi Maluku Utara, serta memerhatikan perkembangan ekonomi global yang signifikan. Arah kebijakan ekonomi, yang disinergikan dengan evaluasi kebijakan keuangan tahun-tahun sebelumnya, menjadi dasar perumusan kebijakan keuangan daerah, yang secara substansi diarahkan dalam rangka implementasi fungsi distribusi APBD (sebagai anggaran publik) yaitu untuk menciptakan pemerataan distribusi pendapatan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Di tengah gejolak ekonomi global yang belum mereda, ekonomi Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan prospek yang baik. Perekonomian Indonesia 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp75,0 juta atau US$4.919,7. Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen, lebih rendah

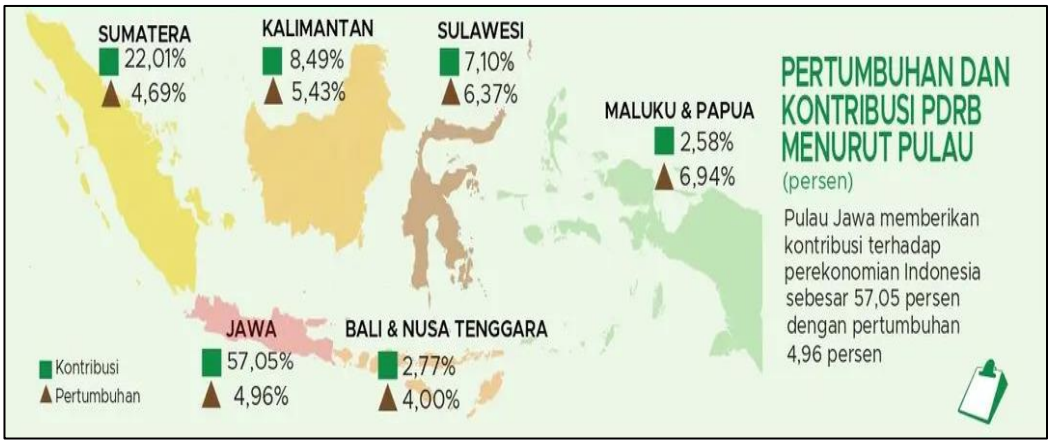
dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,04 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,33 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen PK-LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,11 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,45 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,81 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 39,13 persen. Selama tahun 2023 perekonomian Indonesia dilihat secara spasial masih terus tumbuh. Kelompok provinsi menurut pulau yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, serta Kalimantan dengan pertumbuhan sebesar 6,94 persen; 6,37 persen; dan 5,43 persen. Sedangkan kelompok provinsi di Pulau Jawa yang berkontribusi sebesar 57,05 persen terhadap ekonomi nasional mencatat pertumbuhan 4,96.



Gambar 3.1. Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (Persen)
Sumber : BPS Nasional 2023

Pertumbuhan PDRB tahun 2023, Kelompok provinsi di Pulau Jawa masih mewarnai struktur perekonomian Indonesia secara spasial selama tahun 2023 dengan kontribusi sebesar 57,05 persen, diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,01 persen, Pulau Kalimantan sebesar 8,49 persen, Pulau Sulawesi sebesar 7,10 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,77 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,77 persen.

Secara kumulatif pertumbuhan tertinggi (*c-to-c*) tercatat di kelompok Pulau Maluku dan Papua yang tumbuh sebesar 6,94 persen, diikuti Pulau Sulawesi sebesar 6,37 persen, Pulau Kalimantan sebesar 5,43 persen, Pulau Jawa sebesar 4,96 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 4,00 persen, dan Pulau Sumatera tumbuh sebesar 4,69 persen.



Gambar 3.2. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau Tahun 2023 (persen)
Sumber : BPS Nasional 2023

Sasaran pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,3,7-5,6 persen. Tren realisasi capaian sasaran dan target makro nasional disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1. Capaian dan sasaran pembangunan Nasional tahun 2023, Target 2024 dan 2025

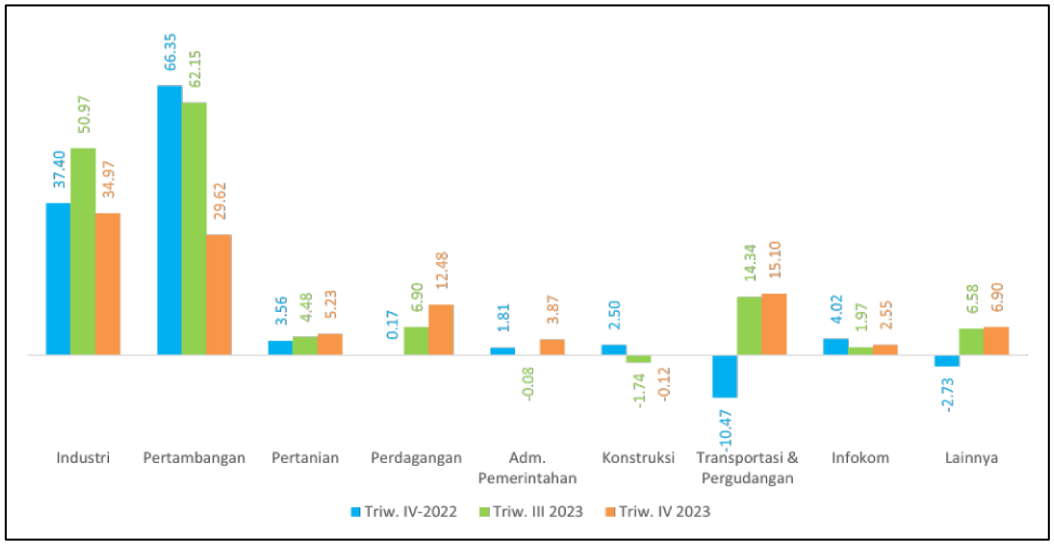
No.	Sasaran Pembangunan	*Baseline* (2019)	2023		Target 2024 (RKP)	Target 2024 (RPJMN)	Target 2025 (RKP)
			Target (RKP)	Capaian			
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0	5,3-5,9	5,05	5,3-5,7	6,2-6,5	**5,3-5,6**
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,41	7,5-8,5	9,36	6,5-7,5	6,5-7,0	**6-7**
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	5,28	5,3-6,0	5,32	5,0-5,7	5,0-5,7	**4,5-5**
4.	Rasio Gini (nilai)	0,382	0,375-0,378	0,388	0,375-0,378	0,374-0,377	**0,379-0,382**
5.	Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai)	71,92	73,31-73,49	72,91	73,99-74,02	73,99-74,02	**73,99-74,02**
6.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (%)	24,92	27,02	34,09	27,27	27,27	**38,6**
7.	Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	100,9	103-105	10733	107-110	107-110	**113-115**
8.	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	100,2	106-107	106,5	105-108	105-108	104-100

Sumber : BPS 2023

3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Provinsi Maluku Utara

Ekonomi Maluku Utara Triwulan IV-2023 terhadap Triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 17,99 persen *(y-on-y)*. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 34,97 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 42,40 persen.

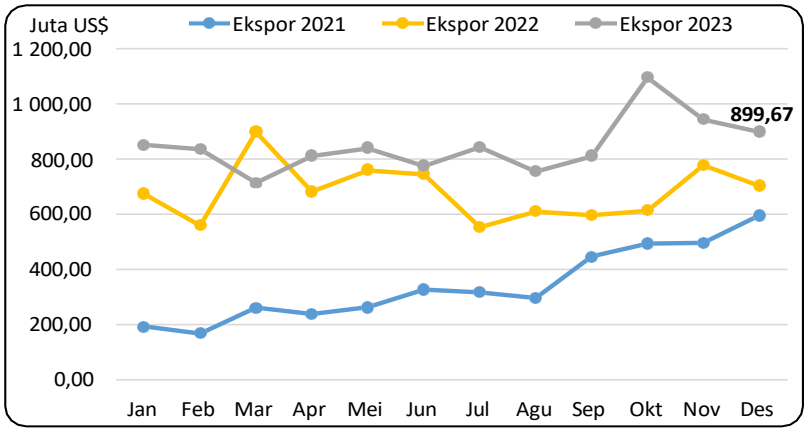
Ekonomi Maluku Utara Triwulan IV-2023 terhadap Triwulan III-2023 mengalamipertumbuhan sebesar 3,16 persen *(q-to-q)*. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 20,19 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 34,72 persen



Gambar 3.3. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (Persen)

Sumber : BPS Maluku Utara 2023

Nilai ekspor Provinsi Maluku Utara pada Desember 2023 sebesar US$899,67 juta, turun 4,77 persen dibanding November 2023 yang senilai US$944,75 juta. Volume ekspor Provinsi Maluku Utara pada Desember 2023 sebesar 465,46 ribu ton, naik 3,65 persen dibanding November 2023 yang senilai 449,06 ribu ton. Secara kumulatif, nilai ekspor Provinsi Maluku Utara Januari–Desember 2023 sebesar US$10.186,39 juta, mengalami peningkatan 24,45 persen dibandingkan periode Januari– Desember 2022 yang sebesar US$8.185,18 juta. Secara kumulatif, volume ekspor Provinsi Maluku Utara Januari–Desember 2023 sebesar 4.851,42 ribu ton, naik sebesar 38,54 persen dibanding Januari–Desember 2022 yang sebesar 3.501,91 ribu ton.



Gambar 3.4. Pertumbuhan Ekspor dan Impor Maluku Utara sepanjang Triwulan IV Tahun 2023

Sumber BPS Nasional 2023

Pada tahun 2023 hingga 2024 ekonomi Provinsi Maluku Utara diprakirakan tetap tumbuh tinggi namun pada level yang terbatas, melanjutkan tren positif pada tahun sebelumnya sejalan dengan masifnya pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan industri pengolahan serta semakin pulihnya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ini didorong pula oleh perbaikan struktur ekonomi, perbaikan iklim investasi, pembiayaan dan pembangunan infrastruktur, implementasi paket kebijakan, peningkatan konsumsi Pemerintah dan Rumah Tangga serta didukung oleh inflasi yang terjaga.

Inflasi terjaga dalam level yang rendah didukung perbaikan efisiensi, baik dalam distribusi barang dan jasa, perbaikan manajemen stok, dan proses bisnis yang lebih tertata baik. Inflasi tahun 2024 diperkirakan lebih rendah dari inflasi saat ini, dengan asumsi permasalahan struktural terkait infrastruktur telah diselesaikan dan proses tataniaga yang semakin efisien.

Adapun proyeksi asumsi makro ekonomi Maluku Utara pada tahun 2023-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Proyeksi Asumsi Makro Ekonomi Maluku Utara Tahun 2023 – 2024

No	Indikator Kinerja	Target Tahunan	
		2023	2024
1	*2*	*3*	*4*
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,72	70,11
2	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	12,6	11,59
3	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	30,74	33,1
4	Indeks Rasio Gini	0,285	0,278
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,62	4,57
6	Ratio Kontribusi Ekonomi Sektor Sekunder (persen)	26,63	26,67
7	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,25	6,19

Sumber : RPJMD 2020-2024 Provinsi Malut

3.1.3 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Kabupaten Halmahera Barat.

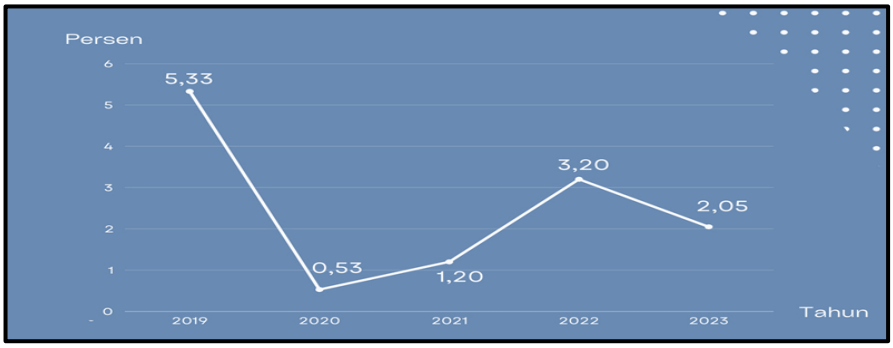
Kondisi ekonomi saat ini (*Pertumbuhan Ekonomi)*

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) suatu daerah. Perkembangan PDRB di Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan ADHK mengalami fase peningkatan, dimana dipengaruhi terutama oleh sektor pertanian dan perikanan, industri pengolahan dan sektor perdagangan

Perekonomian Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2023 secara keseluruhan mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari nilai PDRB Kabupaten Halmahera Barat Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) terjadi peningkatan dari 1,559 triliun menjadi, 1,63 triliun rupiah.

Selanjutnya dari Gambar 3.5 terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Barat secara umum cenderung meningkat setiap tahunnya. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5,33 persen, kemudian pada tahun 2020 melambat

mencapai 0,53 persen, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun – tahun berikutnya mengalami perbaikan, pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Barat sebesar 1,2 persen, tahun 2022 mencapai 3,2 persen, dan tahun 2023 sebesar 2,05. Hal ini dikarenakan berbagai usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani pandemi Covid-19 yang berdampak pada aktivitas ekonomi yang semakin membaik.



Gambar. 3.5 Pertumbuhan Ekonomi
Sumber : PDRB Halmahera Barat, 2019-2023

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan proses perubahan kondisi ekonomi suatu wilayah secara berkesiambungan dalam periode waktu tertentu. Angka tersebut dapat pula diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian. Meskipun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Barat sempat menurun sangat drastis dari tahun sebelumnya, tetapi terlihat bahwa laju pertumbuhannya masih bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian masih tetap tumbuh ditengah adanya pandemi Covid-19.

Tabel 3.3. PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

No	Komponen PDRB Menurut Lapangan Usaha	PDRB ADHK 2021-2023 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
		2021	*2022*	*2023*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	949,75	1.006,72	1.062,62
2	Pertambangan dan Penggalian	2,52	2,75	2,90
3	Industri Pengolahan	96,84	103,24	111,30

No	Komponen PDRB Menurut Lapangan Usaha	PDRB ADHK 2021-2023 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
		2021	*2022*	*2023*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,53	2,81	2,98
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,46	4,73	5,12
6	Konstruksi	123,20	142,94	139,81
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	354,88	385,90	410,92
8	Transportasi dan Pergudangan	50,30	59,19	65,86
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,53	5,95	6,13
10	Informasi dan Komunikasi	66,97	72,06	74,60
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	68,53	75,17	78,48
12	Real Estate	1,72	1,76	1,83
13	Jasa Perusahaan	3,92	4,19	4,38
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	470,80	509,87	530,14
15	Jasa Pendidikan	73,30	76,86	83,16
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61,63	64,42	70,41
17	Jasa Lainnya	10,34	10,89	11,32
	Produk Domestik Regional Bruto	**2.34,23**	**2.529,45**	**2.661,98**

Sumber : BPS Kab. Halmahera Barat, 2024

Dari Gambar 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan.

Tabel 3.4. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019-2023

Komponen		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1 331 389,78	1 411 932,14	1 523 542,16	1 623 527,74	1 760 087,93
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	95 975,41	95 043,97	99 149,40	111 675,95	122 662,91
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	780 322,38	695 079,43	635 320,63	684 244,32	737 269,80
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	477 341,02	250 383,80	241 239,83	366 912,04	274 721,89
5.	Perubahan Inventori	12 658,65	- 9 813,28	- 18 306,51	1 638,99	- 1 503,52
Komponen		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Net Ekspor Barang Jasa	- 455 122,20	- 166 242,25	- 133 718,14	- 258 549,72	- 231 256,92
P D R B		2 242 565,04	2 276 383,81	2 347 227,38	2 529 449,32	2 661 982,09
Keterangan: *) Angka sementara **) Angka sangat sementara						

Sumber : BPS Kab. Halmahera Barat, 2024

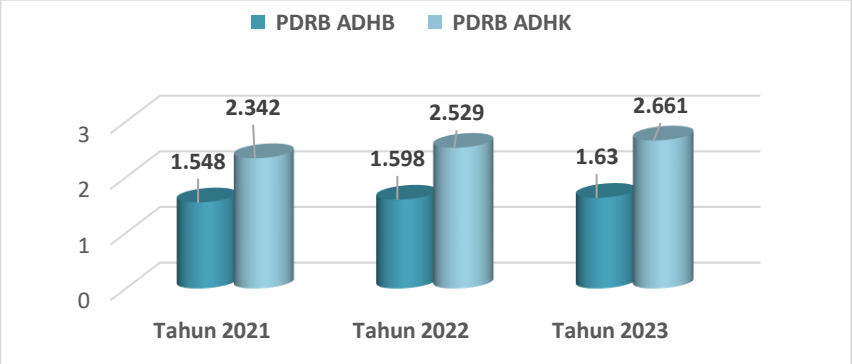
Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori dan Net Ekspor Barang dan Jasa.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2019 sampai 2023, PDRB Kabupaten Halmahera Barat,sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir khususnya rumah tangga (PKRT), hal ini terlihat pada kontribusinya yang lebih besar dari konsumsi akhir yang lain yakni LNPRT dan pemerintah. Kontribusi

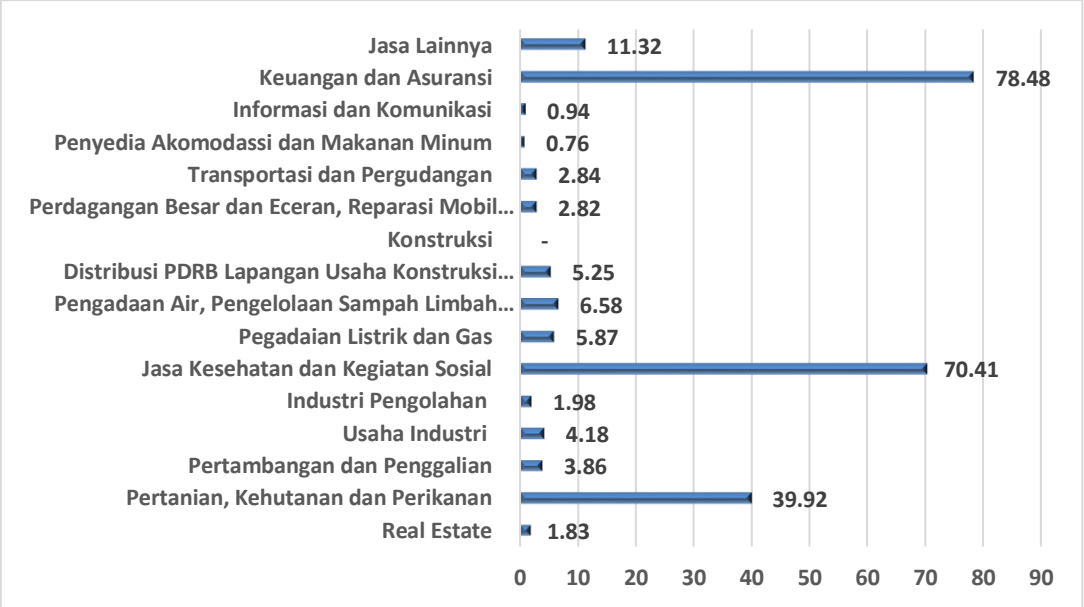
komponen ekspor dan impor terhadap PDRB dapat dilihat dari net ekspor barang dan jasa yang diperoleh dari nilai ekspor dikurangi impor.

Sementara itu, net ekspor barang dan jasa memberikan kontribusi negatif terhadap PDRB. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai impor barang dan jasa lebih besar daripada nilai ekspor barang dan jasa. Kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa mencakup dari luar kabupaten, provinsi, maupun luar negeri.

Tanda negatif menunjukkan bahwa nilai impor masih lebih besar daripada ekspor. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah.



Gambar 3.6. PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Halmahera Barat dan, (2021-2023) (Triliun Rupiah)
Sumber : BPS Halmahera Barat, 2023



Gambar 3.7. Distribusi Presentase PDRB menurut Lapangan Usaha (Persen)

Sumber : BPS Halmahera Barat, 2023

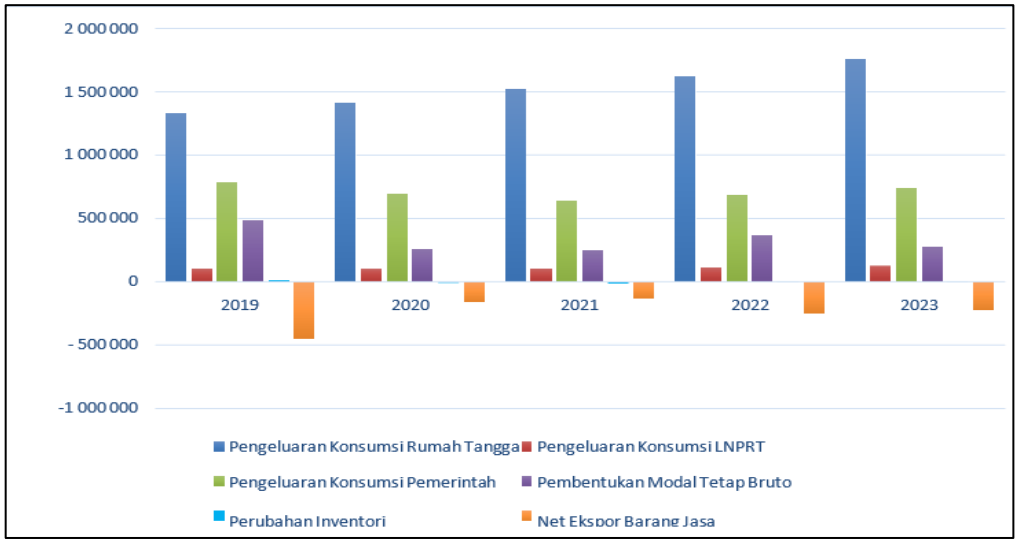
PDRB Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan menghasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita umumnya dipakai sebagai indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejateraannya. Sebaliknya, penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun.

Nilai PDRB Kabupaten Halmahera Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Secara total, PDRB Kabupaten Halmahera Barat atas dasar harga berlaku (ADHB) di tahun 2023 meningkat sebesar 132,53 miliar rupiah. Jika dinilai atas dasar harga konstan (ADHK) terjadi peningkatan dari 1,59 triliun rupiah menjadi 1,63 triliun rupiah, atau meningkat sebesar 2,05 persen.

Pada periode tahun 2019-2023 PDRB Kabupaten Halmahera Barat atas dasar harga berlaku cenderung meningkat, yakni sebesar 2,24 triliun rupiah (2019); 2,27 triliun rupiah (2020); 2,34 triliun rupiah (2021); 2,52 triliun rupiah (2022) dan 2,66 triliun rupiah (2023). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi atau PDRB lapangan usaha diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.

Dari sisi produksi, pada tahun 2023, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi penyumbang PDRB terbesar (39,92 persen). Sementara itu dari sisi permintaan akhir, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) menyumbang 66,12 persen terhadap total PDRB. Komponen PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Halmahera Barat tahun 2019 sampai 2023 dapatdilihat pada Gambar 3.8. berikut ini.



Gambar 3.8. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Halmahera Barat, 2023

Inflasi

Definisi inflasi banyak ragamnya seperti yang dapat kita temukan dalam literatur ekonomi. Keanekaragaman definisi

(pengertian) tersebut terjadi karena luasnya pengaruh inflasi terhadap berbagai sektor perekonomian. Hubungan yang erat dan luas antara inflasi dan berbagai sektor perekonomian tersebut melahirkan berbagai perbedaan pengertian dan persepsi tentang inflasi. Namun pada prinsipnya masih terdapat beberapa kesatuan pandangan bahwa inflasi merupakan suatu fenomena dan dilema ekonomi.

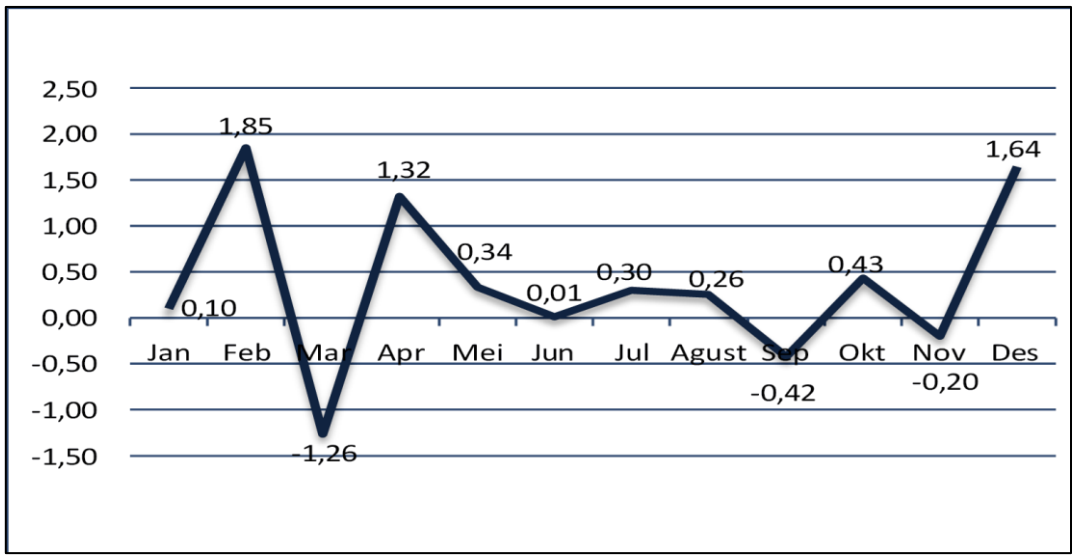
Inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli masyarakat yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara

Tingkat inflasi Kabupaten Halmahera Barat dipresentasikan oleh tingkat inflasi Kota Ternate. Pada tahun 2023, IHK Kota Ternate pada Desember 2023 adalah sebesar 117,18 yang artinya bahwa secara umum rata-rata harga komoditas di Kota Ternate pada tahun 2023 telah mengalami kenaikan sebesar 17,18 persen sejak tahun 2018 (tahun dasar).

Pada tahun 2023, Kota Ternate mengalami Inflasi sebesar 4,41 persen. Inflasi tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2022 yang tercatat sebesar 3,70 persen. Jika dilihat perkembangan inflasi secara bulanan di tahun 2023, Kota Ternate mengalami inflasi sebanyak sembilan kali dan mengalami deflasi sebanyak tiga kali. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 1,85. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 1,26 persen. Inflasi tertinggi sebesar 1,85 persen terjadi pada Bulan Februari 2023 dipicu kenaikan harga beberapa jenis ikan segar, angkutan udara, kangkung, beras, dan rokok kretek filter

Kota Ternate menjadi salah satu dari 5 kabupaten/kota di Indonesia yang dapat menjaga tingkat inflasi nasional di rentang target inflasi nasional pada tahun 2023. Terjadinya peningkatan inflasi tahunan pada triwulan I 2023 didorong oleh kondisi anomali cuaca di perairan Maluku Utara yang terjadi pada awal tahun 2023

sehingga berpengaruh terhadap penurunan produktivitas nelayan di Maluku Utara. Selain itu, kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap kelancaran distribusi bahan pangan dari luar provinsi terutama yang melalui transportasi laut. Sementara itu, pada bulan Maret 2023 Kota Ternate mengalami deflasi sebesar 1,26% (mtm). Kondisi ini disebabkan oleh normalisasi harga pada komoditas ikan segar (cakalang, malalugis, dan dolosi) dan cakalang diawetkan pasca terjadinya peningkatan harga di bulan Februari 2023. Deflasi komoditas ikan segar dipengaruhi oleh membaiknya kondisi cuaca dan tinggi gelombang laut pasca terjadinya anomali cuaca di perairan Maluku Utara pada bulan Februari 2023. Kondisi ini menyebabkan menyebabkan aktivitas melaut nelayan dapat kembali berjalan dengan baik serta berimplikasi pada meningkatnya ketersediaan pasokan ikan di Kota Ternate.



Gambar 3.9 Perkembangan Inflasi Kota Ternate Menurut Bulan, 2023
Sumber : Inflasi Kota Ternate 2023

Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dari pendekatan ini maka indikator kemiskinan mencakup: ***Pertama***, *Head Count Index*

(HCI = P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK); ***Kedua***, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index = P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan; ***Ketiga***, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index = P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Berdasarkan data angka kemiskinan pada tahun 2023 memang mengalami kenaikkan menjadi 10,53 ribu orang atau 8,74 persen dibandingkan dengan tahun 2022 hanya diangka 10,06 ribu jiwa atau 8,43 persen. "Memang mengalami kenaikkan dibandingkan tahun sebelumnya,

Faktor yang menyebabkan penduduk miskin bertambah itu, salah satunya karena terjadi kenaikkan harga bahan pokok di Halmahera Barat, Kemudian pendapatan masyarakat tidak bertambah sehingga yang dulu dianggap tidak miskin itu sekarang jadi miskin. Terutama orang-orang yang tingkat pengeluarannya berada di garis-garis batas kemiskinan.

"Dari sisi jumlah, selama lima tahun terakhir, penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat cenderung mengalami fluktuatif. Jika pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 10,56 ribu jiwa, mengalami peningkatan sehingga mencapai 10,59 ribu jiwa di tahun 2021. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat kembali mengalami penurunan menjadi 10,06 ribu jiwa dan padah tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sebanyak 10,53 ribu. Seperti tersaji dalam grafik berikut:



Gambar 3.10. Jumlah Penduduk Miskin Kab. Halmahera Barat 2021-2023

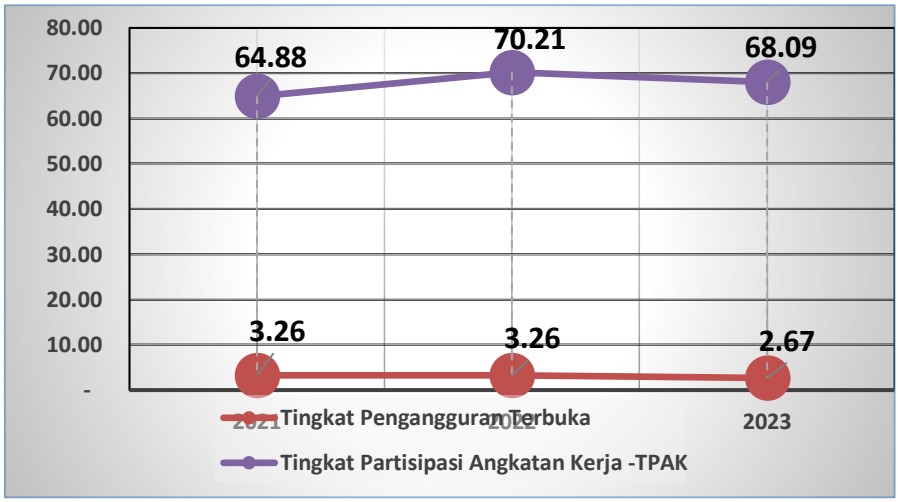
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara 2023

Angka Pengangguran

Penduduk usia kerja adalah semua orang berumur 15 tahun ke atas. Jumlah penduduk usia kerja di Halmahera Barat pada tahun 2022 sebanyak 88.476 orang, naik 1.436 orang dibandingkan tahun 2021. Penduduk usia kerja cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Dari sisi partisipasi angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2021 adalah sebesar 64,88 persen, naik menjadi 70,21 persen pada tahun 2022. TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian wilayah.

Berikut perkembangan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Halmahera Barat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 :



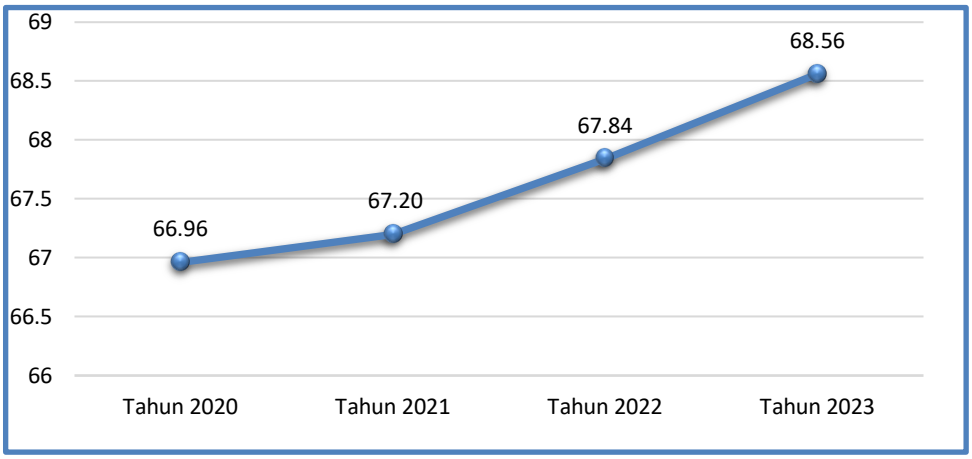
Gambar 3.11. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2023

Sumber : BPS Halmahera Barat, 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yang meliputi dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan).

IPM Kabupaten Halmahera Barat dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 67,20 pada tahun 2021 menjadi 67,84 pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 menjadi 68,56 atau meningkat sebesar 0,69 poin dari tahun sebelumnya. Dengan demikian IPM Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2023 masih berada pada kategori Sedang (60=IPM<70). Sebagaimana digambarkan berikut :



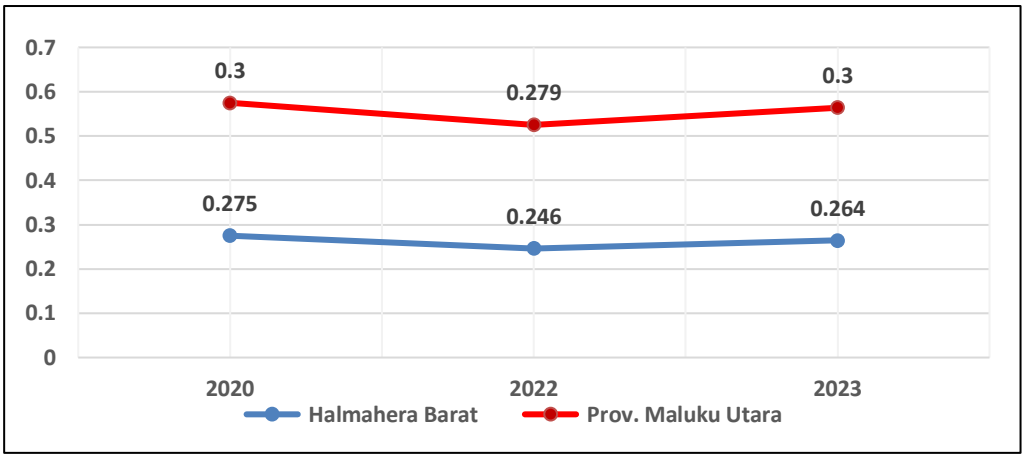
Gambar 3.12. Indeks Pembangunan Manusia Kab. Halmahera Barat Tahun 2020-2023

Sumber : Kabupaten Halmahera Barat Dalam Angka 2024

Rasio Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Indeks Gini Kabupaten Halmahera Barat 3 (Tiga) Tahun terakhir dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3.13. Indeks Gini Kab. Halmahera Barat Tahun 2020-2023
Sumber : BPS Prov.Maluku Utara, 2023

Dari grafik, indeks gini Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, serta senantiasa lebih kecil dari indeks Gini Provinsi Maluku Utara yang pada Tahun 2022 bernilai 0,279 juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu 0,300. Secara keseluruhan Indeks Gini Provinsi Maluku Utara maupun Kabupaten Halmahera Barat masih berada pada rentang ketimpangan rendah (<0,4).

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak daerah adalah mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan penundang-undangan yang berlaku, sedangkan kewajiban daerah adalah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan urusan.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan keuangan

tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Sebuah daerah dapat dikatakan mandiri adalah apabila mampu melakukan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, di mana salah satunya adalah sumber daya keuangan. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah.

3.2.1 Kondisi Serta Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Pendapatan Transfer yang meliputi ; Transfer Pemerintah Pusat; dan Transfer antar daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat meliputi dana perimbangan, dana insentif daerah,

dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Sedangkan Pendapatan transfer antar daerah meliputi pendapatan bagi hasil; dan bantuan keuangan; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya: kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara Nasional; Kebijakan fiskal Nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

3.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah didasarkan pada pengalaman pengelolaan pendapatan daerah, permasalahan yang sering dihadapi pemerintah daerah minimal tiga tahun terakhir, dimana kondisi rendahnya kemampuan fiskal APBD Kabupaten Halmahera Barat berimplikasi terhadap ketergantungan yang masih sangat besar terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), sedangkan porsi DAU dimaksud sebagian besar telah terserap untuk membiayai belanja pegawai, maka kebijakan umum perencanaan pengelolaan pendapatan daerah tahun 2025 tetap difokuskan pada upaya

peningkatan kemampuan penerimaan pendapatan keuangan daerah melalui peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan ini sangat diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik (sustainability public service), pengentasan kemiskinan dan upaya pencapaian kesejahtraan masyarakat.

Secara umum arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

(1). Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan peningkatan pendapatan daerah tahun 2024 diarahkan pada optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Adapun upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2025 untuk peningkatan PAD adalah sebagai berikut :

1) Melakukan upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) terkait pajak daerah dan retribusi daerah melalui Tim Yustisi yang bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan;
2) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang PAD sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan sektor swasta untuk menunaikan kewajiban pajak negara, pajak daerah dan retribusi daerah;
3) Diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui diversifikasi BUMD serta mendorong inovasi pada sektor swasta;
4) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah termasuk pendapatan dari pihak ketiga;
5) Meningkatkan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau penghasil PAD;

6) Menetapkan kelembagaan dan system operasional pemungutan pendapatan daerah;
7) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
8) Meningkatkan deviden BUMD secara signifikan untuk pendapatan daerah;
9) Meningkatkan potensi pendapatan terkait sumber daya alam sebagai salah satu komponen perhitungan dana perimbangan daerah.

(2). Dana Transfer

Pengalokasian dana transfer terdiri atas transfer antar daerah dan transfer dari pemerintah pemerintah pusat yang dimaksudkan untuk mempersempit ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana transfer-perimbangan ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan dana transfer yaitu:

1) Intensifikasi dan optimalisasi koordinasi ke Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Intensifikasi dan optimalisasi komunikasi dengan lembaga ditingkat pusat khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi Provinsi/Kabupaten/Kota;
3) Perkuatan perencanaan dan dukungan berbagai program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Halmahera Barat sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

(3). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalamnya mencakup dana hibah baik dari Kementerian/Lembaga maupun dana penyesuaian dan otonomi khusus. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana ini yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama Kementerian/ Lembaga.

Berdasarkan Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan sebelumnya di atas, dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan ke dalam tabel Realisasi, Target danProyeksi Pendapatan Daerah. Dengan melihat perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2021 - 2023 serta target pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Barat pada Tahun 2024, disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Realisasi Pendapatan Tahun 2021-2023, Target Pendapatan Tahun 2024, dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025 Kabupaten Halmahera Barat

KODE	JENIS PENDAPATAN/ Kind of Revenues	JUMLAH					
		REALISASI			TARGET 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026
		2021	2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**879,001,725,164.32**	**877,835,613,293.49**	**824.134.871.798,90**	**1.088.600.709.504.00**	**1.026.328.957.858,00**	**1.035.266.011.536,58**
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**40,306,091,110.32**	**27,827,898,769.49**	**40.345.767.154,90**	**58.612.235.000.00**	**40.345.767.154,90**	**40.749.224.826,45**
4 . 1 . 1	Pajak Daerah	4,866,770,041.00	6,152,937,538.00	6.566.629.779,00	10.773.756.000.00	10,219,174,500.00	10.321.366.245,00
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	1,197,531,267.00	932,155,056.00	691.606.377,85	1,202,133,000.00	1,600,097,450.00	1.616.098.424,50
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,538,997,462.53	852.385.748,00	1.682.998.574,00	1,297,127,000.00	1,297,127,000.00	1.310.098.270,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	32,702,792,339.79	19,890,420,427.49	31.404.532.424,05	50,287,627,000.00	27.229.368.204,90	27.501.661.886,95
4 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**817,572,550,054.00**	**828,492,816,056.00**	**764.364.224.212,00**	**1,000,225,766,000.00**	**961.168.890.703,10**	**967.217.277.710,13**
4 . 2 . 1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	807,590,908,252.00	807,127,913,347.00	754.835.932.128,00	967,133,585,000.00	927,512,793,932.00	933.724.619.971,32
4 . 2 . 1 . 1	**Dana Perimbangan**	657,266,337,252.00	677,834,767,347.00	616.448.987.128,00	834,509,995,000.00	794,889,203,932.00	801.101.029.971,32
4 . 2 . 1 . 1 . 1	*Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak*	*53,002,314,313.00*	*96.280.009.625,00*	*50.058.613.719,00*	*96,504,189,000.00*	96,504,189,000.00	97.469.230.890,00
4 . 2 . 1 . 1 . 2	*Dana Alokasi Umum*	*456,293,165,000.00*	*451.193.809.841,00*	*462.288.273.665,00*	*520,546,198,000.00*	520,546,198,000.00	525.751.659.980,00
4 . 2 . 1 . 1 . 3	*Dana Alokasi Khusus*	*147,970,857,939.00*	*130.875.982.681,00*	*104.102.099.744,00*	*120,350,193,000.00*	177,838,816,932.00	177.880.139.101,32

KODE	JENIS PENDAPATAN/ Kind of Revenues	JUMLAH					
		REALISASI			TARGET 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026
		2021	2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4 . 2 . 1 . 2	**Dana Insentif Daerah (DID)**	17,930,474,000.00	5.325.868.000,00	6.390.338.000,00	-	0.00	-
4 . 2 . 1 . 3	**Dana Desa**	132,394,097,000.00	123.967.278.000,00	131.996.607.000,00	132,623,590,000	132,623,590,000.00	132.623.590.000,00
4 . 2 . 2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	9,981,641,802.00	21,364,902,709.00	9.528.292.084,00	33,092,181,504	33.656.096.771,10	33.492.657.738,81
4 . 2 . 2.1	*Pendapatan Bagi Hasil*	*9,981,641,802.00*	*21,364,902,709.00*	*9.528.292.084,00*	*33,092,181,504*	33.656.096.771,10	33.492.657.738,81
4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**21,123,084,000.00**	**21,514,898,468.00**	**19.424.880.432,00**	**29.762.708.000**	**24,814,300,000.00**	**25.021.178.900,00**
4 . 3 . 1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18,751,084,000.00	18,919,898,468.00	19.424.880.432,00	4.948.408.000	-	0,00
4 . 3 . 2	Pendapatan Hibah	2,372,000,000.00	2.595.000.000,00	-	24.814.300.000	24,814,300,000.00	25.021.178.900,00
4 . 3 . 3	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
4 . 3 . 4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
4 . 3 . 5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
4 . 3 . 6	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-

Sumber : BP3D Kab. Halmahera Barat, 2024

Bila diperhatikan dalam tabel tersebut di atas, terlihat bahwa proyeksi Pendapatan Daerah pada tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024, hal ini memberikan gambaran bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Daerah harus lebih memaksimalkan potensi pendapatan yang telah ada serta lebih banyak menggali potensi pendapatan lainnya sehingga nantinya pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Barat mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

3.2.3 Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan, dimana kebijakan belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sejak Tahun 2018 pemerintah telah merubah prinsip dari yang menggunakan prinsip money follow function, karena manfaatnya tidak jelas, diubah menjadi money follow program dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan Tahun 2025.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Barat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, tetapi kenaikan tersebut tidak signifikan. Hal tersebut berdampat pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah), ruang fiskal daerah Halmahera Barat menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan belanja daerah Tahun

2024 dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Memprioritaskan belanja untuk urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) urusan, wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 urusan dan pemerintah pilihan sejumlah 8 (delapan) urusan serta penunjang pemerintahan sejumlah 8 (delapan) urusan;

b. Sinkronisasi prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Maluku Utara dengan pencapaian visi dan misi RPJMD 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, serta mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs);

c. Penggunaan dana fungsi pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;

d. Penggunaan dana fungsi kesehatan 10%, dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.

e. Belanja Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1). Belanja Pegawai

- Besarnya gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.

- Belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2024.

- Belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

- Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

- Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2023 pada dana transfer ke daerah, tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dimaksud dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran belanja pegawai berupa honorarium bagi PNSD dan Non PNSD pada pos belanja, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian

sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.

2). Belanja Barang dan Jasa

- Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024

- Dana untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

- Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa asset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.

- Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah/negeri, dilakukan secara selektif, dan jumlahnya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.

- Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Sedangkan perjalan dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

3). Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

4) Belanja Modal

- Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

- Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri, dengan menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Belanja Tidak Terduga

- Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

6) Belanja Transfer

- Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja

nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

- Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

- Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

- Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

7) Pengalokasian belanja berdasarkan sumber pendapatan, dan penggunaan belanja disesuaikan dengan peruntukannya sesuai

peraturan perundangan yang berlaku. Penggunaan dana perimbangan disesuaikan dengan peruntukan kebutuhannya antara lain:

- Dana bagi hasil pajak; diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;
- Dana bagi hasil sumber daya alam; pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum, sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang di tetapkan peraturan perundang-undangan;
- Dana alokasi umum; untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan pelayanan umum;
- Dana alokasi khusus (DAK) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana yang menjadi urusan urusan pemerintah di daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait sesuai peraturan perundang- undangan; dan
- Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping/cost sharing pada program/kegiatan yang berasal dari pusat (terutama DAK) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

8) Alokasi belanja dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang lainnya. Belanja dituangkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh

masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-PD dan RKA-PPKD.

, Belanja pada Tahun 2025 mencakup pembayaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil untuk 13 (tiga belas) bulan dan Tunjangan Hari Raya (Gaji ke-14) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan kenaikan gaji pokok serta acres. Selain itu dianggarkan pula untuk pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja serta tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai, disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2025 dituangkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.6 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2023, Target Belanja Tahun 2024, dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025 Kabupaten Halmahera Barat

KODE	JENIS BELANJA	JUMLAH					
		REALISASI			TARGET 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026
		2021	2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**879,001,725,164.32**	**877,835,613,293.49**	**824.134.871.798,90**	**1.088.600.709.504.00**	**1.026.328.957.858,00**	**1.035.224.747.436,58**
5	**BELANJA**	**868,552,810,252.45**	**1.048.345.487.171,00**	**856.221.037.309,90**	**1,122,393,582,504**	**989.578.957.858,00**	**996.237.681.436,58**
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	**587,754,357,752.45**	**600,256,293,725.14**	**554.907.300.828,90**	**728.163.096.835**	**671.169.297.871,00**	**674.643.924.849,71**
5 . 1 . 0 . 1	Belanja Pegawai	339,454,839,427.93	339,070,949,828.00	323.249.938.500,00	432.553.209.326	432.553.209.326,00	436.878.741.419,26
5. 1 . 0 . 2	Belanja Barang dan Jasa	234,975,921,646.48	248,625,690,797.14	217.007.961.328,90	226.289.412.207	217.836.310.545.00	219.014.673.650,45
5 . 1 . 0 . 3	Belanja Bunga	37,413,580.04	-	-	10.755.125.000.00	8,604,100,000.00	6.453.075.000,00
5 . 1 . 0 . 5	Belanja Hibah	8,921,108,098.00	8,554,143,100.00	10.565.678.000,00	56.955.350.302.00	10,565,678,000.00	10.671.334.780,00
5 . 1 . 0 . 6	Belanja Bantuan Sosial	4,365,075,000.00	4.005.510.000,00	4.083.723.000,00	1.610.000.000.00	1,610,000,000.00	1.626.100.000,00
5 . 2	**BELANJA MODAL**	**95,187,311,050.00**	**267,666,148,058.00**	113.229.019.781,00	**196.562.488.025.00**	**121,923,394,987.00**	**123.142.628.936,87**
5 . 2 . 0 . 1	Belanja Modal Tanah	2,486,290,149.00	80,000,000.00	1.254.652.000,00	2.600.000.000,00	-	-
5 . 2 . 0 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34,290,558,653.00	20,554,201,748.00	12.115.031.035,00	33.946.527.943,00	-	-
5 . 2 . 0 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27,128,215,801.00	69,144,721,820.00	39.919.223.145,00	61.105.627.932,00	-	-
5 . 2 . 0 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30,906,055,858.00	177.278.145.599,00	58.794.397.201,00	98.700.332.150,00	-	-
5 . 2 . 0 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	376,190,589.00	609.078.891,00	919.611.400,00	210.000.000,00		

KODE	JENIS BELANJA	JUMLAH					
		REALISASI			TARGET 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026
		2021	2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						-	-
5 . 2 . 0 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	226.105.000,00	-	-	-
5 . 3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1,844,274,200.00**	**5,654,832,000.00**	**4.079.445.500,00**	**2.181.732.644,00**	**1,000,000,000.00**	**1.010.000.000,00**
5 . 3 . 0 . 1	Belanja Tidak Terduga	1,844,274,200.00	5,654,832,000.00	4.079.445.500,00	2.181.732.644,00	1,000,000,000.00	1.010.000.000,00
5 . 4	**BELANJA TRANSFER**	**183,766,867,250.00**	**174.768.213.388,00**	184.005.271.200,00	**195.486.265.000,00**	**195,486,265,000.00**	**197.441.127.650,00**
5 . 4 . 0 . 1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	1.157.636.300,00	1,157,636,300.00	1.169.212.663,00
5 . 4 . 0 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	183,766,867,250.00	174.768.213.388,00	184.005.271.200,00	194.328.628.700,00	194,328,628,700.00	196.271.914.987,00
	SURPLUS / DEFISIT	**10.448.914.911,87**	**(170,509,873,877.65)**	**(32.086.165.511,00)**	**(33.792.873.000,00)**	**36,750,000,000.00**	**36.750.000.000,00**

Sumber : BP3D Kab. Halmahera Barat, 2024

Dari hasil analisis dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025 di atas sebesar Rp. 989.578.957.858,00 yang apabila dibandingkan dengan pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.026.328.957.858,00 pada tabel 3.6 di atas, maka terdapat selisih lebih (surplus anggaran) yang menggambarkan bahwa jumlah pendapatan daerah lebih besar dari Proyeksi belanja daerah yaitu sebesar Rp. 36,750,000,000.00 selisih lebih ini diharapkan akan dapat dijadikan sebagai biaya investasi daerah dalam pembangunan.

3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan antara lain penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari realisasi sisa lebih perhitungan tahun anggaran lalu, Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah terhadap pembayaran pokok utang.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan dan pembiayaan daerah dari realisasi serta proyeksi 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan pembiayaan daerah pada Tahun 2025 dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.7 Pembiayaan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH					
		REALISASI			TARGET 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2025
		2021	2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**879,001,725,164.32**	**877,835,613,293.49**	**824.134.871.798,90**	**1.088.600.709.504.00**	**1.026.328.957.858,00**	**1.035.224.747.436,58**
5	**BELANJA**	**868,552,810,252.45**	**1.048.345.487.171,00**	**856.221.037.309,90**	**1,122,393,582,504.00**	**989.578.957.858,00**	**998.474.747.436,58**
	SURPLUS / DEFISIT	**10.448.914.911,87**	**(170,509,873,877.65)**	**(32.086.165.511,00)**	**(33.792.873.000,00)**	**36,750,000,000.00**	**36.750.000.000,00**
6	**PEMBIAYAAN**						
6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**(5,007,236,573.26)**	**203,022,659,823.69**	**28.876.076.644,25**	**68.542.873.000,00**	**-**	**-**
6 . 1 . 0 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	(5,007,236,573.26)	(2,476,209,744.31)	28.876.076.644,25	68.542.873.000,00	-	-
6. 1 . 0 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	205.498.869.568,00	-	-	-	-
6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**7,430,555,555.56**	**3.000.000.000,00**	-	**34.750.000.000,00**	**36,750,000,000.00**	**36,750,000,000.00**
6 . 2 . 0 . 1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,000,000,000.00	3.000.000.000,00	-	-	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
6 . 2 . 0 . 2	Pembayaran Pokok Utang	4,430,555,555.56	-	-	34.750.000.000,00	34,750,000,000.00	34,750,000,000.00
	Pembiayaan Netto	**(12,437,792,128.82)**	**200,022,659,823.69**	**28.876.076.644,25**	**33,792,873,000.00**	**-36,750,000,000.00**	**-36,750,000,000.00**
6 . 3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**(1,988,877,216.95)**	**29,512,785,946.04**	**(3.210.088.866,75)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Sumber : BP3D Kab. Halmahera Barat, 2024

Dari tabel 3.7 terlihat bahwa (APBD) tahun 2025 dirancang dengan asumsi pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 0.00,- dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 36,750,000,000.00 ; maka didapat pembiayaan netto sebesar (Rp. -36,750,000,000.00). Dengan kondisi surplus dari kelebihan pendapatan yang lebih besar dari belanja, maka dapat menutupi pembiayaan netto tersebut diatas, dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan dapat berada pada Rp. 0.00,-

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang diakukan dalam periode tertentu. Penetapan perioritas adalah upaya standar untuk setiap tujuan program dan kegiatan secara terencana, Terintegrasi, konsisten serta mengikat. Dengan menetapkan sasaran dan Prioritas pembangunan pada suatu perencanaan merupakan serangkaian upaya persiapan dan tindakan untuk mencapai tujuan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukan hasil akhir dalam jangka waktu tertentu. Hal ini mengidentifkasi bahwa tujuan pembangunan daerah adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai dimasa datang yang juga diselaskan dengan amanat pembangunan nasional.

Sedangkan sasaran pembangunan daerah adalah penjabaran dari tujuan pembangunan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Halmahera Barat dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karenaitu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur dan dapat dicapai, dengan indikator kinerja atau tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

Selanjutnya sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro dan sasaran spesifik pembangunan daerah sebagai rancangan kinerja “impact” yang saling terhubung dimana sasaran makro merupakan *lagging indicator* yang

dipicu oleh sasaran spesifik sebagai *leading indicator*. Dengan demikian, sasaran makro pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sekaligus menjadi indikator utama pencapaian pembangunan jangka menengah Halmahera Barat.

Sesuai visi pembangunan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 : **Mewujudkan Halmahera Barat Yang Aman, Adil Dan Sejahtera"** yang selanjutnya dalam rangka pencapaian visi pembangunan, maka dijabarkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandasakan kesetaraan serta nilai- nilai luhur agama, pancasila dan kearifan lokal;
2. Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengakselarasi keterbukaan dan daya saing wilayah;
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan sektor-sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alamstrategis lainnya. Dan;
4. Membangun pemerintah yang bersih, berwibawa, demokratis dan melayani yang memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat.

Misi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021-2026 telah dirumuskan tujuan dansasaran pembangunan yang disertai dengan indikator kinerjanya.

Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja pada RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025

Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
Misi 1 – Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan kesetaraan serta nilai-nilai luhur agama, pancasila dan kearifan local					
Tujuan 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, produktif, berakhlak mulia, dan tanpa memandang gender	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	67,73	68,54	69,34
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan Daerah	Indeks	73,46	73,69	73,93
Sasaran 2: Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	Indeks Pendidikan Daerah	Indeks	71,26	72,14	73,34
Sasaran 3: Meningkatnya produktifitas masyarakat	Pertumbuhan produktifitas total daerah (persen)	Persen	1,82	2,63	3,39
Sasara 4: Meningkatnya harmoni dan daya rekat sosial masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	66,63	68,22	70,12
Sasaran 5: Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,18	90,5	90,82

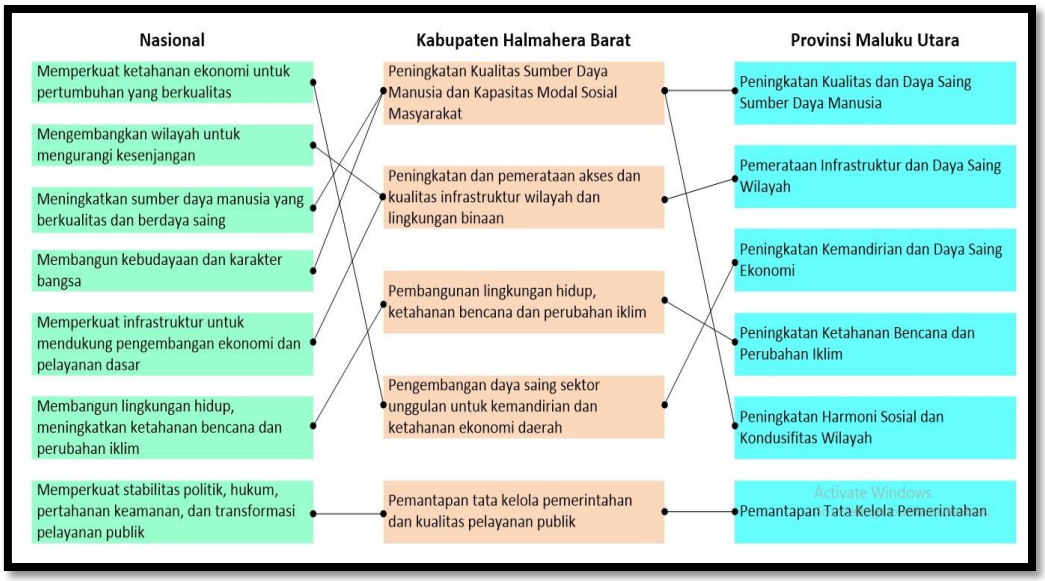
Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
Misi 2 – Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya saing wilayah					
Tujuan 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan yang berkualitas secara merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	62,57	67,52	73,81
Sasaran 6: Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur dasar yang layak dan terjangkau	Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks	75,21	78,28	81,94
Sasaran 7: Meningkatnya konektifitas dan keterbukaan wilayah	Indeks Infrastrukur Wilayah	Indeks	53,06	58,24	66,50
Tujuan 3 : Mewujudkan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan serta adaptif bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Lingkungan	Indeks	65,32	67,11	69,28
Sasaran 8: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	Peningkatan Indeks Ketahanan Lingkungan (basis poin/tahun)	Poin	1,40	1,78	2,17
Misi 3 – Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan sektor-sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya					
Tujuan 4 : Mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui pemanfaatan secara optimal sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata,	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	Persen	6,64	6,75	6,88
	Pendapatan perkapita (Rp. Juta)	Rp. Juta	15,13	15,89	16,72

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
serta sumber daya alam strategis lainnya	Indeks Rasio Gini	Indeks	0,316	0,302	0,282
Sasaran 9: Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	Pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan (persen)	Persen	5,52	5,64	5,80
	Pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata (persen)	Persen	17,43	17,68	17,91
	Pertumbuhan nilai tambah sektor industri pengolahan (persen)	Persen	15,42	15,56	15,74
	Pertumbuhan investasi (persen)	Persen	6,02	6,15	6,30
	Tingkat Penganggur an Terbuka (persen)	Persen	3,18	3,11	3,00

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
Sasaran 10: Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat secara berkeadilan	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks	45,99	49,70	54,51
	Tingkat Kemiskinan (persen)	Persen	8,29	7,77	7,03
Misi 4 – Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan melayani yang memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat					
Tujuan 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, demokratis dan melayani berbasis inovasi berkelanjutan	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	58,89	69,01	80,18
Sasaran 11: Meningkatnya kapasitas dan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui inovasi yang berkelanjutan	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (basis poin/tahun)	Poin	9,07	10,12	11,17

Tabel 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.
Provinsi dan Nasional tahun 2025

Kabupaten	Provinsi	Nasional
1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dankesehatan	1. Mempercepat transformasi perekonomian wilayah melalui peningkatan produktivitas dan hirilisasi komuditas unggulan wiayah yaitu perikanan, pertambangan dan perkebunan	1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kimiskinan ekstrem
2. Pengurangan kemiskinan	2. Memantapkan peran wilayah Maluku utara sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN)	2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
3. Penguatan daya saing usaha dan tenaga kerja	3. Memepercepat pengembangan sector pariwisata berbasisi guguspulau	3. Revitalisasi dan penguatan riset terapan
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar	5. Memeperkuat konektivitas antar pulau dan intra pualau untuk mendukung transformasi ekonomi	4. Pengutan daya saing usaha
5. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan yang selaras dengan arah pembangunan dan potensi wilayah, serta dinamika pasar		6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energy
		7. Percepatan pembangunan infarstruktur dasar dan konektivitas
		8. Percepatan pembanguanan ibu kota Nusantara



Gambar 4.1 Sinergi Prioritas Pembangunan Antara Nasional, Provinsi Maluku Utara

4.2 Prioritas dan Sasaran Program Kerja Pembangnan Daerah

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 adalah ***Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan***, tema ini merupakan tema RPJPN periode pertama (RPJMN 2025-2029) yang di arahkan untuk fokus Pembangunan Kawasan kepulauan terutama di wilayah Maluku.

Sesuai dengan tema tersebut, maka pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan pada 9 arah kebijakan yang meliputi :

1. Identifikasi dan Pengoptimalan kebutuhan dan permintaan pasar global
2. Penyiapan lahan pembangunan yang clean and clear

3. Penyusunan rencana induk pengembangan kawasan pusat pertumbuhan yang terpadu
4. Penjaminan ketersediaan sumber daya produksi yang berkelanjutan
5. Penyiapan sumber daya manusia (SDM) lokal berbasis potensi wilayah; science, technology, engineering, art, dan mathematics (STEAM) serta disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
6. Penyiapan infrastruktur dasar dan penunjang di dalam dan luar kawasan pusat pertumbuhan;
7. Penyiapan teknologi dan inovasi yang didukung pusat riset dan pengembangan (RnD);
8. Penyiapan kelembagaan dan tata kelola yang mendukung iklim usaha kondusif
9. Penguatan promosi dan pemasaran dalam meningkatkan investasi kawasan pusat pertumbuhan

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025:

RKPD 2025 mengusung tema ***"Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Penyiapan Fondasi Transformasi",***

Tema RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 ini maka Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Utara diarahkan pada:

Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas dan Daya saing Sumber Daya Manusia

Prioritas dan sasaran pembangunan untuk peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

1) Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, mencakup : a) peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasiliatas kesehatan, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal, peningkatan kopetensi tenaga kesehatan terutama bidan, perbaikan sistem rujukan maternal, penyediaan saran prasarana dan farmasi, jaminan ketersedian darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu dan anak di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan;

b) Perluasan imunisasi dasar lengkap terutama pada daerah dengan cakupan rendah dan pengembangan imunisasi untuk meneurunkan kematian bayi; c) peningkatan perilaku *hygiene*; d) peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; e) peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khusunya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi. Implementasi startegi ini ditekankan untuk : a) menurunkan secara gradual angka kematian ibu dengan merujuk pada Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu tahun 2030 sehingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran Hidup (Baseline 2018 = 214); b) berupaya untuk terus menekan angka kematian neonatal, bayi dan balita.

2) Meningkatkan akses dan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, mencakup : a) perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; dan b) peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender. Implementasi startegi ini ditekankan untuk : menekan angka fasilitas total (*total fertility rate*) guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.
3) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan/penangulangan permasalahan gizi ganda, dengan menempatkan prioritas pada percepatan penurunan *stunting* dan *wasting* pada balita dengan peningkatan evektivitas intervensi spesifik, serta perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi, termasuk penguatan sistem dan inovasi dalam surveilans gizi, serta peningkatan komitmen dan pendampingan Kabupaten/kota dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat. Implementasi strategi ini diprioritaskan untuk menurunkan secara siknifikan angka prevelensi *stunting* dan *wasting* di seluruh wilayah sehingga berada dibawah 20 persen sesuai standar WHO (Beseline 2019 =30,4 persen).
4) Meningkatkan pengendalian penyakit, baik menular maupun tidak menular, dengan perhatian khusus pada HIV/AIDS, TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, *emerging disease*, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, *sehistosomiasis*), penyakit jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penaykit

gigi dan mulut.

5) Memperluas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), mencakup namun tidak terbatas, pengembangan kawasan sehat antara lain kecamatan sehat, desa sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat, dengan menyiapkan skema-skema apresiasi terukur untuk memperluas partisipasi masyarakat dan pemangku peran lainnya.
6) Memperkuat sistem kesehatan, melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan daerah, terutama pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan pulau kecil, melalui pelayanan kesehatan bergerak dan berbasis *Telemedicine*; pemenuhan, pemerataan distribusi dan peningkatan kopetensi tenaga kesehatan, pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan tersediaan alat kesehatan dengan fokus pada efesiensi pengadaan obat dan vaksin dengan mempertimbangkan kualitas produk.
7) Memperkuat dan meningkatkan efektifitas jaminan kesehatan semesta, terutama dalam pemberian dukungan kerberlanjutan pendaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
8) Memperkuat dan meningkatkan sistem rehabilitasi sosial, mencakup perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial yang menjadi kewenangan provinsi, yang berpegang teguh pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia dan penyandang disabilitas, anak terlantar, gelandangan, pengemis serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;

Sasaran 2: Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah

1) Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dengan penekanan pada: a) mengakselarasi peningkatan Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia SMA/sederajat sehingga mencapai 100 persen (Baseline 2018=76,36 persen);

   b) menekan angka putus sekolah SMA/sederajat termasuk SLB sehingga di bawah 0,75 persen (Baseline SMA/SMK/SLB = 1,24/2,86/2,5 persen); dan mengakselarasi peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia >15 tahun (Baseline 2018=8,720), khususnya pada penduduk usia kerja produktif

(15-40 tahun) yang sudah tidak bersekolah melalui fasilitas pada jalur pendidikan luar sekolah yang memberikan kompetensi ketrampilan; pendidikan vokasional, pelatihan pemberdayaan ekonomi, sosial untuk mendorong transformasi ekonomi lokal dan mengembangkan modal sosial perdesaan;

2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SMK, terutama dengan melakukan revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja sesuai standar. Serta meningkatkan kerja sama indutri/swasta dalam penyelarasan bidang keahlian dan pola pembelajaran inovatif dan sesuai kebutuhan pembangunan sektor unggulan daerah;
3) Meningkatkan profesionalisme dan penempatan pendidikan dan tenaga kependidikan yang merata antar satuan pendidikan dan antar wilayah;
4) Meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah;
5) Memperkuat skema fasilitas bantuan pendidikan tinggi di daerah, dengan penekanan pada meningkatnya komitmen para pihak penerima manfaat untuk meningkatkan kepabilitas iptek dan penciptaan inovasi daerah untuk mendukung transformasi struktural ekonomi daerah dan menghasilkan lulusan yang mampuh menciptakan kesempatan kerja produktif;
6) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung literasi, inovasi, dan kreativitas untuk mendorong terwujudnya masyarakat berpengatahuan dan berkarakter;
7) Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan daerah untuk memperkuat karakter dan nilai jual kebudayaan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sasaran 3: Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan

1) Meningkatkan sistem pelayanan kepemudaan dan peningkatan partisipatif aktif sosial dan politik pemuda, termasuk peran pemuda di forum nasional dan internasional; dan pencegahan perilaku beresiko dan pemuda;
2) Memperkuat skema pelatihan kewirausahaan pemuda berbasis kerjasama industri, untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda baru yang mampu

menciptakan kesempatan kerja produktif dan pekerjaan layak. Implementasi strategi ini ditekankan untuk meningkatkan TPAK dan TPT penduduk usia kerja muda (15-30 tahun) (Beseline 2018 TPAK/TPT= 51,55/11,75 persen);

3) Mengembangkan budaya olahraga melalui jalur keluarga, pendidikan dan masyarakat, dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional, dengan penekanan pada meningkatnya jumlah cabang olah raga yang berprestasi di tingkat nasional, dan memperbaiki peringkat dalamperhelatan olahraga multi event tingkat nasional

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak

1). Memperkuat sistem pemenuhan hak dan pelindungan anak untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan penekanan pada upaya mengakselarasi inisiasi dan implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak

2). Memperkuat sitem pencegahan dan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan perempuan

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan

1) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan, serta sinergitas pendataan keluarga, dengan pemekanan pada tersedianya profil kependudukan komperhensip lintas sektor yang handal dan mampu telusri *(traceable)*

Prioritas 2 : Pemerataan Infrastruktur dan daya saing wilayah

Prioritas dan sasaran pembangunan untuk pemerataan infrastruktur dan daya saing wilayah diuraikan sebagai berikut.

Sasaran 1 : Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau

1) Meningkatkan akses hunian dan lingkungan hunian layak dan terjangkau, dengan penekanan pada: Meningkatkan implementasi standar pelayanan minimal, melalui penyediaan rumah bagi penduduk (yang punya rumah) korban bencana provinsi dan dampak relokasi provinsi; pemerataan dan akses rumah tangga tidak mampu pada sumber air minum bersih; pemerataan

dan akses rumah tangga tidak mampu pada sanitasi layak; termasuk meningkatkan jumlah rumah tangga tidak mampu yang menggunakan listrik; dan Menurunkan luasan kawasan permukiman kumuh dengan fokus pada wilayah perkotaan.

Sasaran 2: Meningkatnya konektifitas yang mendorong integrasi wilayah

1) Meningkatkan akses dan pemerataan infrastruktur konektifitas untuk daya saing wilayah, dengan penekanan pada: Meningkatkan kondisi struktural dan fungsional jalan provinsi; Menata dan mengembangkan sistem transportasi wilayah multi moda yang aman, nyaman dan terjangkau; Memperkuat koordinasi dalam rangka meningkatkan kapasitas infrastruktur Teknologi Innformasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendorong transformasi digital dan efektifitas penerapan *e-government*.

Sasaran 3: Menguatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah

1) Meningkatkan kapasitas sumber air baku berkelanjutan, dengan penekanan pada: Mengoptimalkan jaringan irigasi provinsi; Meningkatkan akses masyarakat pada sumber air minum terlindungi; Memperkuat koordinasi untuk penyediaan sumur bor bagi daerah-daerah sulit air;
2) Meningkatkan kapasitas energi untuk menunjang ekonomi dan pengembangan wilayah, dengan penekanan pada: Memperkuat koordinasi untuk penambahan kapasitas tenaga listrik terpasang secara merata; Meningkatkan akses jalan pendukung kawasan produksi strategis provinsi, wilayah terpencil dan tertinggal, jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara dan kawasan wisata strategis); Memperkuat koordinasi untuk penyediaan fasilitas PLTS pada wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil;
3) Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; Meningkatkan jumlah desa berkembang, maju dan mandiri; Meningkatkan pengembangan kawasan transmigrasi, perbatasan dan daerah tertinggal; dan mengakselerasi fasilitas pengembangan kawasan-kawasan produksi dan strategis provinsi termasuk pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan, melalui penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Prioritas 3: Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi

Prioritas dan sasaran pembangunan untuk Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomidiuraikan sebagai berikut.

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/nelayan

1) Meningkatkan kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani, yang mencakup: Meningkatkan kualitas konsumsi dan keamanan pangan masyarakat; meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian/perkebunan, produktivitas dan kesejahteraan petani; serta meningkatkan tata kelola sistem pangan daerah, yang difokuskan pada akselerasi produksi berbasis sentra-sentra produksi pangan terpadu, dengan memberi perhatian khususpada wilayah-wilayah dengan tingkat risiko balita *stunting* dan *wasting* tinggi sebagai bentukdukungan intervensi gizi sensitif.
2) Meningkatkan pengelolaan kelautan dan perikanan serta daya saing pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil, yang mencakup: Meningkatkan kualitas ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan; meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan; meningkatkan fasilitas usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecilserta akses terhadap pengelolaan sumber daya;

Sasaran 2: Meningkatnya nilai tambah pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensiunggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif

1) Meningkatkan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan fokus pada: a) Meningkatkan industri berbasis pertanian, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; b) Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok pariwisata; meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif; c) Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi; d) Meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam khususnya pengembangan smelter dan kawasan industri. Implementasi strategi ini

ditekankan pada upaya mengakselerasi pengembangan klaster industri *Agromarine* untuk mengolah hasil pertanian dan perikanan dan menambah jumlah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu SKPT.

Sasaran 3 : Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah

1) Memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, yang mencakup: Meningkatkan sistem logistik dan stabilisasi harga dengan meningkatkan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis, serta ketersediaan dan kelayakan sarana perdagangan; dan meningkatkan diplomasi ekonomi untuk peningkatan daya saing ekspor, citra dan pemasarandestinasi pariwisata dan produk kreaif.

Sasaran 4 : Meningkatnya efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruhwilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat

1) Memperkuat kewirausahaan dan usaha/industri mikro dan kecil, yang mencakup: Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha/industri mikro dan kecil dengan usaha/industri sedang dan besar; meningkatkan akses pembiayaan/permodalan bagi wirausaha; meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi, termasuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Bumdes Bersama. Akselerasi kewirausahaan dan usaha/industri mikro dan kecil diarahkan pada *One Vilage One Product* melalui pengembangan Satu Kecamatan SatuIndustri.

Prioritas 4: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Prioritas dan sasaran pembangunan untuk Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklimdiuraikan sebagai berikut.

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim

1) Meningkatkan daya dukung dan fungsi lingkungan hidup serta perlindungan ekosistem, dengan memperkuat kapasitas pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di setiap sektor pembangunan daerah, yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, termasuk kelestarian ekosistem lingkungan hidup baik didarat maupun di peraiaran

2) Meningkatkan pengarusutamaan ketahanan bencana dan perubahan iklim dalam seluruh perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, yang mencakup: a) Memperkuat penanganan darurat bencana dan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu; b) Meningkatkan ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir, sektor pertanian melalui instensifikasi lahan, sektor kesehatan melalui penguatan kesejahteraan sosial masyarakat dengan dukungan optimal khususnya penyediaan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau.

Prioritas 5: Peningkatan Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah

Prioritas dan sasaran pembangunan untuk Peningkatan Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah diuraikan sebagai berikut.

Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan

1) Meningkatkan harmoni sosial melalui pengamalan nilai-nilai agama, tata nilai lokal dan penguatan wasasan kebangsaan, dengan Memperkuat peran lembaga agama, tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan, dengan penekanan pada peningkatan komunikasi dan dialoglintas agama, termasuk upaya menurunkan potensi ancaman kekerasan antar sesama warga yang menghambat kebebasan sipil dan berkeyakinan; termasuk meningkatkan efektifitas fasilitas pembinaan keagamaan melalui pemberdayaan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan;

Sasaran 2: Meningkatnya keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat

1) Meningkatkan perlindungan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melalui upaya preventif dan penegakan hukum untuk memberikan rasa aman dan damai tertib dan tenteram di lingkungan masyarakat, dengan penekanan pada upaya menurunkan angka kriminalitas di tengah-tengah lingkungan masyarakat.

Prioritas 6: Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan

Prioritas dan sasaran pembangunan untuk Peningkatan Tata Kelola

Pemerintahan Daerah diuraikan sebagai berikut.

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah

1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas koordinasi serta sinergi kebijakan pembangunan, perencanaan, pengendalian pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta kerjasama daerah;
2) Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern Pemerintah (SPIP) secara baik, memperkuat kapabilitas APIP, baik dari sisi *quality assurance* maupun *consulting partner;*
3) Meningkatkan kemampuan fiskal daerah serta kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daera;
4) Meningkatkan kualitas manajemen ASN guna meningkatkan keterpaduan dan efektivitas pengelolaannya sehingga menghasilkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berkinerja;
5) Meningkatakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah;
6) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan), dengan memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (*e-government*), dan meningkatkan kapasitas ASN untuk menggunakannya; dengan penekanan pada percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi melalui pemanfaatan infrastruktur, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan SPBE secara terpadu.

Sasaran 2 : Meningkatnya hak-hak politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demorasi di daerah

1) Memperkuat Hak-hak politik dan kebebasan sipil melalui pendidikan politik dan pemilih secara konsisten serta meningkatkan kualitas dan kapasitas

organisasi masyarakat sipil; Memperkuat peran media-media lokal sebagai sumber informasi masyarakat, termasuk sebagai alternatif peningkatan daya literasi bagi masyarakat;

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025

Berdasarkan analisa isu-isu strategis permasalahan pembangunan daerah dan pencapaian pembangunan daerah yang ada, maka pembangunan daerah tahun 2025 diarahkan pada tema/agenda Pembangunan yairtu ***"Menciptakan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan".*** Hal ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dan keselarasan antara perencanaan pusat dan daerah sehingga dapat mencapai sasaran dalam upaya peningkatan taraf hidup sosial masyarakat.

Tema pembangunan ini diharapkan dapat mengintegrasikan seluruh prioritas pembangunan daerah sehingga dapat mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai tahapan perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Tahapan pembangunan ini diharapakan dapat mengintegritaskan upaya untuk memacu pengembangan sumber daya manusia serta mengurangi kesenjangan, melalui implementasi kebijakan pembangunan daerah. Dalam penjabarannya, dirumuskan 5 arah kebijakan pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2025, sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Penguatan daya saing usaha dan tenaga kerja
3. Pengurangan kemiskinan
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur
5. Tata kelolah pemerintahan

Penjabaran sasaran dari masing-masing prioritas tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Prioritas 1 ; Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, difokuskan pada

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan

Sasaran 1. Peningkatan standar pelayanan pendidikan

Sasaran 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendukung wajib belajarpendidikan bagi masyarakat miskin

Sasaran 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan

Sasaran 4.Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan

Sasaran 5. Peningkatan pembinanan manajemen kelembagaan pendidikan serta kurikulum

Sasaran 6. Pengendalian dan evaluasi secara berkala penyelenggraan pelayananpendidikan

2. Memberikan fasilitas beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa asal Halmahera Barat

Sasaran 1. Memeberikan Bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi

3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan

Sasaran 1. Peningkatan standar pelayananan minimal bidang kesehatan melalui sarana dan prasaran serta obat dan perbekalan kesehatan

Sasaran 2. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi masyarakat

Sasaran 3. Pencegahan danpengendalian penyakit menular

Sasaran 4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatanreproduksi.

4. Memperluas Jaminan Kesehatan Bagi seluruh masyarakat tidak mampuh

Sasaran 1. Bantuan Jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin

Prioritas 2 ; Penguatan Daya Saing Usaha dan Tenaga Kerja, difokuskan pada :

1. Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja

Sasaran 1. Peningkatan akses dan kualitas pelatihan pendidikan dan pelatihanketrampilan bagi pencari kerja

Sasaran 2. Pengutan koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan sarana prasarana pelatihan kerja.

2. **Mengembangkan sentra – sentra industri rakyat berbasis karakter sesuai potensi unggulan setempat yang disertai penyediaan fasiltas akses kepada pasar**

   Sasaran 1 Pengembangan potensi daerah yaitu pertanian, perikanan yang berdaya saing.

   Sasaran 2 Peningkatan produksi pertanian dan perikanan dengan penyediaan sarana pertanian serta yang disesuiakn dengan komoditas lokal.

   Sasaran 3 Pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dikecamatan dan desa serta pembetukan badan usaha milik petani.

   Sasaran 4 Penyediaan prasarana usaha perikanan, pengembangan kapsitas nelayan kecil serta fasilitasi bantuan kemitraan usaha.

   Sasaran 5 Peningkatan pembangunan dan pengelolaan sarana pemasaran

3. **Membangun dan merevitalisasi destinasi-destinasi wisata bahari, wisata alam dan agrowisata**

   Sasaran 1. Pengembangan destinasi wisata yang aman, nyaman, menarik dan muda di capai serta pengembangan pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab.

Prioritas 3 ; Pengurangan Kemiskinan, difokuskan pada :

1. **Peningkatan kualitas keluarga, perempuan dan anak**

   Sasaran 1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penyediaan layanana bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus

   Sasaran 2. Peningkatan kelembagaan pengerustamaan gender (PUG)

2. **Memperkuat dan meningkatkan sistem perlindungan sosial serta jaminan sosial**

   Sasaran 1. Peningkatan standar pelayanan minimal bidang social

   Sasaran 2. Peningkatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah

3. **Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah**

   Sasaran 1. Peningkatan jaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok

dan barangpenting.

Sasaran 2. Peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk unggulan daerahSasaran 3. Pengembangan sentra industri lokal (UKM)

Sasaran 4. Mendorong kemudahan berusaha melalui akses perizinan untuk investasi

Prioritas 4 ; Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, difokuskan pada :

1. **Peningkatan fasilitas penanganan rumah kumuh dan lingkungan kumuh baik diperkotaan maupun pedesaan**

   Sasaran 1. Peningkatan dan pemerataan akses infrastruktur dasar yang layak dan terjangkau

   Sasaran 2. Peningkatan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat

   Sasaran 3. Peningkatan efektifitas koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh

   Sasaran 4. Fasilitas Bantuan bahan bangunan untuk keluarga tidak mampu

2. **Peningkatan Fasilitasi pembangunan infrastuktur pencegah dan pengendali bencana di wilayah-wilayah rawan bencana termasuk meningkatakan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim**

   Sasaran 3. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase perkotaan maupun drainase lingkungan.

   Sasaran 4.Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan persampahan.

   Sasaran 5.Peningkatan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum meliputi: Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

3. **Meningkatkan aksebilitas dan kualitas dan sistem transportasi dan logistik di seluruhwilayah**

   Sasaran 1. Peningkatan dan pemerataan akses infrastruktur wilayah

   Sasaran 2. Peningkatan kualitas pembanguanan, pelebaran, serta pemeliharaan jaringanjalan dan jembatan yang memadai.

Sasaran 3. Peningkatan kapsiatas dan kualitas pelayanan sistem transportasi daerah

4. **Meningkatkan aksebilitasi fasailitas telekomunikasi seluler dan pita lebar diseluruhwilayah untuk mengakselerasi kapasitas literasi digital masyarakat**

Sasaran 1. Peningkatan kapsiatas sarana dan prasarana jaringan komunikasi dan informasidaerah

Prioritas 5 ; Pegelolaan Tata Kelolah Pemerintahan, difokuskan pada :

1. **Mengembangnakan kelembangaan perangkat daerah yang efektif dan efisien, tepat fungsidan struktur**

Sasaran 1 Meningkatkan kualitas manajemen ASN guna meningkatkan keterpaduan dan efektivitas pengelolaannya sehingga menghasilkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berkinerja;

Sasaran 2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan), dengan memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (*e- government*), dan meningkatkan kapasitas ASN untuk menggunakannya; dengan penekanan pada percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronil (SPBE) secara terintegrasi melalui pemanfaatan infrastruktur, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan SPBE secara terpadu.

Sasaran 3. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme serta kopetensi aparatur pemerintah melaui bimtek.

2. **Memaksimalkan satu data dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah**

Sasaran 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah

Sasaran 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas koordinasi serta sinergi kebijakan pembangunan, perencanaan, pengendalian

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta kerjasama daerah;

Sasaran 3. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern Pemerintah (SPIP) secara baik, memperkuat kapabilitas APIP, baik dari sisi *quality assurance* maupun *consulting partner*;

Sasaran 4. Meningkatkan kemampuan fiskal daerah serta kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;

Sasaran 5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguna serta meningkatkan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah;

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KAB. HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			**184.324.368.561,00**				**232.799.474.211,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**182.924.368.561,00**				**228.999.474.211,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			**182.924.368.561,00**				**228.999.474.211,00**	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	134.550.342.211,00				138.350.342.211,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	500.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	500.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	130.000.342.211,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	130.400.342.211,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	562 Orang/bulan	129.400.342.211,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	129.400.342.211,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								

		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	700.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.400.000.000,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								

		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD								
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD								

		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	400.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	600.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas								
		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								

		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	950.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.450.000.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.000.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.300.000.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	800.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	2.100.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	200.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	600.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	47.974.026.350,00				89.699.132.000,00	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	22.249.856.350,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	42.169.962.000,00	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								

		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	1.200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah								
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah								
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah								
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengadaan Mebel Sekolah								
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	162.856.350,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	6 Paket	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	75 Peserta Didik	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar								
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	75 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar								
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	75 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	60 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	173 Satuan Pendidikan	16.337.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	16.337.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	176 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar								

		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	2.511.459.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan								
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	75 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan								
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan								
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 Komunitas	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								

		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	41 Ruang	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	3.471.503.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus								
		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	3 Ruang	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus								
		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	50 Ruang	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar								
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	75 Peserta Didik	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	19.595.920.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	34.850.920.000,00	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	8 Ruang	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	8 Ruang	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	Pembangunan Laboratorium								
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	6 Ruang	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula								
		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	2 Ruang	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah								
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.080.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	1.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah								
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	1.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium								
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah								
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengadaan Mebel Sekolah								

		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	30 Paket	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama								
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	75 Peserta Didik	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	25 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	63 Satuan Pendidikan	8.995.920.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	8.995.920.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	65 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan								

		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan								
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan								
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan								

		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20 Komunitas	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan								
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik								
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	900 Buku	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								

		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	4.928.250.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	11.478.250.000,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengadaan Mebel PAUD								
		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengadaan Perlengkapan PAUD								
		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD								
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	75 Peserta Didik	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD								
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD								
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD								
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengelolaan Dana BOP PAUD								

		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	135 Satuan Pendidikan	1.978.250.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.978.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD								
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	75 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan								
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan								
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	75 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan								
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20 Komunitas	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								

		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik								
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Peserta didik	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah								
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula								
		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD								
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	10 Paket	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.200.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.200.000.000,00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan								
		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50 Peserta Didik	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1000000000 Ruang	1.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	100.000.000,00				150.000.000,00	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	100.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	150.000.000,00	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								

		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	-	-	100.000.000,00				500.000.000,00	
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	500.000.000,00	
	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota								
		Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	1 Kamus	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	200.000.000,00				300.000.000,00	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	300.000.000,00	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan								

		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 Objek	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan								
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	25 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**1.400.000.000,00**				**3.800.000.000,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			**1.400.000.000,00**				**3.800.000.000,00**	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	200.000.000,00				300.000.000,00	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	300.000.000,00	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya								
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional								

		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	-	-	200.000.000,00				300.000.000,00	
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	300.000.000,00	
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional								
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional								
		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	-	-	100.000.000,00				1.000.000.000,00	

	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.000.000.000,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	400.000.000,00				700.000.000,00	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	300.000.000,00	
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya								
		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	10 Objek	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Penetapan Cagar Budaya								

		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	
	Pelindungan Cagar Budaya								
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	6 Objek	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	
	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	10 Objek	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

10	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-	500.000.000,00				1.500.000.000,00	
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-	500.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.500.000.000,00	
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	DINAS KESEHATAN			**90.567.959.389,00**				**0,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**90.567.959.389,00**				**0,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**90.567.959.389,00**				**0,00**	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			31.013.474.129,00				0,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	150.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	30.033.474.129,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	419 Orang/bulan	30.033.474.129,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	100.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	430.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	350.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN

12	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	58.954.485.260,00				0,00	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	13.954.485.260,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Pembangunan Puskesmas								
		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	15 Unit	4.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	15 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	15 Unit	3.954.485.260,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN

	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	15 Paket	3.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	44.850.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								

		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	750.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9700 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								

		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	110 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								

		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	770 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	15 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	15 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN

	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	20.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	15 Dokumen	20.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota								
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	15 Unit	750.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	150.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	15 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN

13	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	400.000.000,00				0,00	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	150.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	0,00	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	30 Orang	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	0,00	DINAS KESEHATAN
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	250.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 Orang	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
14	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	200.000.000,00				0,00	

	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	100.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-	100.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								

		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	15 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KESEHATAN
	RSUD JAILOLO			**54.617.981.744,00**				**60.444.087.973,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**54.617.981.744,00**				**60.444.087.973,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**54.617.981.744,00**				**60.444.087.973,00**	
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	41.180.796.705,00				45.298.876.376,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	495.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	544.500.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	121.000.000,00	RSUD JAILOLO
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	385.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	423.500.000,00	RSUD JAILOLO
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	24.134.005.965,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	26.547.406.562,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	346 Orang/bulan	23.772.972.215,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	26.150.269.437,00	RSUD JAILOLO
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	361.033.750,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	397.137.125,00	RSUD JAILOLO
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	230.631.500,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	253.694.650,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								

		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	230.631.500,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	253.694.650,00	RSUD JAILOLO
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	302.500.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	332.750.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	302.500.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	332.750.000,00	RSUD JAILOLO
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.737.050.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.910.755.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	850.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	935.000.000,00	RSUD JAILOLO
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	110.000.000,00	RSUD JAILOLO
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	55.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	60.500.000,00	RSUD JAILOLO
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	266.200.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	292.820.000,00	RSUD JAILOLO
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	199.650.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	219.615.000,00	RSUD JAILOLO
	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	133.100.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	146.410.000,00	RSUD JAILOLO
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	133.100.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	146.410.000,00	RSUD JAILOLO

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.085.445.240,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.193.989.764,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.030.445.240,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.133.489.764,00	RSUD JAILOLO
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	55.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	60.500.000,00	RSUD JAILOLO
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.422.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.564.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	11.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	12.100.000,00	RSUD JAILOLO
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.081.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.189.100.000,00	RSUD JAILOLO

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	330.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	363.000.000,00	RSUD JAILOLO
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	195.800.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	215.380.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	110.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	121.000.000,00	RSUD JAILOLO
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	85.800.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	94.380.000,00	RSUD JAILOLO
	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	11.578.364.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	12.736.200.400,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	11.578.364.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	12.736.200.400,00	RSUD JAILOLO

16	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	13.437.185.039,00				15.145.211.597,00	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	11.272.630.864,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	12.399.893.950,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	5 Unit	2.003.100.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.203.410.000,00	RSUD JAILOLO
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	2.581.922.193,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.840.114.412,00	RSUD JAILOLO
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								

		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit	133.100.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	146.410.000,00	RSUD JAILOLO
	Pengembangan Rumah Sakit								
		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 Unit	2.190.375.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.409.412.500,00	RSUD JAILOLO
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	4.364.133.671,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	4.800.547.038,00	RSUD JAILOLO
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	641.357.775,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.069.801.607,00	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit								

		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	550.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	605.000.000,00	RSUD JAILOLO
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota								
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	91.357.775,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	464.801.607,00	RSUD JAILOLO
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	1.523.196.400,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.675.516.040,00	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1.523.196.400,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	PENDAPATAN DARI BLUD	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.675.516.040,00	RSUD JAILOLO
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**69.363.306.000,00**				**175.041.432.449,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			69.363.306.000,00				175.041.432.449,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			69.363.306.000,00				175.041.432.449,00	
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.123.306.000,00				8.091.432.449,00	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	20.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.081.018.922,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.991.432.449,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	3.031.018.922,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.941.432.449,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	175.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	225.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								

		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	907.287.078,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	905.000.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.287.078,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	750.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.750.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.750.000.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	750.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.200.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.200.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-	5.300.000.000,00				10.300.000.000,00	

	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.500.000.000,00			6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 3. Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim	6.500.000.000,00	
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing								
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,2 KM	1.500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 3. Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pembangunan Tanggul Sungai								
		Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,2 KM	1.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 3. Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim	2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya								
		Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,2 KM	1.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 3. Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.800.000.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	3.800.000.000,00	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan								

		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,2 KM	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan								
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,5 KM	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan								
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,2 KM	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa								
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
19	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-	2.300.000.000,00				5.300.000.000,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.300.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	5.300.000.000,00	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								

		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0 Liter/Detik	1.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	15 Liter/Detik	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	800.000.000,00				1.000.000.000,00	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	800.000.000,00			2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	1.000.000.000,00	

	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS								
		Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	0 Ton/hari	800.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
21	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-	4.100.000.000,00				3.300.000.000,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.100.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	3.300.000.000,00	
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman								
		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	0 M^3/Hari	1.500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat								
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	0 M^3/Hari	2.300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								

		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
22	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-	5.100.000.000,00				2.500.000.000,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.100.000.000,00			6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 3. Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim	2.500.000.000,00	
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan								
		Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	4000 M	4.600.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 3. Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan								
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 3. Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
23	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-	1.000.000.000,00				1.000.000.000,00	

	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.000.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	1.000.000.000,00	
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya								
		Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	1.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	38.040.000.000,00				140.350.000.000,00	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	38.040.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	140.350.000.000,00	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	4 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pembangunan Jalan								

		Panjang Jalan yang Dibangun	6 KM	5.200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Halmahera Barat, Ibu Utara, Podol	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	75.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Rekonstruksi Jalan								
		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	7 KM	25.090.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	40.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pemeliharaan Berkala Jalan								
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	4 KM	1.300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Halmahera Barat, Ibu Utara, Semua Kel/Desa Kab. Halmahera Barat, Ibu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pembangunan Jembatan								

		Jumlah Jembatan yang Dibangun	5 Jembatan	4.600.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Halmahera Barat, Jailolo Selatan, Domato	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pemeliharaan Berkala Jembatan								
		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	10 Jembatan	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan								
		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	512,94 KM	350.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-	100.000.000,00				100.000.000,00	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-	100.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis								

		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	15 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
26	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-	2.500.000.000,00				3.100.000.000,00	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-	1.900.000.000,00			4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.000.000.000,00	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota								
		Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota								
		Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	900.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	500.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.000.000.000,00	
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang								

		Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang								
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			**11.566.279.258,00**				**0,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.166.279.245,00				0,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			9.166.279.245,00				0,00	
27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	7.216.279.232,00				0,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.400.000.000,00			-	0,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	250 Orang/bulan	6.400.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1,00			-	0,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	1,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	262.479.225,00			-	0,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Fasilitasi Kunjungan Tamu								

		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	42.479.225,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	425.000.000,00			-	0,00	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	25 Unit	425.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	128.800.000,00			-	0,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	28.800.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6,00			-	0,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
28	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	850.000.009,00				0,00	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	5,00			-	0,00	
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan								

		Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	5,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	2,00			-	0,00	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana								
		Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 Orang	2,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	2,00			-	0,00	
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana								
		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	200 Unit Rumah	2,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota								
		Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	150 Unit Rumah	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-	850.000.000,00			-	0,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun								
		0	0 0	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Pembangunan Rumah Khusus								
		Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	16 Unit	600.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-	0,00			-	0,00	
	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman								
		Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
29	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	1.100.000.003,00				0,00	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-	0,00			-	0,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman								
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	3,00			-	0,00	
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP								

		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	1,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha								
		Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	10 Rumah Tangga	2,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh								
		Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.100.000.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	0,00	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni								

		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	33 Unit Rumah	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Halmahera Barat, Ibu, Semua Kel/Desa Kab. Halmahera Barat, Ibu Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
30	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-	1,00				0,00	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	1,00			-	0,00	
	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU								
		Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	1 Kelompok	1,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.400.000.012,00				0,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			2.400.000.012,00				0,00	
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.100.000.000,00				0,00	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.100.000.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 3. Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim	0,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	250 Unit	1.100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda, Semua Kel/Desa Kab. Halmahera Barat, Ibu, Semua Kel/Desa Kab. Halmahera Barat, Ibu Utara, Semua Kel/Desa Kab. Halmahera Barat, Ibu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 3. Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
32	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	0,00				0,00	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	0,00	

	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD								
		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
33	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	1,00				0,00	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	1,00			-	0,00	
	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								
		Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	10 Lokasi	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan								
		Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	0 Paket	1,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

34	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-	1,00				0,00	
	Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-	1,00			-	0,00	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3								
		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
35	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-	1.300.000.010,00				0,00	
	Pengelolaan Sampah	-	-	1.300.000.010,00			-	0,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan								

		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	10 Unit	900.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah								
		Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	10 Unit	400.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah								

		Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	100 Ton	1,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan								
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	150 Ton	2,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan								
		jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	7,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	NON URUSAN			1,00				0,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1,00				0,00	
36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	-	1,00				0,00	

	KABUPATEN/KOTA								
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1,00			-	0,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00			-	0,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			9.470.467.069,00				0,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.470.467.069,00				0,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			9.470.467.069,00				0,00	
37	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.510.500.000,00				0,00	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	35.000.000,00			6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	12.500.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	12.500.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.815.000.000,00			6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	4.750.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	275.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								

		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	147.500.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	12.500.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	125.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	113.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	125.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	125.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
38	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	2.989.967.069,00				0,00	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.458.967.069,00			6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum								

		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	1.434.967.069,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia								
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	75 Orang	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	10 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas								
		Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	75 Orang	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan								

		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	6 laporan	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa								
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	6 Laporan	125.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	6 Unit	199.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	431.000.000,00			6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								

		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	356.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	6 Laporan	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS								
		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
39	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-	970.000.000,00				0,00	

	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	820.000.000,00			6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	10 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Laporan	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran								
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								

		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran								
		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	35 Orang	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	6 Unit	195.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	150.000.000,00			6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat								

		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50 Orang	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			5.525.529.059,00				0,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.510.529.059,00				0,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			5.510.529.059,00				0,00	
40	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.385.529.054,00				0,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00			-	0,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.218.029.059,00			-	0,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	2.183.029.059,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	10 Laporan	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	20.309.615,00			-	0,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								

		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	20.309.615,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	880.560.380,00			-	0,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	20.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	20.260.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								

		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	76.600.000,00			-	0,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.600.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	180.030.000,00			-	0,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	100.030.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	80.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
41	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	2.125.000.005,00				0,00	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	225.000.000,00			-	0,00	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)								

		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	590.000.003,00			-	0,00	
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	1,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota								

		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	10 Unit	30.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota								
		Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	30 Orang	1,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana								
		Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota								

		Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana								
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota								

		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	10 laporan	20.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2 Kawasan	1,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	1.000.000.000,00			-	0,00	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota								

		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	800.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	30 Orang	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota								
		Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	30 Orang	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								

		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	30 Orang	25.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	12 Laporan	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	310.000.002,00			-	0,00	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	12 Dokumen	1,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana								
		Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota								

		Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	30 Orang	1,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	30 Orang	80.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	12 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota								

		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	12 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	NON URUSAN			15.000.000,00				0,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			15.000.000,00				0,00	
42	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	15.000.000,00				0,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	15.000.000,00			-	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			**7.429.209.455,00**				**8.496.750.000,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**4.990.692.455,00**				**6.346.750.000,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			**4.990.692.455,00**				**6.346.750.000,00**	
43	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.015.692.455,00				3.146.750.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	7.500.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	7.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.734.209.455,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.830.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang / 12 Bulan Orang/bulan	2.659.209.455,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.750.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	6.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	7.500.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								

		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	7.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	146.483.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	167.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	11.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Penyediaan Bahan/Material								

		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	16.483.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	11.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	120.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	55.700.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	59.750.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.200.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.250.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	22.500.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	32.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	33.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	67.300.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	75.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	67.300.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
44	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-	525.000.000,00				725.000.000,00	

	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	525.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	725.000.000,00	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								

		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Lembaga	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	400.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
45	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	200.000.000,00				425.000.000,00	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	200.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	425.000.000,00	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat								
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	175.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar								

		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	250.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
46	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-	450.000.000,00				950.000.000,00	
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-	-	150.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	300.000.000,00	
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar								
		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	300.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	300.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	650.000.000,00	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								

		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	7000 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	7000 Keluarga	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga								
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7000 Keluarga	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	300.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
47	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-	450.000.000,00				600.000.000,00	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-	300.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 3. Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim	400.000.000,00	

	Penyediaan Makanan								
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 3. Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim	400.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	150.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana								
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	98 Orang	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
48	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-	350.000.000,00				500.000.000,00	

	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	350.000.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	500.000.000,00	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	350.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**2.438.517.000,00**				**2.150.000.000,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			**2.438.517.000,00**				**2.150.000.000,00**	
49	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	175.000.000,00				400.000.000,00	

	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	300.000.000,00	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi								
		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Organisasi	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	300.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	75.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								

		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
50	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-	1.613.517.000,00				950.000.000,00	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	75.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Perangkat Daerah	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	1.538.517.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	850.000.000,00	

	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	60 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	250.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen Layanan	1.438.517.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Acango	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN, DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	600.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
51	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	200.000.000,00				150.000.000,00	

	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	150.000.000,00	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
52	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-	100.000.000,00				150.000.000,00	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	150.000.000,00	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota								

		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
53	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-	275.000.000,00				400.000.000,00	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	150.000.000,00	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Organisasi	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	175.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	250.000.000,00	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
54	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	75.000.000,00				100.000.000,00	

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	75.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	
	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota								
		jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			**3.303.005.107,00**				**0,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**3.303.005.107,00**				**0,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			**3.303.005.107,00**				**0,00**	
55	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.274.421.407,00				0,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	18.080.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen Dokumen	18.080.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.909.765.107,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang / 12 Bulan Orang/bulan	1.883.005.107,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen Dokumen	26.760.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	238.169.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	

	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket Paket	37.823.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan Laporan	200.346.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	56.550.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan Laporan	2.250.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan Laporan	36.300.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan Laporan	18.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	51.857.300,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit Unit	51.857.300,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
56	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	113.583.700,00				0,00	

	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	113.583.700,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk								
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	0 Orang	113.583.700,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	0,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk								
		Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan Laporan	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
57	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	400.000.000,00				0,00	

	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	200.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil								
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Laporan Layanan	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	200.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil								
		Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Dokumen Laporan	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
58	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	350.000.000,00				0,00	

	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	175.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen Dokumen	175.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	175.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Dokumen Laporan	175.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

59	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-	165.000.000,00				0,00	
	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	165.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen Dokumen	165.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA			**11.007.940.047,00**				**9.423.427.616,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**11.007.940.047,00**				**9.423.427.616,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			**11.007.940.047,00**				**9.423.427.616,00**	
60	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.723.940.047,00				3.973.427.616,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	14.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 paket Dokumen	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok Dokumen	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.405.427.616,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	2.923.427.616,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan Orang/bulan	4.370.427.616,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	2.870.427.616,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								

		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 org/bln dan 1 dok Dokumen	30.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	48.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok Laporan	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	3.000.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dok Laporan	3.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	990.000.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	723.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket Paket	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	23.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket Paket	25.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Fasilitasi Kunjungan Tamu								

		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	dok Laporan	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dok Laporan	750.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	20.512.431,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	25.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 dok Laporan	20.512.431,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terjaganya Barang Milik OPD	100 %	285.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	285.000.000,00	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 paket Unit	35.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket Unit	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
61	PROGRAM PENATAAN DESA	-	-	200.000.000,00				250.000.000,00	
	Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-	200.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	250.000.000,00	
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa								
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	1 dok Desa	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
62	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-	-	500.000.000,00				250.000.000,00	

	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-	500.000.000,00			4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	250.000.000,00	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan								
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dok Dokumen	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
63	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-	2.534.000.000,00				3.150.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	2.534.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	3.150.000.000,00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	dok Dokumen	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa								

		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 dok Dokumen	450.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa								
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	dok Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa								
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1 paket Orang	450.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa								
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dok Dokumen	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa								

		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kepala Desa Laporan	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa								
		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	dok Dokumen	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa								
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Desa Dokumen	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa								
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	dok Dokumen	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan								

		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	134.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
64	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-	2.050.000.000,00				1.800.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.050.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.800.000.000,00	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								

		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	dok Dokumen	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	dok Lembaga	400.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa								
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 paket Dokumen	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna								

		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 dok Laporan	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga								
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	dok Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB			**7.400.019.102,00**				**5.800.830.000,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**7.400.019.102,00**				**5.800.830.000,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			**7.400.019.102,00**				**5.800.830.000,00**	
65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.087.044.102,00				2.052.000.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.000.000,00			4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	5.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.675.244.102,00			4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.765.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	1.609.389.102,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.700.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	5.855.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00			4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	10.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	196.800.000,00			4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	72.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan	24.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	24.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	172.800.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	48.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Penataan Organisasi	-	-	200.000.000,00			4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
66	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-	111.000.000,00				111.000.000,00	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-	15.000.000,00			4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	15.000.000,00	
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal								

		Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	5 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana								
		Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kegiatan	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	96.000.000,00			4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	96.000.000,00	
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan								
		Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	8 Dokumen	48.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	48.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga								

		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	48.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	48.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
67	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-	2.535.630.000,00				2.385.630.000,00	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	465.000.000,00			4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	515.000.000,00	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana								
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	8 Laporan	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)								

		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	120.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang								
		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja								

		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	15 Organisasi	45.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	507.000.000,00			4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	507.000.000,00	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)								
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	169 Orang	507.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	507.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.105.880.000,00			4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	905.880.000,00	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya								

		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	17.100.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	17.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB								
		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 3. Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB								
		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Unit	400.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	1045 Orang	348.430.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	348.430.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya								

		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	8.550.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	8.550.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak								
		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	9.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	9.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB								
		Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	19 Orang	22.800.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	22.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	457.750.000,00			4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	457.750.000,00	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB								

		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	3.750.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	3.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Pembinaan Terpadu Kampung KB								
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	4 Laporan	4.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas								
		Jumlah DASHAT di Kampung KB	15 Unit	450.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	450.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
68	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	2.666.345.000,00				1.252.200.000,00	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	187.500.000,00			4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	187.500.000,00	
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)								

		Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan / Dokumen	187.500.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	187.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	2.478.845.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.064.700.000,00	
	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Organisasi	1.614.145.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KEFARMASIAN	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)								
		Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	407.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	507.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)								
		Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	457.700.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	557.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	DINAS PERHUBUNGAN			**13.170.307.612,00**				**8.175.000.000,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**13.170.307.612,00**				**8.175.000.000,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			**13.170.307.612,00**				**8.175.000.000,00**	
69	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Meningkatkan pelayanan Publik	100 Persen 30 Persen	5.600.307.612,00				1.405.000.000,00	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	29,41 Unit 100 Unit	100.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 paket Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.115.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun Orang/bulan	4.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								

		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 tahun Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 tahun Laporan	30.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 tahun Laporan	35.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	176.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								

		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 tahun Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	76.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	735.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	700.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 tahun Paket	35.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun Laporan	400.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	45.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	5.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 tahun Laporan	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 tahun Laporan	40.000.000,00	-	-	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	429.307.612,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	600.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 tahun Unit	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 tahun Unit	14.307.612,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
70	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-	6.820.000.000,00				5.770.000.000,00	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	3.000.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	2.000.000.000,00	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	400 Unit	3.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	950.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	400.000.000,00	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C								
		Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	2 Dokumen	850.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C								
		Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	4 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-	550.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	650.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota								

		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 tahun Laporan	550.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	500.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	500.000.000,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 tahun Laporan	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								
		Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 tahun Laporan	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	-	320.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	220.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin								
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 tahun Laporan	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin								
		Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	2 Orang	45.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin								
		Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	1 tahun Laporan	25.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin								

		Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	1 tahun Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.500.000.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	2.000.000.000,00	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu, Semua Kel/Desa Kab. Halmahera Barat, Ibu Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
71	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	750.000.000,00				1.000.000.000,00	
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	750.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	1.000.000.000,00	
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal								

		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	2 Unit	750.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			**6.683.500.148,00**				**5.325.196.143,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**6.683.500.148,00**				**5.325.196.143,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			**6.555.914.148,00**				**5.225.196.143,00**	
72	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.811.440.148,00				2.345.196.143,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	40.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	20.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1.795.196.148,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.795.196.143,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.663.500.148,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.663.500.143,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	111.696.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	111.696.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								

		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan KIM Kecamatan Yang disampaikan setiap bulan Jumlah Media Yang Berkontrak Dengan Dinas Kominfo jumlah organisasi perangkat daerah yang memiliki operator tanda tangan elektronik (TtE) Jumlah Portal Website OPD yang terintergrasi dengan Prtal Resmi Pemda Halbar Persentase Desa-Desa Yang terkoneksi Jaringan Telpon Seluler Persentase Desa Yang Terkoneksi Jaringan Telekomunikasi Seluler Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi ASN Persentase Sekolah dan Kantor Desa Yang Terpasang Wifi Publik	7 Laporan 30 Media 40 OPD 7 OPD 90,9 Desa 11 Desa 100 % 85 %	215.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	20.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								

		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	65.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Kantor	12 Bulan	431.244.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	350.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	56.244.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	330.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Diadakan	2 Unit	250.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	100.000.000,00	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya								

		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tenaga Ahli Yang diKontrak	2 Orang	30.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	30.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Pemeliharaan	5 Unit	50.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	30.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
73	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-	2.910.000.000,00				1.930.000.000,00	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.910.000.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.930.000.000,00	
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat								
		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik								

		Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	90 Persentase	120.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	130.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik								
		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	40.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik								
		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	2.500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
74	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Server Induk Yang Dibangun Peningkatan jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasii (kumulatif)	1 Unit 3 layanan	834.474.000,00				950.000.000,00	

	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Yang terkoneksi Internet Terintegrasi Yang disediakan Dinas Kominfo	20 OPD	40.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa								
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki Portal dan Website Resmi Yang terintegrasi dengan Website Resmi Pemda Halbar Jumlah Portal Web Site OPD yang terintegrasi dengan Web site Resmi Pemda Halbar	5 OPD 15 OPD	794.474.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	650.000.000,00	
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda								

		Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	179.189.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE								
		Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE								
		Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	215.285.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE								

		Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	35 Perangkat Daerah	350.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			127.586.000,00				100.000.000,00	
75	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rata-rata nilai LKJ perangkat daerah	100 %	127.586.000,00				100.000.000,00	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang dibuat	5 Buah	127.586.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral								
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	127.586.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP			**3.472.615.192,00**				**4.172.615.192,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**3.472.615.192,00**				**4.172.615.192,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			**3.472.615.192,00**				**4.172.615.192,00**	

76	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.961.315.192,00				2.472.615.192,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.961.315.192,00			-	2.472.615.192,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	1.961.315.192,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2.472.615.192,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
77	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	200.000.000,00				250.000.000,00	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	250.000.000,00	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
78	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-	400.000.000,00				450.000.000,00	

	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	400.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	450.000.000,00	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
79	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-	911.300.000,00				1.000.000.000,00	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	911.300.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.000.000.000,00	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik								

		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12 Pelaku Usaha	761.300.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko								
		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	6 Kegiatan Usaha	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			2.404.601.177,00				23.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.404.601.177,00				23.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			2.274.601.177,00				23.000.000,00	
80	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.149.601.177,00				23.000.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	23.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	23.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.604.603.377,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.604.603.377,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	120.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan Paket	20.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyediaan Bahan/Material								

		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	300.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	69.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan Laporan	19.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan Laporan	30.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan Laporan	20.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	35.997.800,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	35.997.800,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

81	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-	125.000.000,00				0,00	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	125.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan								
		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20 Perpustakaan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	25.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			**130.000.000,00**				**0,00**	
82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	40.000.000,00				0,00	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	40.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
83	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-	90.000.000,00				0,00	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	40.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota								
		Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	18 Instansi	40.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN								
		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	18 Pengguna	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			17.270.541.660,00				19.192.568.743,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			17.270.541.660,00				19.192.568.743,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			17.270.541.660,00				19.192.568.743,00	
84	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.745.541.660,00				3.942.068.743,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	50.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	55.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.805.541.660,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.945.818.743,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan Orang/bulan	2.605.541.660,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.735.818.743,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	200.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	210.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	150.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	157.500.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	157.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	300.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	315.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	52.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	52.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	210.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	100.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	105.000.000,00	
	Pengadaan Mebel								

		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	105.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	220.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	231.750.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan Laporan	25.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	26.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan Laporan	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	16.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	180.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	189.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	120.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	132.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan Unit	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	20.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	22.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
85	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	5.450.000.000,00				6.024.250.000,00	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	3.850.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	4.227.500.000,00	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan								

		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	157.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap								
		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	25 Unit	3.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	4.070.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap								
		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	2 Unit	700.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu, Semua Kel/Desa Kab. Halmahera Barat, Ibu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.565.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	1.760.000.000,00	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil								

		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	18 Orang	1.565.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	1.760.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	35.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	36.750.000,00	
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT								
		Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	30 Rekomendasi	35.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	36.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
86	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	7.600.000.000,00				8.715.000.000,00	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	150.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	157.500.000,00	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil								

		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	150.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	157.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	7.450.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	8.557.500.000,00	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	150.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	157.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	7.300.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	8.400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
87	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	475.000.000,00				511.250.000,00	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	150.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	157.500.000,00	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko								

		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	150.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	157.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	325.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	353.750.000,00	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35 Ton	250.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	275.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	20 Pelaku Usaha	75.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	78.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA			**12.067.986.216,00**				**13.469.107.047,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**4.616.565.216,00**				**7.156.686.547,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			**4.616.565.216,00**				**7.156.686.547,00**	
88	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	-	3.605.065.216,00				3.775.186.547,00	

	KABUPATEN/KOTA								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.352.686.547,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	3.352.686.547,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	3.152.686.547,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	3.152.686.547,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	150.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	300.000.000,00	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	90.378.669,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	112.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	80.378.669,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	90.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	22.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	12.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	10.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	12.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
89	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	280.000.000,00				650.000.000,00	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	-	-	180.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	150.000.000,00	

	Kabupaten/Kota								
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota								
		Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	10 Orang	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda								
		Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	1 Orang	30.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota								
		Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota								

		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	5 Orang	25.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota								
		Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	500.000.000,00	
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota								
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	10 Organisasi	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA

90	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	481.500.000,00				1.981.500.000,00	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	150.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota								
		Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota								
		Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar								

		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.300.000.000,00	
	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga								
		Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	150 Orang	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.300.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	150.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	350.000.000,00	
	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga								

		Jumlah penerima Penghargaan olahraga	20 Orang	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota								
		Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	20 Orang	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota								
		Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	131.500.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	131.500.000,00	
	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional								

		Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	131.500.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	131.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
91	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-	250.000.000,00				750.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	250.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	750.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah								
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	750.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			**7.451.421.000,00**				**6.312.420.500,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			**7.451.421.000,00**				**6.312.420.500,00**	
92	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-	6.201.421.000,00				4.041.421.000,00	

	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	150.000.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	0,00	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	50 Lokasi	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu Selatan, Talaga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	6.001.421.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	3.991.421.000,00	
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								

		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	270.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	4.300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	2.520.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	951.421.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	751.421.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA

	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	50.000.000,00	
	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota								
		Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
93	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-	1.050.000.000,00				1.700.000.000,00	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	1.050.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.700.000.000,00	
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri								

		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri								
		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata								
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KEMBALI DANA BERGULIR KEPADA BLUD	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota								
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	650.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri								

		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
94	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-	200.000.000,00				570.999.500,00	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	100.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	100.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	370.999.500,00	

	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	370.999.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			**21.640.141.025,00**				**33.652.640.758,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**430.000.000,00**				**2.797.000.000,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			**430.000.000,00**				**2.797.000.000,00**	
95	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-	-	0,00				700.000.000,00	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	700.000.000,00	
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya								
		Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	7 Unit	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	700.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

96	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-	390.000.000,00				1.837.000.000,00	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	190.000.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	1.087.000.000,00	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	120.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga								
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20 Keluarga	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	800.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota								

		Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan	80.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis								
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	37.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)								
		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-	150.000.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	500.000.000,00	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota								

		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Ton	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	50.000.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	250.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
97	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-	40.000.000,00				100.000.000,00	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-	30.000.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	50.000.000,00	
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan								

		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	10.000.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	50.000.000,00	
	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota								
		Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
98	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-	0,00				160.000.000,00	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	160.000.000,00	
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota								

		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	120.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			**21.210.141.025,00**				**30.855.640.758,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			**21.210.141.025,00**				**30.855.640.758,00**	
99	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	12.669.677.025,00				13.692.291.796,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	50.000.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	225.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	220.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	11.935.755.025,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	12.309.091.796,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/bulan	11.935.755.025,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	12.276.091.796,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	27.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	6.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	15.200.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								

		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	15.200.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	206.000.000,00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	6.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	471.622.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	478.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	7.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	7.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	7.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Penyediaan Bahan/Material								

		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	12.622.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	27.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	230.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	28.200.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	57.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	28.200.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	57.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	164.100.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	402.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	64.100.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	52.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	350.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
100	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-	3.163.260.000,00				4.150.000.000,00	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-	2.523.260.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	3.350.000.000,00	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi								
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	1.100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	1.150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian								

		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1.238.840.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	1.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan								
		Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	10000 Anakan	184.420.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	1.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	20.000.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	200.000.000,00	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman								
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-	620.000.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	600.000.000,00	
	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain								

		Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	35 Ekor Dosis	620.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
101	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	5.087.204.000,00				10.543.348.962,00	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	1.192.200.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	3.300.000.000,00	
	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian								
		Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	100 Ha	1.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan								

		Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	1 Unit	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	450.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota								
		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	2.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota								
		Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian								
		Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen	192.200.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	3.895.004.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	7.243.348.962,00	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian								
		Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	450.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani								
		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 Unit	3.895.004.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	3.210.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit								
		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	470.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya								
		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	1.713.348.962,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya								
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	700.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani								
		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	2 Unit	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	700.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan								
		Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
102	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-	0,00				810.000.000,00	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-	0,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	810.000.000,00	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan								

		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	50 Ha	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan								
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	10 Ha	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	210.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
103	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-	290.000.000,00				1.660.000.000,00	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	290.000.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	1.660.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa								
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Unit	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	350.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa								

		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Unit	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	50 Unit	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	810.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota								
		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	2 Unit	40.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	350.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM			**4.302.916.228,00**				**4.829.358.000,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**3.386.150.000,00**				**3.499.060.000,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			**3.386.150.000,00**				**3.499.060.000,00**	
104	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.847.150.000,00				2.958.900.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	350.000.000,00			5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	400.000.000,00	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.350.000.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.400.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	2.300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	18.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	18.900.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	18.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	18.900.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	90.500.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	85.500.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	38.650.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	40.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	17.500.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	18.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	21.150.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	22.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM
105	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-	15.000.000,00				16.000.000,00	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu)	-	-	15.000.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	16.000.000,00	

	Daerah Kabupaten/Kota								
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	16.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM
106	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	324.000.000,00				524.160.000,00	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	324.000.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	524.160.000,00	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	40 Unit Usaha	324.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	524.160.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM
107	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-	200.000.000,00				0,00	

	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-	200.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	0,00	
	Pengembangan Usaha Mikro								
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	10 Unit Usaha	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu Selatan, Talaga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			**916.766.228,00**				**1.330.298.000,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			**716.766.228,00**				**1.130.298.000,00**	
108	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	40.298.000,00				40.298.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	40.298.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	40.298.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.298.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	40.298.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM
109	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	600.000.000,00				1.000.000.000,00	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	600.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 3. Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim	1.000.000.000,00	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan								
		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	600.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 3. Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim	1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM
110	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	76.468.228,00				90.000.000,00	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	51.468.228,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	60.000.000,00	
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat								

		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	51.468.228,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	25.000.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	30.000.000,00	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			**200.000.000,00**				**200.000.000,00**	
111	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	200.000.000,00				200.000.000,00	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	200.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri								

		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM
	SEKRETARIAT DAERAH			**48.200.539.399,00**				**48.150.539.399,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**1.350.000.000,00**				**1.350.000.000,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			**1.350.000.000,00**				**1.350.000.000,00**	
112	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.150.000.000,00				1.150.000.000,00	
	Penataan Organisasi	-	-	550.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	550.000.000,00	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi								

		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	44 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah								
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	600.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	600.000.000,00	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan								
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	50 Laporan	400.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan								

		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	50 Laporan	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
113	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	200.000.000,00				200.000.000,00	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	200.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,00	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi								
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	500 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota								
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			46.850.539.399,00				46.800.539.399,00	
	SEKRETARIAT DAERAH			46.850.539.399,00				46.800.539.399,00	
114	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	38.000.539.399,00				38.000.539.399,00	

	DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	400.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	400.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	15.165.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	15.165.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan	15.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	15.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	225.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	225.000.000,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD								

		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	700.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	700.000.000,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	500 Paket	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								

		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.810.539.399,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	3.810.539.399,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi								

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	750.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Bahan/Material								

		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	940.327.031,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	940.327.031,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	920.212.368,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	920.212.368,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.600.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	3.600.000.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	550.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	750.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.150.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.150.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	400.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.500.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	6.500.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah								
		Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	2.500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	1.350.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.350.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								

		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Gufasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	550.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	2.700.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.700.000.000,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah								

		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah								
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah								
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Penataan Organisasi	-	-	650.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	650.000.000,00	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan								
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	40 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana								

		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	350.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	750.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	750.000.000,00	
	Fasilitasi Keprotokolan								
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	750.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
115	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	7.950.000.000,00				7.950.000.000,00	
	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	2.200.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.200.000.000,00	
	Penataan Administrasi Pemerintahan								

		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	semua kecamatan Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	2.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah								
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	5.100.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	5.100.000.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual								
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial								

		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	3.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat								
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	2.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	500.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	500.000.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah								
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	300 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Bantuan Hukum								
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum								
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	300 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	150.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	150.000.000,00	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri								

		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri								
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
116	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	900.000.000,00				850.000.000,00	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	150.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	150.000.000,00	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan								
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	450.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	400.000.000,00	

	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	50 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik								
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	300.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan								

		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	SEKRETARIAT DPRD			**28.138.260.991,00**				**31.471.450.991,00**	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			**28.138.260.991,00**				**31.471.450.991,00**	

	SEKRETARIAT DPRD			**28.138.260.991,00**				**31.471.450.991,00**	
117	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	20.976.720.991,00				22.438.910.991,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	60.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	70.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.929.352.771,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	4.229.352.771,00	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	2.359.243.751,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.559.243.751,00	SEKRETARIAT DPRD
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	1.570.109.020,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.670.109.020,00	SEKRETARIAT DPRD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.238.710.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.610.000.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	269.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	270.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	79.950.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	80.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	834.760.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.331.150.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.363.550.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.600.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	11.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	501.280.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	523.280.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	819.270.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	829.270.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	574.210.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	677.210.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 Unit	390.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	392.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	184.210.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	285.210.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	Penataan Organisasi	-	-	150.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	152.000.000,00	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana								

		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	152.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	13.288.298.220,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	13.451.798.220,00	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD								
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	12.422.298.220,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	12.522.298.220,00	SEKRETARIAT DPRD
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	25 Paket	741.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	799.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	125.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	Layanan Administrasi DPRD	-	-	405.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	885.000.000,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD								
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	405.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	885.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
118	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-	7.161.540.000,00				9.032.540.000,00	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	50.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	70.000.000,00	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli								
		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4 Orang	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	1.594.200.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.245.200.000,00	

	Kunjungan Kerja dalam Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	4 Laporan	1.000.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	Pelaksanaan Reses								
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	4 Dokumen	594.200.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	745.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	5.517.340.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	6.717.340.000,00	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD								
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 Dokumen	5.517.340.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	6.717.340.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			**13.123.500.000,00**				**13.075.000.000,00**	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			**13.073.500.000,00**				**13.075.000.000,00**	
	PERENCANAAN			**12.285.000.000,00**				**12.270.000.000,00**	

119	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	8.335.000.000,00				8.470.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.500.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	6.000.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	5.500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	6.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	500.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	720.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								

		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	960.000.000,00			4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.070.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4. Penguatan dukungan penyiapan fondasi transformasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	750.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.150.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	420.000.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	700.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	145.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	160.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	80.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	80.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
120	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	2.200.000.000,00				2.530.000.000,00	

	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	1.750.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.900.000.000,00	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota								
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	12 Berita Acara	1.200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	550.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	100.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	160.000.000,00	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah								

		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	350.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	470.000.000,00	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah								
		0	4 0	350.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	470.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
121	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	1.750.000.000,00				1.270.000.000,00	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	550.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	660.000.000,00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								

		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan								
		0	1 0	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	400.000.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	360.000.000,00	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								

		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian								
		0	1 0	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	800.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	250.000.000,00	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
		0	2 0	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan								

		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	400.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	0,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan								
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 Laporan	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			**788.500.000,00**				**805.000.000,00**	
122	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	330.000.000,00				35.000.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	30.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	35.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	300.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
123	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	458.500.000,00				770.000.000,00	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-	130.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,00	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial								
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	130.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	250.000.000,00	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan								
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	198.500.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	320.000.000,00	
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif								
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	198.500.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	320.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	NON URUSAN			**50.000.000,00**				**0,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**50.000.000,00**				**0,00**	
124	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	50.000.000,00				0,00	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	50.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	BADAN PENDAPATAN DAERAH			**10.491.798.424,00**				**9.964.857.424,00**	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			**10.031.798.424,00**				**9.564.857.424,00**	
	KEUANGAN			**10.031.798.424,00**				**9.564.857.424,00**	
125	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.366.798.424,00				6.254.857.424,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	90.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	90.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	25.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.453.998.424,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	3.392.057.424,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	3.292.057.424,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	3.292.057.424,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	36.941.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	25.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								

		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah	50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	895.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	845.000.000,00	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah								
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah								
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	5 Laporan	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah								

		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	170.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	170.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah								
		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	75.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	915.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	915.000.000,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								

		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	235.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	235.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	705.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	705.000.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	117.500.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	117.500.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Pengadaan Mebel								

		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	7.500.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	7.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	90.300.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	90.300.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	300.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	35.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
126	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	300.000.000,00				300.000.000,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	300.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan								
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
127	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-	250.000.000,00				250.000.000,00	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	250.000.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	250.000.000,00	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah								

		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
128	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	3.115.000.000,00				2.760.000.000,00	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	3.115.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.760.000.000,00	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah								
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	165.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah								
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah								

		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	350.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit	350.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	145.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)								

		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	9 Obyek Pajak	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Penetapan Wajib Pajak Daerah								
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	180.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah								
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	125.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah								
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Penagihan Pajak Daerah								

		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	30 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	170.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	170.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah								
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Dokumen	135.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	135.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	110.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah								

		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	130.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	130.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	NON URUSAN			**460.000.000,00**				**400.000.000,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**460.000.000,00**				**400.000.000,00**	
129	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	460.000.000,00				400.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	60.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	60.000.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	300.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah								

		Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	40.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			**225.550.000.000,00**				**0,00**	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			**225.550.000.000,00**				**0,00**	
	KEUANGAN			**225.550.000.000,00**				**0,00**	

130	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	13.334.813.459,00				0,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	245.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								

		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.548.278.579,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	9.308.278.579,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								

		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								

		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	780.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								

		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								

		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.595.553.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.434.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	450.066.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	37.800.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	207.253.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	500.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								

		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	170.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	645.981.880,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	588.981.880,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	37.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	350.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

131	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	209.765.186.541,00				0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	1.550.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS								
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	36 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	36 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD								
		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD								

		-	-	50.000.000,00	-	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD								
		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD								
		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD								
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD								

		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran								
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan								

		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Orang	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	1.500.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya								
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD								

		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	140 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah								
		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	90 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								

		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait								

		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	3 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan								
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	588 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	954.374.398,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah								

		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	34 Laporan	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban								
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	34 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran								
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	34 Laporan	60.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah								
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	49 Laporan	90.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota								

		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	80 Dokumen	304.374.398,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD								
		Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD								

		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah								
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	20 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah								
		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	34 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	15 Orang	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota								

		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah								
		Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	205.760.812.143,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan								

	Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	10.775.125.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi								

		Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan								
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	190.845.933.062,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak								
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	3.113.309.131,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota								
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	426.444.950,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
132	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-	2.450.000.000,00				0,00	

	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	2.450.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyusunan Standar Harga								
		Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah								
		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah								
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	35 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah								
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	Penatausahaan Barang Milik Daerah								
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	36 Laporan	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Inventarisasi Barang Milik Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	36 Laporan	300.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Pengamanan Barang Milik Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penilaian Barang Milik Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	50 Laporan	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah								

		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	36 Laporan	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah								
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	36 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	36 Laporan	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah								
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	36 Laporan	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								

		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT			**8.191.178.685,00**				**8.532.778.685,00**	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			**8.191.178.685,00**				**8.532.778.685,00**	
	KEPEGAWAIAN			**7.391.178.685,00**				**7.627.778.685,00**	
133	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.640.178.685,00				4.775.778.685,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	15.000.000,00			5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	16.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	10.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	5.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.896.178.685,00			5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	4.006.278.685,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	3.786.178.685,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	3.890.778.685,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	15.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100.000.000,00			5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	105.500.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								

		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	15.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	85.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	309.000.000,00			5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	321.500.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	26.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	10.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	15.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	14 Paket	19.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	19.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	205.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	290.000.000,00			5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	295.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	15.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	275.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	280.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	30.000.000,00			5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	31.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	15.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	15.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
134	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	2.751.000.000,00				2.852.000.000,00	

	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	1.085.000.000,00			5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.126.000.000,00	
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	2 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	120.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	375.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	380.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK								
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN								
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	220.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian								

		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	155.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Pengelolaan Data Kepegawaian								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian								
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Laporan	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	75.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Mutasi dan Promosi ASN	-	-	320.000.000,00			5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	330.500.000,00	
	Pengelolaan Mutasi ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN								

		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Pengelolaan Promosi ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	120.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	961.000.000,00			5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	990.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN								
		Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	11 Orang	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Pengelolaan Assessment Center								
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	205.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN								

		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	400.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	405.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional								
		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	11 Orang	111.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional								
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	385.000.000,00			5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	405.500.000,00	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai								

		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai								
		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50 Orang	110.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN								
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	75.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai								
		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	3 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Evaluasi Disiplin ASN								

		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			**800.000.000,00**				**905.000.000,00**	
135	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	800.000.000,00				905.000.000,00	
	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-	150.000.000,00			5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	155.000.000,00	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 Orang	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	155.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-	650.000.000,00			5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	750.000.000,00	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan								

		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	650.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	750.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
	INSPEKTORAT			**7.992.591.341,00**				**8.797.000.000,00**	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			**7.992.591.341,00**				**8.797.000.000,00**	
	INSPEKTORAT DAERAH			**7.992.591.341,00**				**8.797.000.000,00**	
136	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.963.427.541,00				7.422.000.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	150.000.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	30.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	30.000.000,00	INSPEKTORAT
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.578.172.341,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	6.095.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	5.490.172.341,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	6.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								

		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	75.000.000,00	INSPEKTORAT
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	18.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	20.000.000,00	INSPEKTORAT
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	250.000.000,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	300.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								

		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	250.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	300.000.000,00	INSPEKTORAT
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	865.036.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 3. Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim	865.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 3. Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim	200.000.000,00	INSPEKTORAT
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	245.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	300.000.000,00	INSPEKTORAT
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.034.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	15.000.000,00	INSPEKTORAT
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1200 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	65.000.000,00	INSPEKTORAT
	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	50.002.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	55.000.000,00	INSPEKTORAT
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	350.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	230.000.000,00	INSPEKTORAT
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	80.219.200,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	87.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	15.000.000,00	INSPEKTORAT
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	55.219.200,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	55.000.000,00	INSPEKTORAT
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	17.000.000,00	INSPEKTORAT
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	40.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	45.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	40.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	45.000.000,00	INSPEKTORAT
137	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-	829.163.800,00				1.135.000.000,00	

	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	729.163.800,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	995.000.000,00	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	220.000.000,00	INSPEKTORAT
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	42 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	245.000.000,00	INSPEKTORAT
	Reviu Laporan Keuangan								
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	150.000.000,00	INSPEKTORAT
	Pengawasan Desa								

		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	164 Laporan	224.550.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	230.000.000,00	INSPEKTORAT
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1 Dokumen	104.613.800,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	150.000.000,00	INSPEKTORAT
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	100.000.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	140.000.000,00	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah								
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	70.000.000,00	INSPEKTORAT
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								

		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	70.000.000,00	INSPEKTORAT
138	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-	200.000.000,00				240.000.000,00	
	Pendampingan dan Asistensi	-	-	200.000.000,00			6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	240.000.000,00	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah								
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10 perangkat daerah	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	55.000.000,00	INSPEKTORAT
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi								
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	55.000.000,00	INSPEKTORAT
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								

		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	60.000.000,00	INSPEKTORAT
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas								
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 perangkat daerah	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	70.000.000,00	INSPEKTORAT
	KECAMATAN JAILOLO			**30.705.617.734,00**				**31.988.830.209,00**	
	UNSUR KEWILAYAHAN			**30.705.617.734,00**				**31.988.830.209,00**	
	KECAMATAN			**30.705.617.734,00**				**31.988.830.209,00**	
139	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	30.567.817.734,00				31.510.530.209,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	9.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	30.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok Dokumen	9.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	15.000.000,00	KECAMATAN JAILOLO

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dok Laporan	0,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	15.000.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	30.391.617.734,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	30.620.064.209,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450 Orang/bulan	30.385.617.734,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	30.613.564.209,00	KECAMATAN JAILOLO
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	6.500.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	21.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	125.016.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	12.000.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	52.000.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	9.000.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.016.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.750.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	32.000.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	17.250.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	18.000.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	424.400.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	-	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	55.000.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	22.500.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	21.900.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	325.000.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	37.250.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	3.750.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	20.000.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	13.500.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	143.200.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	163.800.000,00	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	23.200.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	25.300.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Pemeliharaan Mebel								
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	0,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	-	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	7.500.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	0,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	6.000.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	120.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	125.000.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Penataan Organisasi	-	-	0,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	110.000.000,00	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana								

		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	0,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	110.000.000,00	KECAMATAN JAILOLO
140	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	0,00				103.800.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	0,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	103.800.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	103.800.000,00	KECAMATAN JAILOLO
141	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	0,00				62.500.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	0,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	62.500.000,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								

		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	0,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	62.500.000,00	KECAMATAN JAILOLO
142	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	137.800.000,00				312.000.000,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	137.800.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	312.000.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	0,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	37.500.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								

		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8 Dokumen	0,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	18.000.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	34 Dokumen	0,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	7.500.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan								
		Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	34 Dokumen	0,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	5.500.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	34 Dokumen	0,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	5.500.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif								
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	34 Dokumen	72.750.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa								

		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen	65.050.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	68.000.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	0,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	70.000.000,00	KECAMATAN JAILOLO
	KECAMATAN JAILOLO SELATAN			**17.007.846.072,00**				**17.031.846.072,00**	
	UNSUR KEWILAYAHAN			**17.007.846.072,00**				**17.031.846.072,00**	
	KECAMATAN			**17.007.846.072,00**				**17.031.846.072,00**	
143	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	16.783.618.072,00				16.790.471.072,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	16.707.846.072,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	16.707.846.072,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan Orang/bulan	16.707.846.072,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	16.707.846.072,00	KECAMATAN JAILOLO SELATAN

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	9.671.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	10.125.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.125.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo Selatan, Semua Kel/Desa	-	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	3.125.000,00	KECAMATAN JAILOLO SELATAN
	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	6.546.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo Selatan, Semua Kel/Desa	-	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	7.000.000,00	KECAMATAN JAILOLO SELATAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	66.101.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	72.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	7.120.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo Selatan, Semua Kel/Desa	-	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	7.500.000,00	KECAMATAN JAILOLO SELATAN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	58.981.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo Selatan, Semua Kel/Desa	-	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	65.000.000,00	KECAMATAN JAILOLO SELATAN
144	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	59.178.000,00				65.000.000,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	59.178.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	65.000.000,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	59.178.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo Selatan, Semua Kel/Desa	-	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	65.000.000,00	KECAMATAN JAILOLO SELATAN
145	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	136.395.000,00				141.375.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	136.395.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	141.375.000,00	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa								

		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	- Orang	60.020.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo Selatan, Semua Kel/Desa	-	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	65.000.000,00	KECAMATAN JAILOLO SELATAN
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	4 Orang	76.375.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo Selatan, Semua Kel/Desa	-	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	76.375.000,00	KECAMATAN JAILOLO SELATAN
146	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	28.655.000,00				35.000.000,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	28.655.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	35.000.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa								
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	28.655.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo Selatan, Semua Kel/Desa	-	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	35.000.000,00	KECAMATAN JAILOLO SELATAN

	KECAMATAN SAHU			**10.973.755.183,00**				**10.171.009.450,00**	
	UNSUR KEWILAYAHAN			**10.961.755.183,00**				**10.101.009.450,00**	
	KECAMATAN			**10.961.755.183,00**				**10.101.009.450,00**	
147	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.726.009.450,00				9.861.009.450,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	10.673.755.183,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	9.777.009.450,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/bulan	10.673.755.183,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	9.777.009.450,00	KECAMATAN SAHU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	24.254.267,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi	15.000.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi	15.000.000,00	KECAMATAN SAHU
	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	3.254.267,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN SAHU
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN SAHU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	18.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	39.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	2.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	12.000.000,00	KECAMATAN SAHU
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	12.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	12.000.000,00	KECAMATAN SAHU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi	15.000.000,00	KECAMATAN SAHU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	10.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	30.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN SAHU
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	30.000.000,00	KECAMATAN SAHU
148	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	5.000.000,00				40.000.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	2.500.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	25.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	25.000.000,00	KECAMATAN SAHU

	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	2.500.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	15.000.000,00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum								
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	15.000.000,00	KECAMATAN SAHU
149	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	7.500.000,00				65.000.000,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	2.500.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	15.000.000,00	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								

		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	15.000.000,00	KECAMATAN SAHU
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.000.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	KECAMATAN SAHU
150	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	15.995.733,00				35.000.000,00	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	10.000.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	35.000.000,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	35.000.000,00	KECAMATAN SAHU
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	0,00	KECAMATAN SAHU

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	5.995.733,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	5.995.733,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN SAHU
151	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	152.250.000,00				80.000.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	152.250.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	80.000.000,00	

	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	250 Orang	35.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	KECAMATAN SAHU
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Orang	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	30.000.000,00	KECAMATAN SAHU
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	17.250.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN SAHU
152	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	55.000.000,00				20.000.000,00	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	55.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	20.000.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	20.000.000,00	KECAMATAN SAHU
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN SAHU
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN SAHU
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								

		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN SAHU
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa								
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN SAHU
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN SAHU
	NON URUSAN			**12.000.000,00**				**70.000.000,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**12.000.000,00**				**70.000.000,00**	
153	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	12.000.000,00				70.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	12.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	70.000.000,00	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	KECAMATAN SAHU
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	10.000.000,00	KECAMATAN SAHU
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	10.000.000,00	KECAMATAN SAHU
	KECAMATAN SAHU TIMUR			**10.867.456.695,00**				**11.262.456.695,00**	
	UNSUR KEWILAYAHAN			**10.867.456.695,00**				**11.262.456.695,00**	
	KECAMATAN			**10.867.456.695,00**				**11.262.456.695,00**	
154	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.652.456.695,00				10.957.456.695,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	10.567.456.695,00			-	10.567.456.695,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	147 Orang/bulan	10.567.456.695,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10.567.456.695,00	KECAMATAN SAHU TIMUR
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	70.000.000,00			-	345.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun Paket	45.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	200.000.000,00	KECAMATAN SAHU TIMUR
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun Paket	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	25.000.000,00	KECAMATAN SAHU TIMUR
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun Laporan	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	120.000.000,00	KECAMATAN SAHU TIMUR
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	15.000.000,00			-	45.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun Laporan	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	25.000.000,00	KECAMATAN SAHU TIMUR
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	20.000.000,00	KECAMATAN SAHU TIMUR
155	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	70.000.000,00				120.000.000,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	70.000.000,00			-	120.000.000,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	120.000.000,00	KECAMATAN SAHU TIMUR
156	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	20.000.000,00				30.000.000,00	

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	20.000.000,00			-	30.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	30.000.000,00	KECAMATAN SAHU TIMUR
157	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	75.000.000,00				100.000.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	75.000.000,00			-	100.000.000,00	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 Keg Orang	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	100.000.000,00	KECAMATAN SAHU TIMUR
158	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	50.000.000,00				55.000.000,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	50.000.000,00			-	55.000.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								

		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	25.000.000,00	KECAMATAN SAHU TIMUR
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif								
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Sahu Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	30.000.000,00	KECAMATAN SAHU TIMUR
	KECAMATAN IBU			**8.229.837.658,00**				**0,00**	
	UNSUR KEWILAYAHAN			**8.229.837.658,00**				**0,00**	
	KECAMATAN			**8.229.837.658,00**				**0,00**	
159	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	8.027.937.658,00				0,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.929.837.658,00			-	0,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	7.929.837.658,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	KECAMATAN IBU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	21.900.000,00			-	0,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.200.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	KECAMATAN IBU
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.200.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	KECAMATAN IBU
	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	8.500.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	KECAMATAN IBU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	31.200.000,00			-	0,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.200.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	KECAMATAN IBU
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	24.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	KECAMATAN IBU

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	45.000.000,00			-	0,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	45.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	KECAMATAN IBU
160	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	49.000.000,00				0,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	49.000.000,00			-	0,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	24 Laporan	49.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	KECAMATAN IBU
161	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	47.900.000,00				0,00	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	47.900.000,00			-	0,00	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	500 Orang	47.900.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	KECAMATAN IBU
162	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	105.000.000,00				0,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	105.000.000,00			-	0,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	38.800.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	KECAMATAN IBU
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	20.500.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	KECAMATAN IBU

	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif								
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	45.700.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	KECAMATAN IBU
	KECAMATAN IBU SELATAN			**8.274.872.859,00**				**357.000.000,00**	
	UNSUR KEWILAYAHAN			**8.274.872.859,00**				**357.000.000,00**	
	KECAMATAN			**8.274.872.859,00**				**357.000.000,00**	
163	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	8.066.872.859,00				117.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.974.872.859,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan Orang/bulan	7.974.872.859,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN IBU SELATAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	40.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	55.000.000,00	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu Selatan, Semua Kel/Desa	-	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	40.000.000,00	KECAMATAN IBU SELATAN
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	15.000.000,00	KECAMATAN IBU SELATAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	52.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	62.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu Selatan, Semua Kel/Desa	-	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	12.000.000,00	KECAMATAN IBU SELATAN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	KECAMATAN IBU SELATAN

164	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	30.000.000,00				50.000.000,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	30.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Halmahera Barat, Ibu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	KECAMATAN IBU SELATAN
165	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	90.000.000,00				110.000.000,00	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	90.000.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	110.000.000,00	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	40.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	50.000.000,00	KECAMATAN IBU SELATAN
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	60.000.000,00	KECAMATAN IBU SELATAN
166	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	88.000.000,00				80.000.000,00	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	88.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	80.000.000,00	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	60.000.000,00	KECAMATAN IBU SELATAN
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	38.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	20.000.000,00	KECAMATAN IBU SELATAN
	KECAMATAN TABARU			**7.005.250.240,00**				**7.135.000.000,00**	
	UNSUR KEWILAYAHAN			**7.005.250.240,00**				**7.135.000.000,00**	
	KECAMATAN			**7.005.250.240,00**				**7.135.000.000,00**	
167	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.822.300.240,00				6.944.000.000,00	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.705.250.240,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	6.800.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan Orang/bulan	6.705.250.240,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	6.800.000.000,00	KECAMATAN TABARU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	75.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	KECAMATAN TABARU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	22.050.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	23.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.880.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	3.000.000,00	KECAMATAN TABARU

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	19.170.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	20.000.000,00	KECAMATAN TABARU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	20.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	21.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	21.000.000,00	KECAMATAN TABARU
168	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	79.150.000,00				80.000.000,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	79.150.000,00			5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	80.000.000,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								

		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	79.150.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	80.000.000,00	KECAMATAN TABARU
169	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	48.800.000,00				50.000.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	48.800.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 Orang	48.800.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	KECAMATAN TABARU
170	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	55.000.000,00				61.000.000,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	55.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	61.000.000,00	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								

		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Halmahera Barat, Ibu Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	40.000.000,00	KECAMATAN TABARU
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa								
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Ibu Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	21.000.000,00	KECAMATAN TABARU
	KECAMATAN LOLODA			**8.530.775.478,00**				**8.868.367.534,00**	
	UNSUR KEWILAYAHAN			**8.530.775.478,00**				**8.868.367.534,00**	
	KECAMATAN			**8.530.775.478,00**				**8.868.367.534,00**	
171	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	7.775.939.593,00				7.888.367.534,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.689.967.534,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	7.789.967.534,00	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113 Orang/bulan	7.689.967.534,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	7.789.967.534,00	KECAMATAN LOLODA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	12.088.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	12.500.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.106.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.500.000,00	KECAMATAN LOLODA
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.982.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	10.000.000,00	KECAMATAN LOLODA
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	820.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	900.000,00	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya								

		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	820.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	900.000,00	KECAMATAN LOLODA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	36.028.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	46.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.300.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda, Semua Kel/Desa	-	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.500.000,00	KECAMATAN LOLODA
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.028.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	5.000.000,00	KECAMATAN LOLODA
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.700.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	40.000.000,00	KECAMATAN LOLODA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	37.036.059,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	38.500.000,00	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.005.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda, Semua Kel/Desa	-	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	36.000.000,00	KECAMATAN LOLODA
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.031.059,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda, Semua Kel/Desa	-	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.500.000,00	KECAMATAN LOLODA
172	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	644.835.885,00				860.000.000,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	100.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	110.000.000,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	110.000.000,00	KECAMATAN LOLODA

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	350.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	500.000.000,00	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	17 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	KECAMATAN LOLODA
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17 Laporan	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 3. Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim	200.000.000,00	KECAMATAN LOLODA
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	194.835.885,00			1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	250.000.000,00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum								

		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	17 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas modal sosial masyarakat	200.000.000,00	KECAMATAN LOLODA
	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta								
		Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	17 Unit	44.835.885,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi 4. Pengembangan sektor unggulan untuk ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah	50.000.000,00	KECAMATAN LOLODA
173	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	60.000.000,00				65.000.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	60.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	65.000.000,00	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	60.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	65.000.000,00	KECAMATAN LOLODA
174	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	-	-	50.000.000,00				55.000.000,00	

	DESA								
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	50.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	55.000.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	23.000.000,00	KECAMATAN LOLODA
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif								
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	32.000.000,00	KECAMATAN LOLODA
	KECAMATAN LOLODA TENGAH			**3.921.553.640,00**				**0,00**	
	UNSUR KEWILAYAHAN			**3.916.553.640,00**				**0,00**	
	KECAMATAN			**3.916.553.640,00**				**0,00**	
175	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.696.553.640,00				0,00	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.621.553.640,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	3.621.553.640,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN LOLODA TENGAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	33.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Halmahera Barat, Loloda Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN LOLODA TENGAH
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN LOLODA TENGAH
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN LOLODA TENGAH
	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN LOLODA TENGAH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	30.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN LOLODA TENGAH

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN LOLODA TENGAH
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN LOLODA TENGAH
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN LOLODA TENGAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	12.000.000,00			7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	12.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN LOLODA TENGAH

176	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	180.586.933,00				0,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	15.586.933,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	0,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	15.586.933,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	0,00	KECAMATAN LOLODA TENGAH
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	165.000.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum								

		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN LOLODA TENGAH
	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta								
		Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana 2. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan binaan	0,00	KECAMATAN LOLODA TENGAH
177	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	29.413.067,00				0,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	29.413.067,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								

		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Orang	29.413.067,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN LOLODA TENGAH
178	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	10.000.000,00				0,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	10.000.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Loloda Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN LOLODA TENGAH

	NON URUSAN			**5.000.000,00**				**0,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			**5.000.000,00**				**0,00**	
179	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.000.000,00				0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.000.000,00			3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Halmahera Barat, Loloda Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	0,00	KECAMATAN LOLODA TENGAH
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH			**6.785.449.410,00**				**9.138.680.549,00**	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			**6.785.449.410,00**				**9.138.680.549,00**	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**6.785.449.410,00**				**9.138.680.549,00**	

180	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.404.401.910,00				2.869.520.549,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.000.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	25.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.189.751.910,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.323.760.549,00	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.124.751.910,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.238.760.549,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	40.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								

		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	181.250.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	451.500.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	160.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.250.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	4.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Pornity	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	280.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.400.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	9.260.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.400.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.760.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	6.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	20.000.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	20.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
181	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	1.353.880.000,00				2.210.000.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	1.353.880.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.210.000.000,00	

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	Pembentukan Paskibraka								

		Jumlah Paskibraka	45 Orang	1.203.880.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.650.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
182	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-	1.233.160.000,00				1.453.160.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	1.233.160.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.453.160.000,00	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								

		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9 Parpol Orang	1.123.160.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.123.160.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								

		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9 Orang	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Menyiapan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

183	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-	70.000.000,00				240.000.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	70.000.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	240.000.000,00	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	9 Orang	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
184	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-	50.000.000,00				110.000.000,00	

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	50.000.000,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	110.000.000,00	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								

		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6 Orang	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
185	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-	1.674.007.500,00				2.256.000.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	1.674.007.500,00			2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	2.256.000.000,00	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								

		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	0,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	255.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Jailolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	271.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								

		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	130.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.514.007.500,00	Kab. Halmahera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2. Menyiapan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
				989.578.957.858,00				**796.790.305.140,00**	

5.2.Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan tata tertib DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota pasal 54 ayat (1) Badan anggaran DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan. Saran dan pendapat berupa rumusan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil reses/penjaringan masyarakat. Dalam perumusan Pokir DPRD harus di selaraskan dengan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 disampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam upaya kesejahteraan masyarakat melalui Musrenbang dan Forum Lintas Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang aman, adil dan sejahtera , sebagai berikut :

TABEL. 5.2 Usulan Pokir di Tahapan Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten Halmahera Barat Ke Dalam SIPD Tahun 2025

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
1	Charles R. Gustan	PENGADAAN BODY FIBER <5GT LENGKAP DENGAN MESIN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	BELUM ADA PERAHU UNTUK TANGKAP IKAN	KECAMATAN SAHU, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2	paket	200000000	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
2	Charles R. Gustan	Pengadaan Kaisar	BELUM ADA ALAT ANGKUTAN UNTUK ANGKUT BARANG/HASIL PERTANIAN	SAHU, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	2	unit	100000000	-	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	Charles R. Gustan	Pembangunan Saluran Drainase	SERING TERJADI BANJIR	DESA AKELAMO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	200	METER	200000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
4	Charles R. Gustan	Pemasangan Penerangan Lampu Jalan	KURANGNYA PENERANGAN DI SEPANJANG JALAN	kecamatan sahu, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	20	Unit	300000000	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
5	Charles R. Gustan	Pembangunan Jalan (Jalan hotmix , Jalan Lapen dan Jalan Sirtu)	Jalan belum memadai	Desa Porniti, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	400	Meter	1500000000	-	Rekonstruksi Jalan
6	Robinson Missi, SH	BIBIT TERNAK SAPI	KURANGNYA BIBIT SAPI	SAHU, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	10	Ekor	120000000	-	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
7	Robinson Missi, SH	KENDARAAN PENGANGKUT RODA 3	KURANGNYA ALAT ANGKUT BARANG	DESA WORAT WORAT, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Unit	55000000	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
8	Robinson Missi, SH	PEMBANGUNAN/REHAB JALAN USAHA TANI	Jalan ke kebun belum memadai	sahu, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1000	Meter	110000000	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
9	Robinson Missi, SH	PENGADAAN BODY FIBER <5GT LENGKAP DENGAN MESIN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	MINIMNYA FASILITAS DALAM BEKERJA SEBAGAI NELAYAN	SUSUPU, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	paket	100000000	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
10	Riswan Hi. Kadam	PEMBANGUNAN/REHAB JALAN USAHA TANI	JALAN TANI BELUM MEMADAI	KEC IBU SELATAN, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	3	Km	330000000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

11	Riswan Hi. Kadam	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA IKAN KOMODITAS LOKAL	PENGADAAN ROMPON KARENA BELUM ADA	IBU SELATAN, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	paket	200000000	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
12	Riswan Hi. Kadam	Pembangunan Jembatan	Pembangunan 15 Unit Jembatan semi permanen tani lokasi kec IBU selatan karena belum ada jembatan	Ibu selatan, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2	unit	700000000	-	Pembangunan Jembatan
13	Riswan Hi. Kadam	Pemberian Modal usaha untuk wirausaha melalui Kementerian Koperasi dan UMKM	pengadaan 5 unit oven pengering kopra putih dan perlengkapan lokasi kec sahu timur,ibu selatan dan jailolo	Sahu timur, jailolo dan ibu selatan, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM	5	Unit	-	-	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
14	Juliche D. Baura, S.Th., MM	Pengadaan Bantuan Alat Kue, Alat pembuatan kripik, alat rumah tangga, alat perbengkelan dan alat pertukangan	PENGADAAN ALAT DAPUR UNTUK USAHA	BUKUMATITI, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM	2	SET	-	-	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
15	Juliche D. Baura, S.Th., MM	Pengadaan Bantuan Alat Kue, Alat pembuatan kripik, alat rumah tangga, alat perbengkelan dan alat pertukangan	USAHA TATA RIAS KECANTIKAN	JAILOLO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM	10	SET	100000000	-	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
16	Juliche D. Baura, S.Th., MM	PEMBANGUNAN/REHAB JALAN USAHA TANI	JALAN BELUM MEMADAI	BUKUMATITI, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	5	Km	550000000	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
17	Atus Sandiang	BIBIT TERNAK SAPI	PENGADAAN 22 EKOR SAPI BALI UNTUK MEMBANTU MASYRAKAT, KARENA MASIH KURANG BIBIT SAPI BALI	DESA AKEDIRI, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	10	Ekor	120000000	-	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
18	Atus Sandiang	BIBIT PERKEBUNAN (PALA, CENGKEH, KELAPA)	PENGEMBANGAN BIBIT PALA, MASIH KURANG BIBIT PALA UNGGUL	JAILOLO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2000	bibit	50000000	-	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
19	Atus Sandiang	KENDARAAN PENGANGKUT RODA 3	BELUM ADA ALAT ANGKUTAN HASIL TANI	KEC JAILOLO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	3	Unit	165000000	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
20	Herman Josef Moanurak	Pengadaan Kaisar	KAISAR 6 UNIT, KURANGNYA ALAT ANGKUT HASIL PERTANIAN	JAILOLO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	2	Unit	100000000	-	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

21	Herman Josef Moanurak	PENGADAAN BODY FIBER <5GT LENGKAP DENGAN MESIN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	FASILITAS BELUM MEMADAI BAGI PARA NELAYAN	JAILOLO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	paket	100000000	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
22	Herman Josef Moanurak	BIBIT TERNAK SAPI	MASIH KURANG BIBIT SAPI	JAILOLO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	40	EKOR	450000000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
23	Roni Giop	PENGADAAN BODY FIBER <5GT LENGKAP DENGAN MESIN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	pengadaan Fiber 3 hb 15 Pk, Karena minimnya fasilitas dalam berkerja para nelayan	Desa Pumadada, gamkahe dan laba kecil, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2	paket	200000000	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
24	Roni Giop	Pembangunan Jalan (Jalan hotmix , Jalan Lapen dan Jalan Sirtu)	Jalan belum memadai	Desa salu, barataku dan nolu, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	Km	45000000000	-	Rekonstruksi Jalan
25	Pdt. Jordan Murary, S.Th	PENGADAAN BODY FIBER <5GT LENGKAP DENGAN MESIN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	BELUM ALAT PENUNJANG DALAM BEKERJA	DESA BAJA, SALU, BUO DAN TOSOMOLO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2	paket	200000000	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
26	Pdt. Jordan Murary, S.Th	Pembangunan Jembatan	BELUM ADA JEMBATAN PENGHUBUNG YANG BAIK	DESA NAGA, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20	Meter	5000000000	-	Pembangunan Jembatan
27	Pdt. Jordan Murary, S.Th	KENDARAAN PENGANGKUT RODA 3	BELUM ADA ALAT ANGKUTAN HASIL PERTANIAN	DESA KEDI, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2	Unit	110000000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
28	Nicodemus Henri David	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Talud Penahan Tanah)	KARENA SERING TERJADI LONGSOR	DESA NGAWET, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	500	Meter	2000000000	-	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
29	Nicodemus Henri David	Pembangunan Jalan (Jalan hotmix , Jalan Lapen dan Jalan Sirtu)	JALAN BELUM MEMADAI	DESA JERE, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	500	Meter	1750000000	-	Pembangunan Jalan
30	Nicodemus Henri David	BIBIT TERNAK SAPI	BELUM ADA BIBIT SAPI UNGGUL	DESA NANAS, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	20	EKOR	220000000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
31	Nicodemus Henri David	PENGADAAN BODY FIBER <5GT LENGKAP DENGAN MESIN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	BELUM MEMADAI FASILITAS DALAM BEKERJA SEBAGAI NELAYAN	DESA BATAKA, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	paket	100000000	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

32	Nicodemus Henri David	Pembangunan Jalan (Jalan hotmix , Jalan Lapen dan Jalan Sirtu)	JALAN BELUM MEMADAI	DESA BATAKA, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	500	Meter	1750000000	-	Pembangunan Jalan
33	Joko Ahadi	PENGADAAN BODY FIBER <5GT LENGKAP DENGAN MESIN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	BELUM ADA BODY FIBER	KECAMATAN IBU, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	paket	100000000	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
34	Joko Ahadi	KENDARAAN PENGANGKUT RODA 3	BELUM ADA ALAT ANGKUT HASIL PERTANIAN	KECAMATAN IBU, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	3	Unit	165000000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
35	Joko Ahadi	Pembangunan Jembatan	BELUM ADA JEMBATAN PENGHUBUNG KE PEKUBURAN	KECAMATAN IBU, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	50	Meter	15000000000	-	Pembangunan Jembatan
36	Mahdi Albaar	Pembangunan Talud Penahan Ombak	BELUM ADA TALUD	DESA PAYO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	500	METER	5000000000	-	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
37	Mahdi Albaar	Pengadaan Kaisar	BELUM ADA ALAT ANGKUTAN HASIL BUMI	DESA PATENG DAN PAYO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	2	Unit	100000000	-	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
38	Mahdi Albaar	Pengadaan Bantuan Alat Kue, Alat pembuatan kripik, alat rumah tangga, alat perbengkelan dan alat pertukangan	BELUM MEMADAI ALAT UNTUK BUAT KUE BAGI PARA PENGUSAHA KUE	DESA BOBOJIKO DAN PAYO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM	4	SET	100000000	-	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
39	Mahdi Albaar	Pengadaan Bantuan Alat Kue, Alat pembuatan kripik, alat rumah tangga, alat perbengkelan dan alat pertukangan	BELUM MEMADAI ALAT BAGI USAHA CATERING	DESA SOAKONORA DAN BOBOJIKO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM	2	SET	-	-	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
40	Judid Sikawi	PENGADAAN BODY FIBER <5GT LENGKAP DENGAN MESIN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	BELUM ADA FIBER	KECAMATAN LOLODA, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	paket	100000000	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

41	Judid Sikawi	Pengadaan Bantuan Alat Kue, Alat pembuatan kripik, alat rumah tangga, alat perbengkelan dan alat pertukangan	MINIMNYA ALAT DAPUR BAGI PARA PENGUSAHA KUE	DESA KEDI, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM	2	SET	100000000	-	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
42	Judid Sikawi	Pembangunan Jembatan	BELUM ADA JEMBATAN PENGHUBUNG	DESA SOSIO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100	Meter	-	Non Belanja Transfer	-
43	Sofyan Kasim	PENGADAAN BODY FIBER <5GT LENGKAP DENGAN MESIN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	FASILITAS NELAYAN BELUM MEMADAI	KECMATAN LOLODA, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	paket	100000000	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
44	Sofyan Kasim	BIBIT TERNAK SAPI	MASIH KURANG BIBIT SAPI	DESA DOMATO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	10	Ekor	120000000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
45	Sofyan Kasim	Pengadaan Bantuan Alat Kue, Alat pembuatan kripik, alat rumah tangga, alat perbengkelan dan alat pertukangan	MASIH KURANG ALAT UNTUK USAHA PERTUKANGAN	DESA BOBO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM	1	Unit	100000000	-	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
46	Sofyan Kasim	Pengadaan Bantuan Alat Kue, Alat pembuatan kripik, alat rumah tangga, alat perbengkelan dan alat pertukangan	MASIH KURANG ALAT UNTUK USAHA PERBENGKELAN	DESA BOBANEHENA, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM	1	Unit	100000000	-	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
47	Sofyan Kasim	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	KURANGNYA BAK PENAMPUNG	DESA BILOTE, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	Unit	500000000	-	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
48	Sofyan Kasim	KENDARAAN PENGANGKUT RODA 3	BELUM ADA ALAT ANGKUTAN	DESA DOMATO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Unit	55000000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
49	Albert Hama	Pembangunan Saluran Drainase	BELUM ADA DRAINASE	DESA IDAMDEHE GAMSUNGI, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100	Meter	100000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
50	Albert Hama	BIBIT TERNAK SAPI	MASIH KURANG BIBIT SAPI	DESA IDAMDEHE GAMSUNGI, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	20	Ekor	220000000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

51	Albert Hama	Pembangunan Jalan (Jalan hotmix , Jalan Lapen dan Jalan Sirtu)	JALAN BELUM MEMADAI	DESA GAMTALA, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	500	Meter	1500000000	-	Pembangunan Jalan
52	Asdian Taluke, SH.,MH	PENGADAAN BODY FIBER <5GT LENGKAP DENGAN MESIN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	KURANGYA FASILITAS BAGI PARA NELAYAN	DESA BAKUN DAN BUO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	paket	100000000	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
53	Asdian Taluke, SH.,MH	Pengadaan Bantuan Alat Kue, Alat pembuatan kripik, alat rumah tangga, alat perbengkelan dan alat pertukangan	KURANGNYA ALAT BAGI PENGUSAHA KUE	DESA BUO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM	1	Set	100000000	-	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
54	Hardy Hayun	PENGADAAN BODY FIBER <5GT LENGKAP DENGAN MESIN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	KURANGNYA FASILITAS PENDUKUNG DALAM BEKERJA BAGI PARA NELAYAN	DESA BOBANEHENA, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	paket	100000000	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
55	Hardy Hayun	BIBIT TERNAK SAPI	BELUM ADA BIBIT SAPI	KECAMATAN JAILOLO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	10	Ekor	120000000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
56	Dasril Hi. Usman	KENDARAAN PENGANGKUT RODA 3	BELUM ADA ALAT ANGKUTAN HASIL BUMI	DESA TUADA DAN DESA SUKA DAMAI, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2	Unit	110000000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
57	Dasril Hi. Usman	PENGADAAN BODY FIBER <5GT LENGKAP DENGAN MESIN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	MASIH KURANG FIBER UNTUK PARA NELAYAN	DESA GUAEMAADU, BIAMAAHI DAN AKELAH, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2	paket	200000000	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
58	Heny S. Talolang	PEMBANGUNAN/REHAB IRIGASI AIR TANAH DANGKAL	BELUM ADA IRIGASI	DESA HOKU HOKU, IDAMDEHE DAN IDAMDEHE GAMSUNGI, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	3	TEMPAT	600000000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
59	Heny S. Talolang	Pengadaan Kaisar	BELUM ADA ALAT ANGKUTAN HASIL PERTANIAN	JAILOLO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	2	UNIT	100000000	-	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
60	Heny S. Talolang	PENGADAAN BODY FIBER <5GT LENGKAP DENGAN MESIN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	BELUM ADA FIBER UNTUK PARA NELAYAN	JAILOLO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	paket	100000000	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

61	Ibnu Saud Kadim	PENGADAAN BODY FIBER <5GT LENGKAP DENGAN MESIN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	FASILITAS PENUNJANG BAGI NELAYAN MASIH MINIM	DESA SUSUPU, SARIA DAN BOBO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2	paket	200000000	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
62	Ibnu Saud Kadim	Pengadaan Bantuan Alat Kue, Alat pembuatan kripik, alat rumah tangga, alat perbengkelan dan alat pertukangan	MASIH MINIM ALAT PERTUKANGAN BAGI USAHA PERTUKANGAN	DESA GALALA DAN BOBO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM	2	SET	100000000	-	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
63	Ibnu Saud Kadim	Pengadaan Bantuan Alat Kue, Alat pembuatan kripik, alat rumah tangga, alat perbengkelan dan alat pertukangan	MINIMNYA ALAT UNTUK PENGUSAHA KUE	DESA GALALA, JALAN BARU DAN GUAEMAADU, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM	3	SET	-	-	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
64	Ibnu Saud Kadim	Pembangunan Saluran Drainase	BELUM ADA DRAINASE	DESA GALALA, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	200	Meter	200000000	-	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
65	Ibnu Saud Kadim	Pengadaan Kaisar	BELUM ADA ALAT ANGKUTAN BAGI HASIL PERTANIAN	DESA GUAEMAADU, GALALA DAN BOBANEHENA, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	2	Unit	100000000	-	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
66	Sarlin Antu	Pengadaan Bantuan Alat Kue, Alat pembuatan kripik, alat rumah tangga, alat perbengkelan dan alat pertukangan	MINIMNYA FASILITAS UNTUK USAHA PEMBUATAN KUE	KECMATAN IBU, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM	1	UNIT	100000000	-	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
67	Sarlin Antu	PENGADAAN BODY FIBER <5GT LENGKAP DENGAN MESIN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	BELUM MEMADAI FASILITAS NELAYAN	HALMAHERA BARAT, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	paket	100000000	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
68	Sarlin Antu	Pengadaan Kaisar	KURANGNYA ALAT ANGKUTAN HASIL PERTANIAN	TERSEBAR DI HALMAHERA BARAT, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	2	UNIT	100000000	-	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
69	Sarlin Antu	Pemasangan Penerangan Lampu Jalan	LAMPU JALAN BELUM MEMADAI	TERSEBAR, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	20	Unit	300000000	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

70	Fandi Ibrahim	PENGADAAN BODY FIBER <5GT LENGKAP DENGAN MESIN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	BELUM MEMADAI FASILITAS UNTUK PARA NELAYAN	KEC JAILOLO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	paket	100000000	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
71	Fandi Ibrahim	Pengadaan Bantuan Alat Kue, Alat pembuatan kripik, alat rumah tangga, alat perbengkelan dan alat pertukangan	MINIMNYA ALAT UNTUK USAHA PERTUKANGAN	JAILOLO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM	1	Set	100000000	-	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
72	Fandi Ibrahim	Pengadaan Bantuan Alat Kue, Alat pembuatan kripik, alat rumah tangga, alat perbengkelan dan alat pertukangan	KURANGNYA FASILITAS PENDUKUNG USAHA PEMBUATAN KUE	KEC JAILOLO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM	1	SET	100000000	-	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
73	FONNY S. SUWATALABESSY, SE	PENGADAAN BODY FIBER <5GT LENGKAP DENGAN MESIN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	KURANGNYA FASILITAS BAGI PARA NELAYAN	KECAMATAN SAHU, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	paket	100000000	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
74	FONNY S. SUWATALABESSY, SE	Pengadaan Kaisar	BELUM ADA ALAT ANGKUTAN	KEC SAHU, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	2	Unit	100000000	-	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
75	FONNY S. SUWATALABESSY, SE	BIBIT TERNAK SAPI	BELUM ADA BIBIT SAPI	DESA TIBOBO, GOLAGO KUSUMA, DAN AIR PANAS, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	30	Ekor	330000000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
76	FONNY S. SUWATALABESSY, SE	Pengadaan Bantuan Alat Kue, Alat pembuatan kripik, alat rumah tangga, alat perbengkelan dan alat pertukangan	MINIMNYA ALAT BAGI USAHA MAKANAN/KATERING	SAHU, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM	2	Set	100000000	-	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
77	Marsela Pracilia Tampi	PENGADAAN BODY FIBER <5GT LENGKAP DENGAN MESIN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	BELUM ADA FIBER BAGI NELAYAN	DESA BAJA, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	paket	100000000	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
78	Marsela Pracilia Tampi	Pengadaan Kaisar	MINIMNYA ALAT ANGKUTAN	DESA TOGOWO DAN AKESIBU, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	2	Unit	100000000	-	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

79	Yan Frangky Luang, SH	Pembangunan Talud Penahan Ombak	BELUM ADA TALUD PENAHAN OMBAK	DESA GAMSIDA, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	120	Meter	1500000000	-	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
80	Yan Frangky Luang, SH	PENGADAAN BODY FIBER <5GT LENGKAP DENGAN MESIN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	MINIMNYA FASILITAS TRANSPORTASI BAGI NELAYAN	DESA GAMSIDA DAN DESA GORO GORO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2	paket	200000000	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
81	Yan Frangky Luang, SH	Pembangunan Talud Penahan Ombak	BELUM ADA TALUD PENAHAN OMBAK	DESA BOBO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	120	METER	1000000000	-	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
82	Yan Frangky Luang, SH	Pengadaan Bantuan Alat Kue, Alat pembuatan kripik, alat rumah tangga, alat perbengkelan dan alat pertukangan	MINIMNYA ALAT PERTUKANGAN	IBU SELATAN, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM	2	Set	200000000	-	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
83	Mahdin Husen	Pembangunan Talud Penahan Ombak	BELUM ADA TALUD PENAHAN OMBAK	DESA TONIKU, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	200	Meter	2000000000	-	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
84	Mahdin Husen	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Talud Penahan Tanah)	SERING TERJADI BANJIR	DESA TONIKU, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	200	Meter	1200000000	-	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
85	Mahdin Husen	PENGADAAN BODY FIBER <5GT LENGKAP DENGAN MESIN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	MINIMNYA FASILITAS PERIKANAN	DEAS BIAMAAHI, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2	paket	200000000	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
86	Robinson Missi, SH	Pengadaan Bantuan Alat Kue, Alat pembuatan kripik, alat rumah tangga, alat perbengkelan dan alat pertukangan	MINIMNYA ALAT MASAK BAGI USAHA KATERING	SAHU, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI UKM	2	Set	200000000	-	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
87	Juliche D. Baura, S.Th., MM	Pengadaan Bantuan Alat Kue, Alat pembuatan kripik, alat rumah tangga, alat perbengkelan dan alat pertukangan	MINIMNYA ALAT UNTUK USAHA PEMBUATAN KUE	JAILOLO, Kab. Halmahera Barat	Kabupaten / Kota	-	2	Set	-	-	-

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemeritahan daerah adalah Capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penetapan indicator kinerja penyelenggaraan pemrintah daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran kebehadilan pencapaian Visi dan Misi Kepada daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumalasi pencapaian indicator outcome program Pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang brersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai

Kerangka Indikator Kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran kebersihan pencapaian Pembangunan dari serangkaian strategi yang telah dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan dan isu strategis yang ada. Penetapan indicator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikpanduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja daerah (IKD) maupun Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Akhir perencanaan. Kerangka Keberhasilan Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada akhir perencanaan. Kerangaka Keberhasilan Kinerja Penyelenggaaraan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari capaian indicator kinerja pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022-2025 yang disajikan pada Tabel 6.1 (Indikator Kinerja Makro)); Tabel 6.2 (Indikator Kinerja Daerah) dan Tabel 6.3 (Indikator Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan daerah).

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Makro Kabupaten Halmahera Barat

No	Indikator Kinerja	Capaian		Target Tahunan	
		2022	2023	2024	2025
1	Indeks Pembangunan Manusia	66,20	66,20	67,73	68,54
2	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	3,25	3,25	6,64	6,75
3	Pendapatan perkapita (Rp. Juta)	18,41	18,41	15,13	15,89
4	Tingkat Kemiskinan (persen)	8,43	8,43	8,29	7,77
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,45	3,45	3,18	3,11
6	Indeks Rasio Gini	0,246	0,2605	0,316	0,302

Sumber : LKPJ Pemerintah Kab. Halbar 2023 dan RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026

6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Halmahera Barat

No	Indikator Kinerja	Capaian		Target Tahunan	
		2022	2023	2024	2025
1	Indeks Pembangunan Manusia	66,20	66,38	68,54	69,34
2	Indeks Kesehatan Daerah	71,75	2,35	73,69	73,93
3	Indeks Pendidikan Daerah	65,32	17,95	72,14	73,02
4	Pertumbuhan Produktifitas total Daerah (persen)	-5,95	8,69	2,63	3,39
5	Indeks Ketahanan Sosial (Point)	63,17	3,36	68,22	70,12
6	Indeks Pembangunan Gender	88,89	0,261	90,50	90,82

No	Indikator Kinerja	Capaian		Target Tahunan	
		2022	2023	2024	2025
7	Indeks Pembangunan Infrastruktur	85,42	83,51	67,52	73,81
8	Indeks Infrastruktur Dasar	72,77	71,89	78,28	81,94
9	Indeks Infrastruktur Wilayah	52,76	50,89	58,24	66,50
10	Indeks Ketahanan Lingkungan	62,96	62,88	67,11	69,28
11	Rasio Peningkatan Indeks	2,40	2,45	2,44	3,50
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,25	2,35	6,75	6,88
13	Pendapatan Per Kapita (Rp.Juta)	18,41	17,95	15,89	16,72
14	Tingkat Kemiskinan (persen)	8,43	5,79	7,77	8.50
15	Rasio Peningkatan Kontribusi Nilai Tambah Sektor Pertanian dan	3,58	3,43	5,64	5,80
16	Rasio Peningkatan Kontribusi Nilai Tambah Sektor Pariwisata (Persen)	5,01	6,42	17,68	17,91
17	Rasio Peningkatan Kontribusi Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan	2,44	5,5	15,56	15,74
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,45	3,36	3,11	3,00
19	Indeks Ketahanan Ekonomi	40,46	42,73	49,70	54,51
20	Indeks Rasio Gini	0,246	0,261	0,302	0,282
21	Indeks Tata Kelola Pemerintahan	71,15	69,47	88,71	90.50
22	Predikat SAKIP	C	C	B	A
23	Predikat LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Level Maturitas SPIP	3	3	3	3
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	72,50	72	74,50	80

6.2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

6.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum Dan Aspek Daya Saing

Tabel 6.3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian		Target Capaian Tahunan		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	
A	**ASPEK KESEJAHTERAAN**						
1	Laju pertumbuhan ekonomi	1,44	3,25	1,74	6,75	6,88	7,03
2	Pendapatan per kapita (Rp. Juta)	18,41	18,41	16,23	15,89	16,72	17,61
3	Indeks Rasio Gini	0,246	0,246	0,253	0,302	0,282	0,257
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,45	3,45	3,23	3,11	3,00	2,86
5	Tingkat Kemiskinan	8,43	8,43	8,73	7,77	7,03	6,10
6	Indeks Pembangunan Manusia	66.20	66.20	65,69	66,81	69,34	70,15
B	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
B.1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**						
1	**Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator**						
1.1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	31,35	28,93	29,8	36,58		51,50
1.2	Angka Partispasi Kasar SD/Sederajat	108,07	108,05	105,57	113,01		113,01
1.3	Angka Partispasi Kasar SMP/Sederajat	102,79	87,99	97,95	107,95		110,0
1.4	Persentase Sekolah	-	-	-	100	100	100
2	**Kesehatan**						
2.1	Angka Kematian Ibu (per 100 rb KH)	146	106	133	120	102	79
2.2	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	18	19	18	13	12	12
2.3	Prevalensi stunting pada balita (persen)	17	14	16,66	17,06	15,72	14,00
2.4	Prevalensi wasting pada balita (persen)	8	6	7,76	7,72	6,63	5,26
2.5	Persentase fasilitasi pelayanan	77,56	85,73	80,63	92,87	96,43	100
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						

3.1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)	10	9,27	8,40	16,41	21,40	27,35
3.2	Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih	64,7	67,08	64,96	74,42	79,34	85,10
3.3	Cakupan Rumah Tangga memilki askes pada sanitasi layak (persen)	78,4	53,72	60,71	62,33	68,47	75,83
3.4	Indeks kemantapan jalan Kabupaten (terhadap target RPJMD 2021-2026)	57,50	55,97	56,69	63,60		70,70
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan**						
4.1	Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (persen)	100	77,47	88,55	81,06	83,03	85,31
5	**Ketentraman dan Ketertiban serta**						
5.1	Persentase gangguan ketenteraman dan	100	100	100	100	100	100
5.2	Skor Indeks (multi) Risiko Bencana	143,00	128,54	138,24	134,06	127,56	119,10
5.3	Persentase Kejadian Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani	100	100	100	100	100	100
6	**Sosial**						
12	Indeks SPM Bidang Sosial	100	100	78,57	100	100	100
B.2	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**						
1	**Tenaga Kerja**						
1.1	Pertumbuhan produktifitas tenaga kerja daerah (persen)	28,41	26,00	27,66	30,16	31,18	32,45
1.2	Persentasi perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	5,00	11,1	6,61	13,4	15,56	20,00
2	**Pemberdayaan Perempuan dan**						
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	88,48	88,89	83,24	77,29	78,75	80,2
3.	**Pangan**						
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	74,71	74,71	66,84	71,8	80,6	90,7

4	**Pertanahan**						
4.1	Rasio lahan pemerintah kabupaten untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang bersertifikat (persen)	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a
5	**Lingkungan Hidup**						
5.1	Persentasi usaha dan/ atau kegiatan	100	100	100	100	100	100
6	**Administrasi Kependudukan dan**						
6.1	Rasio efektifitas administrasi	57	60,17	63,82	79,0	82,0	85,7
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						
7.1	Persentasi desa berstatus tertinggal dan	63,91	71,01	67,46	53,80	44,47	32,65
7.2	Pesentasi desa berstatus maju dan	2,37	1,78	2,37	6,10	8,14	10,69
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga**						
8.1	Total Fertility Rate (TFR)	2,33	2,31	2,23	2,04	2,04	2,04
9	**Perhubungan**						
9.1	Rasio konektifitas kabupaten	79,5	83,6	80,6	87,7		100
10	**Komunikasi dan Informatika**						
10.1	Akses telekomunikasi (persentase desa	64	82	73	98		98
11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah**						
11.1	Persentase Kopersi Aktif	16,67	16,48	36,72	87,4	92,5	98,7
11.2	Pertumbuhan wirausahaan baru (Persen)	1,65	2,00	1,63	5,3		6,50
12	Penanaman Modal						
21.1	Pertumbuhan realisasi investasi PMDN	16,5	19,02	33,18	130,63	280,67	374,9
12.2	Pertumbuhan realisasi investasi PMA	-	-		-		-
13	**Kepemudaan dan Olahraga**						
31.1	Rasio peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	-	52	52	58		58
13.2	Rasio peningkatan perolehan medali pada multi event olahraga tingkat nasional/ daerah	-	0,40	0,40	0,40		0,40
14	**Statistik**						

14.1	Pesentasi Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	-	-	-	27,5	42,5	62,5
15	**Persandian**						
15.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi (dari KOMINFO)	-	-	-	27,5	42,5	62,5
16	**Kebudayaan**						
16.1	Presentase cagar budaya yang dilestarikan	n/a	0,63	0,63	0,63		0,63
17	**Perpustakaan**						
17.1	Pertumbuhan kunjungan perpustakaan	10,0	21,88	15,94	21,88		21,88
18	**Kearsipan**						
29	Persentase Organisasi Perangkat Daerah mengelola arsip secara baku	22,92	22,92	17,78	32,5	50,0	72,5
B.3	**Urusan Pilihan**						
1.	**Kelautan dan Perikanan**						
1.1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	17.165	17.980	17,218	23.906	26.741	30.170
1.2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	308	309,6	304,2	521	737	1.157
2	**Pariwisata**						
2.1	Rasio kontribusi nilai tambah pariwisata (persen)	7,82	5,01	4,35	7,99		7,99
3	**Pertanian**						
3.1	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	7.061	6.777	6,972	12.679	18.887	31.655
3.2	Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	7.028,9	45,275,9	25.093,1	12.697	15.251	19.212
3.3	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	34.016	36.667	24.375	3.320	3.871	4.745
3.4	Produksi Peternakan (Ton)	323.667	323.887	233.858	587.461	600.129	613.592
4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**						
4.1	Persentasi rumah tangga menggunakan	99,68	99,74	99,68	99,87	99,93	99,99
5	**Perdagangan**						
5.1	Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	-94.494,60	-	-	-120,95	-	-15,0

6	**Perindustrian**						
6.1	Rasio nilai tambah industri pengolahan	-8,56	2,44	5,21	5,49	-	7,37
7	**Transmigrasi**						
7.1	Persentase satuan pemukiman	100	100	100	100	100	100
B.4	**Unsur Pendukung Urusan**						
1	**Sekretariat Daerah**						
1.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan						
1.2	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja	C	CC		BB	A	A
2	**Sekretariat DPRD**						
2.1	Persentase Ranperda dalam Prolegda	100	100	100	100	100	100
	Unsur Penunjang Urusan						
1	**Perencanan**						
1.1	Persentasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	44,46	-	44,46	80,0	80,0	80,0
2	**Keuangan**						
2.1	Rasio kemandirian keuangan daerah	10,17	11,50	9,05	10,43	10,73	11.10
2.2	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daeerah (LKPPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	**Kepegawaian**						
3.1	Rasio pegawai PNS yang memilki kualifikasi pendidikan tinggi	73,93	77,41	75,67	80	-	-
3.2	Rasio pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan)	28,30	32,47	20,92	12,10	-	29,10
4	**Pendidikan dan Pelatihan**						
4.1	Rasio pegawai fungsional yang memilki sertifikat kompetensi (diluar guru dan tenaga kesehatan)	-	8	8	10	-	-
C	**ASPEK DAYA SAING**						
1	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	74,71	58,59	63,73	52,78	53,89	55,0
2	Perkembangan pasokan tenaga listrik	7,47	8,83	7,85	9,62	-	12,0
3	Persentase penduduk mengakses sumber air bersih perpipaan	28,9	27,46	27,68	29,71	31,71	34,5

4	Persentase penduduk menggunakan telepon seluler	67,72	66,56	66,5	68,85	71,90	78,7
5	Pesentae penduduk mengakses internet	29,43	26,35	26,12	30,67	36,57	46,9
6	Rasio penduduk berkualifikasi pendidikan minimal S1 (persen)	7,98	7,79	7,80	7,95	8,07	8,4
7	Rasio ketergantungan (persen)	48,21	53,23	51,86	52,33	51,87	51,4

BAB VII
PENUTUP

RKPD ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengangaran, pelaksanaan dan pengawasan. Subtansi RKPD ini merupakan sinkronisasi antar pelaku kepentingan dan stakeholder, baik ditingkat kabupaten Halmahera Barat, Provinsi dan Nasional dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan faktual yang dihadapi. Dokumen RKPD Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025 adalah dokumen rencana tahunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 dan RPJMN 2025-2029.

Komitmen dan kedisiplinan sangat menentukan kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada perencanaan tahunan ini yang mengusung tema "***Menciptakan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan***", untuk itu komitmen seluruh Perangkat Daerah untuk mewujudkan tema pembangunan agar dapat memanfaatkan Sistem Perencanaan Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Keuangan Daerah guna menunjang akuntabilitas perencanaan daerah dan meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait sehingga program, kegiatan konsisten secara vertikal dan horizontal untuk menghasilkan sasaran dan arah kebijakan yang terukur sesuai prioritas perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan tahun berjalan, RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 kemudian menunjukan adanya ketidaksesuain dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilaksanakan penyesuaian dalam bentuk RKPD perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.